LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

(L P P D)

KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2023

KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2024

PROGRAM WAJIB BELAJAR MALINAU MAJU

PROGRAM RT BERSIH

PROGRAM DESA SARJANA

PROGRAM RASDA PLUS

PROGRAM MILENIAL MANDIRI

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang..... 1

1.1.1 Penjelasan Umum..... 1

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah..... 27

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal..... 275

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... 278

2.1 Capaian Kinerja Makro..... 278

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..... 278

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran..... 280

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil..... 325

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan..... 333

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah..... 335

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN..... 564

3.1 Dasar Hukum..... 564

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Malinau..... 565

3.2.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya..... 565

3.2.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya..... 567

3.3 Hambatan dan Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan..... 567

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL..... 570

4.1 Bidang Urusan Pendidikan..... 572

4.2 Bidang Urusan Kesehatan..... 578

4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat..... 594

4.4 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... 605

4.5 Bidang Urusan Penanggulangan Bencana Daerah..... 620

4.6 Bidang Urusan Sosial..... 631

BAB V PENUTUP..... 637

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena melalui rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Utara sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Adapun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan ini sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat dalam rangka mewujudkan transparansi dan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18

Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi Tahun 2021-2026 dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dalam penyusunannya berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 11 Desember 2023 Nomor: 100.2.2.7/8697/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menganut Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, merupakan instrument pembinaan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga hak dan kewenangan Daerah dalam mengelola Otonomi tetap sejalan dengan cita-cita Nasional.

Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak terkait Capaian Kinerja baik Makro maupun Mikro dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Malinau dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah terhadap dinamika Kehidupan

Masyarakat yang terus berkembang melalui 5 Program Unggulan yaitu **Desa Sarjana, Milenial Mandiri, Rasda Plus, RT Bersih dan Wajib Belajar Malinau Maju**.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna baik secara penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu berbagai kritik dan saran yang ada sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah untuk menyempurnakan laporan khususnya bagi kemajuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Visi Kabupaten Malinau yaitu **Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional**.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Kalimantan Utara untuk dapat menerimanya sebagai bahan laporan.

Malinau, 18 Maret 2024

BUPATI MALINAU

WEMPI W. MAWA, SE, MH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang disebut LPPD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara tahun 2019 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3);

20. Peraturan Bupati Malinau Nomor 40 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 40);

21. Peraturan Bupati Malinau Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 27).

22. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 11 Desember 2023 Nomor: 100.2.2.7/8697/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023.

a. Undang- Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

b. Data Geografis Wilayah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362, Kabupaten Malinau merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau terletak antara $114^0$35'22" sampai dengan $116^0$50'55" Bujur Timur dan $1^0$21'36" sampai dengan $4^0$10'55" Lintang Utara.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kabupaten yang Berbatasan dengan Malinau oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten Malinau sampai dengan Tahun 2019, maka luas wilayah Kabupaten Malinau sebesar 38.973,56 Km^2 yang merupakan daratan. Kecamatan Kayan Hilir merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Malinau yaitu mencapai 11.863,19 km^2. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Malinau Kota yaitu sebesar 142,07 km^2. Kecamatan Sungai Boh merupakan kecamatan terjauh di Kabupaten Malinau dengan jarak 277,87 km dari ibukota kabupaten.

Secara umum, topografi Kabupaten Malinau dapat dibedakan menjadi perbukitan dan dataran rendah. Kawasan perbukitan terdapat pada bagian barat dari wilayah utara yang merupakan jalur pegunungan dengan puncaknya yaitu Gunung Naga Peratu (5.910) di Kecamatan Mentarang. Selain itu, kawasan perbukitan juga terdapat di wilayah selatan Kabupaten Malinau dengan ketinggian mencapai 500 – 1.500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah terdapat sekitar Daerah Aliran Sungai di bagian timur dari wilayah utara yaitu di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau

Barat, dan Kecamatan Malinau Selatan sepanjang Sungai Malinau, Sungai Simendurut, Sungai Sembuak dan Sungai Salap.

Kabupaten Malinau merupakan daerah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Januari mencapai 744,7 mm dan terendah terjadi sekitar bulan Oktober sebesar 239,1 mm. Suhu udara di Kabupaten Malinau berkisar antara 26 s.d 28 ^{o}C, dengan suhu maksimum mencapai 36,9 ^{o}C terjadi di bulan Juni. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 86 hingga 91 persen. Kecepatan angin paling kencang tercatat pada bulan Agustus dengan kecematan 18 meter per detik.

Sebelah Utara Kabupaten Malinau berbatasan langsung dengan Kabupaten Nunukan; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Berau dan Kutai Timur; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Mahakam Hulu, dan Kutai Kartanegara; dan sebelah barat berbatasan dengan Malaysia tepatnya Negara Bagian Serawak.

Adapun batas wilayah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Nunukan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Hulu dan Kutai Kartanegara
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Malaysia Timur (Sarawak)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kutai Timur, Berau dan Kab. Tana Tidung.

Gambar 1.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau

Tabel 1.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%) Terhadap Luas Kabupaten
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Mentarang	Pulau Sapi	535,15	1,37
2	Mentarang Hulu	Lung Berang	2.807,20	6,55
3	Malinau Kota	Malinau Kota	142,07	0,36
4	Malinau Utara	Malinau Seberang	1.091,18	2,77
5	Malinau Barat	Tanjung Lapang	765,41	1,95
6	Malinau Selatan	Long Loreh	1.154,79	2,83
7	Malinau Selatan Hulu	Metut	2.171,21	5,72
8	Malinau Selatan Hilir	Setarap	572,20	1,47
9	Kayan Selatan	Long Ampung	2.471,50	6,25
10	Kayan Hilir	Data Dian	11.863,19	30,12

11	Kayan Hulu	Long Nawang	735,40	2,31
12	Sungai Boh	Mahak Baru	2.801,51	7,17
13	Pujungan	Long Pujungan	6.515.59	16,87
14	Bahau Hulu	Long Alango	3.103,38	7,91
15	Sungai Tubu	Long Pada	2.243,78	6,34
Jumlah			**38.973,56**	**100,00**

Sumber : LKPJ Kab. Malinau Tahun 2023

Tabel 1.2

Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	*2*	*3*	*4*
1	Mentarang	63,00	12,20
2	Mentarang Hulu	423,70	56,64
3	Malinau Kota	62,00	-
4	Malinau Utara	59,70	4,94
5	Malinau Barat	63,20	4,42
6	Malinau Selatan	83,30	45,69
7	Malinau Selatan Hulu	---	69,27
8	Malinau Selatan Hilir	---	21,80
9	Kayan Selatan	744,40	274,26
10	Kayan Hilir	604,20	238,69
11	Kayan Hulu	611,10	273,25
12	Sungai Boh	566,20	277,87
13	Pujungan	267,90	140,78
14	Bahau Hulu	416,00	111,43
15	Sungai Tubu	---	76,75

Sumber : BPS Kabupaten Malinau 2024

Tabel 1.3
Keadaan Iklim dan Curah Hujan di Kabupaten Malinau

Bulan	Iklim (Rata-rata)		Curah Hujan (Rata-rata)	
	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Januari	26,00	91	744,70	23
Februari	26,70	88	282,90	16
Maret	27,30	87	379,40	21
April	27,40	87	341,30	23
Mei	28,10	87	296,90	22
Juni	27,90	86	288,70	13
Juli	27,40	87	494,60	24
Agustus	27,50	86	362,20	20
September	27,40	87	374,70	23
Oktober	27,30	89	239,10	16
November	27,60	88	326,30	22
Desember	27,20	89	336,30	23

Sumber : BPS Kabupaten Malinau 2024

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data kependudukan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sampai dengan Tahun 2023**,** penduduk Kabupaten Malinau berjumlah 85.073 jiwa dengan 25.008 KK, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2,2 jiwa/km^2 yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 44.851 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 40.222 jiwa. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4
Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH JIWA	PERSENTASE (%)
		L	P		
1	MENTARANG	2.933	2.707	5.640	6,63%
2	MALINAU KOTA	13.687	12.656	26.343	30,97%
3	PUJUNGAN	1.001	872	1.873	2,20%
4	KAYAN HILIR	872	682	1.554	1,83%
5	KAYAN HULU	1.275	1.180	2.455	2,89%
6	MALINAU SELATAN	2.934	2.475	5.409	6,36%
7	MALINAU UTARA	8.333	7.284	15.617	18,36%
8	MALINAU BARAT	6.126	5.562	11.688	13,74%
9	SUNGAI BOH	1.337	1.148	2.485	2,92%
10	KAYAN SELATAN	1.035	963	1.998	2,35%
11	BAHAU HULU	763	644	1.407	1,65%
12	MENTARANG HULU	961	894	1.855	2,18%
13	MALINAU SELATAN HILIR	1.622	1.425	3.047	3,58%
14	MALINAU SELATAN HULU	1.467	1.282	2.749	3,23%
15	SUNGAI TUBU	505	448	953	1,12%
JUMLAH		**44.851**	**40.222**	**85.073**	**100,00%**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Semester II Tahun 2023

Tabel 1.5
Rekapitulasi Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Malinau
Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan
Tahun 2023

No	Kecamatan	Kepala Keluarga		Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepemilikan KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Mentarang	1,295	278	1,573	1,565
2	Malinau Kota	6,710	1,371	8,081	8,053
3	Pujungan	468	73	541	538
4	Kayan Hilir	383	70	453	451

5	Kayan Hulu	546	119	665	662
6	Malinau Selatan	1,439	229	1,668	1,658
7	Malinau Utara	4,119	638	4,757	4,740
8	Malinau Barat	2,830	583	3,413	3,398
9	Sungai Boh	591	113	704	699
10	Kayan Selatan	446	93	539	539
11	Bahau Hulu	324	65	389	389
12	Mentarang Hulu	413	54	467	428
13	Malinau Selatan Hilir	733	165	898	893
14	Malinau Selatan Hulu	670	100	770	760
15	Sungai Tubu	212	26	238	235
Jumlah		**21,179**	**3,977**	**25,156**	**25,008**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Semester II Tahun 2023

Berdasarkan jenis pekerjaan, penduduk Malinau didominasi oleh penduduk yang belum memiliki pekerjaan sebesar 26,39%, selanjutnya Pelajar/Mahasiswa sebesar 23,40%, Mengurus Rumah Tangga sebesar 17,78%, Petani/Pekebun sebesar 11,47%.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut ini :

Tabel 1.6
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau
Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2023

NO	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH JIWA	PERSENTASE (%)
		L	P		
1	Belum/Tidak Bekerja	12.569	9.883	22.452	26,39%
2	Mengurus Rumah Tangga	0	15.129	15.129	17,78%
3	Pelajar/Mahasiswa	10.418	9.487	19.905	23,40%
4	Pensiunan	282	55	337	0,40%
5	Pegawai Negeri Sipil	1.739	1.343	3.082	3,62%

6	Tentara Nasional Indonesia	929	0	929	1,09%
7	Kepolisian RI	484	28	512	0,60%
8	Perdagangan	75	24	99	0,12%
9	Petani/Pekebun	8.266	1.494	9.760	11,47%
10	Peternak	13	4	17	0,02%
11	Nelayan/Perikanan	97	0	97	0,11%
12	Industri	2	0	2	0,00%
13	Konstruksi	7	0	7	0,01%
14	Transportasi	23	0	23	0,03%
15	KaryawanSwasta	3.474	492	3.966	4,66%
16	Karyawan BUMN	57	29	86	0,10%
17	Karyawan BUMD	40	24	64	0,08%
18	KaryawanHonorer	1145	978	2123	2,50%
19	BuruhHarian Lepas	715	12	727	0,85%
20	BuruhTani/Perkebunan	303	46	349	0,41%
21	BuruhNelayan/Perikanan	17	0	17	0,02%
22	BuruhPeternakan	3	0	3	0,00%
23	PembantuRumahTangga	1	13	14	0,02%
24	TukangCukur	1	0	1	0,00%
25	Tukang Listrik	1	0	1	0,00%
26	Tukang Batu	56	0	56	0,07%
27	Tukang Kayu	115	0	115	0,14%
28	Tukang Sol Sepatu	1	0	1	0,00%
29	Tukang Las/Pandai Besi	2	0	2	0,00%
30	Tukang Jahit	8	4	12	0,01%
31	Penata Rias	2	4	6	0,01%
32	Penata Rambut	2	2	4	0,00%
33	Mekanik	67	0	67	0,08%
34	Seniman	1	1	2	0,00%
35	Imam Mesjid	3	0	3	0,00%
36	Pendeta	221	15	236	0,28%
37	Pastor	2	0	2	0,00%
38	Wartawan	3	0	3	0,00%
39	Ustadz/Mubaligh	9	0	9	0,01%
40	JuruMasak	0	0	0	0,00%
41	Wakil Gubernur	1	0	1	0,00%
42	Bupati	1	0	1	0,00%
43	Wakil Bupati	1	0	1	0,00%
44	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	16	4	20	0,02%
45	Dosen	14	9	23	0,03%
46	Guru	245	351	596	0,70%
47	Pengacara	5	1	6	0,01%

48	Notaris	2	0	2	0,00%
49	Konsultan	10	0	10	0,01%
50	Dokter	35	41	76	0,09%
51	Bidan	0	92	92	0,11%
52	Perawat	49	129	178	0,21%
53	Apoteker	1	5	6	0,01%
54	Psikolog / Psikiater	1	0	1	0,00%
55	Peneliti	2	0	2	0,00%
56	Pelaut	10	0	10	0,01%
57	Sopir	179	0	179	0,21%
58	Pedagang	83	14	97	0,11%
59	Perangkat Desa	159	30	189	0,22%
60	Kepala Desa	108	1	109	0,13%
61	Biarawati	0	3	3	0,00%
62	Arsitek	1	0	1	0,00%
63	Wiraswasta	2.790	458	3.248	3,82%
64	Lainnya	2	0	2	0,00%
TOTAL		**44.868**	**40.205**	**85.073**	**100,00%**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Semester II Tahun 2023

Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sampai dengan Tahun 2023 jumlah penduduk yang terdaftar sebanyak 85.073 jiwa, yang tersebar di 15 kecamatan dengan kepadatan penduduk sebesar berpusat di Kecamatan Malinau Kota. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada semester II tahun 2021 dengan Semester II Tahun 2022, pertumbuhan penduduk terbesar berada di kecamatan Mentarang Hulu dengan persentase sebesar 103,84% atau 731 jiwa. Data selengkapnya mengenai rincian jumlah penduduk per Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.7 berikut ini:

Tabel 1.7
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malinau
per Kecamatan Tahun 2022 – 2023

No	Kecamatan	2022	2023		Pertumbuhan Y-on-Y	
		SMT II	SMT I	SMT II	Jiwa	Persen
1	Mentarang	5.449	5.558	5.640	191	3,505%
2	Malinau Kota	25.894	25.899	26.343	449	1,733%
3	Pujungan	1.752	1.745	1.873	121	6,906%
4	Kayan Hilir	1.538	1.547	1.554	16	1,040%
5	Kayan Hulu	2.341	2.413	2.455	114	4,869%
6	Malinau Selatan	5.099	5.257	5.409	310	6,079%
7	Malinau Utara	15.255	15.348	15.617	362	2,372%
8	Malinau Barat	11.425	11.475	11.688	263	2,301%
9	Sungai Boh	2.336	2.429	2.485	149	6,378%
10	Kayan Selatan	1.990	2.002	1.998	8	0,402%
11	Bahau Hulu	1.327	1.346	1.407	80	6,028%
12	Mentarang Hulu	1.786	1.805	1.855	69	3,863%
13	Malinau Selatan Hilir	2.982	3.005	3.047	65	2,179%
14	Malinau Selatan Hulu	2.565	2.640	2.749	184	7,173%
15	Sungai Tubu	890	902	953	63	7,078%
Jumlah		**82.629**	**83.371**	**85.073**	**2.444**	**2,957%**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Semester II Tahun 2023

d. Jumlah Kecamatan dan Desa

Secara administratif Kabupaten Malinau terdiri dari 15 Kecamatan dan 109 Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Kayan Selatan maka beberapa desa mengalami perubahan wilayah administrasi. Untuk secara rincinya dapat dilihat pada tabel 1.8 berikut ini :

Tabel 1.8
Nama Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Malinau
Tahun 2023

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa
1.	Malinau Kota	Malinau Kota	Batu Lidung Malinau Kota Pelita Kanaan Malinau Hulu Malinau Hilir Tanjung Keranjang
2.	Malinau Utara	Malinau Seberang	Kaliamok Luso Malinau Seberang Putat Salap Seruyung Respen Tubu Belayan Sembuak Warod Lubak Manis Kelapis Semengaris
3	Malinau Barat	Tanjung Lapang	Long Billa Long Kenipe Punan Bengalun Sesua Sentaban Tanjung Lapang Taras Kuala Lapang Sempayang
4.	Mentarang	Pulau Sapi	Long Bisai Pulau Sapi Paking Lidung Kemenci Mentarang Baru Harapan Maju
5.	Mentarang Hulu	Long Barang	Long Gafit Long Liku Temalang Lung Berang Lung Fala Lung Kebinu

			Lung Mekatif Lung Semamu Lung Sulit Lung Simau
6.	Malinau Selatan	Long Loreh	Bila Bekayuk Long Loreh Langap Laban Nyarit Nunuk Tanah Kibang Pelencau Paya Seturan Punan Rian Sengayan
7.	Malinau Selatan Hilir	Setarap	Setulang Setarap Punan Setarap Batu Kajang Gong Solok Punan Gong Solok Long Adiu Punan Long Adiu
8.	Malinau Selatan Hulu	Metut	Long Lake Punan Mirau Long Rat Halanga Metut Long Jalan Nahakramo Tanjung Nanga
9.	Kayan Hulu	Long Nawang	Long Nawang Nawang Baru Long Temuyat Long Betaoh Lidung Payau
10.	Kayan Hilir	Data Dian	Data Dian Long Pipa Long Sule Sungai Anai Long Metun
11.	Kayan Selatan	Long Ampung	Long Ampung Long Uro Lidung Payau Sungai Barang Metulang

12.	Sungai Boh	Mahak Baru	Dumu Mahak Long Lebusan Mahak Baru Long Top Agung Baru Data Baru
13.	Sungai Tubu	Long Pada	Long Nyau Long Titi Long Ranau Rian Tubu Long Pada
14.	Bahau Hulu	Long Alango	Long Uli Long Alango Long Berini Long Tebulo Apau Ping Long Kemuat
15.	Pujungan	Long Pujungan	Long Pujungan Long Ketaman Long Pua Long Lame Long Jelet Long Aran Long Peliran Long Bena Long Belaka Pitau
15 Kecamatan			***109 Desa***

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Malinau Tahun 2024

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau. Perangkat Daerah berdasarkan Jumlah PNS berdasarkan Unit Kerja dan Golongan Tahun 2023 tersaji pada tabel 1.9 sebagai berikut:

Tabel 1.9
Jumlah PNS Berdasarkan Unit Kerja dan Golongan
Tahun 2023

NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN				JML
		I	II	III	IV	
1	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	6	6
2	INSPEKTORAT	0	0	32	6	38
3	DINAS PENDIDIKAN	0	6	36	12	54
4	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0	3	21	13	37
5	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	1	17	8	26
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	1	25	11	37
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK &SOSIAL	0	4	17	9	30
8	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	0	5	40	5	50
9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	4	27	8	39
10	DINAS PERHUBUNGAN	0	2	25	8	35
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	3	22	6	31
12	DINAS PERTANIAN	1	16	28	11	56
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	8	31	9	48
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	5	17	7	30
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	23	5	28
16	DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADU SATU & TK	0	2	25	6	33
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	2	22	6	30
18	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PKP	0	6	67	8	81
19	DINAS PERIKANAN	0	4	20	3	27
20	DINAS KETENAGAKERJAAN (TIPE C)	0	1	17	4	22
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG	0	6	26	13	45
22	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0	9	55	8	72
23	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	8	30	7	45
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	6	16	7	30
25	BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH	1	6	12	6	25
26	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	0	3	11	8	22
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2	23	51	9	85
28	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	0	9	18	4	31
29	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	0	0	2	0	2
30	SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALINAU	0	0	3	0	3
31	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINAU	1	20	195	17	233
32	RUMAH SAKIT PRATAMA LANGAP	0	0	10	1	11
33	RUMAH SAKIT PRATAMA LONG AMPUNG	0	0	5	1	6
34	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	0	2	12	1	15
35	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	2	7	2	11
36	BAGIAN HUKUM	0	0	13	0	13
37	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	0	0	8	3	11
38	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0	1	5	3	9
39	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	2	11	1	14

40	BAGIAN UMUM	0	11	26	1	38
41	BAGIAN ORGANISASI	0	2	6	1	9
42	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0	0	11	1	12
43	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	0	1	6	1	8
44	KANTOR CAMAT MALINAU KOTA	0	7	23	0	30
45	KANTOR CAMAT MALINAU UTARA	1	9	17	2	29
46	KANTOR CAMAT MALINAU BARAT	1	5	15	2	23
47	KANTOR CAMAT MENTARANG	0	7	20	1	28
48	KANTOR CAMAT MENTARANG HULU	0	2	8	2	12
49	KANTOR CAMAT MALINAU SELATAN	0	3	11	1	15
50	KANTOR CAMAT MALINAU SELATAN HILIR	1	2	11	1	15
51	KANTOR CAMAT MALINAU SELATAN HULU	1	2	12	2	17
52	KANTOR CAMAT SUNGAI TUBU	0	1	10	0	11
53	KANTOR CAMAT PUJUNGAN	1	3	14	1	19
54	KANTOR CAMAT BAHAU HULU	0	5	7	3	15
55	KANTOR CAMAT SUNGAI BOH	0	4	21	1	26
56	KANTOR CAMAT KAYAN HULU	0	4	17	0	21
57	KANTOR CAMAT KAYAN HILIR	0	3	13	0	16
58	KANTOR CAMAT KAYAN SELATAN	0	1	16	0	17
59	PUSKESMAS MALINAU KOTA	0	4	25	1	30
60	PUSKESMAS MALINAU SEBERANG	0	5	37	0	42
61	PUSKESMAS TANJUNG LAPANG	0	4	29	1	34
62	PUSKESMAS SESUA	0	4	14	0	18
63	PUSKESMAS LONG LOREH	0	6	15	0	21
64	PUSKESMAS SEHATI/GONG SOLOK	0	3	10	0	13
65	PUSKESMAS SETULANG	0	1	13	0	14
66	PUSKESMAS PULAU SAPI	0	10	25	0	35
67	PUSKESMAS LONG BERANG	0	5	13	0	18
68	PUSKESMAS PUJUNGAN	0	6	10	0	16
69	PUSKESMAS LONG ALANGO	0	3	13	0	16
70	PUSKESMAS LONG AMPUNG	0	0	13	0	13
71	PUSKESMAS LONG NAWANG	0	2	10	0	12
72	PUSKESMAS DATA DIAN	0	1	7	0	8
73	PUSKESMAS SUNGAI BOH	0	2	15	0	17
74	PUSKESMAS LONG SULE	0	2	1	0	3
75	UPTD GUDANG FARMASI	0	0	1	2	3
76	UPTD PUSKESMAS MALINAU SELATAN HULU	0	1	4	0	5
77	PUSKESMAS PEMBANTU BATU LIDUNG (MALINAU KOTA)	0	0	1	0	1
78	PUSKESMAS PEMBANTU PELITA KANAAN(MALINAU KOTA)	0	0	1	0	1
79	PUSKESMAS PEMBANTU TJG. KERANJANG (MALINAU KOTA)	0	0	2	0	2
80	PUSKESMAS PEMBANTU SEMBUAK WAROD/TAJAN (MALTRA)	0	1	3	0	4
81	PUSKESMAS PEMBANTU SERUYUNG (MALINAU UTARA)	0	1	0	0	1
82	PUSKESMAS PEMBANTU (KELAPIS)	0	2	0	0	2
83	PUSKESMAS PEMBANTU (BELAYAN)	0	0	0	0	0
84	PUSKESMAS PEMBANTU (LUSO)	0	1	0	0	1
85	PUSKESMAS PEMBANTU (RESPEN TUBU)	0	0	1	0	1
86	PUSKESMAS PEMBANTU (LUBAK MANIS)	0	1	2	0	3

87	PUSKESMAS METUT	0	1	5	0	6
88	PENGAWAS SEKOLAH DINAS PENDIDIKAN	0	0	2	12	14
89	UPTD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALINAU KOTA	0	0	0	1	1
90	UPTD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MENTARANG	0	1	0	1	2
91	UPTD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALINAU SELATAN	0	1	0	1	2
92	UPTD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PUJUNGAN	0	1	0	1	2
93	UPTD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUNGAI BOH	0	0	2	0	2
94	UPTD DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KAYAN HULU	0	0	1	1	2
95	SDN NO. 001 MALINAU KOTA	0	2	6	9	17
96	SDN NO. 002 MALINAU KOTA	0	1	9	8	18
97	SDN NO. 003 MALINAU KOTA	0	0	5	1	6
98	SDN NO. 004 MALINAU KOTA	0	1	10	3	14
99	SDN NO. 005 MALINAU KOTA	0	1	10	8	19
100	SDN NO. 006 MALINAU KOTA	0	1	4	3	8
101	SDN NO. 007 MALINAU KOTA	1	1	3	2	7
102	SDN NO. 008 MALINAU KOTA	0	0	5	4	9
103	SDN NO. 009 MALINAU KOTA	0	1	4	2	7
104	SDN NO. 010 MALINAU KOTA	0	1	5	5	11
105	SDN NO. 011 MALINAU KOTA	0	1	4	5	10
106	SDN NO. 001 MALINAU UTARA	0	0	8	6	14
107	SDN NO. 002 MALINAU UTARA	0	2	7	1	10
108	SDN NO. 003 MALINAU UTARA	0	0	7	4	11
109	SDN NO. 004 MALINAU UTARA	0	1	6	0	7
110	SDN NO. 005 MALINAU UTARA	0	1	7	0	8
111	SDN NO. 006 MALINAU UTARA	0	3	5	1	9
112	SDN NO. 007 MALINAU UTARA	0	1	6	1	8
113	SDN NO. 008 MALINAU UTARA	0	1	4	4	9
114	SDN NO. 009 MALINAU UTARA	0	2	2	7	11
115	SDN NO. 010 MALINAU UTARA	0	2	2	3	7
116	SDN NO. 011 MALINAU UTARA	0	3	3	1	7
117	SDN NO. 012 MALINAU UTARA	0	0	7	3	10
118	SDN NO. 013 MALINAU UTARA	0	1	6	3	10
119	SDN NO. 001 MALINAU BARAT	0	2	5	0	7
120	SDN NO. 002 MALINAU BARAT	0	1	15	3	19
121	SDN NO. 003 MALINAU BARAT	0	1	4	4	9
122	SDN NO. 004 MALINAU BARAT	0	1	8	1	10
123	SDN NO. 005 MALINAU BARAT	0	3	7	6	16
124	SDN NO. 006 MALINAU BARAT	0	3	7	0	10
125	SDN NO. 007 MALINAU BARAT	0	3	4	1	8
126	SDN NO. 008 MALINAU BARAT	0	0	6	1	7
127	SDN NO. 009 MALINAU BARAT	0	1	5	1	7
128	SDN NO. 010 MALINAU BARAT	0	0	4	1	5
129	SDN NO. 001 MENTARANG	0	1	5	6	12
130	SDN NO. 002 MENTARANG	0	1	4	3	8
131	SDN NO. 003 MENTARANG	0	0	8	1	9
132	SDN NO. 004 MENTARANG	1	3	2	1	7
133	SDN NO. 005 MENTARANG	0	1	3	1	5
134	SDN NO. 006 MENTARANG (RAJUK)	0	1	5	0	6

135	SDN NO. 001 SUNGAI TUBU	0	3	4	0	7
136	SDN NO. 002 SUNGAI TUBU	0	1	1	0	2
137	SDN NO. 003 SUNGAI TUBU	0	2	2	0	4
138	SDN NO. 004 SUNGAI TUBU	0	0	3	0	3
139	SDN NO. 005 SUNGAI TUBU	0	0	2	0	2
140	SDN NO. 001 MENTARANG HULU	0	1	5	0	6
141	SDN NO. 002 MENTARANG HULU	1	2	1	0	4
142	SDN NO. 003 MENTARANG HULU	0	0	2	1	3
143	SDN NO. 004 MENTARANG HULU	0	0	6	0	6
144	SDN NO. 005 MENTARANG HULU	0	2	2	0	4
145	SDN NO. 006 MENTARANG HULU	0	0	2	0	2
146	SDN NO. 007 MENTARANG HULU	0	0	6	0	6
147	SDN NO. 008 MENTARANG HULU	0	0	4	0	4
148	SDN NO. 001 MALINAU SELATAN (LONG LOREH)	0	2	7	2	11
149	SDN NO. 002 MALINAU SELATAN (LANGAP)	0	4	2	0	6
150	SDN NO. 003 MALINAU SELATAN (BILA BEKAYUK)	0	0	6	0	6
151	SDN NO. 004 MALINAU SELATAN	0	0	5	1	6
152	SDN NO. 005 MALINAU SELATAN	0	0	4	0	4
153	SDN NO. 006 MALINAU SELATAN	0	0	1	0	1
154	SDN NO. 001 MALINAU SELATAN HILIR (GONG SOLOK)	0	0	8	0	8
155	SDN NO. 002 MALINAU SELATAN HILIR (SETULANG)	0	1	5	0	6
156	SDN NO. 003 MALINAU SELATAN HILIR (SETARAP)	0	2	4	0	6
157	SDN NO. 004 MALINAU SELATAN HILIR (BATU KAJANG)	0	2	4	1	7
158	SDN NO. 005 MALINAU SELATAN HILIR (LONG ADIU)	0	0	5	1	6
159	SDN NO. 006 MALINAU SELATAN HILIR (PN. GONG SOLOK)	0	1	7	0	8
160	SDN NO. 007 MALINAU SELATAN HILIR (PUNAN SETARAP)	0	1	4	2	7
161	SDN NO. 001 MALINAU SELATAN HULU	0	1	5	3	9
162	SDN NO. 002 MALINAU SELATAN HULU	0	0	4	0	4
163	SDN NO. 003 MALINAU SELATAN HULU	0	2	0	0	2
164	SDN NO. 004 MALINAU SELATAN HULU	0	0	4	0	4
165	SDN NO. 005 MALINAU SELATAN HULU	0	0	3	0	3
166	SDN NO. 006 MALINAU SELATAN HULU	0	0	5	0	5
167	SDN NO. 007 MALINAU SELATAN HULU	0	0	6	1	7
168	SDN NO. 008 MALINAU SELATAN HULU	0	0	0	0	0
169	SDN NO. 001 PUJUNGAN	0	0	6	1	7
170	SDN NO. 002 PUJUNGAN	0	0	2	1	3
171	SDN NO. 003 PUJUNGAN	0	0	5	0	5
172	SDN NO. 004 PUJUNGAN	1	0	3	0	4
173	SDN NO. 005 PUJUNGAN	0	2	3	0	5
174	SDN NO. 006 PUJUNGAN	0	2	5	1	8
175	SDN NO. 007 PUJUNGAN	0	1	3	0	4
176	SDN NO. 008 PUJUNGAN	0	0	2	2	4
177	SDN NO. 001 BAHAU HULU	0	1	5	1	7
178	SDN NO. 002 BAHAU HULU	0	0	4	0	4
179	SDN NO. 003 BAHAU HULU	0	3	2	1	6
180	SDN NO. 004 BAHAU HULU	0	0	4	1	5
181	SDN NO. 005 BAHAU HULU	0	2	2	1	5

182	SDN NO. 006 BAHAU HULU	0	0	4	0	4
183	SDN NO. 001 SUNGAI BOH	0	0	6	0	6
184	SDN NO. 002 SUNGAI BOH	0	1	4	1	6
185	SDN NO. 003 SUNGAI BOH	0	0	6	1	7
186	SDN NO. 004 SUNGAI BOH	0	0	3	0	3
187	SDN NO. 005 SUNGAI BOH	0	0	4	0	4
188	SDN NO. 006 SUNGAI BOH	0	0	2	0	2
189	SDN NO. 001 KAYAN HULU	0	1	6	4	11
190	SDN NO. 002 KAYAN HULU	0	1	5	2	8
191	SDN NO. 003 KAYAN HULU	0	0	3	2	5
192	SDN NO. 004 KAYAN HULU	0	1	3	1	5
193	SDN NO. 005 KAYAN HULU	0	1	0	2	3
194	SDN NO. 001 KAYAN HILIR	0	1	4	2	7
195	SDN NO. 002 KAYAN HILIR	0	3	2	1	6
196	SDN NO. 003 KAYAN HILIR	0	2	2	1	5
197	SDN NO. 001 KAYAN SELATAN	0	0	4	5	9
198	SDN NO. 002 KAYAN SELATAN	1	0	6	1	8
199	SDN NO. 003 KAYAN SELATAN	0	1	8	3	12
200	SDN NO. 004 KAYAN SELATAN	0	1	6	1	8
201	SMPN 1 MALINAU KOTA	0	1	13	15	29
202	SMPN 2 MALINAU KOTA	0	3	13	5	21
203	SMPN 3 MALINAU KOTA	0	0	4	3	7
204	SMPN 1 MALINAU UTARA	0	2	11	7	20
205	SMPN 2 MALINAU UTARA	0	1	7	4	12
206	SMPN 3 MALINAU UTARA	0	0	4	3	7
207	SMPN 4 MALINAU UTARA	0	0	10	2	12
208	SMPN 1 MALINAU BARAT	0	2	6	4	12
209	SMPN 2 MALINAU BARAT	0	1	6	1	8
210	SMPN 3 MALINAU BARAT	0	1	13	2	16
211	SMPN 4 MALINAU BARAT	0	0	5	1	6
212	SMPN 1 MENTARANG (PULAU SAPI)	0	1	9	4	14
213	SMPN 2 MENTARANG (PAKING)	0	0	5	0	5
214	SMPN 3 MENTARANG (MENTARANG BARU)	0	0	2	1	3
215	SMPN 1 SUNGAI TUBU	0	0	5	1	6
216	SMPN 1 MENTARANG HULU	0	0	7	0	7
217	SMPN 1 MALINAU SELATAN	0	1	8	3	12
218	SMPN 2 MALINAU SELATAN	0	0	0	0	0
219	SMPN 1 MALINAU SELATAN HILIR	0	1	6	1	8
220	SMPN 2 MALINAU SELATAN HILIR	0	2	6	1	9
221	SMPN 3 MALINAU SELATAN HILIR	0	0	5	0	5
222	SMPN 4 MALINAU SELATAN HILIR	0	0	10	0	10
223	SMPN 1 MALINAU SELATAN HULU	0	0	6	0	6
224	SMPN 2 MALINAU SELATAN HULU	0	0	5	1	6
225	SMPN 3 MALINAU SELATAN HULU	0	0	0	0	0
226	SMPN 1 PUJUNGAN	0	0	7	1	8
227	SMPN 2 PUJUNGAN	0	0	5	1	6
228	SMPN 1 BAHAU HULU	0	0	3	0	3
229	SMPN 1 SUNGAI BOH	0	0	6	1	7

230	SMPN 2 SUNGAI BOH	0	3	5	2	10
231	SMPN 1 KAYAN HULU	0	0	6	0	6
232	SMPN 2 KAYAN HULU	0	0	5	2	7
233	SMPN 1 KAYAN HILIR	0	1	6	1	8
234	SMPN 2 KAYAN HILIR	0	0	5	0	5
235	SMPN 1 KAYAN SELATAN	0	0	9	3	12
236	SMPN 2 KAYAN SELATAN	0	0	4	1	5
237	SMPN 3 KAYAN SELATAN	0	0	7	0	7
238	TK NEGERI PRATAMA	0	1	10	1	12
239	TK NEGERI WANA KENCANA (DESA TANJUNG LAPANG)	0	0	4	0	4
240	TK NEGERI INTIMUNG (DESA MALINAU SEBERANG)	0	0	1	1	2
241	TK NEGERI HANDAYANI (DESA PULAU SAPI)	0	0	1	0	1
242	TK NEGERI CERIA (DESA LONG LOREH)	0	0	1	0	1
243	MTs NEGERI MALINAU	0	0	1	0	1
Total		**17**	**432**	**2.273**	**518**	**3.240**

Sumber: SIASN BKPP Kabupaten Malinau Tahun 2023

Tabel 1.10
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malinau
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah PNS (Orang)
1	Sekolah Dasar	16
2	SLTP	25
3	SLTA	633
4	Diploma I	5
5	Diploma II	36
6	Diploma III	505
7	Diploma IV	128
8	S-1	1529
9	S-2	358
10	S-3	5
JUMLAH		**3240**

Sumber: SIASN BKPP Kab.Malinau Tahun 2023

Tabel 1.11
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malinau Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	I/a	0	0	0
2	I/b	0	1	1
3	I/c	5	0	5
4	I/d	9	2	11
5	II/a	21	11	32
6	II/b	56	36	92
7	II/c	69	23	92
8	II/d	97	119	216
9	III/a	314	288	602
10	III/b	236	321	557
11	III/c	272	313	585
12	III/d	288	241	529
13	IV/a	181	147	328
14	IV/b	90	74	164
15	IV/c	25	0	25
16	IV/d	1	0	1
Total		**1664**	**1576**	**3240**

Sumber: SIASN BKPP Kab.Malinau Tahun 2023

Tabel 1.12
Jumlah PPPK Kabupaten Malinau Tahun 2023

NO	JABATAN	PPPK (Orang)	Persen
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	4	0,64
2	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	3	0,48
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	2	0,32
4	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	0,16
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	0,16
6	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	2	0,32
7	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	1	0,16
8	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	7	1,13
9	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	10	1,61

10	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	58	9,34
11	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	18	2,90
12	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	12	1,93
13	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	3	0,48
14	AHLI PERTAMA - GURU IPA	17	2,74
15	AHLI PERTAMA - GURU IPS	11	1,77
16	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	168	27,05
17	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	14	2,25
18	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	48	7,73
19	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	16	2,58
20	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	22	3,54
21	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	0,16
22	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	2	0,32
23	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	1	0,16
24	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	1	0,16
25	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	3	0,48
26	AHLI PERTAMA - PENGELOLA KESEHATAN IKAN	1	0,16
27	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	2	0,32
28	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	8	1,29
29	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	0,48
30	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	0,16
31	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	6	0,97
32	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	4	0,64
33	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	11	1,77
34	TERAMPIL - BIDAN	40	6,44
35	TERAMPIL - NUTRISIONIS	9	1,45
36	TERAMPIL - PERAWAT	86	13,85
37	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	10	1,61
38	TERAMPIL - SANITARIAN	5	0,81
39	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	9	1,45
TOTAL		**621**	**100**

Sumber: SIASN BKPP Kab.Malinau Tahun 2023

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berikut ini tersaji Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 pada tabel 1.13 berikut ini:

Tabel 1.13
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023
01 Januari Tahun 2023 Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023
1	*2*	*3*
PENDAPATAN DAERAH	**2.557.014.876.447**	**2.424.597.895.321,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**62.693.670.758**	**91.432.401.465,00**
Pajak Daerah	14.975.396.658	17.025.579.720,00
Retribusi Daerah	1.958.274.100	1.686.580.129,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.600.000.000	3.939.962.456,51
Lain-lain PAD yang Sah	42.160.000.000	68.780.279.159,49
PENDAPATAN TRANSFER	**2.488.929.837.071**	**2.330.639.869.703,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.404.590.415.074	2.250.311.057.899,00
Dana Perimbangan	2.286.953.742.074	2.132.674.384.899,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.331.245.950.074	1.187.686.913.846,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	809.470.515.000	809.470.321.804,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	76.144.714.000	74.637.163.936,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	70.092.563.000	60.879.985.313,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0	0,00
Dana Desa	117.636.673.000	117.636.673.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.339.421.997	80.328.811.804,00
Pendapatan Bagi Hasil	62.138.664.764	60.364.622.072,00
Bantuan Keuangan	22.200.757.233	19.964.189.732,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**5.391.368.618**	**2.525.624.153,00**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.391.368.618	2.525.624.153,00

1	*2*	*3*
BELANJA DAERAH	**2.798.332.565.372**	**2.108.877.879.524,00**
BELANJA OPERASI	**1.671.649.789.344**	**1.327.663.376.737,00**
Belanja Pegawai	731.416.141.535	517.179.663.601,00
Belanja Barang dan Jasa	775.672.417.205	664.203.378.458,00
Belanja Subsidi	35.806.311.000	32.069.056.558,00
Belanja Hibah	108.932.016.254	96.635.735.839,00
Belanja Bantuan Sosial	19.822.903.350	17.575.542.281,00
BELANJA MODAL	**567.136.405.419**	**479.059.137.795,00**
Belanja Modal Tanah	12.607.144.171	2.926.630.777,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.380.389.268	185.113.018.741,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191.517.201.926	152.303.142.023,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	148.198.964.854	134.691.487.204,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	259.977.200	104.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**260.904.142.047**	**3.513.349.290,00**
Belanja Tidak Terduga	260.904.142.047	3.513.349.290,00
BELANJA TRANSFER	**298.642.228.562**	**298.642.015.702,00**
Belanja Bantuan Keuangan	297.160.994.400	297.160.781.540,00
SURPLUS/DEFISIT	**(241.317.688.925)**	**315.720.015.797,00**
PEMBIAYAAN DAERAH	**241.317.688.924**	**241.317.688.924,96**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**251.317.688.924**	**251.317.688.924,96**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	251.317.688.924	251.317.688.924,96
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**10.000.000.000**	**10.000.000.000,00**
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**10.000.000.000**	**10.000.000.000,00**
PEMBIAYAAN NETTO	**241.317.688.924**	**241.317.688.924,96**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(0)**	**557.037.704.721,96**

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau Tahun 2024

1.1.2 Perencanan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan darah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Permasalahan pembangunan yang berasal dari analisa lingkungan eksternal dan internal dapat menjadi prediksi terhadap berbagai peluang dan

ancaman yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malinau. Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan sebagai bagian dari isu-isu strategis yang perlu untuk menjadi perhatian dalam penyusunan kerangka kebijakan agar sesuai dengan keutuhan pembangunan Kabupaten Malinau. Isu strategis pembangunan daerah merupakan seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kabupaten Malinau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Malinau.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Malinau meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek Kondisi Wilayah

   Kabupaten Malinau merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara, berada di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kayan, Sesayap, Sembakung, dan Sebuku, di mana sebagian besar wilayah berada di ketinggian >300 m dpl, bergunung dan berbukit dengan kelerengan yang umumnya terjal.

   Di wilayah Kabupaten Malinau terbentang Hutan Taman Nasional Kayan Mentarang yang merupakan kawasan dengan hutan primer dan sekunder tua terbesar yang masih tersisa di Pulau Kalimantan dan ikon Provinsi Kalimantan Utara, yang juga merupakan kawasan diperuntukkan bagi perlindungan kawasan secara alami, berpemandangan indah, memiliki makna penting secara nasional dan internasional, serta mempunyai nilai manfaat dalam ilmu pengetahuan, pariwisata dan pendidikan.

   Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Malinau antara lain yaitu : terjadinya degradasi hutan, kerusakan hutan, alih fungsi lahan hutan

untuk peruntukkan lainnya. Sementara dari segi demografis permasalahan yang dihadapi yaitu : Tingginya pertumbuhan penduduk, Ketimpangan rasio jenis kelamin, dan rendahnya tingkat kepadatang penduduk.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

   Meski menunjukkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malinau, baik ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, kemiskinan, tingkat partisipasi angkatan kerja, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan PDRB, hal ini bukan berarti bahwa tantangan pembangunan atas peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malinau telah terselesaikan. Adapun permasalahan pembangunan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

   a. *IPM*; Kemampuan masyarakat untuk mengakses/memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan masih berada pada batas bawah level kesejahteraan tinggi.
   b. *Indeks Gini*; Distribusi tingkat ketimpangan pendapatan berada pada batas bawah ketimpangan rendah.
   c. *Kemiskinan*; Masih adanya penduduk berstatus miskin akibat keterisolasian.
   d. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*; TPAK cenderung fluktuatif.
   e. *Tingkat Pengangguran Terbuka*; Masih adanya pengangguran terbuka cenderung mengalami peningkatan.
   f. *Pertumbuhan Ekonomi*; Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara.
   g. *PDRB;* PDRB bertumpu pada sumber daya alam tak dapat pulih.
   h. *Inflasi;* Belum terkendalinya tingkat inflasi.

3. Aspek Layanan Umum

   Permasalahan yang terkait dengan aspek layanan umum di Kabupaten Malinau antar lain yaitu sebagai berikut :

   a. *Pendidikan;* Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) masih fluktuatif serta adanya penduduk usia sekolah yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan.
   b. *Kesehatan;* Masih adanya kasus gizi buruk, kematian ibu dalam melahirkan, angka kematian dalam kelahiran.
   c. *Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;* Infrastruktur yang belum memadai (optimal).
   d. *Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*; Belum tuntasnya permasalaham permukiman kumuh.
   e. *Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat*; Belum maksimalnya jaminan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
   f. *Sosial*; Belum terselesaikannya penanganan sosial PMKS, fakir miskin, dan KAT.
   g. *Tenaga Kerja*; Belum tuntasnya penanganan pengangguran.
   h. *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*; Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan belum menunjukkan kemajuan signifikan.
   i. *Ketahanan Pangan*; Belum maksimalnya jaminan ketersediaan pangan utama.
   j. *Lingkungan Hidup*; Masih minimnya penanganan kualitas lingkungan hidup.
   k. *Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*; Belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki KTP, akte perkawinan, akte kelahiran, akte kemaitan dan kartu keluarga.

l. *Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*; Masih adanya cakupan sasaran kepesertaan KB baru dan layanan KB aktif yang belum terdata atau terlaporkan.
m. *Perhubungan*; Kecenderungan peningkatan arus kedatangan dan keberangkatan orang.
n. *Komunikasi dan Informatika*; Fasilitas teknologi informasi belum tersedia di seluruh desa.
o. *Koperasi Usaha Kecil dan Menengah*; Kemampuan koperasi dalam manajemen masih rendah.
p. *Penanaman Modal*; Masih rendahnya nilai investasi.
q. *Kepemudaan dan Olahraga*; Rendah prestasi organisasi kepemudaan dan olahraga.
r. *Statistik*; Kecukupan data dan validitas data untuk untuk perencanaan pembangunan masih belum terpenuhi.
s. *Persandian*; Belum optimalnya penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.
t. *Perpustakaan dan Kearsipan*; Masih kurangnya (belum optimalnya) layanan kepustakaan dengan model *hybrid library.*
u. *Pariwisata;* Rendahnya kunjungan wisata dan belum memadainya fasilitas wisata daerah.
v. *Pertanian;* Rendahnya produktifitas tanaman pangan.
w. *Kelautan dan Perikanan;* Rendahnya produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
x. *Kehutanan;* Degradasi dan rendahnya reboisasai-rehabilitasi hutan dan dan lahan.
y. *Perindustrian dan Perdagangan;* Rendahnya pertumbuhan dan kontribusi industri kecil dan rumah tangga.
z. *Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan;* Belum primanya tata kelola pemerintahan

4. Aspek Daya Saing Daerah

   Permasalahan pembangunan berdasarkan aspek daya saing daerah yang terjadi di Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

   a. *Ekonomi Daerah;* Daya saing ekonomi daerah bertumpu pada sektor primer.
   b. *Infrastruktur;* Rendahnya daya saing infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, dan air), infrastruktur pencegah dan pengendalian banjir.
   c. *Iklim Berinvestasi;* Masih adanya gejolak dan konflik sosial di masyarakat yang perlu untuk diselesaikan.
   d. *Sumber Daya Manusia;* Masih rendahnya daya saing SDM.

5. Aspek Keuangan Daerah

   Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Malinau ditinjau dari aspek keuangan daerah adalah sebagai berikut :

   a. *Pendapatan Daerah;* Pendapatan daerah yang cenderung fluktuatif.
   b. *Belanja Daerah;* Belanja yang cenderung fluktuatif dan tidak signifikannya kenaikan realisasi transfer.
   c. *Aset;* Aset yang cenderung meningkat.
   d. *Pengelolaan Pendapatan Daerah;* Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur dalam mengelola kegiatan dan administrasi keuangan serta masih rendahnya profesionalisme penyedia jasa pembangunan.

Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan pada berbagai urusan pemerintahan serta memperhatikan masukan dan kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*Stakeholder)* teridentifikasi lima permasalahan utama pembangunan Kaubupaten Malinau yaitu :

1. Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat;
2. Belum optimalnya layanan umum;

3. Masih rendahnya daya saing daerah;
4. Masih rendahnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan
5. Belum optimalnya tata kelola keuangan daerah.

Isu strategis merupakan acuan yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Malinau pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, identifikasi isu-isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan diterimanya prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Perumusan isu-isu strategis Kabupaten Malinau dilakukan melalui proses identifikasi berbagai isu yang berkembang baik yang terjadi di tingkat internasional, nasional, provinsi maupun yang terjadi di Kabupaten Malinau. Berkenaan dengan isu strategis di Kabupaten Malinau diuraikan sebagai berikut:

1. Isu Strategis Internasional.

   Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* menjadi kesepakatan pembangunan global yang dimulai tahun 2016. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030 berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. Adapun tujuan SDGs adalah sebagai berikut :

   a. Mengentaskan segala bentuk kemiskininan di manapun.
   b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
   c. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
   d. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

e. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
f. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
g. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
h. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
i. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
j. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
k. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
l. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
n. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
o. Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
p. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

q. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation)* dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :

a. Menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi dengan kaitannya pada elemen produk aktivitas ekonomi bebas, seperti tenaga kerja (terdidik/terampil), bebas bea untuk aliran barang dan jasa dari kawasan regional ASEAN, serta keluar masuknya investasi dan aliran modal untuk negara-negara sekawasan;
b. Menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetisi ekonomi, meliputi perlindungan konsumen, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perpajakan, kelancaran aktivitas *e-Commerce* dan pengembangan infrastruktur;
c. Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM); dan
d. Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global.

Terkait empat tujuan MEA tersebut di atas maka penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 telah menelaah dan berkomitmen akan memasukkan program yang sesuai untuk mendukung terlaksananya tujuan MEA di daerah Kabupaten Malinau.

Perubahan iklim merupakan suatu fenomena yang memberi dampak nyata di kehidupan manusia, di antaranya kelangkaan sumber daya alam, kerusakan habitat flora dan fauna, gangguan kesehatan dan peningkatan bencana hidrometeorologi. Kabupaten

Malinau sebagai salah satu kabupaten konservasi hutan di Indonesia telah berkontribusi terhadap isu perubahan iklim. Yaitu dengan ditingkatkan dan diperluasnya kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malinau.

Revolusi Industri keempat menjadi isu strategis yang patut menjadi perhatian dalam kerangka pembangunan di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Kabupaten Malinau. Kemudahan dan kecepatan pertukaran informasi dan konektivitas internet semakin mempersingkat jarak dan waktu yang diperlukan dalam menjalin komunikasi dengan dunia di luar daerah Kabupaten Malinau. Sehingga hal ini menjadi penting untuk menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan daerah di Kabupaten Malinau, sebab ada begitu banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pandemi Covid-19 yang melanda berbagai negara membuat perekonomian global semakin terpuruk. Terjadinya krisis kesehatan, krisis ekonomi dan pasar keuangan membuat berbagai negara harus melakukan berbagai upaya agar dapat bangkit dari keterpurukan. Oleh sebab itu diperlukan adanya usaha bersama dan dukungan dari berbagai pihak agar pemulihan dari krisis yang terjadi dapat segera terwujud. Demikian tidak terkecuali bagi masyarakat Kabupaten Malinau perlu untuk bangkit dan pulih dari dampak pandemi covid-19.

2. Isu Strategis Nasional

Ada beberapa isu strategis nasioal yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan antara lain :

a. Ketersediaan sumber daya alam yang makin berkurang.
b. Masih adanya ketimpangan antar wilyah di Kawasan Indonesia Timur dan Kawasan Indonesia Barat.
c. Rendahya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

d. Belum optimalnya infrastruktur layanan dasar, ekonomi, energi, dan ketenagalistrikan, serta infrastruktur transformasi digital.
e. Melemahnya ideologi dan belum kuatnya karakater bangsa.
f. Penurunan kualitas lingkungan hidup.
g. Masih perlunya pengembangan demokrasi.
h. Belum mapannya tata kelola pemerintahan.
i. Stabilitas politik, hukum dan keamanan

3. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan hasil penyelarasan antara isu strategis dan misi kepala daerah terpilih yang dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Gubernur menghasilkan kesepakatan isu strategis RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

a. Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM.
b. Masih rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar wilayah.
c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
d. Rentannya ketahanan ekonomi daerah sebagai kawasan perbatasan dalam menghadapi persaingan global.
e. Masih rendahnya aksesibilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi.
f. Belum optimalnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan.

4. Isu-Isu Strategis Kabupaten

Isu-isu Strategis Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pengelolaan dan keberlanjutan ketersediaan SDA (pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan budidaya dan SDA tak dapat pulih).

b. Belum mapannya struktur ekonomi yang menjamin pertumbuhan berkualitas dan pemerataan.
c. Belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi, lingkungan hidup dan kawasan permukiman.
d. Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
e. Masih adanya kesenjangan wilayah dan belum optimalnya infrastruktur (infrastruktur layanan dasar, ekonomi, ketenagalistrikan, air dan Teknologi Informasi Komputer).
f. Belum kuatnya ketahanan pangan dan energi.
g. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.
h. Belum primanya pelayanan publik dan stabilitas keamanan.

Arahan Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 berdasarkan Isu Strategis dapat dilihat pada Tabel 1.14 berikut ini :

Tabel 1.14
Sasaran Pokok dan Arahan Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2022 – 2026 Berdasarkan Isu Strategis

ISU STRATEGIS 1: ***Belum optimalnya pengelolaan dan keberlanjutan ketersediaan SDA (pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan budidaya dan SDA tak dapat pulih)***	
Sasaran Pokok Pembangunan	**Arahan Pembangunan**
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi industri melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan tambang yang berkelanjutan	Meningkatkan nilai pengelolaan SDA yang berkelanjutan
ISU STRATEGIS 2: ***Belum mapannya struktur ekonomi yang menjamin pertumbuhan berkualitas dan pemerataan***	
Sasaran Pokok Pembangunan	**Arahan Pembangunan**
Berkembang dan semakin mantapnya ekonomi lokal dalam rangka transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor primer ke sektor ekonomi sekunder maupun tersier yang menyerap tenaga kerja	Meningkatkan pertumbuhan sektor primer dan industri pengolahan untuk penguatan kewirausahaan UMKM, dan koperasi yang berdayasaing
ISU STRATEGIS 3: ***Belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas***	

pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi, lingkungan hidup dan kawasan permukiman	
Sasaran Pokok Pembangunan	**Arahan Pembangunan**
Meningkatnya taraf hidup masyarakat dalam pendapatan, penurunan kemiskinan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan gizi serta sistem perlindungan sosial	Meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan
ISU STRATEGIS 4: ***Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia***	
Sasaran Pokok Pembangunan	**Arahan Pembangunan**
Meningkatnya daya saing SDM	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
ISU STRATEGIS 5: ***Belum optimalnya infrastruktur dan adanya kesenjangan antar wilayah***	
Sasaran Pokok Pembangunan	**Arahan Pembangunan**
Meningkatnya infrastruktur dan pemerataan pembangunan yang menurunkan tingkat kesenjangan antar-wilayah serta membuat wilayah semakin berkembang	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan
ISU STRATEGIS 6: ***Belum kuatnya ketahanan pangan dan energi***	
Meningkatnya akses dan ketersediaan pangan dan energi	Meningkatkan akses dan ketersediaan pangan dan energi
ISU STRATEGIS 7: ***Menurunnya kualitas lingkungan hidup***	
Sasaran Pokok Pembangunan	**Arahan Pembangunan**
Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup dengan menurunnya emisi gas rumah kaca dan bencana akibat kerusakan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
ISU STRATEGSI 8: ***Belum primanya pelayanan publik dan stabilitas keamanan***	
Sasaran Pokok Pembangunan	**Arahan Pembangunan**
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara bersih, bertanggungjawab, efisien, efektif, tertib dan aman	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketertiban keamanan melalui pemantapan reformasi birokrasi

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, serta memperhatikan cita-cita dan harapan masyarakat, visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005 - 2025, capaian kinerja pembangunan daerah serta hasil analisis permasalahan dan isu strategis daerah, maka visi Bupati dan

Wakil Bupati terpilih telah memiliki keselarasan hal tersebut. Sehingga visi pembangunan Kabupaten Malinau dalam RPJMD tahun 2021–2026 adalah:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL"

Visi tersebut memiliki substansi nilai-nilai (*values*) atau pokok-pokok visi yang menjadi dasar pijakan untuk menjabarkan misi pembangunan. Adapun nilai-nilai atau pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021 - 2026 disajikan pada Tabel 1.15 sebagai berikut:

Tabel 1.15
Nilai-nilai atau Pokok-pokok Visi dan Penjabarannya

Nilai-Nilai / Pokok-pokok Visi	Penjabaran
Kabupaten Malinau yang Mandiri	Bermakna: 1. Terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kesempatan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau. 2. Terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pada sektor pangan, Pendidikan, Kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha/berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya, dengan penekanan pada aspek

	Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.
Kabupaten Malinau yang Damai	Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana masyarakat berada pada situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan supremasi hukum.
Kabupaten Malinau yang Sejahtera	Suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malinau, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan sosial antar wilayah, serta meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
Pemerintahan yang Profesional	Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya sistem pemerintahan secara benar dan bersih (*good and clean governance*) efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayan publik yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun asas kesetaraan dalam pelayanan publik, yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan. Visi ini juga diharapkan dapat menegakan supremasi hukum (*Rule of*

	law) yang konsisten dan non diskriminatif dalam membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan baik secara langsung atau melalui Lembaga-lembaga perwakilan sah (termasuk masyarakat adat dan kelembagaannya) yang mewakili kepentingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Misi merupakan rumusan pernyataan mengenai apa yang akan dikerjakan/dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut serta berlandaskan pada makna visi Kabupaten Malinau, maka ditetapkan misi Kabupaten Malinau tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;

   Melalui upaya menciptakan sumber daya manusia sehat dan cerdas serta tenaga kerja terampil yang menguasai dan mampu menerapkan IPTEK, berkecukupan pangan, suasana kehidupan yang kondusif aman, tentram, harmonis dan bebas bencana, tidak terjadi diskriminasi, pemberdayaan perempuan dan anak, serta bebas konflik dengan karakter dan budaya masyarakat yang kuat.

2) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal;

   Melalui upaya pembangunan perekonomian domestik berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi, penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan usaha dengan membuka peluang

investasi dibidang pertanian dalam arti luas, industri, jasa perdagangan dan pariwisata, ekonomi kreatif, serta memperkuat koperasi dan UMKM.

3) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;

Membangun dan mengembangkan infrastruktur ekonomi, sistem transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, teknologi komunikasi dan informasi, serta menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas.

4) Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan;

Melalui implementasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, yakni pemerintahan daerah yang profesional, bertanggung jawab, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan pemerintahan dimana dalam menjalankan kebijakan, program dan sistemnya dapat diakses informasinya dengan mudah oleh masyarakat.

Visi merupakan tujuan/harapan/cita-cita yang diinginkan, sedangkan misi merupakan langkah atau penjabaran apa yang akan dikerjakan/dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karenanya visi dan misi memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari keterkaitan pokok-pokok visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2021 – 2026, sebagaimana diilustrasikan dalam bentuk Gambar 1.2 berikut:

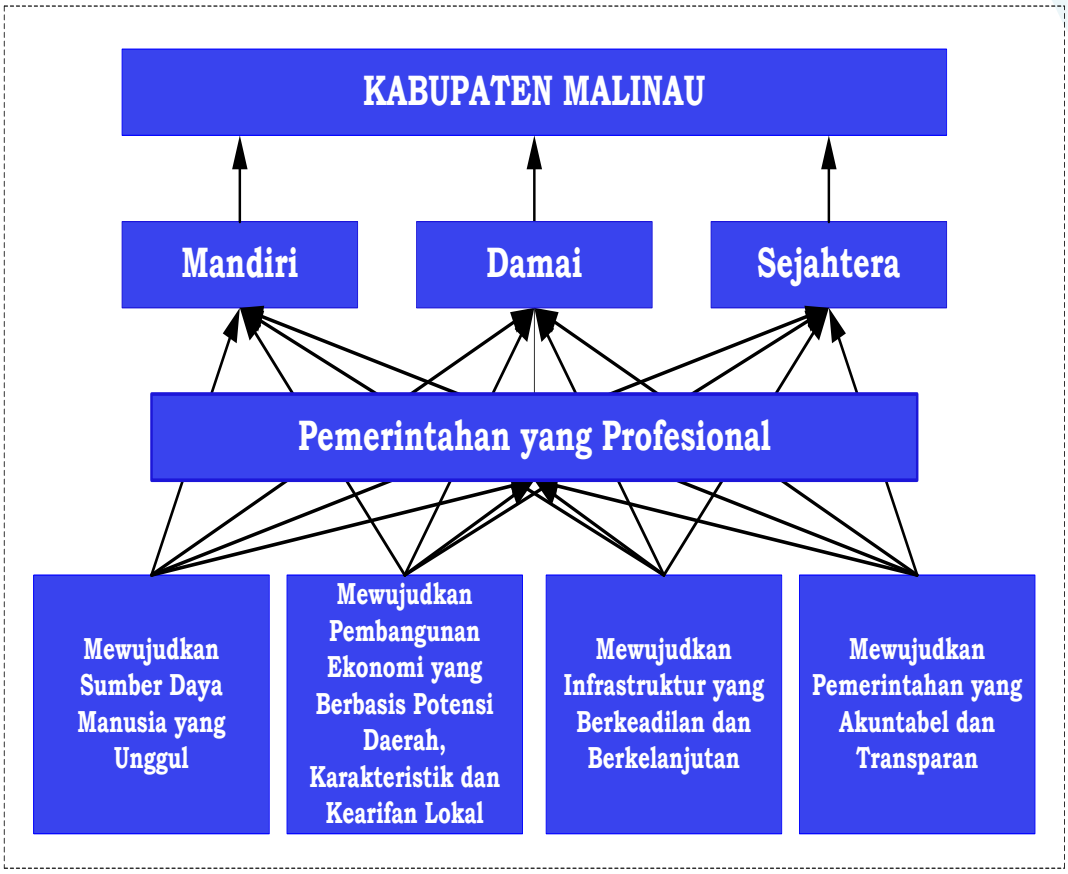

Gambar 1.2
Keterkaitan Pokok-pokok Visi dan Misi Pembangunan KabupatenMalinau Periode Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan keterkaitan antara kemandirian, kedamaian, kesejahteraan maupun keprofesionalan pegawai pemerintah di Kabupaten Malinau dengan SDM, ekonomi, infrastruktur dan pemerintahanan. Dimana kemandirian, kedamaian, kesejahteraan maupun keprofesionalan pegawai pemerintah di Kabupaten Malinau dipengaruhi secara simultan oleh berbagai faktor seperti keunggulan SDM, pembangunan ekonomi, pemerataan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Guna merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Malinau, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD berdasarkan misi pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2021 - 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 1.16 berikut:

Tabel 1.16
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026
Visi:Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul											
	Tujuan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,94	72,52	72,85	73,18	73,51	73,84	74,17	74,17
	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Persen	71,45	71,84	71,94	72,05	72,16	72,27	72,38	72,38
	Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	9,39	9,07	9,37	9,67	9,97	10,27	10,57	10,57
	Sasaran 3. Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,08	4,14	4,24-6,14	4,35-6,25	4,44-6,34	4,55-6,45	4,64-6,54	4,64-6,54
	Sasaran 4. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Poin	70,78	72,21	73,65	75,09	76,52	77,96	79,4	79,4
	Tujuan 2. Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Ketahanan Nasional	Poin	2,65	2,7	2,75	2,78	2,8	2,82	2,85	2,85

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Sasaran 1. Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Resiko Bencana	Poin	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4
	Sasaran 2. Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	81,36	82,36	83,36	84,36	85,36	86,36	87,36	87,36
	Sasaran 3. Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat	1. Indeks Kerukunan Beragama	Poin	78		79,25	80,6	81,7	82,8	83,3	83,3
		2. Indeks Pembangunan Kebudayaan/ Masyarakat	Poin	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	82,5
MISI 2: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, karakteristik dan Kearifan Lokal											
	Tujuan 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan Karakteristik Daerah	1. Pertumbuhan PDRB	Persen	-0,62	2,0-4,0	3,0-5,0	5,28	5,54	5,86	6,17	6,17
		2. Indeks Gini	Poin	0,289	0,287	0,285	0,283	0,282	0,28	0,278	0,278
		3. Angka Kemiskinan	Persen	6,63	7,30	6,5-6,75	6-6,5	5,5-6,5	5,5-6	5,5-6	5,5-6
		4. Laju Inflasi	Persen	1,32	0,39	0,36	0,33	0,3	0,27	0,24	0,24
	Sasaran 1. Meningkatnya produktifitas sektor sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	1. Kontribusi Pertanian Dalam Arti Luas (TNP, Holti, Ternak, Perikanan) Terhadap PDRB	Persen	3,79	4,8	4,82	4,9	4,92	4,95	5	5
		2. Nilai Tukar Petani	Poin	102,86	103,59	103,65	103,7	103,8	103,85	103,9	103,9
		3. Nilai Tukar Peternak	Poin	103,11	103,15	103,2	103,25	103,3	103,35	103,4	104,4
		4. Nilai Tukar Nelayan	Poin	102,74	102,8	102,91	102,95	102,99	1103,02	103,05	103,05
	Sasaran 2.	1. Kontribusi	Persen	2,56%	2,60%	2,70%	2,70%	2,80%	3,00%	3,00%	0,03

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB									
		2. Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	1.82%	1.82%	1.84%	1.84%	1.85%	1.85%	1.86%	1.86%
	Sasaran 3. Mantapnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	1. Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	65%	66%	70%	72%	74%	75%	80%	80%
		2. Pesentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil	Persen	52,50%	55,40%	70,60%	73,30%	76,60%	83,30%	100%	100%
	Sasaran 4. Meningkatnya Investasi daerah	Nilai Investasi Daerah	Rupiah	92.077.500.000	90.050.000.000	80.500.000.000	91.100.000.000	92.000.000.000	93.000.000.000	94.000.000.000	94.000.000.000
MISI 3: Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan											
	Tujuan 1. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	N/A	3,5-4,5	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,1
	Sasaran 1. Terbangun Dan Berkembangnya Infrastruktur Pemerataan Ekonomi Berwawasan Lingkungan	1. Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	49,70%	45,10%	50,0%	52,1%	54,8%	59,6%	64,4%	64,4%
		2. Persentase Daerah/Wilayah Banjir	Persen	1,24%	1,24%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
		3. Persentase Daerah Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	Persen	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
		4. Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	57%	62%	67%	72%	77%	82%	87%	87%

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
		5. Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	Persen	25,78	27,3	28,01	30,34	32,46	34,69	36,92	36,92
	Sasaran 2. Meningkatnya kualitas Perumahan dan Permukiman	1. Pesentase Pemukiman Yang Layak	Persen	73,03	76	77	79	80	81	81,97	81,97
		2. Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	4:05	4:05	7:09	7:09	7:09	7:09	7:09	7:09
	Sasaran 3. Berkembangnya Sistem Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Wilayah Yang Terlayani TIK	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sasaran 4. Berkembangnya Dukungan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	Persen	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18
	Tujuan 2. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Rasio	78,77	78,95	79,03	79,11	79,19	79,27	79,35	79,35
	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	Poin	100	100	100	100	100	100	100	100
		2. Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	Poin	50	53,55	53,65	53,75	53,85	53,95	54,05	54,05
		3. Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	Poin	94	91,15	91,25	91,36	91,47	91,58	91,68	91,68
MISI 4: Mewujudkan Pemerinta											
	Tujuan 1: Mewujudkan Penyelenggaraan	Indeks RB	Poin	CC	CC	CC	B	B	B	BB	BB

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
han Yang Akuntabel Dan Transpara n	Pemerintahan Daerah yang baik (good governance)										
	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1. Predikat SAKIP	Poin	CC	CC	CC	B	B	B	BB	BB
		2. Nilai LPPD	Poin	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	Sasaran 2. Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	Poin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Sasaran 3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	4	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
	Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	C	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
	Sasaran 5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Desa Mandiri (Desa)	Persen	8,26	11,93	13,76	15,59	17,74	19,22	21,05	21,05

Keselarasan visi dan misi RPJMN dan RPJMD merupakan cerminan kesamaan harapan/keinginan dan langkah-langkah atas apa yang ingin dicapai. Memperhatikan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMN dan yang dinyatakan dalam RPJMD Kabupaten Malinau, jelas diantara keduanya memiliki keselarasan. Keselarasan dalam visi tersebut terlihat pada cita-cita untuk Mandiri, Damai dan Sejahtera atau mandiri dan berdaulat. Sedangkan keselarasan dalam misi terlihat pada langkah-langkah yang sama untuk: (1) meningkatkan kualitas SDM; (2) meningkatkan perekonomian; (3) membangun infrastruktur; dan (4) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keselarasan visi dan misi tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.17 dan 1.18 :

Tabel 1.17
Visi RPJMD Kabupaten Malinau dan Visi dalam RPJMN

Visi RPJMD	Visi RPJMN
Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Tabel 1.18
Misi RPJMD Kabupaten Malinau dan Misi dalam RPJMN

Misi RPJMD	Misi RPJMN
1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul**	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 3. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
2. **Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karateristik dan Kearifan Lokal**	4. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. **Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan**	5. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 6. Mencapai Lingkungan Hidup yang

Misi RPJMD	Misi RPJMN
Berkelanjutan	Berkelanjutan
4. **Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**	7. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 8. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 9. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Tabel 1.19
Visi RPJMD Kabupaten Malinau dan Visi dalam RPJMD Kalimantan Utara

Visi RPJMD Kab. Malinau	Visi RPJMD Kaltara
Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional	Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara Yang Berubah, Maju Dan Sejahtera

Tabel 1.20
Misi RPJMD Kabupaten Malinau dan Misi dalam RPJMD Kalimantan Utara

Misi RPJMD Kab. Malinau	Misi RPJMD Kaltara
1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul**	(3) Mewujudkan pembangunan SumberDaya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktivitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan (7) Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara (9)Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Milenial dalam pembangunan
2. **Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karateristik dan Kearifan Lokal**	(4)Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (6)Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar

Misi RPJMD Kab. Malinau	Misi RPJMD Kaltara
	kabupaten/kota (10) Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM (12) Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota
3. **Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**	(11) Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional (13)Mewujudkan pembangunan yang berbasis-kan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun (5) Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktivitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan (14) Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan (8) Mewujudkan ketahanan energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah
4. **Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**	(1) Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (2) Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang ditopang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah;

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan serangkaian program sesuai dengan kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Program ini disajikan pada Tabel 1.21 berikut ini :

Tabel. 1.21

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF

KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Mandiri	**Misi 1 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL**															
1.1	Tujuan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	72,52	72,85		73,18		73,51		73,84		74,17		74,17		
1.1.1	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	71,84	71,94		72,05		72,16		72,27		72,38		72,38		
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Pereorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana,Alkes dan Ketersediaan Obat Esensial yang sesuai Standar	89,5%	89,5%	53.434.598.400	89,5 %	56.995.830.000	*94,7%*	60.465.830.000	95%	59.011.830.000	100%	60.174.830.000	100%	290.082.918.400	DINKES PPKB
		Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan	89,5%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

		Faskes yang Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)														
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Ketersediaan SDMK Sesuai Standar Di Faskes	81%	81%	16.530.200.000	81%	25.289.060.000	81%	25.120.060.000	81%	25.120.060.000	81%	26.220.060.000	81%	118.279.440.000	DINKES PPKB
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Keehatan, dan Makanan Minuman	Cakupan Kecamatan Dengan Pemberian Izin Operasi, Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%						198.000.000	100%	548.000.000	100%	198.000.000	100%	944.000.000	DINKES PPKB
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM	100%	100%	480.000.000	100%	2.255.860.000	100%	2.255.860.000	100%	2.255.860.000	100%	2.255.860.000	100%	9.503.440.000	DINKES PPKB
1.1.2	Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Angka)	9,07	9,37		9,67		9,97		10,27		10,57		10,57		**DINAS PENDIDIKAN**
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	100%	100%	91.906.099.601	100%	99.839.656.601	100%	104.926.137.601	100%	106.754.859.601	100%	109.297.967.601	100%	512.724.721.005	**DINAS PENDIDIKAN**

1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenga Kependidikan yang ditemparkan sesuai analisis kebutuhan per wilayah	100 %	100 %	29.200.000.000	100%	28.313.552.804	100%	28.010.581.750	100%	28.330.645.750	100%	28.317.301.750	100%	142.172.082.054	**DINAS PENDIDIKAN**
1.1.3	**Sasaran 3. Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja**	Persentase Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular	4,14	4,24-5,14		4,35-5,25		4,44-5,34		4,55-5,45		4,64-5,54		4,64-5,54		
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Presentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana Tenaga Kerja	100 %	100 %	100.000.000					100%	150.000.000			100%	250.000.000	**DINAS KETENAGA KERJAAN**
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	100 %	100%	1.130.000.000	100%	1.480.000.000	100%	1.565.000.000	100%	1.865.000.000	100%	2.085.000.000	100%	8.125.000.000	**DINAS KETENAGA KERJAAN**
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar dan ditempatkan	100 %	100%	584.952.000	100%	599.055.000	100%	800.000.000	100%	581.000.000	100%	455.000.000	100%	3.020.007.000	**DINAS KETENAGA KERJAAN**
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak (PP/PKB, Lks Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)		100%	950.000.000	100%	850.000.000	100%	975.000.000	100%	830.000.000	100%	675.000.000	100%	4.280.000.000	**DINAS KETENAGA KERJAAN**
1.1.4	**Sasaran 4.**	Indeks Ketahanan	72,21	73,65		75,09		76,52		77,96		79,4		79,4		

	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Pangan (IKP)														
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Dalam Kondisi Baik	0	1 Dokumen Perencanaan	50.000.000	1 Unit	207.922.632	0	-	0	-	0	-	1 Unit	257.922.632.000	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Kemandirian Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan masyarakat	4%	4%	895.000.000	6%	662.028.623	6%	843.731.749	8%	766.323.219	8%	687.707.116	8%	3.854.790.708	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	6%	7%	125.000.000	7%	126.950.000	7%	128.930.420	7%	130.941.735	8%	132.984.426	8%	644.806.580	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	57,50%	57,50%	50.000.000	57,50%	50.780.000	57,50%	51.572.168	57,50%	52.376.694	57,50%	53.193.770	57,50%	257.922.632	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
1.2	**Menciptakan Suasana Kondusif yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia**	Indeks Ketahanan Nasional	2,7	2,75		2,78		2,8		2,82		2,85		2,85		
1.2.1.1	**Sasaran 1. Terciptanya Kehidupan yang Aman, Tenteram dan Harmonis dan Serta Bebas Bencana**	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman	100	100		100		100		100		100		100		
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti		100%	739.872.550	100%	715.000.000	100%	764.000.000	100%	615.000.000	100%	805.000.000	100%	3.638.872.550	**SATPOL PP**

7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	29.610.000	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	29.610.000	100%	148.050.000	**KEC. MALINAU KOTA**
		Persentase Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	29.994.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	109.994.000	**KEC. MALINAU UTARA DAN PERWAKILAN MALTARA TIMUR**
		Proporsi Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian	100 %	100 %	29.994.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	29.994.000	**KEC. MENTARANG**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45 Kali	45 Kali	38.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	44.000.000	45 Kali	214.000.000	**KEC. MENTARANG HULU**
		Proporsi Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian	100 %	100 %	29.994.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	29.994.000	**KEC. MALINAU SELATAN HILIR**
		Persentase Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	15.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	215.000.000	**KEC. BAHAU HULU**
1.2.1.2		Indeks Resiko Bencana	124,4	124,4		124,4		124,4		124,4		124,4		124,4		
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Dalam Rangka Pencegahan Mitigasi dan Penyelamatan Serta Evakuasi Korban Bencana		100%	1.124.000.000	100%	1.141.534.400	100%	1.159.342.336	100%	1.177.428.077	100%	1.195.795.955	100%	5.796.100.768	**BPBD**
1.06.03	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana		100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	450.000.000	**DPPPAS**

1.05.04	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kecamatan yang mendapat Pendampingan Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran		100%	150.000.000	100%	55.097.600	100%	125.000.000	100%	921.311.600	100%	125.000.000	100%	1.376.409.200	**SATPOL PP**
1.2.2	**Sasaran 2. Meningkatnya Kesetaraan Gender**	Indeks Pembangunan Gender	82,36	83,36		84,36		85,36		86.36		87,36		87,36		
2.08.02	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pengarustamaan Gender	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	**DPPPAS**
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000	**DPPPAS**
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100%	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	1.150.000.000	**DPPPAS**
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Sistem Data Gender dan Anak	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	**DPPPAS**
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	290.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	810.000.000	**DPPPAS**
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perlindungan Khusus Anak	100%	100%	180.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.380.000.000	**DPPPAS**
1.2.3.1	**Sasaran 2. Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat**	1. Indeks Kerukunan Beragama (Poin)		79,25		80,6		81,7		82.8		83,3		83,3		
1.2.3.2		2. Indeks Pembangunan Kebudayaan/	77,5	78,5		79,5		80,5		81.5		82,5		82,5		

		Masyarakat (Poin)														
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Karakter Kebangsaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	225.000.000	**KESBANG POL**
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik untuk Parpol yang ada di Kabupaten Malinau	-	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	675.000.000	**KESBANG POL**
1.2.3.1	**Sasaran 2. Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat**	Indkes Kerukunan Beragama (Poin)		79,25		80,6		81,7		82.8		83,3		83,3		
Mandiri-Sejahtera	**MISI 2 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERBASIS PADA POTENSI DAERAH, KARAKTERISTIK DAN KEARIFAN LOKAL**															
2.1	**Tujuan 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah**	1. Pertumbuhan PDRB (%)	2,0-4,0	3,0-5,0		5,28		5,54		5,86		6,17		6,17		
		2.Indeks Gini (Poin)	0,287	0,285		0,283		0,282		0,28		0,278		0,278		
		3. Angka Kemiskinan	6,63	7,30		6,5-6,75		6-6,5		5,5-6,5		5,5-6		5,5-6		
		4. Laju Inflasi	0,39	0,36		0,33		0,3		0,27		0,24		0,24		
2.1.1 .1	**Sasaran 1. Meningkatnya Produktivitas**	1. Kontribusi Pertanian Dalam Arti luas	4,8	4,82		4,9		4,92		4,95		5		5		

	Sektor- Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Lokal	(Tnp. Holti, Ternak, Perikanan) Terhadap PDRB (%)														

2.1.1.2		2. Nilai Tukar Petani (Poin)	103,59	103,65		103,7		103,8		103,85		103,9		103,9		
2.1.1.3		3. Nilai Tukar Peternak (Poin)	103,15	103,2		103,25		103,3		103,35		103,4		104,4		
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	100%	1.233.708.800	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	4.633.708.800	DISPERTAN
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	100%	1.107.220.000	100%	5.025.000.000	100%	4.875.000.000	100%	4.925.000.000	100%	4.975.000.000	100%	20.907.220.000	DISPERTAN
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	100%	490.000.000	100%	750.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	3.790.000.000	DISPERTAN
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	-	-	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	1.000.000.000	DISPERTAN
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	100%	100%	49.396.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	449.396.000	DISPERTAN

3.27.07	**Program Penyuluh Lapangan**	**Persentase Penyuluh Lapangan**	100%	100%	2.097.075.200	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	2.997.075.200	DISPERTAN
2.1.1.4		**4. Nilai Tukar Nelayan (Poin)**	102,8	102,91		102,95		102,99		1103,02		103,05		103,05		
3.25.03	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	68 Ton	70 Ton	475.000.000	72 Ton	525.000.000	74 Ton	525.000.000	76 Ton	525.000.000	78 Ton	555.000.000	370 Ton	2.605.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	175 Ton	184 Ton	913.940.000	193 Ton	1.195.000.000	202 Ton	1.195.000.000	212 Ton	1.195.000.000	222 Ton	1.265.000.000	1013 Ton	5.763.940.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06	**Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Jumlah Sarana Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan**		8 Unit	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 Unit	100.000.000	DINAS PERIKANAN
2.1.2.1	**Sasaran 2. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah**	**1. Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB (%)**	2,60%	2,70%		2,70%		2,80%		3,00%		3,00%		0,03		
3.31.02	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	**Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha sektor industri**	100%	100%	3.180.864.003	100%	2.247.716.783	100%	2.272.668.003	100%	2.683.668.003	100%	1.165.168.003	100%	11.550.084.795	DISPERINDAG

3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Prosentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	80%	80%	340.000.000	80%	345.000.000	80%	345.000.000	80%	345.000.000	80%	360.000.000	100%	1.735.000.000	DISPERINDAG
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Peningkatan jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0%	0%	335.000.000	100%	899.951.220	100%	511.902.500	100%	505.000.000	100%	2.148.500.000	100%	4.400.353.720	DISPERINDAG
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Prosentase peningkatan jumlah konsumen yang dilindungi	100%	100%	90.000.000	100%	75.000.000	100%	77.500.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	407.500.000	DISPERINDAG
2.1.2.2		2. Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1.82%	1.84%		1.84%		1.85%		1.85%		1.86%		1.86%		
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	548.000.000	100%	630.000.000	100%	380.000.000	100%	1.080.000.000	100%	530.000.000	100%	3.168.000.000	DISBUDPAR
2.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata	100%	100%	430.000.000	100%	540.000.000	100%	385.000.000	100%	240.000.000	100%	285.000.000	100%	1.880.000.000	DISBUDPAR
2.1.3.1	Sasaran 3. Mantapnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	1. Persentase Koperasi Berkualitas	66%	70%		72%		74%		75%		80%		80%		
2.1.3.2		2. Pesentase Peningkatan Usaha	55,40%	70,60%		73,30%		76,60%		83,30%		100%		100%		

		Mikro Dan Kecil (%)														
3.26.04	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Persentase Peningkatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlinsungan Hak Kekayaan Intelektual**	**100%**		-	100%	220.000.000		-		-		-	100%	220.000.000	**DISBUDPAR**
3.26.05	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**100%**	100%	65.000.000	100%	210.000.000	100%	175.000.000	100%	240.000.000	100%	365.000.000	100%	1.055.000.000	DISBUDPAR
1.06.05	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial**	**100%**	100%	850.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.850.000.000	DPPPAS
2.13.05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan**	**100%**	100%	680.300.000	100%	680.250.000	100%	680.250.000	100%	680.250.000	100%	680.250.000	100%	3.401.300.000	DPMD
2.17.05	**Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian**	**Prosentase peningkatan jumlah Diklat Koperasi yang diadakan**	**100%**	100%	390.304.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	790.304.000	DISPERINDAG
2.17.07	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil**	**Prosentase UMKM yang Diberdayakan**	**5%**	5,0%	1.209.808.000	2,50%	891.000.000	4,70%	1.294.097.500	3,70%	895.000.000	3,10%	750.000.000	19%	5.039.905.500	DISPERINDAG

	Dan Usaha Mikro (UMKM)															
2.1.4.	**Sasaran 4. Meningkatnya Investasi Daerah**	**Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)**	90.050.000.000	80.500.000.000		91.100.000.000		92.000.000.000		93.000.000.000		94.000.000.000		9400000000		DPMPTSP
2.18.02	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha**	**100%**	100%	429.232.000	100%	435.928.019	100%	442.728.496	100%	449.635.061	100%	456.649.368	100%	2.214.172.944	**DPMPTSP**
2.18.03	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Peningkatan Jumlah Peminat Investasi**	**100%**	100%	293.756.000	100%	298.338.594	100%	302.992.677	100%	307.719.361	100%	312.519.783	100%	1.515.326.415	**DPMPTSP**
2.18.04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Perizinan**	**78,60%**	78,66%	334.200.000	78,70%	339.413.520	78,75%	344.708.371	78,8%	350.085.822	78,85%	355.547.160	78,90%	1.723.954.873	DPMPTSP
2.18.05	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA Dan PMDN**	**-0,02%**	0,01%	572.627.000	0,01%	194.227.406	0,01%	197.257.354	0,01%	200.334.569	0,01%	203.459.788	0.03%	1.367.906.117	**DPMPTSP**
2.18.06	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Informasi Yang Tersampaikan Kepada Masyarakat**	**100%**	100%	85.000.000	100%	86.326.000	100%	87.672.686	100%	89.040.379,50	100%	90.429.409	100%	438.468.474,52	**DPMPTSP**
Sejahtera	**MISI 3: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN**															
3.1	**Tujuan 1. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Dan**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Ikli)(Poin)**	3,5-4,5	3,7		3,8		3,9		4		4,1		4,1		

	Pelayanan Dasar															
3.1.1.1	**Sasaran 1. Terbangun Dan Berkembangnya Infrastruktur Pemerataan Ekonomi Berwawasan Lingkungan**	**1. Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap**	45,10%	50,0%		52,1%		54,8%		59,6%		64,4%		64,4%		
1.03.10	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%)**	**100,00%**	**0,53%**	44.509.081.100	0,54%	44.000.000.000	0,56%	45.317.823.024	0,58%	45.546.957.011	0,60%	45.733.699.534	0,60%	225.107.560.669	DPUPR PERKIM
3.1.1.2		**2. Persentase Daerah/Wilayah Banjir (%)**	1,24%	2%		2%		2%		2%		2%		2%		
1.03.06	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Persentase Pengurangan Luas Genangan Banjir Di Kawasan-Kawasan Pusat Layanan**		-	-	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.000.000.000	**DPUPR PERKIM**
3.1.1.3		**3. Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)**	60%	65%		70%		75%		80%		85%		85%		
2.15.02	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi**	**100%**	100%	1.070.000.000	100%	3.740.000.000	100%	3.740.000.000	100%	3.740.000.000	100%	3.740.000.000	100%	16.030.000.000	DISHUB
2.15.03	**Program Pengelolaan Pelayaran**	**Persentase sarana dan prasarana pengelolaan pelayaran**	**100%**	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	290.000.000	DISHUB

3.1.1.4		4. Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	62%	67%		72%		77%		82%		87%		87%		
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	100%	56,40%	9.697.625.400	65,80%	1.100.000.000	66%	800.000.000	66,20%	800.000.000	66,40%	800.000.000	66,80%	13.197.625.400	DPUPR PERKIM
3.1.1.5		5. Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	27,3	28,01		30,34		32,46		34,69		36,92		36,92		
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Ws Kewenangan Kab/Kota	100%	10,45%	4.925.000.000	10,67%	7.000.000.000	10,97%	7.210.000.000	11,28%	7.282.100.000	11,59%	7.311.956.610	11,59%	33.729.056.610	DPUPR PERKIM
3.1.2.1	Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Permukiman	1. Pesentase Pemukiman Yang Layak	76	77		79		80		81		81,97		81,97		
3.1.2.2		2. Rasio Rumah Layak Huni (Nilai Angka Rasio)	4:05	7:09		7:09		7:09		7:09		7:09		7:09		
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Di Tangani	100%	0,58%		0,88%	1.100.000.000	1,18%	1.050.000.000	1,48%	850.000.000	1,78%	950.000.000	1,78%	3.950.000.000	DPUPR PERKIM

1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Atau Warga Korban Bencana Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	0%	55,30%		55,80%	350.000.000	56,10%	350.000.000	56,50%	350.000.000	56,70%	350.000.000	56,70%	1.400.000.000	
3.1.3	Sasaran 3. Berkembangnya Sistem Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Wilayah Yang Terlayani Tik	100	100		100		100		100		100		100		
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebaran Informasi Publik	100%	100%	1.172.223.400	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	2.572.223.400	DISKOMINFO
3.1.4	Sasaran 4. Berkembangnya Dukungan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi (%)	78,18	78,18		78,18		78,18		78,18		78,18		78,18		
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika	100%	100%	4.783.312.600	100%	3.596.772.000	100%	3.496.772.000	100%	3.477.536.000	100%	3.367.536.000	100%	18.721.928.600	DISKOMINFO
3.2	Tujuan 4. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Iklh)	78,95	79,03		79,11		79,19		79,27		79,35		79,35		

3.2.1.1	**Sasaran 1. Meningkanya Kualitas Lahan, Air Dan Udara**	**1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)**	100	100		100		100		100		100		100		
3.2.1.2		**2. Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)**	53,55	53,65		53,75		53,85		53,95		54,05		54,05		
3.2.1.3		**3. Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)**	91,15	91,25		91,36		91,47		91,58		91,68		91,68		
2.11.03	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**78,77 Poin**	79,15 Poin	350.000.000	79,52 Poin	1.190.000.000	79,52 Poin	1.190.000.000	79,52 Poin	1.190.000.000	79,52 Poin	1.190.000.000	79,446 Poin	5.110.000.000	DLH
2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten/Kota**	**85%**	86%	9.170.000.000	87%	9.600.000.000	87%	9.600.000.000	87%	9.600.000.000	87%	9.600.000.000	87%	47.570.000.000	DLH
1.03.05	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik**	**100%**	21,20%	5.083.349.200	21,30%	2.100.000.000	21,50%	1.600.000.000	21,80%	1.100.000.000	22%	700.000.000	22,15%	10.583.349.200	DPUPR PERKIM
Mandiri - Profesional	**MISI 4: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN**															
4.1	**Tujuan 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**1. Indeks Rb**	Cc	B		B		B		B		BB		BB		

	Daerah Yang Baik (Good Governance)															
4.1.1.1	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1. Predikat Sakip	B	B		B		B		B		BB		BB		
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah	100%	100%	1.535.094.500	100%	1.432.184.500	100%	1.432.184.500	100%	1.432.184.500	100%	1.510.789.503	100%	7.342.437.503	BAPPEDA DAN LITBANG
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100%	100%	2.724.997.900	100%	1.304.999.205	100%	1.304.999.205	100%	1.304.999.205	100%	1.404.999.205	100%	8.044.994.720	BAPPEDA DAN LITBANG
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian yang diimplementasikan dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	1.250.000.000	100%	268.983.495	100%	268.983.495	100%	268.983.495	100%	261.773.489	100%	2.318.723.974	BAPPEDA DAN LITBANG
4.1.1.2		2. Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan	100%	100%	2.678.910.800	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	12.698.910.800	INSPEKTORAT
4.02.02	Program Dukungan	Persentase Unit Kerja Yang	100%	100%	15.021.484.7	100%	15.244.521.8	100%	15.244.521.80	100%	16.019.521.80	100%	16.327.579.40	100%	77.857.629.58	SEKRETARIAT DPRD

	Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	**Mendapat Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur**			80		00		0		0		0		0	KABUPATEN MALINAU
4.1.2	**Sasaran 2. Terselenggarany a Pemerintahan Yang Transparan**	**1. Opini BPK**	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	-	
5.02.03	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah**	**100%**	100%	1.400.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	6.200.000.000	BPKD
4.1.3	**Sasaran 3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah**	**Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah**	4%-6%	4%-6%		4%-6%		4%-6%		4%-6%		4%-6%		4%-6%		
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb**	**100%**	100%	2.500.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.750.000.000	100%	9.400.000.000	BPKD
4.1.4	**Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	B	B		Bb		Bb		Bb		Bb		Bb		
6.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Pendampingan Yang Diilaksanakan**	**100%**	100%	1.086.566.850	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	4.586.566.850	INSPEKTORAT
4.1.5	**Sasaran 5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan**	**Persentase Peningkatan Status Desa**	11,93%	13,76%		15,59%		17,74%		19,22%		21,05%		21,05%		

	Berbasis Desa	**Mandiri**														
2.13.02	**Program Penataan Desa**	**Presentase Pengentasan Desa Tertinggal**	**100%**	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	2.450.000.000	DPMD
2.13.03	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Presentase Desa Yang Melakukan Kerjasama Antara Desa**	**100%**	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.000.000.000	DPMD
2.13.04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Presentase Administrasi Pemerintahan Desa Yang Baik**	**100%**	100%	1.115.000.000	100%	1.515.000.000	100%	1.275.000.000	100%	1.625.000.000	100%	1.250.000.000	100%	6.780.000.000	DPMD

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
DINAS PENDIDIKAN											
1	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Keuangan perangkat Daerah		100%		
1	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	1228 orang	130.164.110.714	APBD II
1	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Sarana dan Prasarana Sekolah	Malinau	25 sekolah	100.000.000	APBD II
							Tersedianya Penunjang Administasi Pemerintah	Malinau	15 orang	881.000.000	APBD II
							Tersedianya Penunjang Administrasi DAK SD dan SMP	Malinau	9 orang	100.000.000	APBD II
							Tersedianya Penunjang Administrasi Aneka Tunjangan Guru SD, SMP & Pengawas	Malinau	12 orang	100.000.000	APBD II

							Tersedianya Penunjang Administrasi DAK PAUD	Malinau	9 orang	100.000.000	APBD II
							Tersedianya Penunjang Administrasi Bagian Sungram Dan keuangan OPRATOR Krisna, Sirup, Pencairan, E- Biling, E-monev, Verifikasi Berkas Pencairan dan bagian penyusunan arsip	Malinau	20 orang	200.000.000	APBD II
							Tersedianya Operasional Pengawas	Malinau	15 Kecamatan	300.000.000	APBD II
							Tersedianya Operasional UPTD	Malinau	15 Kecamatan	250.000.000	APBD II
1	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	Malinau	35dokumen	310.000.000	APBD II
1	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum perangkat Daerah		100%		APBD II
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya alat Tulis Kantor	Malinau	46 Jenis	150.000.000	APBD II
1	01	01	2	06	05		Terlaksananya Cetak dan Penggandaan	Malinau	6 Jenis	50.000.000	APBD II
						Penyrlengaraan rapat koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Malinau	50 Kali	150.000.000	APBD II
							Makan Minum Rapat		35 Kali	50.000.000	APBD II

1	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Malinau	100%		
1	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	5 Unit	50.000.000	APBD II
1	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Malinau	100%		
1	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Tersedianya Dana Pajak Kendaraan dan Oprasional dinas Pendidikan	Malinau	2 orang	65.000.000	APBD II
1	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Malinau	15 unit	30.000.000	APBD II
1	01	01	2	09	09	Pemeliharaan Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Keg. Pemeliharaan Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Malinau	2 unit	45.000.000	APBD II
							Tersedianya Alat Kebersihan Kantor		45 Peralatan Kebersiha n	30.000.000	APBD II
							Tersedianya Cleaning Servis		7 orang	210.000.000	APBD II
1	01	01	2	08	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana pembayaran air		12 Bulan	15.000.000	APBD II
							Tersedianya dana pembayaran Listrik		12 Bulan	15.000.000	APBD II

							Tersedianya dana Wi-Fi		12 Bulan	30.000.000	APBD II
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anggaran program pengelolaan pendidikan	Malinau	100%		APBD II
1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Malinau	100%		APBD II
						Pengadaan Perlengkapan Siswa Sekolah Dasar	Seragam Merah putih Sepasang		10.157 Siswa SD	2.031.400.000	APBD II
							Pakaian Olahraga sepasang		10.157 Siswa SD	2.397.052.000	APBD II
							Sepatu sekolah		10.157 Siswa SD	2.843.960.000	APBD II
							Tas sekolah		10.157 Siswa SD	2.031.400.000	APBD II
							topi Sekolah		10.157 Siswa SD	304.710.000	APBD II
							Dasi sekolah		10.157 Siswa SD	253.925.000	APBD II
							Kaos Kaki Putih Panjang		10.157 Siswa SD	609.420.000	APBD II
							Lambang Kabupaten		10.157 Siswa SD	457.065.000	APBD II

							Buku Tulis Sekolah		10.157 Siswa SD	1.218.840.000	APBD II
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Asesmen Nasional Berbasis Komputer tingkat Sekolah Dasar	Malinau	108 sekolah	500.000.000	APBD II
							Terlaksananya Evaluasi Belajar Tahap Akhir (UAS) SD/MI	Malinau	108 sekolah	200.000.000	APBD II
						Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya Keg Akreditasi Sekolah Dasar	Malinau	44 sekolah	200.000.000	APBD II
							Pelatihan /Bimtek Akreditasi Pendidikan Sekolah Dasar	Malinau	40 sekolah	150.000.000	APBD II
						Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Terlaksananya Keg Penerimaan Peserta Didik Baru SD/MI (PPDB) berdasarkan Zonasi	Malinau	108sekolah	150.000.000	APBD II
							Penunjang Administrasi PIP SD	Malinau	108 sekolah	150.000.000	APBD II
							Terlaksananya E- Raport SD	Malinau	108 sekolah	350.000.000	APBD II
						Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	Tersedianya Penunjang Administrasi BOS/BOSDA SD	Malinau	53 sekolah	120.000.000	APBD II
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tersedianya Dana BOS (Pusat) SD negeri dan swasta	Malinau	108 sekolah	11.400.300.000	BOSNAS
							Tersedianya Dana BOSDA SD Negeri	Malinau	104 sekolah	5.777.400.000	APBD II

						Pembangunan Sarana Prasarana Unitilitas Sekolah dasar	Terlaksananya kegiatan DAK	Malinau	1 Kegiatan	10.444.191.000	DAK FISIK
							Terlaksananya kegiatan DAK Non Fisik	Malinau	1 Kegiatan	23.478.461.000	DAK Non Fisik
1	01	02	2	02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		100%		APBD II
						Pengadaan Perlengkapan Siswa Sekolah Menengah Pertama	Seragam Putih Biru Sepasang	Malinau	4.391 Siswa SMP	1.097.750.000	APBD II
							Pakaian Olahraga sepasang	Malinau	4.391 Siswa SMP	1.150.442.000	APBD II
							Sepatu sekolah	Malinau	4.391 Siswa SMP	1.317.300.000	APBD II
							Tas sekolah	Malinau	4.391 Siswa SMP	1.097.750.000	APBD II
							Dasi sekolah	Malinau	4.391 Siswa SMP	131.730.000	APBD II
							Kaos Kaki Putih Panjang	Malinau	4.391 Siswa SMP	263.460.000	APBD II
							Lambang Kabupaten	Malinau	4.391 Siswa SMP	197.595.000	APBD II
							Buku Tulis Sekolah	Malinau	4.391 Siswa SMP	843.072.000	APBD II

						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Dana BOS (Pusat) SMP negeri dan swasta	Malinau	38 Sekolah	6.220.800.000	DAK Non Fisik
							Tersedianya Dana BOS (BOSDA) SMP negeri	Malinau	35 Sekolah	3.372.000.000	APBD II
						Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menegah Pertama	Tersedianya Penunjang Dan BOS/BOSDA	Malinau	8 Orang	100.000.000	APBD II
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Sekolah Menengah Pertama					APBD II
						Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Terlaksananya Ujian Sekolah	Malinau	38 Sekolah	100.000.000	APBD II
							Terlaksananya Keg Akreditasi Sekolah Menengah Pertama	Malinau	35 Sekolah	300.000.000	APBD II
							Pelatihan Bimtek Akreditasi Pendidikan Sekolah Menengah	Malinau	38 Sekolah	290.000.000	APBD II
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	-Terlaksananya Keg. Asesmen Pendidikan Nasional	Malinau	35 Sekolah	300.000.000	APBD II
							Terlaksananya Evaluasi Belajar tahap Akhir (UAS) SMP/MTs	Malinau	38 Sekolah	150.000.000	APBD II
						Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Terlaksananya Keg Penerimaan Peserta Didik Baru SMP/MTs (PPDB) berdasarkan Zonasi	Malinau	38 Sekolah	100.000.000	APBD II

							Penunjang Administrasi PIP SMP	Malinau	38 Sekolah	100.000.000	APBD II
							Terlaksananya E- Raport SMP	Malinau	38 Sekolah	150.000.000	APBD II
							Terlaksananya Ijin Operasional Sekolah SMP	Malinau	38 Sekolah	152.290.601	APBD II
							-Terlaksananya Keg Peningkatan Mutu Pendidikan	Malinau	38 Sekolah		APBD II
							Terlaksananya Mutasi Siswa SMP	Malinau	38 Sekolah	60.000.000	APBD II
1	01	02	2	03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	Malinau	100%		
						Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Seragam Paud TK Sepasang	Malinau	3.354 Siswa TK/Paud	493.038.000	APBD II
							Pakaian Olahraga sepasang	Malinau	3.354 Siswa TK/Paud	704.340.000	APBD II
							Sepatu sekolah	Malinau	3.354 Siswa TK/Paud	670.800.000	APBD II
							Tas sekolah	Malinau	3.354 Siswa TK/Paud	503.100.000	APBD II

							topi Sekolah	Malinau	3.354 Siswa TK/Paud	83.850.000	APBD II
							Dasi sekolah	Malinau	3.354 Siswa TK/Paud	83.850.000	APBD II
							Kaos Kaki Putih Pendak	Malinau	3.354 Siswa TK/Paud	167.700.000	APBD II
							Lambang Kabupaten	Malinau	3.354 Siswa TK/Paud	100.620.000	APBD II
							Buku Tulis Sekolah	Malinau	3.354 Siswa TK/Paud	241.488.000	APBD II
							- Terlaksanaya Keg. Pemetaan zonasi lembaga PAUD di Kab. Malinau	Malinau	15 Kecamatan	100.000.000	APBD II
							- Terlaksananya Keg. Sosialisasi Perbup SPM PAUD 1 Tahun Pra SD	Malinau	15 Kecamatan	100.000.000	APBD II
							- Terlaksananya Keg. Bimtek Akreditasi	Malinau	40 Lembaga	100.000.000	APBD II
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	- Terlaksananya Keg.Pelatihan Kurikulum PAUD	Malinau	40 Lembaga	100.000.000	APBD II
							- dipahaminya mekanisme pengelolaan dan manajemen PAUD	Malinau	43 Lembaga	100.000.000	APBD II

						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Meningkatnya layanan PAUD Holistik Integratif	Malinau	45 Lembaga	100.000.000	APBD II
							Meningkatnya Jumlah lembaga PAUD non Formal	Malinau	4Lembaga	100.000.000	APBD II
							Meningkatnya Jumlah lembaga PAUD Formal (TKN)	Malinau	2 TK Negeri	100.000.000	APBD II
							Meningkatnya pemahaman tentang kurikulum PAUD	Malinau	40 Lembaga	100.000.000	APBD II
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	- Terlaksananya Keg.Pembinaan Gugus PAUD	Malinau	20 Gugus	100.000.000	APBD II
							-Terlaksananya Seleksi penerimaan tenaga pendidik PAUD	Malinau	40 orang	100.000.000	APBD II
							- Terlaksananya Keg. Diklat Dasar PAUD	Malinau	30 Pendidik	100.000.000	APBD II
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	-Tersedianya Penunjang Dana BOSDA PAUD	Malinau	128 Lembaga	100.000.000	APBD II
							-Tersedianya Penunjang Dana BOP PAUD	Malinau	128 Lembaga	100.000.000	APBD II
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya Dana BOSDA PAUD	Malinau	128 TK PAUD	2.500.000.000	APBD II

1	01	02	2	04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Malinau	100%		APBD II
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Penerima Bosda Kesetaraan	Malinau	750 Peserta Didik	400.000.000	APBD II
							Tersedianya Penunjang Bosda Kesetaraan	Malinau	6 Orang	75.000.000	APBD II
						Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Penerima Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Malinau	2 Lembaga	150.000.000	APBD II
						Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS)	Malinau	1000 Anak	100.000.000	APBD II
							Terlaksananya Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kesetaraan	Malinau	4 Lembaga	45.000.000	APBD II
							Jumlah Peserta Sosialisasi dan Publikasi Pendidikan Nonformal	Malinau	40 Orang	100.000.000	APBD II
						Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Nonformal	Malinau	1 Dokumen	75.000.000	APBD II
							Jumlah Peserta Didik Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK)	Malinau	750 Peserta Didik	150.000.000	APBD II
							Terlaksananya Kegiatan Asismen Pendidikan Kesetaraan	Malinau	750 Peserta Didik	150.000.000	APBD II

							Terlaksananya Kegiatan E-Raport Kesetaran	Malinau	4 'Lembaga	100.000.000	APBD II
							Tersedianya Data Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Malinau	4 'Lembaga	75.000.000	APBD II
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan PNF	Malinau	1Dokume n	100.000.000	APBD II
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan	Malinau	4 Orang	150.000.000	APBD II
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Bimtek Pembelajaran Daring Pendidikan Kesetaraan	Malinau	30 Orang	150.000.000	APBD II
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data DAPODIK Nonformal	Malinau	4 Lembaga	75.000.000	APBD II
							Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi DAPODIK	Malinau	12 Peserta	75.000.000	APBD II
							Jumlah Dokumen SPM	Malinau	1 Dokumen	75.000.000	APBD II
							Jumlah Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan	Malinau	2 Lembaga	50.000.000	APBD II
							Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Pendidikan Non Formal	Malinau	35 Pesera	100.000.000	APBD II

						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Penunjang Administrasi Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Malinau	8 Orang	100.000.000	APBD II
							Tersedianya Biaya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	Malinau	6 Orang	50.000.000	APBD II
							Tersedianya Penunjang Administrasi DAK Pendidikan Nonformal	Malinau	6 Orang	50.000.000	APBD II
1	01	02				Program Pengembangan Kurikulum		Malinau			
						Penyusunan Kopetensi dasar Muatan Lokal Pendidikan dasar	Terlaksananya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan dasar	Malinau	44 sekolah	350.000.000	APBD II
						Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Malinau	44 sekolah	350.000.000	APBD II
1	01	04				Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Malinau	100%		APBD II
1	01	04	2	01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan pendidikan Dasar, PAUD, dan pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan pendidikan Dasar, PAUD, dan pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Malinau	100%		APBD II
1	01	04	2	01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya keg. Pemberian Beasiswa Tenaga Pendidik SD ke S1	Malinau	100 Orang	500.000.000	APBD II

							Terlaksananya keg. Pemberian Beasiswa Tenaga Pendidik PAUD ke S1	Malinau	100 Orang	500.000.000	APBD II
							Terlaksananya Keg. Pemberian Beasiwa Desa Sarjana	Malinau	109 Orang	5.000.000.000	APBD II
1	01	04	2	01	02		Terlaksananya Keg. Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Malinau	30 Orang	400.000.000	APBD II
							Terlaksananya keg. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Malinau	18 Guru	350.000.000	APBD II
							Terlaksananya keg. Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Malinau	11 Mapel	300.000.000	APBD II
							Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah TK, SD dan SMP	Malinau	152 Orang	250.000.000	APBD II
							terlaksananya keg. Sosialisasi dan Penandatangan MOU Guru Penggerak TK, SD dan SMP	Malinau	150 Orang	150.000.000	APBD II
							Pemutahiran Data Tendik TK, SD dan SMP	Malinau	152Sekolah	200.000.000	APBD II
							Dana Pendampingan Inovasi	Malinau	8 Gugus	300.000.000	APBD II
							Terlaksananya Keg. Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru	Malinau	100 Guru	200.000.000	APBD II

							Terlaksananya Pembinaan KKG gugus PAUD	Malinau	15 Gugus	300.000.000	APBD II
							Terlaksananya lomba KKG PAUD	Malinau	15 Gugus	200.000.000	APBD II
							Terlaksananya Apresiasi GTK PAUD berprestasi dan berdedikasi	Malinau	22 Guru	200.000.000	APBD II
							Terlaksananya Diklat Dasar GTK PAUD	Malinau	40 Guru	200.000.000	APBD II
							Terlaksananya Pengelolaan DAPODIK SD/SMP	Malinau	152 Sekolah	400.000.000	APBD II
						Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Keg. Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Malinau	350 Orang	200.000.000	APBD II
							Terlaksananya Keg. Pemanfaatan media pembelajaran PTM dan PJJ	Malinau	100 Orang	350.000.000	APBD II
							Terlaksananya Rekrutmen Kepala Sekolah SD dan SMP	Malinau	20 Orang	200.000.000	APBD II
							Terlaksananya Keg. Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berPrestasi dan Berdedikasi TK/SD/SMP	Malinau	100 Orang	250.000.000	APBD II
							Tersedianya Insentif (APBD)	Malinau	450 Orang	3.200.000.000	APBD II

							Tersedianya Honor guru Kontrak	Malinau	390 Orang	15.100.000.000	APBD II
							Terlaksananya Keg. Pengelolaan Data SIM PKB (TK,SD dan SMP), SIMTUN PAUD dan SIMTUN SD dan SMP	Malinau	146 Sekolah	300.000.000	APBD II
							Diklat Calon Pengawas Sekolah	Malinau	10 Orang	150.000.000	APBD II
						KESEHATAN					
						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase unit kerja dengan pelayanan administrasi	Malinau	100%		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN mendapat Gaji dan Tunjangan tepat waktu	Malinau	100%		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN mendapat Gaji dan Tunjangan Tepat waktu	Malinau	7980 org	26.704.086.668	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Malinau	100%		
	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah kebutuhan bahan logistik kantor	Malinau	5 paket	198.654.815	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Malinau	10 jenis	80.000.000	
	Rapat koordinasi dan konsultasi	jumlah Rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti	Malinau	6 kali	120.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Malinau	100%		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Malinau	3 jenis	180.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang mendapat pemeliharaan	Malinau	100%		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas	Malinau	2 unit	71.360.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap	jumlah jenis aset tetap yang dipelihara	Malinau	2 jenis	25.000.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Malinau			

	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Malinau	3 jenis	38.147.068.614	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 KH	Malinau	200		
		Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 KH	Malinau	13		
		Persentase Balita Gizi Kurang	Malinau	< 15%		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Malinau	100%		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah faskes dengan ketersedian alkes	Malinau	20 fakes	15.246.165.500	DAK Penguatan sistem kesehatan, Penurunan AKI AKB, KB
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan pengadaan prasarana dan pendukung faskes	Malinau	9 puskesm a s	6.105.000.000	DAK Penguatan sistem kesehatan
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah faskes dengan ketersediaan obat dan vakin	Malinau	20 fakes	1.733.200.000	DAK Kefarmasia n, BOK Distribusi Obat

	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah faskes dengan ketersediaan BHP	Malinau	20 fakes	1.424.369.000	DAK Kefarmasia n, DAK P2P
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Balai penyuluh KB yang dibangun	Malinau	2 unit	800.000.000	DAK KB
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Malinau	100%		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil di Dinkes	Malinau	5 kegiatan	800.000.000	BOK Kabupaten
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Puskesmas dengan kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil	Malinau	17 puskesm a s	1.700.000.000	BOK Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Puskesmas dengan kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Malinau	17puskes ma s	1.700.000.000	BOKPuskesmas
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Puskesmas dengan kegiatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Malinau	5 kegiatan	448.152.800	BOK Kabupaten
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Puskesmas dengan kegiatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Malinau	17 puskesm a s	312.038.200	BOK Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid 19 Dinkes	Malinau	5 kegiatan	312.038.200	BOK Kabupaten
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	Jumlah Puskesmas dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid 19	Malinau	17 puskesm a s	2.533.722.000	BOK Puskesmas

	Berpotensi Bencana					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan lansia	Malinau	17 puskesm a s	850.000.000	BOK Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa dengan kegiatan STBM	Malinau	44 desa	330.000.000	BOK Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan kegiatan promosi kesehatan	Malinau	17 puskesm a s	1.300.000.000	BOK Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah desa dengan penanganan dan pencegahan stunting	Malinau	15 desa	296.255.000	BOK Stunting
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan re akreditasi	Malinau	5 puskesm a s	644.820.000	Akreditasi Pkm
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Malinau	3 kegiatan	136.735.000	Jampersal
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah kebutuhan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat tersedia	Malinau	4 paket	13.084.402.700	
	Pengeloaan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kebutuhan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Malinau	12 bulan	120.000.000	
	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Kota	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Malinau Kota	Malinau	10 jenis	108.000.000	

	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Seberang	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Malinau Seberang	Malinau	11 jenis	108.000.000		
	Penyediaan Operasional Puskesmas Tanjung Lapang	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Tanjung Lapang	Malinau	15 jenis	108.000.000		
	Penyediaan Operasional Puskesmas Pulau Sapi	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Pulau Sapi	Malinau	10 jenis	108.000.000		
	Penyediaan Operasional Puskesmas Setulang	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Setulang	Malinau	10 jenis	85.050.000		
	Penyediaan Operasional Puskesmas Sehati	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Sehati	Malinau	11 jenis	85.050.000		
	Penyediaan Operasional Puskesmas Loreh	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Loreh	Malinau	6 jenis	85.050.000		
	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Alango	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Long Alango	Malinau	10 jenis	85.050.000		
	Penyediaan Operasional Puskesmas Pujungan	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Pujungan	Malinau	10 jenis	85.050.000		
	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Ampung	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Long Ampung	Malinau	15 jenis	85.050.000		
	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Nawang	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Long Nawang	Malinau	12 jenis	85.050.000		

	Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Boh	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Sungai Boh	Malinau	9 jenis	85.050.000		
	Penyediaan Operasional Puskesmas Data Dian	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Data Dian	Malinau	7 jenis	85.050.000		
	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Sule	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Long Sule	Malinau	11 jenis	85.050.000		
	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Berang	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Long Berang	Malinau	15 jenis	85.050.000		
	Penyediaan Operasional Puskesmas Sesua	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Sesua	Malinau	13 jenis	85.050.000		
	Penyediaan Operasional Puskesmas Metut	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Metut	Malinau	10 jenis	85.050.000		
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Long Pada	Malinau	7 paket	85.050.000		
	Penyediaan Operasional RSB Langap	Jumlah kebutuhan Operasional RSB Langap	Malinau	23 paket	800.000.000		
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kebutuhan opersional RSP Long Ampung	Malinau	50 jenis	1.000.000.000		
	Penyediaan Operasional Gudang Farmasi	Jumlah kebutuhan Operasional Gudang Farmasi	Malinau	23 paket	135.000.000		

	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Malinau	5 : 1.000		
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang memiliki Tenaga Kesehatan sesuai ketentuan	Malinau			
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah tenaga PTT Daerah dan tenaga kontrak khusus yang diberikan insentif	Malinau	500 org	15.000.000.000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas dengan Penyediaan tenaga kontrak kesehatan bersumber DAK NF	Malinau	17 puskesm a s	1.480.200.000	BOK Puskesmas
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah faskes yang dilakukan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan	Malinau	19 fakes	50.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Malinau			
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Malinau			
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Puskesmas yang mengadakan kegiatan GERMAS	Malinau	17 puskesm a s	480.000.000	BOK Puskesmas
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA		Malinau			
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan		Malinau			

	Budaya Lokal					
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	Jumlah balai penyuluh yang mendapatkan biaya operasional	Malinau	2 balai	81.000.000	BOKB
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah kegiatan penyediaan dan distribusi KIE KKBPK	Malinau	3 kegiatan	71.521.600	BOKB
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Malinau			
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	jumlah kecamatan dengan kampung KB yang diberikan biaya operasional	Malinau	15 kecamat a n	327.750.000	BOKB
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Malinau			
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	jumlah kecamatan dengan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	Malinau	15 kecamat a n	60.109.700	BOKB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Malinau			
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Malinau			

						Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kecamatan yang dibina program Peningkatan KS	Malinau	15 kecamat a n	1.462.830.000	BOKB
						PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman					
X	XX	01	0	00	0 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Malinau	7 Bidang Urusan		
X	XX	01	2	02	0 0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan	Malinau	1,00		
X	XX	01	2	02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan	Malinau	88 orang		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan	Malinau	88 orang	9.904.424.392	APBD
X	XX	01	2	08	0 0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase NON ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan	Malinau	1,00	-	
X	XX	01	2	08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non ASN yang diberikan Gaji	Malinau	172 Orang		
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Non ASN yang diberikan Gaji	Malinau	31 Orang	1.700.000.000	

						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Non ASN yang diberikan Gaji	Malinau	5 Orang	150.000.000	
						Pembayaran Gaji Petugas Pertamanan		Malinau	88 Orang	3.295.357.600	
						Pembayaran Gaji Petugas Pemakaman		Malinau	48 Orang	1.761.249.600	
X	XX	01	2	06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat daerah	Malinau	62,00		
X	XX	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item ATK yang disediakan	Malinau	89 Item		
						Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item ATK yang disediakan	Malinau	82 Item	400.000.000	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Malinau	7 Item	300.000.000	
						Penyediaan Pakaian Lapangan UPTD/Taman&Pemekaman	Jumlah Pakaian yang dis ediakan	Malinau	400 item	280.000.000	
X	XX	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Malinau	100.000 Lbr		
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Malinau	100.000 Lbr	200.000.000	
X	XX	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik yang tersedia	Malinau	5 Item		

						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik yang tersedia	Malinau	5 Item	80.000.000	
X	XX	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	Malinau	1.000 Kotak		
						Penyediaan Bahan Kebersihan Kntor	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	Malinau	3 Jenis	30.000.000	
						Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Malinau	1.500 Kotak	250.000.000	
X	XX	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	Malinau	2727Liter		
						Pengadaan BBM Kendaraan Dinas Sekretariat	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	Malinau	2.727,27	100.000.000	
X	XX	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Malinau	56 Kali		
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Malinau	44 Kali	800.000.000	
						Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Malinau	12 Kali	550.000.000	
X	XX	01	2	09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Malinau	50,00	-	
X	XX	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang di dilakukan Pemeliharaan	Malinau	1 Buah		
						Pajak Kendaraan, Jasa Servis	Jumlah mobil dinas yang di dilakukan Pemeliharaan	Malinau	1 Buah	100.000.000	

X	XX	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang terpelihara	Malinau	1 Unit		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang dipelihara/direhab	Malinau	1 Unit	300.000.000	
X	XX	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat yang diperlihara	Malinau	20 unit		
						Servis Peralatan Elektronik dan Mesin		Malinau	20 unit	160.000.000	
X	XX	01	2	05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Malinau	30,00	-	
X	XX	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	Malinau	15 Orang		
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	Malinau	15 Orang	220.000.000	
						Diklat Teknis Bidang Pertanahan (bidang Pertanahan)	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Malinau	7 Orang	200.000.000	
X	XX	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan sosialisasi	Malinau	6 Kec		
						Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan (bidang Pertanahan)	Jumlah Kecamatan yang dilakukan sosialisasi	Malinau	6 Kecamat a n	150.000.000	
X	XX	01	2	07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Malinau	35,00	-	

X	XX	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat yang diperlukan	Malinau	13 Alat		
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Malinau	2 Alat	300.000.000	
						Pengadaan alat ukur. (bidang Pertanahan)		Malinau	1 Unit	200.000.000	
						Pengadaan komputer dekstop. (bidang Pertanahan)		Malinau	4 Unit	50.000.000	
						Pengadaan drone pemetaan (bidang Pertanahan)		Malinau	1 Unit	50.000.000	
						Pengadaan Printer (bidang Pertanahan)		Malinau	2 Unit	20.000.000	
X	XX	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang disediakan	Malinau	2 Unit		
						Pengadaan Kendaraan Roda Dua (bidang Pertanahan)	Jumlah Kendaaraan yang DiSediakan	Malinau	2 Unit	80.000.000	
X	XX	01	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumah luas Lahan yang Disediakan	Malinau	6,9 Ha		
						Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum (bidang Pertanahan)	Jumah luas Lahan yang Disediakan	Malinau	3 Ha	3.000.000.000	
X	XX	01	2	03	00	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Malinau	195Bidang	-	

X	XX	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Malinau	140 Bidang		
						Pembuatan Patok Batas Tanah PEMDA	Jumlah Bidang Yang diamankan	Malinau	15 Bidang	600.000.000	
						Sertifikatas Aset PEMDA	Jumlah Bidang Yang diamankan	Malinau	100 Patok	300.000.000	
						Pembuatan Plang NAMA Aset PEMDA	Jumlah Bidang Yang diamankan	Malinau	20 Bidang	300.000.000	
						Pemasangan Kawat Berduri Tanah Aset Pemda	Jumlah Bidang Yang diamankan	Malinau	15 Bidang	300.000.000	
X	XX	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Malinau	60 Bidang		
						Inventarisasi dan monitoring aset Tanah Pemerintah Daerah (bidang Pertanahan)	Jumlah Bidang Yang di iventarisasi	Malinau	60 Bidang	150.000.000	
1	03	10	0	00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Malinau	0,53		
1	03	10	2	01	00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Malinau	0,53		
1	03	10	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Malinau	2 Dokumen		
						Perencanaan Jembatan Gantung Desa Setarap		Malinau	1 Dokumen	150.000.000	

						Perencanaan Jembatan Gantung Desa Long Pada		Malinau	1Dokume n	150.000.000	
1	03	10	2	01	0 8	Rekonstruksi Jalan		Malinau			
						Peningkatan jalan Desa Semengaris		Malinau	1,50	2.000.000.000	
						peningkatan jalan Dalam Desa Mentarang Baru		Malinau	1,50	2.000.000.000	
						Peningkatan Jalan dalam Desa Paking - harapan Maju		Malinau	2,10	4.000.000.000	
						Peningkatan jalan menuju SMA 4 Mentarang		Malinau	1,60	3.500.000.000	
						Peningkatan Jalan Menuju Pelabuhan Kelapis No.168		Malinau	2,30	10.000.000.00 0	DAK
						Peningkatan Jalan Jembatan Singai Terang Menuju Desa Mentarang Baru No.243		Malinau	2,00	4.537.505.000	DAK
						Peningkatan Jalan Long Loreh-Langap- Tg.Nanga-Sp.Temalang No.148		Malinau	2,50	5.000.000.000	DAK
						Peningkatan Jalan Samping Pengadilan- Malinau Hilir No.049		Malinau	2,50	5.000.000.000	DAK
						Peningkatan Jalan Samping Stadion- Belakang Kantor DPRD No.030		Malinau	1,61	5.700.000.000	DAK

1	03	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	Malinau	1 Km		
						Pemeliharaan Jalan Kabupaten Malinau		Malinau	1,00	1.000.000.000	
1	03	10	2	01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang di pelihara	Malinau	60 m		
						Rehabilitasi Jembatan Gantung Sempayang ke RT 03 Sesua		Malinau	60 M	718.852.725	
1	03	10	2	01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jagka Waktu Kesiap Siagaan Jalan dan Jembatan Yang di tanggap darurat	Malinau	12 bulan		
						Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan		Malinau	12 bulan	1.000.000.000	
1	03	03	0	00	00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Terwujudnya infrastruktur penyediaan air minum yang optimal	Malinau		-	
1	03	03	2	01	00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Malinau		-	
1	03	03	2	01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan SPAM	Malinau			
						Pemeliharaan jaringan air Desa Putat	Panjang pemeliharaan jaringan	Malinau	166 M	500.000.000	
						Pembangunan Jaringan SPAM KEC. Mentarang Hulu dan Kec. Bahau Hulu/ Hibah ari minum pedesaan (HAMP) Kabupaten	Panjang pemeliharaan jaringan	Malinau	300 SR	600.000.000	

						Malinau					
						Penyusunan JAKSTRADA Air Minum dan Sanitasi ,Perumahan,Persampahan	Jumlah dokumen yang tersedia	Malinau	1 Dok	187.957.500	
						DAK AIR MINUM		Malinau	1 pkt	3.191.053.000	DAK
						Penunjang DAK Air Minum		Malinau	12 bulan	100.000.000	
1	03	05	0	00	0 0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Terwujudnya infrastruktur pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah terpadu	Malinau		-	
1	03	05	2	01	0 0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Malinau		-	
1	03	05	2	01	0 6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah layanan pengolahan air limbah doemstik	Malinau	150 KK		
						Sanitasi Rumah Warga Desa Malinau Hilir	Jumlah kk yang dilakukan pembanggunan sanitasi	Malinau	50 kk	400.000.000	
						Pintu dan pembuangan air limbah RT. 5 Desa Malinau Seberang	Jumlah kk yang dilakukan pembanggunan sanitasi	Malinau	50 kk	400.000.000	
						Pembangunan Saluran Pembuangan Limbah Domestik (IPAL Komunal) Kuala Lapang	Jumlah kk yang dilakukan pembanggunan sanitasi	Malinau	50 kk	420.000.000	
						DAK SANITASI		Malinau	1 Paket	3.000.000.000	DAK

						Penunjang DAK Sanitasi		Malinau	12 bln	100.000.000	
1	03	08	0	00	0 0	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terwujudnya Penataan Bangunan Gedung yang baik	Malinau		-	
1	03	08	2	01	0 0	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Malinau		-	
1	03	08	2	01	0 1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Malinau	12 Bulan		
						Survei Lapangan Tentang Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Malinau	12 Bulan	350.000.000	
1	03	08	2	01	0 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Malinau			
						Perencanaan Gedung DPU.PR-PERKIM		Malinau	1 Dok	750.000.000	
						Perencanaan Work Shop DPU.PR-PERKIM		Malinau	1 Dok	100.000.000	
						Perencanaan Rehab Kantor Gedung GADIS Kabupaten Malinau		Malinau	1 Dok	250.000.000	

1	03	08	2	01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dirawat / dipelihara	Malinau	9 unit		
						Rehab Berat Rumah Dinas Camat Kayan Selatan	jumlah bangunan yang direhab	Malinau	1 unit	750.000.000	
						Rehab Berat Kantor Camat Kayan Selatan	jumlah bangunan yang direhab	Malinau	1 unit	1.000.000.000	
						Rehab Rumah Dinas camat Pujungan	jumlah bangunan yang direhab	Malinau	1 unit	500.000.000	
						Rehab Berat Kantor Camat Pujungan	jumlah bangunan yang direhab	Malinau	1 unit	500.000.000	
						Rehab Berat GOR malinau Seberang		Malinau	1 Unit	2.000.000.000	
						Rehab Kantor Bupati Malinau		Malinau	1 Unit	2.390.000.000	
						Rehab Kantor PKK Kabupaten Malinau		Malinau	1 Unit	610.000.000	
						Rehab Rumah dinas jabatan Bupati Kabupaten Malinau		Malinau	1 Unit	1.000.000.000	
						Pembangunan Gedung BPKD Kab Malinau		Malinau	1 unit	1.010.000.000	
1	04	02	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Perumahan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Malinau			

1	04	02	2	03	0 0	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Malinau			
1	04	02	2	03	0 5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Malinau	7 unit	350.000.000	
1	04	03	0	00	0 0	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Malinau			
1	04	03	2	03	0 0	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Malinau			
1	04	03	2	03	0 7	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Malinau	1 Dok	160.000.000	
1	04	03	2	03	0 2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah layak huni	Malinau	30 unit		
						Bedah rumah warga tidak mampu Desa Malinau Kota		Malinau	5 unit	100.000.000	DAK
						Pembangunan rumah Tidak Layak Huni Desa Malinau Seberang		Malinau	5 unit	100.000.000	DAK
						Pembangunan rumah Tidak Layak Huni Desa Sengayan		Malinau	5 unit	100.000.000	DAK
						Pembangunan rumah Tidak Layak Huni Desa Taras		Malinau	5 unit	100.000.000	DAK

						Pembangunan rumah Tidak Layak Huni Desa Tanjung Lapang		Malinau	5 unit	100.000.000	DAK
						Pembangunan rumah Tidak Layak Huni Desa Respen		Malinau	5 unit	100.000.000	DAK
						Penunjang Perumahan		Malinau	1 paket	150.000.000	
1	03	07	0	00	0 0	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Malinau		-	
1	03	07	2	01	0 0	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Malinau		-	
1	03	07	2	01	0 1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan yang di bangun	Malinau			
						Penataan jalan lingkungan		Malinau	800 M	1.000.000.000	
1	03	02	0	00	0 0	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Malinau		-	
1	03	02	2	01	0 0	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman	Malinau			

							pantai di WS Kewenangan Kab/Kota				
1	03	02	2	01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Malinau	15Dokumen		
						Perencanaan Konstruksi Penahan Longsor Sungai Mentarang Di Singai Terang		Malinau	5 Dok.	200.000.000	
						Perencanaan Pembangunan Siring Sungai Mentarang Baru		Malinau	5 Dok.	200.000.000	
						Perencanaan Konstruksi Penahah longsor Sungai Mentarang Lokasi Jembatan Lidung Keminci		Malinau	5 Dok.	225.000.000	
1	03	02	2	01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang kanal Yang Lakukan Pemeliharaan	Malinau	3050 M		
						Pemeliharaan Rutin Kanal Dalam Kota		Malinau	3050 M	150.000.000	
1	03	02	2	01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai		Malinau	1000 M		
						Normalisasi dan Rehabilitasi Sungai Seluwing SD 005 - Sebamban		Malinau	1000 M	3.000.000.000	
1	03	02	2	02	00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Malinau	0,31	-	

1	03	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Malinau	1 Dok		
						Perencanaan Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Malinau		Malinau	1 Dok	500.000.000	
1	03	02	2	02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Malinau	60 Ha		
						Pembangunan Jaringan Irigasi Sawah Tengah Pulau Sapi		Malinau	60 Ha	3.000.000.000	DAK
1	03	02	2	02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya data Elektronik Pengelolaan Aset Irigasi dan Kinerja Sistem Irigasi (E-Paksi) untuk data pendukung daerah irigasi	Malinau	30 Ha		
						Survey dan Optimalisasi data jaringan irigasi Kabupaten Malinau		Malinau	1 Dok	250.000.000	
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sempayang		Malinau	30 Ha	225.000.000	
1	03	09	0	00	00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Malinau		-	
1	03	09	2	01	00	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya		Malinau		-	
1	03	09	2	01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Malinau	65 Unit		

						Penyediaan Peralatan Penunjang Oprasional Petamanan		Malinau	50 Unit	434.582.575	
						Penyediaan Peralatan Penunjang Oprasional Pemakaman Umum		Malinau	15 Unit	200.000.000	
						Pengadaan bibit Tanaman		Malinau		200.000.000	
1	03	09	2	01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Malinau			
						Pembangunan Pagar TPU Lidung Keminci		Malinau	100 M	200.000.000	
						Penyiringan TPU Singai Terang		Malinau	70 M	150.000.000	
						Perbaikan Pagar TPU Kaliamok		Malinau	100 M	150.000.000	
						Penataan TPU Muslim Kabupaten (Raja Tua)		Malinau	2 Ha	1.000.000.000	
						Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jarlis PLN Kabupaten Malinau	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jarlis PLN Kabupaten Malinau	Malinau	150 Unit	300.000.000	
						Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jarlis PLN Kabupaten Malinau	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jarlis PLN Kabupaten Malinau	Malinau	20 Unit	200.000.000	
						Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) Kabupaten Malinau	Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) Kabupaten Malinau	Malinau	75 Unit	500.000.000	

						Rehab Kuburan Respen		Malinau	50 M	100.000.000	
1	03	12	0	00	0 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Kebijakan Daerah tentang RTRW	Malinau		-	
1	03	12	2	01	0 0	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Kebijakan Daerah tentang RRTR	Malinau		-	
1	03	12	2	01	0 3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Penetapan Kebijakan	Malinau	6 Dokumen		
						Penyusunan dan Penetapan Kebijakan tentang RTH Publik di Kawasan Perkotaan Malinau		Malinau	1 Peraturan tentang RTH Publik di Kawasan Perkotaa n Malinau	75.000.000	
						Perencanaan RTH Taman Kota Sentra UMKM Seluwing		Malinau	1Dokume n Perencan a an	500.000.000	
						Perencanaan RTH Pemakaman Umum Kristen / Katolik		Malinau	1 Dokumen Perencan a an	200.000.000	
						Perencanaan RTH Pemakaman Umum Budha / Konghuchu		Malinau	1 Dokumen Perencan a an	150.000.000	
						Perencanaan RTH Pemakaman Umum Hindu		Malinau	1 Dokumen Perencan a an	150.000.000	

						Perencanaan RTH Pemakaman Umum Muslim		Malinau	1 Dokumen Perencan a an	200.000.000	
						Penyusunan dan Penetapan RTH Pemakaman di Kabupaten Malinau		Malinau	1 Dokumen Perencan a	100.000.000	
									an		
						Penyusunan RTR Desa		Malinau	2 RTR Desa	150.000.000	
# #	03	12	2	01	0 1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Kebijakan Daerah tentang RTRW	Malinau	1 Kali Rapat Konsultas i		
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW kabupaten/Kota		Malinau	1 Kali Rapat Konsultas i	150.000.000	
1	03	12	2	01	0 4	Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang yang tersosialisasi	Malinau	3 Kali Sosialisas i		
						Sosialisasi tentang RDTR Kawasan Perkotaan		Malinau	2 Kali Sosialisas i	50.000.000	
						Sosialisasi Penggunaan Ruang Publik dalam masa New Normal (Covid-19) di Kabupaten Malinau		Malinau	1 Kali Sosialisas i	50.000.000	
1	03	12	2	02	0 0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten Kota	Malinau		-	

1	03	12	2	02	03	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat	Malinau			
						Pelatihan tentang Pedoman Penyusunan RTR Desa		Malinau	1 Kali Pelatihan	50.000.000	
1	03	12	2	03	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kota	Malinau		-	
1	03	12	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi Dan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Malinau			
						Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Penataan Ruang (KKPR)		Malinau	10 kali Rapat	150.000.000	
						Fasilitasi Tim Percepatan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang (TP4R) Kabupaten Malinau		Malinau	5 Kali Rapat	100.000.000	
1	03	12	2	03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase Sistem Informasi Penataan Ruang	Malinau			
						Pemetaan Wilayah RT		Malinau	2 Album Peta wilayah RT	150.000.000	
						Pembuatan Peta Informasi Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Malinau		Malinau	1 Album Peta di 5 Kecamat a n	50.000.000	
						Pembuatan Peta Informasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Malinau		Malinau	1 Album Peta di 5 Kecamat a n	50.000.000	
						Pembuatan Peta Informasi Dinamika Kesehatan Masyarakat dalam situasi Pandemi di Ruang		Malinau	1 Album Peta	50.000.000	

						Publik					
						Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Penyediaan Rasda di Kabupaten Malinau		Malinau	1 AlbumPeta di 5 Kecamatan	150.000.000	
1	03	12	2	04	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Malinau		-	
1	03	12	2	04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif	Malinau	1 Dokumen Pengaturan Insentif dan Disinsentif terhadap RDTR		
						Penyusunan dan Penetapan kebijakan Rinci Tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam rangka Pemanfaatan Ruang		Malinau	1 Dokumen Pengaturan Insentif dan Disinsentif terhadap RDTR	325.000.000	
1	03	12	2	04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Malinau	1 Kali kegiatan pelatihan		
						Peningkatan Kapasitas Forum Penataan Ruang Kabupaten Malinau Sesuai PP 21 tahun 2021		Malinau	1 Kali kegiatan pelatihan	50.000.000	

						UPTD		Malinau			
X	XX	01	0	00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Malinau		-	
X	XX	01	2	02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Non ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan	Malinau		-	
X	XX	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non ASN yang diberikan Gaji	Malinau	117 Orang		
						Penyedia Jasa Administrasi Keuangan (UPTD PU)	Jumlah Non ASN yang diberikan Gaji	Malinau	113,00	4.791.408.159	
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (UPTD PU)	Jumlah Non ASN yang diberikan Gaji	Malinau	4,00	200.000.000	
X	XX	01	2	06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat daerah	Malinau	52,00	-	
X	XX	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	Malinau	1 Tahun		
						Penyediaan Bahan Logistik UPTD	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	Malinau	1 Tahun	150.000.000	
X	XX	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material UPTD PU yang tersedia	Malinau	153.000 Liter		
						Penyediaan Material Kerja UPTD PU	Jumlah material kerja yang disediakan	Malinau	50.000 Kg	1.227.243.041	

						Pengadaan Bahan Bakar Minyak Alat Berat UPTD	Jumlah BBM yang disediakan	Malinau	126.000Liter	1.884.348.800	
						Pengadaan BBM alat Berat 5 Kecamatan	Jumlah BBM yang disediakan	Malinau	33.000,00	1.155.000.000	
X	XX	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang telah dilaksanakan	Malinau	15 Kali		
						Koordinasi Lapangan SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah khusus UPTD PU	Malinau	15 Kali	200.000.000	
X	XX	01	2	09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Malinau	50,00	-	
X	XX	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Oprasional Yang di lakukan Pemeliharaan	Malinau	13 Unit		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Oprasional Yang di lakukan Pemeliharaan	Malinau	13,00	500.000.000	
X	XX	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar Yang di lkukan Pemeliharaan	Malinau	23 Unit		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar Yang di lkukan Pemeliharaan	Malinau	23,00	1.000.000.000	
X	XX	01	2	07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Malinau	35,00	-	
X	XX	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Item yangPeralatan disediakan	Malinau	10 Unit		

						Pengadaan Peralatan Bengkel dan Mesin	Jumlah Item yangPeralatan disediakan	Malinau	9 Unit	550.000.000	
						EXCAVATOR CRUSHER BUCKET		Malinau	1 unit	1.400.000.000	
						Pengadaan Alat Sporing dan Balancing		Malinau	2 unit	550.000.000	
X	XX	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang disediakan	Malinau	3 unit		
						Pengadaan Truck double gardan		Malinau	1 Unit	700.000.000	
						Pengadaan Mobil Single Cabin 4 X 4		Malinau	2 Unit	450.000.000	
X	XX	01	2	07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang disediakan	Malinau	3 Unit		
						Buldozer	Jumlah Alat Besar yang disediakan	Malinau	1 Unit	3.200.000.000	
						Exavator	Jumlah Alat Besar yang disediakan	Malinau	1 Unit	2.100.000.000	
						Motor Greder	Jumlah Alat Besar yang disediakan	Malinau	1 Unit	2.700.000.000	
						KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran						
1.05.01.2.08.04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran	Kab. Malinau	100%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Malinau	100%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran gaji Tenaga Petugas Lapangan Satpol PP	Kab. Malinau	115 Orang	5.166.076.900	APBD II
1.05.01.2.08	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Keuangan perangkat Daerah	Kab. Malinau	100%		
1.05.01.2.08	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malinau	107 Org	14.225.897.378	APBD II
1.05.01.2.08.02	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Malinau	100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malinau	12 Bulan	40.000.000	APBD II
1.05.01.2.06.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Kab. Malinau	100%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malinau	22 Jenis	150.000.000	APBD II
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Kab. Malinau	100%		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Malinau	2 Jenis	60.000.000	APBD II

1.05.01.2.06.09	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Kab. Malinau	100%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Malinau	19 Kali	200.000.000	APBD II
1.05.01.2.09.02	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Malinau	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan BBM, Perawatan dan Perijinan Kendaraan Operasional Satpol PP dan Damkar	Kab. Malinau	12 Unit	362.091.452	APBD II
1.05.01.2.05.09	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Kab. Malinau	100%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi)	Jumlah PPNS yang Memiliki SKEP dari Kemenkumham RI	Luar Kab. Malinau	3 Orang		
1.05.02.203.01	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pembinaan PPNS	Kab. Malinau	1		
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Malinau	3 Orang	75.000.000	APBD II
1.05.01.2.05.09	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Kab. Malinau	1		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Anggota Damkar yang Bersertifikat	Kab. Malinau	25 Orang	-	APBD II
1.05.01.2.05.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Kab. Malinau	1		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Satpol PP Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malinau	204 Pasang		APBD II

1.05.01.2.05.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Kab. Malinau	1		
	Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Linmas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malinau	470 Pasang		
1.05.01.2.06.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Kab. Malinau	100%		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor POS Penjagaan	Jumlah POS Satpol PP yang Terlayani Bahan Logistik	Kab. Malinau	6 Pos Penjagaa n	290.000.000	APB D II
1.05.01.2.06.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Kab. Malinau	100%		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah POS Sektor Damkar yang Terlayani Bahan Logistik	Kab. Malinau	3 Pos	135.000.000	APB D II
1.05.01.2.06.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Kab. Malinau	100%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malinau	30 Buah		APB D II
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Malinau	100%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Patroli	Kab. Malinau	2 Unit	729.200.000	APB D II
1.05.01.2.09.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Malinau	1		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Damkar yang Rekondisi	Kab. Malinau	2 Unit	800.000.000	APB D II
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Malinau	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Damkar	Kab. Malinau	3 Unit		APBD II
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Malinau	100%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedinya Garasi Kendaraan Damkar	Kab. Malinau	1 Unit	300.000.000	APBD II
1.05.01.2.08.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Malinau	100%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin Portable	Kab. Malinau	1 Unit	200.000.000	APBD II
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Malinau	1		
	Pengendalian Keamanan Lingkungan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Tersedianya Tenaga Linmas	Kab. Malinau	470 Orang	13.018.036.200	APBD II
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Malinau	1		

	Operasional Petugas PMK (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Tersedianya Petugas Damkar	Kab. Malinau	92 Orang	4.551.825.520	APBD II
1.05.02.201.01	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase anggaran program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Malinau	100%		
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	100%		
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Patroli dan Pengawalan Pejabat VVIP	Kab. Malinau	290 Kali	300.000.000	APBD II
1.05.02.201.05	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	100%		
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah TRC (Tim Riaksi Cepat) Linmas yang Terlatih	Kab. Malinau	23 Orang	0	APBD II
1.05.02.201.02	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	100%		
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan Operasi PEKAT (Penyakit Masyaralat) Gabugan	Kab. Malinau	15 Kali	200.000.000	APBD II
1.05.02.201.05	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	100%		

	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlasananya Pelatihan Pengendalian Massa	Kab. Malinau	3 Satuan	125.000.000	APBD II
1.05.02.202.03	Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Malinau	100%		
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kasus TIPIRING yang ditagani	Kab. Malinau	10 Kasus	30.000.000	APBD II
1.05.02.202.01	Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Malinau	1		
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbub	Kab. Malinau	6 Kali	84.872.550	APBD II
1.05.04.2.01.05	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase anggaran program pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran	Kab. Malinau	100%		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	100%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah POS Sektor Damkar yang Terlayani Sarana dan Prasarana	Kab. Malinau	3 Pos	150.000.000	APBD II
1.05.04.2.04.01	Perberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masayarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Malinau	100%		

	Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan	Jumlah Sosialisasi Pencegahan dan Penaggulagan Kebakaran	Kab. Malinau	15 Kali	0	APBD II
	Edukasi Masyarakat					
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Malinau	100%		
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Penyelamatan Korban Bencana	Kab. Malinau	5 Kali	0	APBD II
1.05.04.2.04.02	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran	Kab. Malinau	100%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Kab. Malinau	100%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Tenaga Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Malinau	60 Orang	50.000.000	APBD II
	SOSIAL					
Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelayan Prima yang terlaksana	Kabupaten Malinau dan luar Kabupaten Malinau	0,95		

1 . 1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi keuangan	Kabupaten Malinau dan luar Kabupaten Malinau	100%		
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	32 ASN	4.227.657.060	APBD
1 . 2	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uusan Pemerintah Daerah	Persentase kendaraan dinas yang beroperasi dengan baik	Malinau	100%		
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	Malinau	7 unit	80.000.000	APBD
1 . 3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Kabupaten Malinau dan luar Kabupaten Malinau	100%		
1.3.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rakor dan konsultasi yang diikuti	Dalam dan luar Kab.Malina u	13 kali	236.000.000	APBD
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Malinau	32 jenis	40.000.000	APBD
1 . 4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Malinau	100%		
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kerja yang memadai	Malinau	11 jenis	20.000.000	APBD

2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan dalam rangka pencegahan, mitigasi dan penyelamatan serta evakuasi korban bencana	Malinau	0,95		
2 . 1	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Malinau	100%		
2.1.1	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlatih dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Malinau	150 orang	300.000.000	APBD
2.1.2	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasita Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang terakomodir	Malinau	20 orang	624.000.000	APBD
2 . 2	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase logistik yang tersedia untuk pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Malinau	100%		
2.2.1	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan logistik bagi tim untuk penyelamatan dan evakuasi korban	Malinau	286 kotak	100.000.000	APBD
2.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan dasar (Logistik) untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Malinau	21 jenis	100.000.000	APBD
	TENAGA KERJA					
Dinas Ketenagakerjaan						
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	Kab. Malinau	100		APBD II
0 2 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Aparatur di Bidang Keuangan dan Perencanaan		100		

0 2 01 1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malinau	21 Orang	2.700.429.610	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran		100%		
2.12.2.12.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	SKPD	44 Jenis	80.000.000	APBD II
2.12.2.12.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	1 Tahun	36.000.000	APBD II
X XX 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah minuman dan makanan	SKPD	1 Tahun	10.000.000	APBD II
2.12.2.12.1.01.18	Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi dalam dan luar Daerah	Meningkatnya pelyanan dan SDM pegawai dalam menjalankan setiap tugas dan pelayanan	Luar dan Dalam Daerah	1 Tahun	104.000.000	APBD II
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAN APARATUR	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Malinau	100%		
X XX 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan kantor	Kab. Malinau	20 unit	100.000.000	APBD II
2.12.2.12.1.02.26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung Kantor.	Jumlah peralatan yang mendapatkan perawatan/ service	Kab. Malinau	3 unit	50.000.000	APBD II
2.12.2.12.1.02.24	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2	Kab. Malinau	3 unit	70.000.000	APBD II
02.07. 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		2%		

02.07.02.2.0 1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Rencana Tenaga Kerja		1 Dokumen		
02.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	SKPD	1 Dokumen	50.000.000	APBD II
02.07.02.2.01.02	Sosialisasi Penyusunan rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi	Kab. Malinau	24 Perusaha a n	50.000.000	APBD II
02.07. 03	PROGRAM PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase Pelatihan dan peningkatan Produktivas Tenaga kerja	Kab. Malinau dan Luar Daerah	100%		
02.07.03.2.0 1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	Kab. Malinau dan Luar Daerah	100%		
02.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan	Kab. Malinau dan Luar Daerah	100 Orang	400.000.000	APBD II
02.07.03.2.01.01	Proses Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja bagi Masyarakat Pengangguran menjdai Tenaga Kerja Terampil, Mandiri dan Inovatif	Jumlah Peserta Pelatihan bagi Pengangguran	Kab. Malinau dan Luar Daerah	75 Orang	100.000.000	APBD II
02.07.03.2.01.01	Sosialisasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi milenial	Jumlah kegiatan Sosialisasi	Kab. Malinau	50 Orang	100.000.000	APBD II
02.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Pematangan Lahan Balai Latihan Kerja Kab. Malinau	Kab. Malinau	Lahan Balai Latihan Kerja Kab. Malinau	200.000.000	APBD II
02.07.03.2.0 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	persentase LPK yang di bina	Kab. Malinau	100%		

02.07.03.1.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang dibina	Kab. Malinau	4 LPK	30.000.000	APBD II
02.07.03.2.0 5	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat daerah Kabupaten/Kota	persentase produktivitas total	Kab. Malinau	100%		
02.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Malinau	1 Kegiatan	25.000.000	APBD II
02.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi Ke Perusahaan	Kab. Malinau	10 X Konsultsi	25.000.000	APBD II
02.07.03.2.04.01	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pesrta Pelatihan Produktivitas	Kab. Malinau dan Luar Daerah	50 Orang	100.000.000	APBD II
02.07.03.2.04.01	Pelatihan Pemagangan Dalam Daerah	Jumlah Peseta Pemagangan	Kab. Malinau dan Luar Daerah	20 Orang	150.000.000	APBD II
02.07. 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Kab. Malinau	100%		
02.07.04.2.0 1	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentasetenaga kerja yang ditempatkan	Kab. Malinau dan Luar Daerah	100%		
02.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Petugas Petugas Antar Kerja	Kab. Malinau dan Luar Daerah	1 Orang	50.000.000	APBD II
02.07.04.2.01.02	Pendataan Tenaga Kerja di Kabupaten Malinau	Jumlah Tenaga Kerja Kab. Malinau	Kab. Malinau dan Luar Daerah	1 Kegiatan	50.000.000	APBD II

02.07.04.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kab. Malinau	1 Kegiatan	135.900.000	APBD II
02.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Perusahan Peserta Bursa Kerja	Kab. Malinau dan Luar Daerah	15 Perusaha a n	131.000.000	APBD II
02.07.04.2.0 4	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten Kota	Persentase pekerja migran indonesia/tenaga kerja indonesia yang mendapat sosialisasi	Kab. Malinau	100%		APBD II
02.07.04.2.04.02	Sosialisasi bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Kegiatan Sosilasasi Bagi Calon TKI	Kab. Malinau	1 Kegiatan	50.000.000	APBD II
02.07.04.2.0 3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi pasar Kerja online	Kab. Malinau dan Luar Daerah			APBD II
02.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Peralatan sarana dan Prasarana IPK Online	Kab. Malinau dan Luar Daerah	4 Unit	68.052.000	APBD II
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA dan Tenaga kerja Lokal dalam 1 wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau dan Luar Daerah	1 Kegiatan		APBD II
	Koordinasi dan Singkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Asing diwilayah Kabupaten Malinau	Kab. Malinau dan Luar Daerah	25 Perusaha a n	100.000.000	APBD II
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Peresentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Strutur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Kab. Malinau dan Luar Daerah	100%		APBD II
02.07.05.2.0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang memiliki PP dan PKB	Kab. Malinau dan Luar Daearah	100%		

02.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Pembentukan LKS BIPARTIT dan Ferivikasi PP dan PKB	Kab. Malinau dan Luar Daerah	30 Perusaha a n	100.000.000	APBD II
02.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Sosialisasi dan Penetapan UPah Minimum Kabupaten	Kab. Malinau dan Luar Daerah	1 Dokumen	100.000.000	APBD II
02.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan dan Informasi Saran Hubungan Industrial	Kab. Malinau dan Luar Daerah	25 Perusaha a n 2x Kegiatan	150.000.000	APBD II
02.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kab. Malinau dan Luar Daerah	100%		APBD II
02.07.05.2.02.01	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Penyelesaian Perselisihan	Kab. Malinau dan Luar Daerah	12 Kegiatan	100.000.000	APBD II
02.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotan pada Konfederasi Serikat Organisasi Pekerja/Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja	Kab. Malinau dan Luar Daerah	6 Serikat Buruh/Se rikat Pekerja	100.000.000	APBD II
02.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operational Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah Operational LKS Tripartit	Kab. Malinau dan Luar Daerah	1 Kegiatan	100.000.000	APBD II
02.07.05.2.02.05	Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Kab. Malinau dan Luar Daerah	25 Perusaha a n	100.000.000	APBD II
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan Peliputan dan Sarana dan Prasarana Hubungan Industrial	Jumlah Pengadaan Peralatan Peliputan	Kab. Malinau dan Luar Daerah	9 Unit	100.000.000	APBD II
02.07.05.2.02.05	Pelatihan Petugas Mediator Perselisihan Hubungan Industrial	Petugas Mediator Perselisihan	Kab. Malinau dan Luar Daerah	1 Orang	100.000.000	APBD II

					PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
Dinas Permebrdayaan Perempauan, Perlindungan Anak dan Sosial									
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial	Kab. Malinau	100%		APBD II
1	06	02	2		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Malinau	1		
1	06	02	2	2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Pendampingan Pemberdayaan KAT	Kab. Malinau	2 Kec.	100.000.000	APBD II
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Malinau	100%		APBD II
1	06	04	2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NSPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang medapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kab. Malinau	1		
1	06	04	2	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Bimbingan yang di berikan kepada PMKS	Kab. Malinau	15 Kec.	125.000.000	APBD II
1	06	04	2	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Bimbingan yang diberikan kepada PMKS	Kab. Malinau	15 Kec.	105.000.000	APBD II
1	06	04	2	3	Pemberian Layanan dan Rujukan	Jumlah PUSKESOS yang di bentuk di Kecamatan	Kab. Malinau	15 Kec.	180.000.000	APBD II
Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub**	**Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)**			

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial	Kab. Malinau	100%		
1 06 05 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Keluarga Miskin yang mendapatkan Bantuan Sosial	Kab. Malinau	1		
1 06 05 2 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pendataan Fakir Miskin yang Tersedia	Kab. Malinau	15 Kec.	450.000.000	APBD II
1 06 05 2 3	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Bantuan Sosial yang Tersedia	Kab. Malinau	1660 KPM	400.000.000	APBD II
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	Kab. Malinau	100%		APBD II
1 06 06 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase Penanganan Masyarakat yang mengalami Bencana Alam	Kab. Malinau	1		
1 06 06 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Kampung Siaga Bencana yang dilaksanakan	Kab. Malinau	3 Desa	90.000.000	APBD II
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	Kab. Malinau	100%		APBD II
01 2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang disusun tepat waktu	Kab. Malinau	1		

01	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang Tersedia	Kab. Malinau	3 Dok	100.000.000	APBD II
01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan	Kab. Malinau	1		
01	2	1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malinau	36 Orang	4.471.733.198	
01	2, 1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Kab. Malinau	1		
01	2, 1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malinau	12 Jenis	20.000.000	APBD II
01	2, 1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Malinau	4 Jenis	25.000.000	APBD II
01	2, 1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Malinau	20 Kali	242.700.000	APBD II
01	2, 1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pengadaan barang milik daerah	Kab. Malinau	1		
01	2, 1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malinau	4 Unit	42.000.000	APBD II
01	2, 1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Malinau	1		

		01	2, 1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Malinau	1 Unit	50.000.000	APBD II
		01	2, 1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malinau	37 Unit	20.300.000	APBD II
2	08	02			PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pengarustamaan Gender	Kab. Malinau	100%		APBD II
2	08	02	2		Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase PUG pada Lembaga Pemerintah	Kab. Malinau	1		
2	08	02	2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi PUG yang dilaksanakan	Kab. Malinau	1 Lap	100.000.000	APBD II
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan	Kab. Malinau	100%		APBD
2	08	03	2		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perlindungan Kekerasan pada Perempuan yang mengalami KDRT	Kab. Malinau	1		
2	08	03	2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Kasus KDRT yang Terlaksana	Kab. Malinau	2 Kec.	100.000.000	APBD II
2	08	03	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten /	Persentase Pendampingan kasus pada Perempuan dan Anak yang mengalami Kekerasan	Kab. Malinau	1		

					Kota					
2	08	03	2	01	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pendampingan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang tersedia	Kab. Malinau	15 Kasus	50.000.000	APBD II
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab. Malinau	100%		APBD II
2	08	04	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Sumber Daya dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab. Malinau	1		
2	08	04	2	01	Advokasi Kebijakan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peingkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kader yang terlatih	Kab. Malinau	80 Orang	130.000.000	APBD II
2	08	04	2	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Layanan yang Terlatih	Kab. Malinau	10 Lembaga	100.000.000	APBD II
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Sistem Data Gender dan Anak	Kab. Malinau	100%		APBD II

2	08	05			Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pada Pengelolaan Data Gender dan Anak	Kab. Malinau	1		
2	08	05	2	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang Tersedia	Kab. Malinau	1 Laporan	100.000.000	APBD II
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Kab. Malinau	100%		
2	08	06	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase untuk mendapatkan Layanan Pemenuhan Hak Anak	Kab. Malinau	1		
2	08	06	2	01	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Forum Anak Daerah yang terbentuk	Kab. Malinau	10 FAD	80.000.000	APBD II
2	08	06	2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Profil Anak Daerah yang tersusun	Kab. Malinau	1 Profil Anak Daerah	50.000.000	APBD II
2	08	06	2	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Koordinasi dan Monitoring Evaluasi SRA yang terbentuk	Kab. Mal	44 SRA	160.000.000	APBD II
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Khusus Anak	Kab. Malinau	100%		APBD II

2	08	07	2		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencegahan kekerasan pada Anak untuk mendapatkan Perlindungan Khusus	Kab. Malinau	100%		
2	08	07	2	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Kasus Anak yang tersusun	Kab. Mal	3 Laporan	50.000.000	APBD II
2	08	07	2		Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ABH yang medapatkan Pendampingan Bantuan Hukum	Kab. Malinau	100%		
2	08	07	2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pendampingan bagi ABH yang tersedia	Kab. Mal	20 Kasus	90.000.000	
2	08	07	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Anak yang menerima Layanan Perlindungan Khusus	Kab. Malinau	100%		
2	08	07	2	03	Kordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Koordinasi antar Lembaga yang Terlaksana	Kab. Mal	20 Kasus	40.000.000	APBD II
					PANGAN					
Dinas Ketahanan Pangan										

2	09	01				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Anggaran Program Penunjang terhadap Total Anggaran	Malinau	100		
2	09	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan	Malinau	100		
2	09	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang penerima gaji dan tunjangan ASN	Malinau	35 ASN	4.355.816.997	APBD
2	09	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Malinau	100		
2	09	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Malinau	5 Dokumen	20.000.000	APBD
2	09	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	Malinau	100		
2	09	01	2	06	02	Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	30 Jenis	40.000.000	APBD
2	09	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Malinau	2 Jenis	11.350.000	APBD
2	09	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	20 Kali	180.000.000	APBD

2 09	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Malinau	100		
2 09	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Malinau	1 Unit	28.650.000	APBD
2 09	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Anggaran Program Kedaulatan dan Kemandirian Pangan terhadap Total Anggaran	Malinau	100		
2 09	02	2	01		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Sarana Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Malinau	100		
2 09	02	2	01	03	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Gudang Penyimpanan Cadangan Pangan milik Pemerintah	Malinau	1 Unit	50.000.000	APBD
2 09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Anggaran Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat terhadap Total Anggaran	Malinau	100		
2 09	03	2	01		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Malinau	100		
2 09	03	2	01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Data Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)	Malinau	1 Dokumen	55.000.000	APBD
2 09	03	2	01	02	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Orang mengikuti Pelatihan Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil Pertanian	Malinau	30 Orang	50.000.000	APBD

2	09	03	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Dokumen data Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Malinau	1 Dokumen	35.000.000	APBD
2	09	03	2	01	04	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Malinau	1 Dokumen	50.000.000	APBD
2	09	03	2	03		Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Persentase Regulasi Dokumen yang di buat untuk Penentuan Harga Minimum Daerah	Malinau	100		
2	09	03	2	03	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Regulasi Dokumen Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Malinau	1 Regulasi	30.000.000	APBD
2	09	03	2	04		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Malinau	100		
2	09	03	2	04	01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Data Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Malinau	1 Dokumen	65.000.000	APBD
2	09	03	2	04	02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Desa/KWT Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Malinau	2 KWT	150.000.000	APBD
2	09	03	2	04	02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Desa/KWT Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Malinau	4 KWT	350.000.000	DAK
2	09	03	2	02		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Malinau	100		

2	09	03	2	02	01	Sub Kegiatan Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Pemantauan Cadangan Pangan	Malinau	1Dokumen	35.000.000	APBD
2	09	03	2	02	02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Malinau	1 Dokumen	75.000.000	APBD
2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Anggaran Program Penanganan Kerawanan Pangan terhadap Total Anggaran	Malinau	100		
2	09	04	2	01		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Malinau	100		
2	09	04	2	01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Malinau	1 Dokumen	75.000.000	APBD
2	09	04	2	02		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Malinau	100		
2	09	04	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Penanganan Kerawanan Pangan	Malinau	1 Dokumen	50.000.000	APBD
2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Anggaran Program Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Total Anggaran	Malinau	100		
2	09	05	2	01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	Malinau	100		
2	09	05	2	01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dan Uji Sampel Data Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah	Malinau	1 Dokumen	50.000.000	APBD
						LINGKUNGAN HIDUP					
Dinas Lingkungan Hidup											

2 1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
2 1 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	persentase kinerja perkantoran yang baik	Kab. Malinau	100,00%		APBD
2 1 01 2. 1 02	Admninistrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase kinerja keuangan perangkat daerah	Kab. Malinau	100%		APBD
2 1 01 2. 0 1 02 1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN	Kab. Malinau	12 bulan	6.161.889.300	APBD
X XX 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi	Kab. Malinau	5 kali	45.000.000	
2 1 01 2. 1 06	Admnistrasi Umum perangkat Daerah	persentase kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Malinau	100%		APBD
2 1 01 2. 02 1 06	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kab. Malinau	12 bulan	65.000.000	APBD
2 1 01 2. 05 1 06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kab. Malinau	3 item	16.000.000	APBD
2 1 01 2. 09 1 06	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi	Kab. Malinau	5 kali	90.000.000	APBD
2 1 01 2. 1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Malinau	1		APBD

2	1 1	01	2. 08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jangka waktu pemeliharaan kantor	Kab. Malinau	12 bulan	50.000.000	APBD
2	1 1	01	2. 09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemrintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Malinau	1		APBD
2	1 1	01	2. 09	01	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah item pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Malinau	3 item	355.000.000	APBD
2	1 1	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Kab. Malinau	79.15 poin		APBD
2	1 1	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	indeks kualitas udara (IKU)	Kab. Malinau	94.00poin		APBD
2	1 1	03	2. 01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah pengawas pos yang tersedia	Kab. Malinau	15 orang	80.000.000	APBD
2	1 1	03	2. 01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah alat laboratorium yang dapat berfungsi dengan baik	Kab. Malinau	5 item	60.000.000	APBD
2	1 1	03	2. 02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	indeks kualitas air (IKA)	Kab. Malinau	51.00 poin		APBD
2	1 1	03	2. 02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah data kualitas lingkungan yang tersedia	Kab. Malinau	3 data	210.000.000	APBD
2	1 1	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	percentase kawasan yang dikonservasi	Kab. Malinau	30.00%		APBD

2	1 1	04	2. 01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	luas kawasan lahan yang ditanami dalam rangka rehabilitasi DAS	Kab. Malinau	400 Ha		APBD
2	1 1	04	2. 02	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	jumlah dokumen penanaman dan pemeliharaan	Kab. Malinau	2 dokumen	650.000.000	APBD
2	1 1	04	2. 03		Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	jumlah tanaman yang ditanam dan Pemeliharaan	Kab. Malinau	181.500 batang dan 54.450 batang	9.150.000.000	APBD
2	1 1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yg diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kab/kota	Kab. Malinau	80%		APBD
2	1 1	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Malinau	80 usaha		APBD
2	1 1	06	2. 01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan	Kab. Malinau	5 Usaha	450.000.000	APBD
2	1 1	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	1 MHA		APBD
2	1 1	07	2. 01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Kab. Malinau	1 MHA		APBD

2	1 1	07	2. 01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	jumlah penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	6 MHA	75.000.000	APBD
2	1 1	07	2. 02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Kab. Malinau	1 MHA		APBD
2	1 1	07	2. 02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah masyarakat hukum adat yang diusulkan untuk ditingkatkan kapasitasnya terkait PPLH	Kab. Malinau	1 MHA	70.000.000	APBD
2	1 1	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidupTerlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kab. Malinau	1 Penghargaan		APBD
2	1 1	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kab/Kota yang diterima	Kab. Malinau	1Penghargaan		APBD
2	1 1	09	2. 01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan Kalpataru dan Sekolah Adiwiyata	Kab. Malinau	2 kategori dan 5 sekolah	60.000.000	APBD
2	1 1	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kab/kota yang ditangani	Kab. Malinau	100%		APBD

2	1 1	10	2. 01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	jumlah pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten/Kota yang tertangani	Kab. Malinau	100%		APBD
2	1 1	10	2. 01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan lingkungan yang diterima	Kab. Malinau	10 pengadu a n	75.000.000	APBD
2	1 1	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	86%		APBD
2	1 1	11	2. 01		Pengelolaan Sampah	Persentase cakupan area pelayanan	Kab. Malinau	11.03%		APBD
2	1 1	11	2. 01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia	Kab. Malinau	5 item	1.470.000.000	APBD
2	1 1	11	2. 01	07	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	jumlah petugas kebersihan dan persampahan yang terpenuhi kesejahteraannya	Kab. Malinau	265 orang	7.700.000.000	APBD
					ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil										
X XX 01					PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran		100%		APBD II
x xx 01 2.02					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan		100%		APBD II

x xx 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	Malinau	38 Orang	5.222.495.085	APBD II
x xx 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum		100%		APBD II
x xx 01 2.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah tersedianya alat tulis kantor	Malinau	56 Jenis	200.000.000	APBD II
x xx 01 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Malinau	6 Jenis	30.000.000	APBD II
x xx 01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan keluar daerah	Kabupaten Malinau dan luar Kabupaten Malinau	10 Kali	45.000.000	APBD II
x xx 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pengadaan barang milik daerah		100%		APBD II
x xx 01 2.07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Malinau	5 Unit	90.000.000	APBD II
x xx 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah		100%		APBD II
x xx 01 2.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Malinau	1 Unit	20.000.000	APBD II
x xx 01 2.09 02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Malinau	25 Unit	20.000.000	APBD II

2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el		95%		APBD II
2 12 02 2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk		100%		APBD II
2 12 02 2.01 04	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terlayani	Desa Long Loreh, Pulau Sapi, Respen Tubu, Metut	400Dokumen	50.000.000	APBD II
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran		90%		APBD II
2 12 03 2.01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil		100%		APBD II
2 12 03 2.01 02	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang terlayani	Desa Tanjung Lapang, Punan Bengalun, Long Bila, Sentaban, Long Kebinu, Long Mekatif, Long Gafid, Long Bisai	100 Dokumen	50.000.000	APBD II
2 12 03 2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil		100%		APBD II
2 12 03 2.02 08	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi	Kecamatan Malinau Utara dan Malinau Kota	110 Orang	50.000.000	APBD II

2 12 04	PROGRAM PENGELOLAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase SIAK dalam kondisi baik		100%		APBD II
2 12 04 2.01	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan		100%		APBD II
2 12 04 2.01 02	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	15Kecamata n	15Kecam ata n	350.000.000	APBD II
2 12 04 2.02	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		100%		APBD II
2 12 04 2.02 01	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen survei kepuasan masyarakat	Malinau	2 Dokumen	20.000.000	APBD II
2 12 04 2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		100%		APBD II
2 12 04 2.03 03	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sarana prasarana SIAK/KTP Elektronik dalam kondisi baik	Malinau dan Jakarta	2 Perangka t	250.000.000	APBD II
2 12 04 2.03 07	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen standar pelayanan yang diterbitkan	Malinau	1 Dokumen	75.000.000	APBD II
2 12 04 2.03 08	Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawab kan	Jumlah buku laporan yang di cetak	Malinau	64 Buku	50.000.000	APBD II

2 12 04 2.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		100%		APBD II
2 12 04 2.04 03	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta bimbingan teknis	Jakarta	11 Orang	150.000.000	APBD II
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan		68%		APBD II
2 12 05 2.01	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penyusunan profil kependudukan		100%		APBD II
2 12 05 2.01 02	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah buku profil yang di cetak	Malinau	60 Buku	50.000.000	APBD II
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Malinau	100%		APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	4.803.375.191	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		95%		

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor		37 Jenis	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4 Jenis	60.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		8 Jenis	100.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi program kegiatan dan tugas kedinasan lainya di dalam dan luar daerah		110 Kali	278.848.989	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia		1 Unit	500.000.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang tersedia		32 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang tersedia		1 Unit	70.310.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor dan alat pendukung lainya yang diperbaiki		6 Unit	100.000.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan Data perencanaan laporan keuangan OPD		2 Orang	40.800.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional		3 Unit	50.000.000	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase pengentasan desa tertinggal		100%		
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa		96%		
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa tertinggal		10 desa	300.000.000	
		Jumlah Desa berkembang		8 desa		
		Jumlah Desa Maju		3 desa		
		Jumlah Desa Mandiri		2 desa		
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang tertata wilayahnya		2 Desa	100.000.000	

	fasilitasi penataan kewenangan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam Penataan kewenangan desa		2 Desa		
	fasilitasi penamaan dan kode desa	Jumlah desa yang terfasilitasi perubahan penamaan dan kode desa		2 Desa		
	fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewengangan kabupaten/kota.	Jumlah kesatuan wilayah Masyarakat hukum adat dan desa adat kabupaten yang terfasilitasi		1 Wilayah		
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah desa pengelola penyediaan sarana air minum dan sanitasi (KPSPAM)		10 Desa	150.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa		100%		
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase fasilitasi kerja sama antar desa		91%		
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		14 Desa	150.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang terfasilitasi Kerja sama dengan pihak ketiga				
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang terfasilitasi melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan		2 Desa	50.000.000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Admiistrasi Pemerintahan Desa yang Baik		100%		

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan penegasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		96%		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang tertata baik administrasi Pemerintahannya		8 Desa		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa		13 Desa		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang		109 Desa	150.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang di monitoring dan di verifikas pelaksanaan kegiatan APBDes		109 Desa	150.000.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang mengikuti pelatihan administrasi umum dan siskudes		109 Desa	120.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan RT		381 RT	100.000.000	
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah desa yang mengikuti evaluasi Raperdes tentang APBDes		109 Desa	100.000.000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang terbentuk dan terbina yang Telah Di Perdeskan		6 BUMDes	70.000.000	
		Jumlah BUMDes yang Terdaftar menjadi badan Hukum sesuai PP No. 11 Tahun 2021 dan Permendes No. 3 Tahun 2021		30 Bumdes		

		Jumlah Pengurus BUMDes yang Terlatih		60 Pengurus		
	penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Desa yang telah melaksanakan pemilihan dan Pelantikan				
	fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah pemilihan dan pelantikan ketua RT		0	-	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang melakukan up date Profil Desa		109 Desa	50.000.000	
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah kepala desa dan yang mengikuti pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa		17 Kades	100.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen aset desa		15 Dokumen / Desa	125.000.000	
	pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang dibina		0		
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang ditetapkan batas desanya		2 Desa	50.000.000	
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang mengikuti pelatihan administrasi laporan pemerintahan desa		109 Kepala Desa		
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba tingkat kabupaten dan provinsi		15 Desa	100.000.000	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan		100%		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdyakan		92%		
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang diidentifikasi dan inventarisir		1 Masyarakat Hukum Adat		
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LPM berprestasi		20Lembaga	150.050.000	
		Jumlah PKK dan Posyandu yang tertata dan diberdaya		26 PKK/Posyandu		
		jumlah tenaga fasilitator program pemerintah daerah		64 Orang		
	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan karang Taruna) Lembaga adat desa /kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Kelembagaan lembaga kemasyarakat, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan yang terlatih dan terbina		110 Lembaga	130.200.000	

		Jumlah masyarakat desa yang mengikuti pendidikan dalam upaya		18 Orang		
		peningkatan ekonomi masyarakat desa				
	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga yang terfasilitasi sarana dan prasarana nya		216 Lembaga		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa		2 Usaha		
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang difasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		20 Desa	140.000.000	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang melaksanakan nilai - nilai lingkungan rapi, tertib, bersih, sehat, indah dan harmonis		2 Desa	150.000.000	
		Jumlah Desa yang melaksanakan Gotong royong (TMMD)		2 Desa		
		Jumlah Desa yang melaksanakan gotong royong KKN		6 Desa		
	Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Jumlah kegiatan lembaga adat tingkat kabupaten dan lembaga adat tingkat kecamatan		54 Lembaga	10.050.000	
		Jumlah data LSM yang aktif		1 data LSM		

	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah lembaga PKK yang terbina		20lembaga PKK	100.000.000	
		Jumlah kelompok binaan PKK		20 Kelompok Binaan PKK		
		Jumlah Kader Desa yang berkompeten		15 kader Desa		
	PERHUBUNGAN					
Dinas Perhubungan						
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran	Kab. Malinau	1		APBD
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji ASN)	Jumlah ASN Dishub	Kab. Malinau	38 orang	4.812.262.972	APBD
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah computer, laptop dan printer	Kab. Malinau	4 unit	50.000.000	APBD
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga ASN dan Wasdal DIshub	Kab. Malinau	115 orang		APBD
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor	Kab. Malinau	1.050 liter/pcs/ porsi	200.000.000	APBD
X XX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana pembayaran air, Listrik,WIFI	Kab. Malinau	12 Bulan	40.000.000	APBD

2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi	Kab. Malinau	12 bulan	150.000.000	APBD
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan bandara perintis	Kab. Malinau	2 bandara	100.000.000	APBD
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honor Dishub	Kab. Malinau	111 org	3.588.000.000	APBD
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas	Kab. Malinau	1 unit	30.000.000	APBD
2.15.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Kab. Malinau	0,95		APBD
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah rencana induk jaringan LLAJ	Kab. Malinau	-	-	APBD
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Gedung Bangunan PKB)	Jumlah bangunan Gedung	Kab. Malinau	-	-	APBD
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Peralatan Uji Kendaraan Bermotor)	Jumlah peralatan dan perlengkapan uji kendaraan	Kab. Malinau	-	-	APBD
2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota	Jumlah Rambu lalin	Kab. Malinau	20 unit	60.000.000	APBD
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Operasional Terminal	Kab. Malinau	12 bulan	50.000.000	APBD

2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Pengamanan dan lokasi parkir	Kab. Malinau	2 Lokasi	130.000.000	APBD
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Operasional UPTD. PKB	Kab. Malinau	12 bulan	100.000.000	APBD
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah tersedianya trafic light yang memadai	Kab. Malinau	3 unit	700.000.000	APBD
2.15.02.2.08.02	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	jumlah kendaraan umum yang layak beroperasi	Kab. Malinau	600 unit	30.000.000	APBD
2.15.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pengelolaan pelayaran	Kab. Malinau	0,9		APBD
2.15.03.2.13	Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Operasional UPTD. Kelapis dan Speet Boad	Kab. Malinau	12 bulan	50.000.000	APBD
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau (Ponton Pelabuhan Speed)	Jumlah ponton yang tersedia	Kab. Malinau	-	-	APBD
2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah fender karet sandar	Kab. Malinau	-	-	APBD
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau (Tambatan Perahu)	Jumlah Tambatan Perahu	Kab. Malinau	-	-	APBD
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan	Kab. Malinau	-	-	APBD

	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Dinas Komunikasi dan Informatika						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelayanan prima yang terlaksana		100		APBD
1 . 1	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100		APBD
1 . 1 . 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	36 PNS	3.971.988.185	APBD
1 . 2	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan		100		APBD
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Malinau	3 Unit	70.000.000	APBD
1 . 3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilakukan	Malinau/Prov/Pusat	48 kali	150.000.000	APBD
1 4	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Malinau	50 stel	50.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Perlengkapannya	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Malinau/Prov/Pusat	4 ASN	50.000.000	APBD

1 . 3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan		100		APBD
1 .	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah penyediaan tenaga PTT, ATK dan Biaya Makan Minum	Malinau	12 Bulan	672.464.000	
1 . 4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kendaraan dinas yang beroperasi dengan baik		100		APBD
1 . 4 . 7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi	Malinau	1 R-4	52.000.000	APBD
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		81,05		APBD
2 . 5	Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota		81,05		APBD
2 . 8	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang disebarkan dan media yang dipergunakan	Malinau	12 Bulan	708.523.400	APBD
2.	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Buku Statistik Sektoral yang dibuatPPID Pembantu pada OPD Tersedianya infografis pembangunan daerah	Malinau	3Dokume n	463.700.000	APBD
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		73,39		APBD

3 . 6	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang baik yang disediakan oleh Dinas Kominfo		73,39		APBD
3 .	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan yang akan dikerjakan	Malinau	6 Laporan Kegiatan	3.430.312.600	APBD
3 . 7	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, Video, Teks, Data dan Sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah				APBD
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Belanja jasa sewa License	Malinau	4 Laporan	116.000.000	APBD
3 .	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan yang akan dikerjakan	Malinau	8 Laporan Kegiatan	1.237.000.000	APBD
	PENANAMAN MODAL					
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA		1%		
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		80.500,00		

2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda yang terbit	Kab. Malinau	1 Perda	29.232.000	
2.18.02.2.02	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		80.500,00		
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku dan Perda	Dalam dan Luar Daerah	1 Buku (Perda)	400.000.000	APBD II
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA		80%		
2.18.03.2.01	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		80.500,00		
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	75.000.000	APBD II
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran yang diikuti	Dalam dan Luar Daerah	2 Kali	218.756.000	APBD II
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang bernilai minimal baik		80%		
2.18.04.2.01	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah data, data perizinan dan penanaman modal serta data sistem informasi		424		

2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Konsultasi	Dalam dan Luar Daerah	6 Orang (3x Pertemuan)	150.000.000	APBD II
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit	Dalam dan Luar Daerah	550 Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit	149.200.000	APBD II
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan(5) dan Konsultasi(20)	Kab. Malinau	25 Pengadu a n dan Konsultas i	15.000.000	APBD II
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Dalam dan Luar Daerah	2 Kali	20.000.000	APBD II
2.18.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA		1%		
2.18.05.2.01	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		80.500,0 0		
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan	Kab. Malinau	4 Laporan Triwulan 4 (1 Laporan Tahunan)	68.100.000	DAK / APBD II
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi	Kab. Malinau	2 Kali	376.627.000	DAK / APBD II
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan	Kab. Malinau	2 kali	127.900.000	DAK / APBD II

2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang bernilai minimal baik		80%		
2.18.06.2.01	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah data, data perizinan dan penanaman modal serta data sistem informasi		424		
2.18.06.2.01.01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan	Kab. Malinau	10 Laporan	85.000.000	APBD II
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran		100%		
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur, Administrasi Perkantoran dan Perencanaan		100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Kab. Malinau	26	3.752.797.679	APBD II
	ADMINISTRASI KEPEGAWIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur, Administrasi Perkantoran dan Perencanaan		100%		
	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Daerah	24 Orang	200.000.000	APBD II
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur, Administrasi Perkantoran dan Perencanaan		100%		

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malinau		70.000.000	APBD II
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang mengikuti Rakor	Kab. Malinau		136.568.000	APBD II
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Malinau		5.000.000	APBD II
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemeliharaan Rutin/ Berkala Aset Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan Perawatan	Kab. Malinau		40.000.000	APBD II
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang mendapatkan Perawatan			15.000.000	APBD II
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran		100%		APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran	Malinau	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Malinau	100%	4.186.130.218	APBD

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan admisistrasi umum	Malinau	100%		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Malinau	3 Jenis	40.000.000	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	Malinau	20 Jenis	43.981.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Malinau	20 Kali	340.475.000	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan admisistrasi umum	Malinau	100%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Malinau	4 Unit	50.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor dan Jumlah Makan Minum Rapat	Malinau	4 Orang dan 6 Jenis	151.380.000	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan admisistrasi umum	Malinau	1 Unit		
2 1 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	Malinau	1 Unit	40.000.000	APBD
2 19 02 2.01	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Pemuda yang Berdaya Saing	Malinau	0,84%		APBD

2 19 02 2.01 03	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing	Malinau	100%		
2 19 02 2.01 09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab/Kota	Jumlah Data yang Diperoleh	Malinau	9 Kec	83.727.000	APBD
2 19 02 2.02	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Jumlah Siswa yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan	Malinau	54 Orang	750.000.000	APBD
2 19 02 2.02 01	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Malinau	5,78%		
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	Jumlah Data yang diperoleh	Malinau	9 Kec	83.727.000	APBD
		Jumlah Dana Hibah Milenial	Malinau	1 Paket	200.000.000	APBD
2 19 02 2.02 02		Jumlah Dana Hibah KNPI	Malinau	1 Paket	250.000.000	APBD
2 19 03	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Data dan Pemuda Yang Mengikuti Pelatihan	Malinau	90 Orang	262.905.000	APBD
2 19 03 2.01	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	Malinau	6 Cabor		APBD

2 19 03 2.03 04	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet yang Berprestasi	Malinau	80%		
2 19 03 2.03 05	Pemberian Penghargaan Olahraga Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi	Malinau	45 Org	233.610.000	APBD
2 19 03 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data yang Diperoleh	Malinau	9 Kec	83.727.000	APBD
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Atlit Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi	Malinau			
2 19 03 2.04 02	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Malinau	60%		
2 19 03 2.04 03	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Cabang Olahraga yang dibina	Malinau	6 Cabor	436.468.000	APBD
2 19 03 2.04 01	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dana Hibah KONI	Malinau	1 Paket	1.000.000.000	
2 19 03 2.05	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Standarisasi Organisasi Olahraga	Malinau			
2 19 03 2.05 01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan Olahraga	Malinau	80%		
2 19 03 2.05 03	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Haornas dan Instruktur Senam	Malinau	1 Paket	100.000.000	APBD

2 19 04	Penyediaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Malinau			
2 19 04 2.01	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pramuka yang dibina	Malinau			
2 19 04 2.01 02	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang dibina	Malinau			
2 19 04 2.01 05	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Dana Hibah Pramuka	Malinau	1 Paket	150.000.000	APBD
2 19 04 2.01 06	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Malinau			
2 19 04 2.01 08	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan	Malinau			
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Partisipasi Kegiatan Kepramukaan	Malinau			
	KEBUDAYAAN					
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
3. 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Persentase kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkntoran dan sarana prasarana aparatur yang memadai				
2. 22. 02. 2.02	Pelestarian kesenian tradisional yang masayarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sanggar seni				

2. 22. 02. 2.02. 02	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan paranata tradisional	Terselenggaranya pembinaan sanggar seni dan festival seni budaya nusantara	Dalam dan Luar daerah	2 keg	415.000.000	APBD II
2. 22. 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian warisan budaya				
2. 22. 05. 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah warisan budaya yang dilestarikan				
2. 22. 05. 2.02. 02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan Kehancuran atau kemusnahan cagar budaya	Terpeliharanya cagar budaya	Kab. Malinau	1 cagar	750.000.000	APBD II
	PERPUSTAKAAN					
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
2 3	Wajib / Urusan Pemerintah tidak berkaitan dgn pelayanan dasar					
2 0 3 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase anggaran Program Penunjang Terhadap Total Anggaran	Malinau	1,000		
2 0 02 3 1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan administrasi Keuangan	Malinau	1,000		
2 01 02 02 3	Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Terbayar selama 12 Bulan	Malinau	33 Orang	4.111.830.398	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Memperoleh Pelayanan administrasi Umum	Malinau	1		

2 3	01	02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasionall	Jumlah Kendaraan Dinas/ perizinan kendaraan dinas/operasional yg terpelihara.	Malinau	5 Unit	20.000.000	APBD
X X X					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	7 Jenis	50.000.000	APBD
2 3	01	2	06	04	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah (130.000.000)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi tiap tahun	Malinau	12 Kali	130.000.000	APBD
2 3	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah brg Cetak dan Penggandaan	Malinau	5 Jenis	20.000.000	APBD
2 3	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Mkn mnm rapat)	Jumlah makan minum	Malinau	400 Kotak	10.000.000	APBD
2 3	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan/Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perlengkapan kantor yg diperbaiki	Malinau	5 Jenis	18.000.000	APBD
2 4	3				Program Perlindungan dan penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Yang dapat diselamatkan	Malinau	0,65		
2 4	3	2	03		Kegiatan : Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten Kota Yang di gabung dan Atau Di bubarkan dan Pemekaran daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Terselamatnya arsip OPD / Perangkat Daerah	Malinau	1		
2 4	03	2	03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran prangkat daerah kab/kota.	Jumlah OPD yang arsipnya diselamatkan	Malinau	1 OPD	15.000.000	APBD

2 4	2					Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip Yang dapat diKelola	Malinau	1		
						Kegiatan : Pengelolaan simpul jaringan informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan Tingkat Kab/Kota	Malinau	1		
2 4	2	2	01	01		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD, Ormas/orpol,kecamatan yg mendapatkan Pembinaan Kearsipan	Malinau	30 Orang	15.000.000	APBD
2 4	2	2	01	02		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis (10.000.000)	Jumlah daftar arsip In -aktif	Malinau	5 Daftar	10.000.000	APBD
2 4	2	2	01	03		Pengawasan arsip Dinamis kewenangan Kab/kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan arsip Dinamis di 4 OPD	Malinau	4 OPD	15.000.000	APBD
2 4	2	2	03	01		Penyediaan Informasi Akses dan layanan kearsipan tingkat Kab/Kota	Jumlah Pedoman yang disusun.	Malinau	3 Pedoman	100.000.000	APBD
2 4	2	2	03	02		Pemberdayaan Kapasitas unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana kearsipan yang tersedia	Malinau	3 Jenis	57.000.000	APBD
2 3	2					Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Yang mendapatkan Pembinaan	Malinau	1		
						Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Layanan Perpustakaan dan Kunjungan ke Sekolah	Malinau	1		

2 3	2	2	02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah sekolah yang terlayani	Malinau	18 Sekolah	20.000.000	APBD
2 3	2	2	01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada satuan Pendidikan dasar di seluruh wilayah Kab/Kota sesuai standar Nasional Perpustakaan	Jumlah SDM Perpustakaan yang mendapatkan pembinaan perpustakaan	Malinau	50 Orang	20.000.000	APBD
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
					KELAUTAN DAN PERIKANAN					
					Dinas Perikanan					
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Malinau	1,000		
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	1,000		
					Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Malinau	12 Bulan	3.841.778.808	APBD
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	1		
					Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat – rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Dalam dan Luar Daerah	45 Kali	150.000.000	APBD
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	1		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan ATK	SKPD	42 Jenis	40.000.000	APBD
X .					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD	80 Buku	23.400.000	APBD

X X X	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor	SKPD	3 jenis	6.600.000	APBD
3 . 2 5 .	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi perikanan tangkap	Kab. Malinau	1		
3 25 03 2.01 01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data dan Sarana Perikanan Tangkap	Kab. Malinau	1		
3 . 2 5 .	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah dokumen statistic perikanan tangkap	Kab. Malinau	1 Dokumen	25.000.000	APBD II
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Benih Ikan yang diterbarkan diperairan umum	Kab. Malinau	2 jenis	100.000.000	APBD II
3 25 03 2.02	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah dokumen kajian inventarisasi ikan local di perairan umum	Kab. Malinau	1 dokumen	250000000	APBD II
3 25 03 2.02 01	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten Kota					
3 25 04	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan	Kab. Malinau	10 kelompok	100.000.000	APBD II
3 25 04 2.01	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Produksi Perikanan budidaya	Kab. Malinau	1		
3 25 04 2.01 01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaa Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Persentase Ketersdiaan Dokumen Ijin Usaha Perikanan	Kab. Malinau	1		
3 25 04 2.02	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi,	Jumlah dokumen SOP dan syarat penerbitan izin usaha perikanan budidaya	Kab. Malinau	1Dokume n	25.000.000	APBD II

	dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Sem Intensif, dan Intensif, Serta Tidaka Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing					
3 25 04 2.02 04	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase Pembudidaya yang terlatih	3 Kecamatan	1		
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pembudidaya yang dilatih cara pembuatan pakan ikan	3 Kecamatan	75 Orang	46.250.000	APBD II
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pembudidaya yang dilatih cara pembenihan ikan	3 Kecamatan	75 Orang	48.500.000	APBD II
3 25 04 2.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah tenaga penyuluh perikanan	Kab. Malinau	2 Orang	60.000.000	APBD II
3 25 04 2.04 01	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Malinau	1		
3 25 04 2.04 03	Penyediaan Data dan Informasi Pembudiayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistic perikanan budiaya	Kab. Malinau	1 Dokumen	37010000	APBD II
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu)derah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan BBM, Obat-obatan	BBI Kaliamok	23 Jenis	120.000.000	APBD II
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu)derah Kabupaten/Kota	Jumlah Induk dan pakan ikan	BBI Kaliamok	3 Jenis	109.830.000	APBD II

3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu)derah Kabupaten/Kota	Jumlah benih ikan dan pakan ikan	3 Kecamatan	4 Jenis	329.800.000	APBD II
3 25 06	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu)derah Kabupaten/Kota	Jumlah mesin pembuat pakan ikan	BBI Kaliamok	1 Unit	137.550.000	APBD II
3 25 06 2.03	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan	Kab. Malinau	1		
3 25 06 2.03 02	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan penggunaan bahan baku untuk industri pengolahan	Kab. Malinau	1		
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah mesin pengolahan ikan	Kab. Malinau	Unit	100.000.000	APBD II
	PERTANIAN					
Dinas Pertanian						
x xx 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pembayaran gaji ASN Dinas Pertanian	Kab. Malinau	100%		APBD II
	Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang terbayar	Malinau	12 bulan	8.343.717.963	APBD
x xx 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Produksi danProduktivitas Perkebunan	Kab. Malinau	100%		APBD II
x xx 0 1 2 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan	Kab. Malianu	1		
x xx 0 1 2 . 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya alat Pemecah Biji Kopi		2 Unit	100.000.000	

3	27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan	Kab. Malinau	100%		APBD II
3	27	02	2.01		Pangawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan sarana produksi	Kab. Malinau	24 Kali		
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Produksi	Tersedianya sarana pendamping produksi	Kab. Malinau	23 Kali	410.900.000	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Produktivitas pertanian per hektar per tahun				
3	27	02	2.02	01	Penjamin Kemurnian dan Kelestraian SDG Hewan/Tanaman	Tersedianya Sarana pendamping produksi laboratorium POH	Kab. Malinau	1 Lab	52.000.000	
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/tumbuhan	Tersedianya tenaga teknis Pemulia Tanaman dan Koleksi Plasma Nutfah	Kab. Malinau	2 org	144.800.000	
Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)**			
							Lokasi	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Peningkatan Produksi Peternakan		80%		
3	27	02	2.06	01	Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Bibit ternak sapi unggul	Kab. Malinau	10 ekor	208.000.000	

3	2 7	0 2	2 . 06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya darai Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya benih padi unggul dan Jagung	Kab. Malinau	7,5 Ton	418.008.800	
3	2 7	0 3			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang disediakan	Kab.Malina u	100%		APBD II
3	2 7	0 3	2 . 01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Kab. Malinau	100%		
3	2 7	0 3	2 . 01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan pertanian Paangan Bekelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Terlaksananya Optimalisasi Lahan Sawah		24 Ha	562.200.000	
3	2 7	0 3	2 . 01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasaranan Pendukung Pertanian lainnya.	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Malinau	1 dokumen	200.000.000	
3	2 7	0 3	2 . 01	04	Penyusunan masterplan pengembangan prasarana sarana kawasan dan komoditas perkebunan	Tersusunnya masterplan pengembangan prasarana sarana kawasan dan komoditas perkebunan	Kab. Malinau	1 dokumen	100.000.000	
3	2 7	0 3	2 . 02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan Prasarana Pertanian	Kab. Malinau	100%		
3	2 7	0 3	2 . 02	05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Panjang Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Kab. Malinau	1 Unit	245.020.000	
3	2 7	0 4			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Malinau	100%		APBD II

3	2 7	0 4	2 . 02		Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah penyakit Hewan menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesehatan Hewan Ternak	Kab. Malinau	100%		
3	2 7	0 4	2 . 02	02	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksanya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Malinau	98%	150.000.000	
3	2 7	0 4	2 . 02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pengawasan Terhadap Keluar masuknya Hewan dan Produk Hewan	Kab.malina u	100%		
3	2 7	0 4	2 . 02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Malinau	1 dokumen	40.000.000	
3	2 7	0 4			Penerapan dan Pengawasan Persaratan Teknis Kesehatan Masyarakat verteriner	Peningkatan Pengawasan Terhadap Masyarakat Veteriner	Kab. Malinau	100%		
3	2 7	0 4	2 .04	01	Pendampingan Unit Usaha dan Produk Hewan	Tersedianya operasional UPTD Pembibitan dan Pabrik Pakan Ternak	Kab. Malinau	1 uptd pabrik pakan	200.000.000	
3	2 7	0 4	2 . 04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk hewan	Terpantaunya Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk hewan	Kab. Malinau	1 dokumen	100.000.000	
3	2 7	0 6			Program Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan Perizinan Usaha Pertanian	Kab. Malinau	100%		APBD II
3	2 7	0 6	2 . 01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanaya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan penilaian dan pemberian pertimbangan izin usaha pertanian		100%		

3	2 7 0 6 . 2 01 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian pertimbangan teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya penilaian dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	Kab. Malinau	2 ijin	49.396.000	
3	2 7 0 7	Program Penyuluh Pertanian	Peningkatan Penyuluhan Pertanian	Kab. Malinau	100%		APBD II
3	2 7 0 7 . 2 01	Pelaksana Penyuluh Pertanian	Terlaksananya Penyuluh Pertanian	kab.malina u	100%		
3	2 7 0 7 . 2 01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian diKecamatan dan Desa	Tersedinya Pengadaan PPL dan BOP PPL	Kab. Malinau	70 org	2.047.075.20 0	
3	2 7 0 7 . 2 01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa	Tersedianya Operasional KTNA	Kab. Malinau	1 lembaga KTNA	50.000.000	
		PERDAGANGAN					
Dinas Perindustrian dan Perdagangan							
		Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase diklat perkoperasian yang diadakan	Kab. Malinau	10%		
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	Kab. Malinau	24,59%		
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Kabupaten/kota.	Jumlah peserta pelatihan	Kab. Malinau	50 orang		
		rincian kegiatan :					

	1. Pendampingan Penyusunan Laporan RAT Koperasi dan tata cara penyelenggaraanya.	Jumlah koperasi yang didampingi	Kab. Malinau	30 koperasi	100.000.000	
	2. Pelatihan Peningkatan SDM Tata kelola Koperasi.	Jumlah peserta pelatihan	Kab. Malinau	50 orang	100.000.000	
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Kab. Malinau	10%		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UKM yang dibina dan diberdayakan	Kab. Malinau	0,03		
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Malinau	100 orang		
	rincian kegiatan :					
	1. Pembinaan dan evaluasi usaha UKM yang mendapat pinjaman dana perkuatan permodalan dari Pemerintah.	Jumlah UKM yang diberdayakan	Kab. Malinau	100 orang	50.000.000	

	2. Pembinaan dan Pemutakhiran data UMKM Kabupaten Malinau	Jumlah UKM yang didata	Kab. Malinau	2500 UKM	150.000.000	
	3. Pekan promosi produk UMKM	Jumlah pekan promosi yang diadakan	Kab. Malinau	10 pekan	200.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	luar daerah	4 kali	80.000.000	
	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase kegiatan standarisasi dan perlindungan konsumen yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kab. Malinau	4,00%		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Kab. Malinau	0,758		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UUTP yang ditera ulang	Kab. Malinau	200 alat	100.000.000	

	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan	Kab. Malinau	0,05		
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tengah masyarakat	Kab. Malinau	100%		
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilakukan/tahun	Kab. Malinau	3 kegiatan		
	rincian kegiatan :					
	1. Monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis.	Jumlah monitoring yang dilakukan	Kab. Malinau	12 kali	100.000.000	
	2. Pasar Murah	Jumlah pasar murah yang diadakan	Kab. Malinau	4 pasar	300.000.000	

	3. Pengawasan barang beredar	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kab. Malinau	12 kali	100.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	luar daerah	4 kali	80.000.000	
	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Kab. Malinau	0,222		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kab. Malinau	22,20%		
	Pemberdayaan pengelola sarana disribusi Perdagangan	Jumlah pemberdayaan yang dilakukan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Kab. Malinau	3 kegiatan		
	rincian kegiatan :					

	1. Penempatan petugas kebersihan pasar induk	Jumlah petugas	Kab. Malinau	7 orang	210.000.000	
	2. Pengawasan dan monitoring kegiatan pasar di Kab. Malinau	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kab. Malinau	10 Kali	250.000.000	
	3. Operasional pendukung kegiatan bidang pasar	Jumlah kebutuhan	Kab. Malinau	1 tahun	200.000.000	
	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kab/Kota	Kab. Malinau	11,80%		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Persentse kegiatan industri yang dievaluasi	Kab. Malinau	10%		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah kegiatan yang dilakukan	Kab. Malinau	7 kegiatan		

	rincian kegiatan :					
	1. Pembinaan dan pemutakhiran data IKM Kab. Malinau	Jumlah IKM yang terdata	Kab. Malinau	1300 unit	50.000.000	
	2. Promosi Produk IKM	Jumlah promosi yang dilakukan	Kab. Malinau	2 kali	75.000.000	
	3. Koordinasi dan konsultasi bidang Industri dan TTG ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Luar daerah	1 kali	45.000.000	
	4. Rehab Showroom Produk IKM dan fasilitasnya	Jumlah showroom	Kab. Malinau	1 unit	1.300.000.000	
	5. Rehab gedung penggilingan padi dan fasilitas lainnya	Jumlah gedung	Kab. Malinau	1 unit	500.000.000	

	6. Pembangunan gudang beras	Jumlah gudang	Kab. Malinau	1 unit	1.000.000.000	
	7. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Malinau 2022 - 2035	Jumlah kegiatan	Kab. Malinau	1 kegiatan	350.000.000	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keg. Penunjang urusan pemerintahan	Kab. Malinau	0,2		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan	Kab. Malinau	1		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi	Kab. Malinau	5 kali	7.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi	Kab. Malinau	5 kali	7.500.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya kegiatan	Kab. Malinau	1		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan	Kab. Malinau	12 bulan	5.081.168.003	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi	Kab. Malinau	5 kali	7.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi	Kab. Malinau	5 kali	7.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi	Kab. Malinau	5 kali	7.500.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksanannya kegiatan	Kab. Malinau	1		

	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah koordinasi	Kab. Malinau	5 kali	7.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanannya kegiatan	Kab. Malinau	1		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi	Kab. Malinau	5 kali	7.500.000	
	Penataan Organisasi	Terlaksanannya kegiatan	Kab. Malinau	1		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi	Kab. Malinau	5 kali	7.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya kegiatan	Kab. Malinau	1		

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan ATK	Kab. Malinau	4 kali	100.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat	Kab. Malinau	4 alat	150.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan	Kab. Malinau	2 kali	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya kegiatan	Kab. Malinau	1		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honor	Kab. Malinau	7 orang	200.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya kegiatan	Kab. Malinau	1		

	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan	Kab. Malinau	2 kali	100.000.000	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Terlaksananya kegiatan DAK Non Fisik	Malinau	1 Kegiatan		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan DAK Non Fisik	Malinau	300 orang		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta pelatihan	Kab. Malinau, Semua Kec., Semua Kelurahan	300 orang	390.304.000	DAK
	UNSUR PENDUDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DAERAH						
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan	1			

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Penunjang Pelaksanaan Kegiatan perkantoran	4 Sub Kegiatan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Malinau	1	68.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kab. Malinau	30 Kali	66.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diterima sub bagian	Kab. Malinau	22 Jenis	55.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Kab. Malinau	1 Laporan	250.000.000	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dilaksanakan	1			

	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Administrasi Pemerintahan yang Dilaksanakan	3 Sub Kegiatan			
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah LPPD yang Disusun	Kab. Malinau	1 Laporan	195.000.000	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jangka Waktu Koordinasi dan Pembinaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	Kab. Malinau	4 Kecamatan	200.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Wilayah yang Diperjelas dan Dipertegas Batas-Batasnya	Kab. Malinau	4 Kecamatan	66.000.000	
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dilaksanakan	1			
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan yang Dilaksanakan	4 Sub Kegiatan			

	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Bina Mental Spiritual Yang di fasilitasi	Kab. Malinau	50 Kegiatan	8.150.000.000	APBD
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Malinau	500 Orang	2.140.000.000	APBD
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan Yang di Fasilitasi	Kab. Malinau	40 Kegiatan	1.050.000.000	APBD
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah ATK yang di Terima Setiap Sub Bagian	Kab. Malinau	18 Jenis	50.000.000	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan	1			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Penunjang Pelaksanaan Kegiatan perkantoran	1 Sub Kegiatan			

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kab. Malinau	10 Kali	100.000.000	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	1 Sub Kegiatan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang dirawat dan dipelihara	Kab. Malinau	10 Unit	10.000.000	APBD
BAGIAN HUKUM						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan	1			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Penunjang Pelaksanaan Kegiatan perkantoran	2 Sub Kegiatan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang diterima setiap sub bagian	Kab. Malinau	10 Jenis	30.000.000	APBD

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kab. Malinau	15 kali	110.000.000	APBD
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dilaksanakan	1			
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan, Penanganan Perkara Hukum dan Pengelolaan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	3 Sub Kegiatan			
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Kab. Malinau	200 produk hukum	210.000.000	APBD
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Penanganan Perkara Hukum Pemda dan jumlah bantuan Hukum serta pelaksanaan Ranham dan Kabupaten Kota Peduli Ham	Kab. Malinau	1 perkara dan 1 laporan Ranham/ KKP Ham	230.000.000	APBD
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah penyebaran informasi produk hukum melalui website dan pelaksanaan penyuluhan hukum	Kab. Malinau	1 Aplikasi dan 4 Kecamata n	220.000.000	APBD
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA						

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan	1			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Habis Pakai	2 Sub Kegiatan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang diterima setiap subbagian	Kab. Malinau	27 Jenis	60.000.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	Kab. Malinau	18 Kali	100.000.000	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	1 Sub Kegiatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas dalam Kondisi Baik	Kab. Malinau	1 Unit R4, 3 Unit R2	30.000.000	APBD

	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Monitoring, Verifikasi dan Validasi serta Koordinasi Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan	1			
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Koordinasi dan Kebijakan Pembangunan di Bidang Perekonomian Daerah	3 Sub Kegiatan	2 BUMD 1 BLUD		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD dan BLUD yang dibina	Kab. Malinau	698 RTSPM dan 8 Penyalur BBM/LPG	150.000.000	APBD
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah RTSPM yang mendapat program RASDA serta jumlah Kouta BBM/LPG yang dikendalikan dan didistribusikan	Kab. Malinau	1 Laporan	550.000.000	APBD
Kode	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)**			
			Lokasi	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Usaha Mikro Kecil yang dibina	Kab. Malinau	1	110.000.000	APBD
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan	1			

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Penunjang Pelaksanaan Kegiatan perkantoran	5 Sub Kegiatan			
	Penyediaan peralatan dan pelengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kab. Malinau	4 jenis	35.000.000	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia dalam setiap rapat internal	Kab. Malinau	12 kali	12.000.000	APBD
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang diterima setiap sub bagian	Kab. Malinau	20 jenis	75.000.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kab. Malinau	15 kali	125.000.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan	Kab. Malinau	7692 dok.	10.000.000	APBD
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	1 Sub Kegiatan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Buku Laporan Kegiatan Belanja Langsung Kabupaten Malinau	Kab. Malinau	72 Buku	90.000.000	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan BMD yang Dipelihara	1 Sub Kegiatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dirawat dan kelengkapan administrasi kendaraan	Kab. Malinau	1 unit	15.000.000	APBD

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan yang Dilaksanakan	2 Sub Kegiatan			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian.verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah OPD yang dokumen kontraknya telah diverifikasi	Kab. Malinau	47 OPD	90.000.000	APBD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah buku data pembangunan Kab. Malinau	Kab. Malinau	70 Buku	90.000.000	APBD
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Monitoring, Verifikasi dan Validasi serta Koordinasi Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan	1			
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Kegiatan Administrasi Pembangunan yang Dilaksanakan	3 Sub Kegiatan			
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan program melalui verifikasi dan validasi serta koordinasi penyusunan program	Kab. Malinau	3 Kegiatan	108.000.000	APBD
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah wilayah Kecamatan yang dimonitoring, dibina dan dievaluasi	Kab. Malinau	15 Kec.	150.000.000	APBD
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah evaluasi pelaksanaan pembangunan melalui rapat koordinasi pengendalian	Kab. Malinau	2 kali	100.000.000	APBD
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan	1			

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Penunjang Pelaksanaan Kegiatan perkantoran	2 Sub Kegiatan			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	Kab. Malinau	22 Jenis	28.032.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah	Kab. Malinau	14 orang	75.000.000	APBD
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Monitoring, Verifikasi dan Validasi serta Koordinasi Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan	1			
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Layanan Pengadaan Barang/Jasa	3 Sub Kegiatan			
	Penyediaan Bandwitdh Internet Perangkat Komputer Server LPSE (Bandwitdh Internet Dedicated Telkom Astinet)	Jumlah Bandwitdh Internet Telkom Astinet Dedicated yang tersedia	Kab. Malinau	15 MBps	235.168.000	APBD
	Penyediaan Bandwitdh Internet WIFI .ID (Peruntukan Ruang Bidding LPSE, layanan untuk penyedia)	Jumlah Bandwitdh Internet WIFI.ID yang tersedia	Kab. Malinau	20 MBps	11.800.000	APBD
	Pengadaan Perangkat Server LPSE (peremajaan)	Jumlah Perangkat Server yang terbaharui	Kab. Malinau	1 Unit	70.000.000	APBD
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2 Sub Kegiatan			

	Peningkatan Kapasitas Tenaga ULP, LPSE dan Advokasi PBJ	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas	Kab. Malinau	16 ASN	100.000.000	APBD
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tugas, Fungsi dan Resiko Kerja UKPBJ	Jumlah ASN yang memperoleh tambahan penghasilan	Kab. Malinau	16 ASN	480.000.000	APBD
BAGIAN UMUM						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran	1			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan admisistrasi umum	5 Sub Kegiatan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Malinau	8 jenis	200.992.000	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Malinau	3 jenis	598.990.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Buku yang di cetak	Kab. Malinau	3091 pcs	199.754.000	APBD
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor yang di sediakan	Kab. Malinau	18 jenis	298.789.000	APBD

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kab. Malinau	15 kali	99.358.000	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang di adakan	3 Sub Kegiatan			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kendaraan Dinas yang dibutuhkan	Kab. Malinau	2 unit	875.487.658	APBD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya barang mebel	Kab. Malinau	63 unit	199.930.300	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana barang milik daerah	Kab. Malinau	7 jenis	1.099.989.312	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di sediakan	3 Sub Kegiatan			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Malinau	12 bulan	6.804.680.012	APBD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Malinau	12 bulan	182.581.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Kab. Malinau	12 bulan	2.552.818.968	APBD

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	3 Sub Kegiatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Barang Milik Daerah	Kab. Malinau	62 Unit	561.994.600	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Malinau	6 gedung	399.993.000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Malinau	8 Kegiatan	6.524.871.250	APBD
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitas Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang di Sediakan	3 Sub Kegiatan			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	Kab. Malinau	12 bulan	2.526.914.000	APBD
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Malinau	12 bulan	1.021.759.000	APBD
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	Kab. Malinau	5 Jenis	851.097.900	APBD
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran	1			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Sub Kegiatan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang diterima sub bagian	Kab. Malinau	12 Jenis	50.000.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	Kab. Malinau	1 Jenis	100.000.000	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran	1			
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Sub Kegiatan			
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Cindramata untuk pejabat negara/Dep/LPLN/LN yang berkunjung ke Kab.Malinau	Kab. Malinau	4 Jenis	200.000.000	APBD
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Wilayah yang dikunjungi KDH/WKDH dalam rangka inspeksi	Kab. Malinau	5 Kec	100.000.000	APBD
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Media informasi pembangunan daerah	Kab. Malinau	11 Media	1.050.000.000	APBD

	BAGIAN ORGANISASI					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan	1			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di sediakan	2 Sub Kegiatan			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	Kab. Malinau	20 Jenis	50.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorer	Kab. Malinau	1 orang	24.000.000	APBD
	Penataan Organisasi	Jumlah Organisasi yang Ditata	5 Sub Kegiatan			
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perbup yang Disusun	Kab. Malinau	1 SOTK 1 SKJ 1 Anjab ABK	476.000.000	APBD
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah OPD yg melaksanakan pelayanan publik	Kab. Malinau	6 OPD	470.000.000	APBD
		Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan SOP dan Peta Proses Bisnis	Kab. Malinau	53 OPD		

	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang Didampingi dalam Pengisian LKE PMPRB	Kab. Malinau	10 OPD	170.000.000	APBD
	Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Monev	Kab. Malinau	6 Kali	30.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang didampingi dalam Penyusunan Laporan Kinerja	Kab. Malinau	45 OPD	280.000.000	APBD
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan	1			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan yang Dilaksanakan	3 Sub Kegiatan			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Kab. Malinau	165 Orang	22.472.606.470	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun	Kab. Malinau	2 Buku	50.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun	Kab. Malinau	18 Buku	150.000.000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Penunjang Pelaksanaan Kegiatan perkantoran	2 Sub Kegiatan			
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang Tersedia	Kab. Malinau	20 Jenis	50.000.000	APBD

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	Kab. Malinau	20 Kali	200.000.000	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	3 Sub Kegiatan			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	Kab. Malinau	2 Dokumen	200.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	Kab. Malinau	2 Dokumen	50.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang Disusun	Kab. Malinau	1 Dokumen	100.000.000	APBD
	PENGELOLAAN PERBATASAN					
	Badan Pengelolaan Perbatasan Negara					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelayanan prima yang terlaksana	Kab. Malinau	100%	-	APBD II
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pelayanan Administrasi perangkat Daerah	Kab. Malinau	100%		APBD II
	Sub.Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malinau	24 ASN	3.484.137.954	APBD II
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Malinau	100%		

	Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)	Malinau	21 Jenis	30.000.000	APBD II
	Sub.Kegiatan Penyediaan Barang Cerak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Malinau	3 Jenis	10.000.000	APBD II
	Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinansi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	Dalam dan Luar Daerah	35 Kali	440.000.000	APBD II
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Perbaikan Peralatan Kerja/Kantor	Kab. Malinau	100%		APBD II
	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja/Kantor yang diperbaiki	Malinau	12 unit	5.000.000	APBD II
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Kendaraan Dinas Oprasional	Malinau	100%		APBD II
	Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional yang dirawat dan dipelihara	Kab. Malinau	1 Unit	15.000.000	APBD II
	Program Pengelolaan Perbatasan	Cakupan Kawasan Perbatasan yang dikelola	Kab. Malinau	100%	-	APBD II
	Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	Prosentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	Kab. Malinau	100%		APBD II
	Sub.Kegiatan Koordinasi,Integrasi, dan sinkronisasi Kebijakan otonomi Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi,integrasi dan sinkronisasi Kebijakan otonomi Daerah yang dilakukan	Kab. Malinau	1 Dokumen	50.000.000	APBD II
	Sub.Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi yang disusun	Kab. Malinau	1 Dokumen	50.000.000	APBD II

	Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Prosentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Kab. Malinau	100%		APBD II
	Sub.Kegiatan Koordinasi, Integrasi,dan sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Koordnasi,Integrasi dan sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilakukan	Kab. Malinau	1 Dokumen	50.000.000	APBD II
	Sub.Kegiatan Koordinasi,Integrasi,dan sinkronisasi pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Koordinasi,Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan yang dilakukan	Kab. Malinau	1Dokume n	50.000.000	APBD II
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Prosentase Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	100%	100%		APBD II
	Sub.Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pengendalian Pengawasan serta evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilakukan	Kab. Malinau	1 Dokumen	50.000.000	APBD II
	Sub.Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kab. Malinau	1 Dokumen	50.000.000	APBD II
	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Anggaran Program Penunjang terhadap Total Anggaran	Malinau dan Luar Malinau	1		APBD
4.02.01.2.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan	Malinau	1		APBD
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan tunjangannya terpenuhi	Malinau	32 orang	5.534.345.771	APBD
4.02.01.2.06.04	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Malinau dan Luar Malinau	1		APBD

4.02.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis Kantor, barang peralatan Listrik, alat/ bahan untuk kegiatan kantor	Malinau	14 jenis 7 jenis 5 jenis	155.000.000	APBD
4.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah bahan bakar dan pelumas, makan dan minum rapat, makan dan minum jamuan tamu	Malianu	11,95 ton300 porsi prasman a n3600kot ak	174.510.129	APBD
4.02.01.2.06.09	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	jumlah jenis barang cetak dan pengadaan	Malianu	10 jenis	50.000.000	APBD
4.02.01.2.05	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan -undangan	Jumlah Bahan bacaan dan buku peraturan Perundang-undangan	Malianu	7000 eks koran	20.000.500	APBD
4.02.01.2.11	penyelengaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Luar Malinau	8 kali	99.992.000	APBD
4.02.01.2.07	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian	Luar Malinau	1		APBD
4.02.01.2.07.11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Perserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Luar Malinau	18 orang	299.904.000	APBD
4.02.01.2.08	Pengadaan Barang Milik	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pengadaan barang milik Daerah	Malinau	1		APBD
4.02.01.2.08.02	Pengadaan Sarana dan Prasaranan pedukung gedung kator dan bagunan lainnya	Luas lokasi rumah dinas DPRD yang dipagar keliling	Malinau	1320 M	639.135.601	APBD
4.02.01.2.08.04	Penunjang Urusan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Malinau	1		APBD

4.02.01.2.09	Penyediaan jasa Komonikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Komonikasi, sumber daya air dan Listrik	Malinau	3 Jenis	350.000.000	APBD
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga ahli, tenaga Kontrak, tenaga keamanan dan asisten rumah tangga unsur pimpinan, tenaga kebersihan taman & Gedung Kantor	Malinau	10 orang 70 orang 1 paket	2.893.618.490	APBD
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan Jasa Pemeliharaan barang milik darah	Malinau	1		APBD
4.02.01.2.09.11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharan kendaraan dinasdan perpanjangan STNK	Malinau	10 kendaraa n	108.990.000	APBD
4.02.01.2.15	Pemeliharaan/ rehalibitas Gedung Kantor dan bagunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang direhalibitasi dan terpelihara	Malinau	20 rumdin	1.000.000.000	APBD
4.02.01.2.11.02	Pemeliharaan/ Rehalibitas Sarana dan Pra-sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Malinau	15 unit	29.980.000	APBD
4.02.01.2.11.03	layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Malinau dan Luar Malinau	1		APBD
4.02.01.2.16	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Gaji dan Tunjangannya terpenuhi	Malinau	1 Tahun	12.000.000.000	APBD
4.02.01.2.16.03	Penyediaan Pakaian dinas dan Atribut	Jumlah pakaian dinas pimpinan, anggota DPRD	Malinau	80 stel	190.000.000	APBD
4.02.01.2.16.04	pelaksanan medical check-up DPRD	Jumlah pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Check-up	Luar Malinau	20 orang	758.190.000	APBD
# #	Layanan Administrsi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Malinau dan Luar Malinau	1		APBD

4.02.02.2.01	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah, Tokoh masyarakat/ tokoh agama	Malinau	12 kali	209.196.500	APBD
4.02.02.2.01.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Unsur Pimpinan yang Kebutuhan Rumah Tangganya terpenuhi	Malinau	3 orang	2.999.998.000	APBD
4.02.02.2.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Malinau dan Luar Malinau	1		APBD
4.02.02.2.02.03	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Malinau dan Luar Malinau	1		APBD
4.02.02.2.02.06	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	Malinau dan Luar Malinau	10 Raperda	2.316.524.500	APBD
4.02.02.2.03	Pembahasan kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Malinau	1		APBD
4.02.02.2.03.03	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan	Malinau	25 kali	330.576.000	APBD
4.02.02.2.04	Pembahasan Pertanggungan APBD	Jumlah Rapat Paripurna Istimewa yang dilaksanakan	Malinau	3 kali	552.300.000	APBD
4.02.02.2.04.02	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Dalam Kab Malinau	1		APBD
4.02.02.2.04.03	Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kecamatan yang dikunjungi pada Musrembang	Dalam Kab Malinau	15 Kecamat a n	367.804.880	APBD
4.02.02.2.05	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Malinau dan Luar Malinau	1		APBD

4.02.02.2.05.01	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis	Luar Malinau	20 orang	1.429.275.000	APBD
4.02.02.2.05.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Informasi yang disebar Melalui media massa	Malinau	4 Informasi	47.100.000	APBD
4.02.02.2.07	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dalam Kab Malinau	1		APBD
4.02.02.2.07.01	Kunjungan Kerja dalam daerah	Jumlah Kunker Gab.komisi dan Kunker Alat Kelengkapan Dewan yang terlaksana	Dalam Kab Malinau	6 kali	1.256.826.400	APBD
4.02.02.2.08	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses di kecamatan yang dilaksanakan	Dalam Kab Malinau	3 kali	4.716.625.000	APBD
4.02.02.2.08.01	Pembahasan Kerja sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja sama Daerah	Malianu	1		APBD
	Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama daerah	Jumlah Pengadaan Barang-barang Cindaramata	Malianu	3 jenis	30.000.000	APBD
	Fasilitas Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	Luar Malinau	1		APBD
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kunker Alat Kelengkapan Dewan ke luar Daerah, Jumlah Kunker Gab. Komisi-Komis keluar Daerah, Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah.	Luar Malinau	9 kali	3.974.453.000	APBD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

	PERENCANAAN					
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang					
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Malinau	100%		APBD
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Malinau	100%		APBD
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Malinau	57 orang	8.981.738.497	APBD
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Malinau	100%		APBD
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Malinau	4 jenis	99.726.000	APBD
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum yang tersedia	Malinau	1507 kotak	49.991.700	APBD
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Malinau	2 jenis	49.962.000	APBD
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah partisipasi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Malinau	50 Kali	499.929.600	APBD
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dukungan layanan jaringan internet	Malinau	40 mbps	75.000.000	APBD

5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Malinau	100%		APBD
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Malinau	3 jenis	19.932.000	APBD
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Malinau	41 jenis	99.291.500	APBD
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Malinau	100%		APBD
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diservice	Malinau	6 unit	150.000.000	APBD
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Malinau	100%		APBD
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan	Malinau	100%		APBD
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah peserta konsultasi publik yang mendapatkan informasi dan memberi masukan	Malinau	350 orang	48.425.000	APBD
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah OPD yang melaksanakan forum perangkat daerah dalam gabungan forum perangkat daerah	Malinau	44 OPD	75.485.000	APBD
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah	Malinau	400 orang	574.986.000	APBD
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perkada	Malinau	2 dokumen	333.288.500	APBD

5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Malinau	100%		APBD
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah buku LKPJ Bupati Malinau Tahun 2022	Malinau	50 buku	100.000.000	APBD
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil daerah	Malinau	20 buku	100.000.000	APBD
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Malinau	100%		APBD
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kegiatan monitoring evaluasi DAK, bantuan keuangan, TP dan Tepra	Malinau	1 dokumen	200.000.000	APBD
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi terhadap hasil RENJA perangkat daerah	Malinau	12 buku	102.910.000	APBD
5.01.0 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Malinau	100%		APBD
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Malinau	100%		APBD
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Malinau	19 kali	150.000.000	APBD
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah OPD yang mengikuti asistensi	Malinau	34 OPD	119.998.695	APBD
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah data pendukung pelaporan pelaksanaan dokumen APBDes	Malinau	7 kecamata n	100.000.000	APBD

5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	Malinau	1 laporan	149.999.645	APBD
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah OPD yang mengikuti asistensi	Malinau	8 OPD	30.000.000	APBD
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen data dan informasi integrasi intervensi pencegahan stunting	Malinau	1 dokumen	219.999.560	APBD
5.01.0 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Malinau	100%		APBD
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Malinau	100%		APBD
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang ekonomi	Malinau	20 kali	150.000.000	APBD
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah OPD yang mengikuti asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi	Malinau	8 OPD	30.000.000	APBD
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Malinau	1 dokumen	150.000.000	APBD
5.01.0 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Malinau	100%		APBD
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Malinau	100%		APBD

5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen review Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Malinau	Malinau	5 dokumen	350.000.000	APBD
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah OPD yang mengikuti asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Malinau	8 OPD	30.000.000	APBD
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Malinau	1 dokumen	100.000.000	APBD
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan koordinasi fasilitasi pokja PKSPAM	Malinau	1 laporan	100.000.000	APBD
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen masterplan kawasan perbatasan	Malinau	5dokume n	800.000.000	APBD
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah OPD yang mengikuti asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Malinau	11 OPD	45.000.000	APBD
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Malinau	1 dokumen	100.000.000	APBD
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Malinau	1 laporan	100.000.000	APBD
5.05.0 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dimanfaatkan	Malinau	100%		APBD
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rencana induk kelitbangan	Malinau	100%		APBD

5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah dokumen rencana kerja 5 tahun	Malinau	1 dokumen	300.000.000	APBD
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase data hasil penelitian dan pengembangan yang diakses ke website	Malinau	100%		APBD
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Malinau	1 dokumen	100.000.000	APBD
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan potensi jajanan kuliner dan batik daerah yang dimanfaatkan	Malinau	100%		APBD
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan potensi jajanan kuliner dan batik daerah	Malinau	1 dokumen	150.000.000	APBD
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan potensi ikan air tawar yang dimanfaatkan	Malinau	100%		APBD
5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan potensi ikan air tawar	Malinau	1 dokumen	350.000.000	APBD
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan potensi tanaman nanas dan jeruk yang dimanfaatkan	Malinau	100%		APBD
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan potensi tanaman nanas dan jeruk	Malinau	1 dokumen	350.000.000	APBD
	KEUANGAN					
	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah					

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan	Kabupaten Malinau	1		APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Malinau	100%		APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA BPKD T.A 2022	Kabupaten Malinau	1 kali	100.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA BPKD T.A 2022	Kabupaten Malinau	1 kali	100.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja BPKD	Kabupaten Malinau	4 Laporan	150.000.000	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kabupaten Malinau	2 Laporan	150.000.000	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Malinau	100%		APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Malinau	80 org	48.567.320.688	APBD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Terlaksananya Urusan Umum Pemerintahaan dalam Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Malinau	12 bulan	1.150.000.000	APBD
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kabupaten Malinau	100%		APBD
	Pendapatan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Pendapatan dan Wajib Pajak Baru	Kabupaten Malinau	6 Kali	600.000.000	APBD

	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Malinau	100%		APBD
	Pendataan dan Pengolahan Administasi Kepegawaian	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan Administrasi kepegawaian dan kebutuhan rutin BPKD	Kabupaten Malinau	50 Orang	2.500.000.000	APBD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Sistem Informasi SDM Aparatur Kepegawaian	Kabupaten Malinau	1 kali	150.000.000	APBD
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Terlaksananya Penyusunan TPP PNS T.A 2022	Kabupaten Malinau	1 Doc	500.000.000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Malinau	100%		APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya ATK dan Peralatan Kantor BPKD	Kabupaten Malinau	49 Jenis	200.000.000	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penunjang Administrasi Staf Ahli	Kabupaten Malinau	12 Bulan	300.000.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan Sekretariat BPKD	Kabupaten Malinau	4 Jenis	100.000.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi BPKD	Kabupaten Malinau	4 Kali	577.596.640	APBD
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Malinau	100%		APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Malinau	12 Bulan	622.403.356	APBD

	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Waktu Yang Diperlukan Untuk Penyediaan Biaya Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Malinau	12 bulan	5.000.000.000	APBD
	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	Kabupaten Malinau	100%		APBD
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihaan teknis tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Kabupaten Malinau	4 Kali	400.000.000	APBD
	Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Kapasitas sumber daya Pengelola Keuangan	Kabupaten Malinau	2 kali	200.000.000	APBD
	Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah diklat Teknis SDM Aparatur Kepegawian Pengelolaan Keuangan yang diikuti	Kabupaten Malinau	4 kali	400.000.000	APBD
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Malinau	100%		APBD
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Terselenggaranya Fasilitasi Forum Komunilasi Unsur Muspida	Kabupaten Malinau	5 Kali	500.000.000	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perde dan Perbub APBD yang ditetapkan	Kabupaten Malinau	1		APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kabupaten Malinau	1		APBD
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah waktu pelaksanaan penyusunan KUA dan PPAS	Kabupaten Malinau	1 Kali	100.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah waktu pelaksanaan penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Kabupaten Malinau	1 kali	50.000.000	APBD

	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Kabupaten Malinau	1 kali	100.000.000	APBD
	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Malinau	1 kali	100.000.000	APBD
	koordinasi, Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan penyusunan dan verifikasi DPA SKPD	Kabupaten Malinau	1 kali	25.000.000	APBD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan penyusunan dan verifikasi DPA SKPD	Kabupaten Malinau	1 kali	25.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah koordinasi penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Kabupaten Malinau	3 kali	600.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah koordinasi penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Kabupaten Malinau	3 kali	600.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah jenis pergeseran Anggaran OPD	Kabupaten Malinau	7 Dokumen	200.000.000	APBD
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah waktu pelaksanaan perencanan pendapatan	Kabupaten Malinau	1 kali	100.000.000	APBD
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan anggaran belanja daerah	Kabupaten Malinau	3 kali	300.000.000	APBD
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan penggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	Kabupaten Malinau	56 OPD	800.000.000	APBD
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kabupaten Malinau	1		APBD

	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelengaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah	Kabupaten Malinau	4 Kegiatan	500.000.000	APBD
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah OPD yang mengikuti Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan AnggaranKas	Kabupaten Malinau	56 OPD	200.000.000	APBD
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Keuangan Bukan Bank	Jumlah waktu Koordinasi Pelaksanaan Non Tunai	Kabupaten Malinau	12 bulan	100.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah, Laporan Aliran kas ,dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran perhitungan pihak Ketiga (PFK)	Jumlah kegiatan Rekonsiliasi pemotongan dan penyetoran PFK (TASPEN, BPJS, Pemotongan Pajak, IWP, Taperum/Tapera)	Kabupaten Malinau	12 Kegiatan	100.000.000	APBD
	rekonsilasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah OPD yang mengikuti Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Kabupaten Malinau	56 OPD	200.000.000	APBD
	pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah Bendahara OPD yang mengikuti pelatihan penatausahaan Keuangan	Kabupaten Malinau	56 OPD	300.000.000	APBD
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Singkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan dan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	Jumlah Pelaporan Dana Transfer Pusat dan Bantuan Keuangan Provinsi,	Kabupaten Malinau	157 Laporan	360.285.385.000	APBD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kabupaten Malinau	1		APBD
	Rekonsiliasi dan Verfikasi aset, Kewajiban , ekuitas, Pendapatan, belanja, Biaya, pendapatan-LO dan beban	Jumlah waktu pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi laporan keuangan OPD dan Daerah	Kabupaten Malinau	1 kali	150.000.000	APBD
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	Jumlah Laporan Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan semesteran OPD yang tepat waktu	Kabupaten Malinau	12 Laporan	400.000.000	APBD

	Konsulidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD dan BLUD yang Akuntabel	Kabupaten Malinau	1 Doc	300.000.000	APBD
	Koordinasai dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Malinau	Kabupaten Malinau	2 dokumen	600.000.000	APBD
	penyusunan Analisis laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	analisis laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Kabupaten Malinau	1 laporan	150.000.000	APBD
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kabupaten Malinau	1		APBD
	Inventarrisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan	Perpanjangan Lisensi Oracle	Kabupaten Malinau	1 kali	100.000.000	APBD
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kabupaten Malinau	3 kali	100.000.000	APBD
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah WaktuPembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	2 Kali	200.000.000	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketetapan waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Malinau	1		APBD
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Malinau	1		APBD
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah buku standar satuan harga barang dan jasa 2022	Kabupaten Malinau	250 buku	200.000.000	APBD

	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan laporan Penatausahaan BMD	Kabupaten Malinau	56 OPD	400.000.000	APBD
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan pengahapusan barang milik Daerah	Jumlah Laporan penghapusan dan Pemindatanganan BMD	Kabupaten Malinau	2 Laporan	200.000.000	APBD
	rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah OPD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan BMD dan Laporan barang persediaan	Kabupaten Malinau	56 OPD	200.000.000	APBD
	Penyusunan Laporan barang milik daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Aset Daerah Kab, Malinau	Kabupaten Malinau	2 kali	200.000.000	APBD
	Pembinaan Pengelolaan barang milik daerah Pemerintah kabupaten /kota	Jumlah OPD yang mengikutsertakan pengelolaan aset/barang Opd mengikuti diklat teknis	Kabupaten Malinau	56 OPD	200.000.000	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengeloaan Pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dan BPHTB	Kabupaten Malinau	1		APBD
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Malinau	100%		APBD
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Waktu Pengelolaan ZNT	Kabupaten Malinau	2 kali	200.000.000	APBD
	Analisa dan pengembangan Pajak daerah Serta Penyusunan Kebijakan pajak daerah	Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Kab. Malinau	Kabupaten Malinau	7 kali	700.000.000	APBD
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pajak Daerah Kab. Malinau	Kabupaten Malinau	1 kali	100.000.000	APBD
	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Wajib Pajak	Kabupaten Malinau	10 Jenis	200.000.000	APBD

	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Pemungutan Objek Pajak PBB P2	Kabupaten Malinau	3 kali	300.000.000	APBD
	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Pelaksanaan Penertiban dan Pengawasan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Malinau	1 kali	100.000.000	APBD
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah SPPDT PBB P2	Kabupaten Malinau	17.561 WP	100.000.000	APBD
	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Pelaporan PAD	Kabupaten Malinau	1 kali	100.000.000	APBD
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Piutang Wajib Pajak PBB P2	Kabupaten Malinau	2 Kegiatan	200.000.000	APBD
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kab. Malinau	Kabupaten Malinau	1 kali	100.000.000	APBD
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaksanaan dan pembinaan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Malinau	4 kali	400.000.000	APBD
	KEPEGAWAIAN					
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran		100%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan admisistrasi umum		100%		

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	Malinau	25 Jenis	4.424.983.338	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Malinau	5 Jenis	75.750.000	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Malinau	50 Jenis	100.000.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Malinau	4 Jenis	40.000.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat, Koordinasi dan Konsulasi yang terlaksana	Malinau dan Luar Daerah	50 Kali	400.000.000	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran		100%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		100%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasanara Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan	Malinau	1 Tahun	50.000.000	APBD
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatakan pelayanan Kepegawaian		100%		
	Pengadaan ,Pemberhetian dan Informasi Kepegawaian ASN					
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah CPNS yang mendapatkan NIP/NIPPPK	Malinau dan Luar Daerah	400 Orang	30.000.000	APBD

	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang mendapatkan Pelayanan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Pensiun	Malinau dan Luar Daerah	50 Orang	50.000.000	APBD
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terpenuhinya Database Kepegawaian yang Memadai	Malinau dan Luar Daerah	4.319 PNS	30.000.000	APBD
	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan Mutasi dan Promosi		100%		
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang Mengurus Kenaikan Pangkat	Malinau dan Luar Daerah	500 Orang	75.000.000	APBD
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti seleksi JPT Pratama	Malinau dan Luar Daerah	202 Orang	300.000.000	APBD
		Jumlah Pejabat Struktural yang dilantik				
	Kegiatan Pengembagan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi yang didapatkan ASN		100%		
	Sub.Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana	Malinau dan Tarakan	44 Orang	592.000.000	APBD
		Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan S1		40 Orang		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan		100%		
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Sosilaisasi Penegakan Hukuman Displin ASN	Malinau	7 Kecamat a n	200.000.000	APBD

		Jumlah Apel Kopri dan Hut Korpri yang terlaksana		12 Kali		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia		100%		
	Sertifikasi,Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatakn sertifikasi dan pengembangan Kompetensi		100%		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mendapat kan pendidikan dan pelatihan PKN,PKA, PKP dan Latsar	Malinau dan Luar Daerah	302 orang	1.407.250.000	APBD
	Sekretariat KORPRI					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran		100%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan admisistrasi umum		100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	Malinau		1.251.157.235	APBD
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatakan pelayanan Kepegawaian		100%		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan		100%		
		Jumlah Apel Kopri dan Hut Korpri yang terlaksana	Malinau	12 Kali	350.000.000	APBD

	UNSUR PENGAWASAN UNSUR PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					
	Inspektorat					
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pengawasan terhadap objek pemeriksaan		1		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD dan Desa yang diawasi		1		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang diperiksa	Kabupaten Malinau	3 OPD	88.930.000	APBD
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang diperiksa	Kabupaten Malinau	35 OPD	577.112.000	APBD
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan yang direviu, dinilai, dan dievaluasi	Kabupaten Malinau	5 laporan	420.475.700	APBD
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan yang direviu	Kabupaten Malinau	3 laporan	168.080.000	APBD
	Pengawasan Desa	Jumlah Obrik Desa dan RT yang diperiksa	Kabupaten Malinau	109 desa	1.102.226.300	APBD
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pemeriksaan terpadu	Kabupaten Malinau	3 laporan	25.440.000	APBD

	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dievaluasi dan rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kabupaten Malinau	162 LHE	119.242.000	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kasus terlapor yang diperiksa		1		
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah kasus yang terperiksa dan LHP Kasus yang terbit	Kabupaten Malinau	3 kasus	69.750.000	APBD
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan hibah dan bantuan sosial & PDTT	Kabupaten Malinau	3 laporan	107.654.800	APBD
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase pendampingan yang diilaksanakan		1		
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang dinilai		1		
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang dinilai SPIP	Kabupaten Malinau	10 OPD	134.900.000	APBD
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dinilai Reformasi Birokrasinya	Kabupaten Malinau	54 OPD	54.810.000	APBD
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan terkait whistle blowing system	Kabupaten Malinau	1 laporan	56.440.000	APBD
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan	Kabupaten Malinau	3 laporan	405.913.750	APBD

	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan	Kabupaten Malinau	3 laporan	434.503.100	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan penunjang				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan gaji				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kabupaten Malinau	36 orang	7.692.370.124	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pelaksanaan tugas		1		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang tersedia	Kabupaten Malinau	36 unit	45.000.000	APBD
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD yang dapat dinilai	Kabupaten Malinau	15 orang	45.964.000	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Kabupaten Malinau	36 orang	292.622.000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan sarana dan prasarana		1		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perlengkapan kantor yang tersedia	Kabupaten Malinau	26 jenis	95.056.000	APBD

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kertas yang digandakan	Kabupaten Malinau	71000 lembar	54.750.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya	Kabupaten Malinau	30 kali	446.082.000	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan barang		1		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan kantor yang tersedia	Kabupaten Malinau	10 unit	182.030.000	APBD
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	aplikasi hasil pemeriksaan yang tersedia	Kabupaten Malinau	1 aplikasi	41.939.000	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pemeliharaan		1		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara	Kabupaten Malinau	17 unit	45.000.000	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara	Kabupaten Malinau	23 unit	8.560.000	APBD
	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					

	KECAMATAN MALINAU KOTA					
7.01.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	Malinau Kota	100%		
	Administrasi Keuangan Perangakt Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kantor Camat Malinau Kota			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Malinau Kota	12 Bulan	4.168.431.793	APBN/APBD
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Presentase jumlah	Kantor Camat Malinau Kota	5 Jenis	9.980.000	APBD
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Presentase jumlah	Kantor Camat Malinau Kota	27 Jenis	30.700.000	APBD
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Presentase jumlah	Kantor Camat Malinau Kota	612 Kotak	19.982.000	APBD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Presentase jumlah	Kantor Camat Malinau Kota	7 Jenis	5.000.000	APBD
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Presentase jumlah	Kantor Camat Malinau Kota	2 Jenis	39.600.000	APBD
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Presentase jumlah	Kantor Camat Malinau Kota	5 Jenis	5.324.000	APBD

7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Presentase jumlah	Kantor Camat Malinau Kota	5 Orang	120.000.000	APBD
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Presentase jumlah	Kantor Camat Malinau Kota	2 Bangunan	5.314.000	APBD
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerntahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kantor Camat Malinau Kota	B		
7,01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Darah dan Instansi Vertikal terkait	Presentase jumlah	Kantor Camat Malinau Kota	3 Jenis	75.080.000	
7,01.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase jumlah	Kantor Camat Malinau Kota	7 Orang	24.960.000	APBD
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	Kantor Camat Malinau Kota	80%		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase tingkat	Kantor Camat Malinau Kota	2 Jenis	99.450.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Persentase tingkat	Kantor Camat Malinau Kota	2 Jenis	35.000.000	APBD
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	Kantor Camat Malinau Kota	100%		
7.01.04.2.02,01	Koordnasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Presentase hasil	Kantor Camat Malinau Kota	15Sekolah	29.610.000	APBD

	Indonesia					
	KecaMatan Malinau Utara					
7:01:0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	Malinau Utara	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Malinau Utara	12 Bulan	4.328.362.038	APBD II
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Camat Malinau Utara	36 Jenis	59.991.500	APBD
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Camat Malinau Utara	12 Bulan	42.600.000	APBD
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Camat Malinau Utara	8 Orang	123.600.000	APBD
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Camat Malinau Utara	922 Kotak	29.988.000	APBD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakkan dan Pengadaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Camat Malinau Utara	3 Jenis	14.990.000	APBD
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Camat Malinau Utara	454 Liter	5.992.800	APBD

7:01:0 1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kantor Camat Malinau Utara	B		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Malinau Utara	1 Tahun	152.023.700	APBD
7:01:01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desan dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	Kantor Camat Malinau Utara	80%		
7.01.02.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desan dan Kelurahan	Kantor Camat Malinau Utara	1 Tahun	10.900.000	APBD
7:01:0 1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	Kantor Camat Malinau Utara	100%		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Bertugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Malinau Utara	1 Kegiatan	29.994.000	APBD
7:01:0 1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Kantor Camat Malinau Utara	100%		
7.01.05.2.01.08	Pelaksaan Tugas Form Koordinasi Pemimpin di Kecamatan	Persentase Pelaksaan Tugas Form Koordinasi Pemimpin di Kecamatan	Kantor Camat Malinau Utara	1 Kegiatan	29.920.000	APBD
	Kecamatan Malinau Barat					

7. 01. 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	Malinau Barat	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Malinau Barat	12 Bulan	3.792.824.039	APBD II
7. 01. 01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Malinau Barat	100%	35.000.000	APBD
7. 01. 01.2 .06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Malinau Barat	100%	9.800.000	APBD
7. 01. 01.2 .08. 02	Penyediaan Jasa Komuikasi, air dan listrik	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Malinau Barat	100%	47.000.000	APBD
7. 01. 01.2 .08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Malinau Barat	100%	62.400.000	APBD
7. 01. 01.2 .09. 11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Malinau Barat	100%	20.000.000	APBD
7. 01.03	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	Kantor Camat Malinau Barat	80%		
7. 01.03.2. 01. 03	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan diwilayah Kecamatan	Presentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Camat Malinau Barat	100%	30.000.000	APBD
7. 01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Kantor Camat Malinau Barat	100%		

7. 01.06. 2. 01. 09	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Presentase Program Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Kantor Camat Malinau Barat	100%	30.000.000	APBD
7. 01.06. 2. 01. 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Presentase Program Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Kantor Camat Malinau Barat	100%	30.000.000	APBD
7. 01.06. 2. 01. 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Presentase Program Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Kantor Camat Malinau Barat	100%	235.800.000	APBD
	KECAMATAN MENTARANG					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Mentarang	100%		
X X 0 2 02 X 1	Administrasi Keuangan Perangakt Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Mentarang			
X X 0 2 01 X 1 , 02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Junlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Kecamatan Mentarang	22 Ob	3.702.206.464	APBN/APB D
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Mentarang	36 Jenis	59.991.500	APBD
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Mentarang	12 Bulan	42.600.000	APBD
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Mentarang	8 Orang	123.600.000	APBD

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Mentarang	922 Kotak	29.988.000	APBD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakkan dan Pengadaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Mentarang	3 Jenis	14.990.000	APBD
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Mentarang	454 Liter	5.992.800	APBD
7:01:0 1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan Mentarang	B		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Mentarang	1 Tahun	152.023.700	APBD
7:01:0 1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desan dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	Kecamatan Mentarang	80%		
7.01.02.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desan dan Kelurahan	Kecamatan Mentarang	1 Tahun	10.900.000	APBD
7:01:0 1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	Kecamatan Mentarang	100%		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Bertugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mentarang	1 Kegiatan	29.994.000	APBD
7:01:0 1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Kecamatan Mentarang	100%		

7.01.05.2.01.08	Pelaksaan Tugas Form Koordinasi Pemimpin di Kecamatan	Persentase Pelaksaan Tugas Form Koordinasi Pemimpin di Kecamatan	Kecamatan Mentarang	1 Kegiatan	29.920.000	APBD
	Kecamatan Mentarang Hulu					
7.01.01.2.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu		100%		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mentarang Hulu	12 Orang	2.013.727.460	APBD
7.01.01.2.06.02	Administarasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan		100%		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor yang di Bayarkan setiap Bulannya	Kecamatan Mentarang Hulu	4 Orang	81.600.000	APBD
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ATK Kantor	Kecamatan Mentarang Hulu	28 Jenis	20.000.000	APBD
7.01.03.2.01.01	Penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu		100%		
7.01.03.2.01.01	Penyediaan Bahan Logistik Lantor	Jumlah BBM Untuk Operasional Kantor	Kab. Malinau	3 Jenis	30.000.000	APBD
7.01.03.2.01.01	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyedian makanan dan minuman kantor	Kecamatan Mentarang Hulu	2 Jenis	30.000.000	APBD

7.01.02.2.02.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Mentarang Hulu	1 Unit	35.680.000	APBD
7.01.03.2.02.01	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan kepada Aparatur pemerintahan desa dan RT		100%		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	Mentarang Hulu-Malinau	22 Kali Malinau	38.000.000	APBD
7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan Kepada Masyarakat tepat Wakru		100%		
7.01.04.2.01.00	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Mentarang Hulu	7 Desa	7.320.000	APBD
7.01.03.2.03.04	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam Mengikuti Lomba RT Bersih	Kab. Malinau	5 RT	7.400.000	APBD
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraa Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mentarang Hulu-Malinau	22 Kali Malinau	40.000.000	APBD
7.01.06.2.01.16	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Mentarang Hulu-Malinau	22 Kali Malinau	38.000.000	APBD
7.01.03.2.03.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase pelayanan SKPT Masyarakat Desa	Mentarang Hulu-Malinau	22 Kali Malinau	38.000.000	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian		100%		

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Bertugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Mentarang Hulu-Malinau	22 Kali Malinau	38.000.000	APBD
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kepada Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Desa		100%		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat desa	Mentarang Hulu-Malinau	22 Kali Malinau	38.000.000	APBD
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan PKK Desa	Kecamatan Mentarang Hulu	2 Desa	20.000.000	APBD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan kepada Maysrakat desa		100%		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Mentarang Hulu-Malinau	22 Kali Malinau	38.000.000	APBD
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan RT		100%		
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Fasilitasi Penyusunan Program Desa	Mentarang Hulu-Malinau	22 Kali Malinau	50.000.000	APBD
	KECAMATAN PUJUNGAN					
X XX (1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Pujungan	100%		

X XX 1 (2 02	Administrasi Keuangan Perangakt Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Pujungan			
X XX 1 (2, 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pujungan	22 Ob	3.073.502.078	APBN/AP B D
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
X XX 1 (2, 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi Umum perangkat daerah	Kecamatan Pujungan	100%		
X XX 1 (2, 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan bakar minyak/gas dan makanan/minuman Kantor Camat Pujungan	Kecamatan Pujungan	2 Jenis	66.400.000	APBD
X XX 1 (2, 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Pujungan	100%		
X XX 1 (2, 08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK Kantor	Kecamatan Pujungan	15 Jenis	20.190.000	APBD
X XX 1 (2, 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Tersedianya penunjang administrasi kantor dan tersedianya kebersihan lingkungan kantor	Kecamatan Pujungan	3 orang	43.200.000	APBD
7 01 3 (	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	Kecamatan Pujungan	80%		

7	01	3	2.03		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	persentase perjalanan dinas/ koordinasi dan konsultasi tim PKK kecamatan	Kecamatan Pujungan	100%		
7	01	3	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah perjalanan dinas/ koordinasi dan konsultasi tim PKK kecamatan	Kecamatan Pujungan	7 Kali	37.310.000	APBD
7	01	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan Pujungan	B		
7	01	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kecamatan Pujungan	100%		
7	01	2	2.01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kab. Malinau	40 Kali	150.300.000	APBD
7	01	6			Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Kab. Malinau	100%		
7	01	6	2.01		Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Pujungan	100%		
7	01	6	2.01	17	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Pujungan	15 kali	116.300.000	APBD
7	01	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Jumlah perjalanan dinsa dalam daerah	Kecamatan Pujungan	15 Kali	116.300.000	APBD
					Kecamatan Kayan Hilir					

7:01:0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	Malinau Utara	100%		
7:01:0 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan Kayan Hilir			
7:01:01.20.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kayan Hilir	12 Bulan	2.542.125.887	APBD II
7:01:0 1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Kayan Hilir			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kayan Hilir	7 Orang	135.600.000	APBD
7:01:01.20.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Kayan Hilir			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kayan Hilir	1 Unit	50.000.000	APBD
7:01:0 1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan Kayan Hilir			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kayan Hilir	29 Jenis	50.000.000	APBD

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Kecamatan Kayan Hilir	40 Kali	389.400.000	APBD
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kecamatan Kayan Hilir	33 Jenis	25.000.000	APBD
7:01:0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		Kecamatan Kayan Hilir	100%		
7.01.04.2.02.01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kecamatan Kayan Hilir	5 Desa	50.000.000	APBD
	Kecamatan Kayan Hulu					
X X 01 X	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Kayan Hulu	100%		APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kayan Hulu	12 Bulan	3.410.206.540	APBD II
X X 1 2 X , 1	Aministrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi Umum perangkat daerah	Kayan Hulu	100%		APBD
X X 1 2 04 X , 1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor	Kayan Hulu	3.400 liter	58.000.000	APBD
X X 0 2 X 1 , 1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kayan Hulu		100.000.000	APBD

X	X X	1	0	2 , 1		Penyediaan jasa Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Tersedianya ATK Kantor	Kayan Hulu	20 jenis	30.000.000	APBD
X	X X	1	0	2 , 1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Tersedianya Penunjang Administri Kantor dan Jasa Kebersihan	Kayan Hulu	4 orang	72.000.000	APBD
7	01		0 3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	Kayan Hulu	80%		APBD
7	01		0 3	2		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	persentase perjalanan dinas/ koordinasi dan konsultasi tim PKK kecamatan	Kayan Hulu	10 kali	40.000.000	APBD
7	01		0 2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kayan Hulu	B		APBD
7	01		0 2	2		Koordinasi Penyelengaraan Pemerintahaan Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi penyelengaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kayan Hulu			APBD
7	01		0 2	2	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kayan Hulu	30 kali	200.000.000	APBD
7	01		0 6			Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Kayan Hulu	100%		APBD
7	01		0 6	2	18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan diwilayah kecamatan	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kayan Hulu	20 kali	50.000.000	APBD
						Kecamatan Sungai Boh					
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Sungai Boh	100%		

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sungai Boh	12 Bulan	3.557.831.405	APBD II
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Sungai Boh	26 Jenis	35.000.000	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Sungai Boh	12 bulan	35.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Sungai Boh	12 lan	45.000.000	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan Sungai Boh	B		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sungai Boh	1 Tahun	335.000.000	APBD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desan dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	Kecamatan Sungai Boh	80%		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desan dan Kelurahan	Kecamatan Sungai Boh	1 Tahun	70.000.000	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Kecamatan Sungai Boh	100%		

	Pelaksaan Tugas Form Koordinasi Pemimpin di Kecamatan	Persentase Pelaksaan Tugas Form Koordinasi Pemimpin di Kecamatan	Kecamatan Sungai Boh	1 Kegiatan	30.000.000	APBD
	KECAMATAN BAHAU HULU					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Bahau Hulu	100%		APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bahau Hulu	100%		APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bahau Hulu	16 Orang	2.213.619.804	APBD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bahau Hulu	10 Jenis	20.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bahau Hulu	100%		APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto	Bahau Hulu	2 Orang	36.000.000	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bahau Hulu	100%		APBD

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bahau Hulu	3 Orang	64.000.000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bahau Hulu	100%		APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahau Hulu	3 Jenis	50.000.000	APBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bahau Hulu	12 Kali	50.000.000	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Bahau Hulu	B		APBD
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bahau Hulu	100%		APBD
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Bahau Hulu	24 Kali	300.000.000	APBD
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Bahau Hulu	100%		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Bahau Hulu	2 Kegiatan	30.000.000	APBD

	KECAMATAN KAYAN SELATAN					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kayan Selatan	100%		APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kayan Selatan	16 Orang	2.654.729.946	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kayan Selatan	100%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kayan Selatan	5 orang	78.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kayan Selatan	17 jenis	25.000.000	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kayan Selatan	100%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kayan Selatan	100%		

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kayan Selatan	2618 Liter	70.000.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	Kayan Selatan		300.000.000	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kayan Selatan	100%		
	Pemelirahaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemelirahaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kayan Selatan	1 Unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemelirahaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kayan Selatan	1 Unit	47.000.000	APBD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	Kayan Selatan	80%		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kayan Selatan	100%		
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah perjalanan dinas/koordinasi dan konsultasi Tim PKK Kecamatan	Kayan Selatan		30.000.000	APBD
	Kecamatan Sungai Tubu					

	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Sungai Tubu	100%		APBD Kab.
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sungai Tubu	12 Bulan	2.201.099.086	APBD II
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Sungai Tubu	10 Jenis	100.000.000	APBD Kab.
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Sungai Tubu	5 Orang	221.000.000	APBD Kab.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Sungai Tubu	100%	60.000.000	APBD Kab.
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	Kayan Selatan	80%		APBD Kab.
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Sungai Tubu	100%	149.000.000	APBD Kab.
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec.Sungai Tubu	100%	20.000.000	APBD Kab.
	Kecamatan Malinau Selatan					

X XX 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Malinau Selatan	100%		
X XX 1 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan admisistrasi umum	Kecamatan Malinau Selatan	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Malinau Selatan	12 Bulan	2.448.433.398	APBD II
X XX 1 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kecamatan Malinau Selatan	23 Jenis	40.000.000	APBD
X XX 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Malinau Selatan	4 Jenis	40.000.000	APBD
2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Malinau Selatan	2 Jenis	6.309.900	APBD
X XX 1 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penungjang yang tersedia	Kecamatan Malinau Selatan	100%		
X XX 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorer	Kecamatan Malinau Selatan	9 Orang	97.200.000	APBD
X XX 1 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Malinau Selatan	100%		

X	XX	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perujinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Malinau Selatan	1 Unit	30.000.000	APBD
7	01	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan Malinau Selatan	B	-	
7	01	2	2.01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persentase permasalahan yang teratasi	Kecamatan Mentarang	100%		
7	01	2	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.	Jumlah kordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan Malinau Selatan	40 kali	226.516.100	APBD
7	01	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	Kecamatan Malinau Selatan	80%	0	
7	01	3	2.01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kordinasi pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kecamatan Malinau Selatan	100%		
7	01	3	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan Malinau Selatan	10 kali	20.000.000	APBD
7	01	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Kecamatan Malinau Selatan	100%	0	
7	01	5	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kecamatan Malinau Selatan	100%		

7 01 2.01.5 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan	Kecamatan Malinau Selatan	12 bulan	39.974.000	APBD
	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamtan Malinau Selatan Hilir	100%		
X XX 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangakt Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Malinau Selatan Hilir			
X XX 01 2, 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	22 Ob	2.473.528.697	APBN/APBD
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	36 Jenis	59.991.500	APBD
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	12 Bulan	42.600.000	APBD
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	8 Orang	123.600.000	APBD
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	922 Kotak	29.988.000	APBD

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakkan dan Pengadaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	3 Jenis	14.990.000	APBD
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	454 Liter	5.992.800	APBD
7:01:0 1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	B		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	1 Tahun	152.023.700	APBD
7:01:0 1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desan dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	80%		
7.01.02.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desan dan Kelurahan	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	1 Tahun	10.900.000	APBD
7:01:0 1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	Kecamatan Mentarang	100%		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Bertugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	1 Kegiatan	29.994.000	APBD
7:01:0 1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	100%		

7.01.05.2.01.08	Pelaksaan Tugas Form Koordinasi Pemimpin di Kecamatan	Persentase Pelaksaan Tugas Form Koordinasi Pemimpin di Kecamatan	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	1 Kegiatan	29.920.000	APBD
	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU					
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamtan Malinau Selatan Hulu	100%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	12 Bulan	2.226.706.167	APBD
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	24 Jenis	30.000.000	APBD
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	7.000 Liter	94.400.000	APBD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	2 Jenis	9.000.000	APBD
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	5 Orang / Bulan	72.000.000	APBD
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Malinau Selatan	1 Unit	30.000.000	APBD

	Lapangan		Hulu			
7.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Monitoring	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	2 Jenis	209.600.000	APBD
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi		100%		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	885 Kotak	30.000.000	APBD
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	58 Orang / Hari	25.000.000	APBD
	KANTOR PERSIAPAN KECAMATAN MALINAU UTARA TIMUR					
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan/ pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	Kantor Persiapan Kecamatan Malinau Utara Timur	100%		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor Persiapan Kecamatan Malinau Utara Timur	24 Jenis	20.000.000	APBD
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Kantor Persiapan Kecamatan Malinau Utara Timur	7.000 Liter	20.000.000	APBD

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Persiapan Kecamatan Malinau Utara Timur	2 Jenis	25.000.000	APBD
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	Kantor Persiapan Kecamatan Malinau Utara Timur	4 Orang / Bulan	85.000.000	APBD
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran		2,59%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah		100%		

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daearh	Jumlah buku yang dicetak	Kab. Malinau	10 Bk	50.000.000	APBD II
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah buku yang dijilid	Kab. Malinau	10 Bk	10.000.000	APBD II
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah buku yang dijilid	Kab. Malinau	10 Bk	10.000.000	APBD II
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah buku yang dijilid	Kab. Malinau	10 Bk	10.000.000	APBD II
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah buku yang dijilid	Kab. Malinau	10 Bk	10.000.000	APBD II
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah buku yang dijilid	Kab. Malinau	10 Bk	50.000.000	APBD II
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi keuangan daerah		100%		

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan dalam bulan yang disediakan	Kab. Malinau	12 Bln	4.283.145.433	APBD II
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan admisistrasi umum		100%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor	Kab. Malinau	2 Unit	30.000.000	APBD II
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Kab. Malinau	30 Jenis	45.000.000	APBD II
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Buku yang dicetak	Kab. Malinau	50 Bk	20.000.000	APBD II
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi yang disediakan	Kab. Malinau	5 jenis	15.000.000	APBD II
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	Kab. Malinau	50 kali	350.000.000	APBD II
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman karakter kebangsaan untuk penyelenggara pemerintahan desa		2,75%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembentuk Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kabupaten		1 Tim		

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah sosialisasi pembauran kebangsaan	Kab. Malinau	1 Kali	45.000.000	APBD II
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik untuk parpol yang ada di Kabupaten Malinau		100%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase parpol yang mendapat pendidikan politik		100%		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah sosialisasi terhadap parpol	Kab. Malinau	1 Kali	100.000.000	APBD II
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah monev dan pelaporan terhadap bantuan keuangan parpol dan situasi politik daerah	Kab. Malinau	1 Kali	35.000.000	APBD II
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembinaan forum kerukunan umat beragama		100%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pembentukan forum kerukunan umat beragama		1 Forum		

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan FKUB	Kab. Malinau	3 kali	35.000.000	APBD II
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah sosialisasi bahaya penyalahgunaan NAPZA	Kab. Malinau	1 Kali	75.000.000	APBD II
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase kualitas keadaan aman, nyaman dan damai di lingkungan masyarakat		100%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya kerjasama OPD dengan Instansi Vertikal dalam kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		2 Kegiatan		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah tim kewaspadaan dini daerah	Kab. Malinau	1 Tim	75.000.000	APBD II
		Jumlah tim penanggulangan konflik sosial	Kab. Malinau	1 Tim	35.000.000	APBD II
TOTAL					**1.354.423.042.548**	

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintahan Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pendidikan anak usia dini.
b. Pendidikan dasar.
c. Pendidikan kesetaraan.
d. Pelayanan kesehatan ibu hamil.
e. Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
g. Pelayanan kesehatan balita.
h. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
i. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
j. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
k. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
l. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.
m. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
n. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.
o. Pelayanan kesehatan orang dengan dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus).*
p. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
q. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
r. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten.

s. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah.

t. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

u. Pelayanan informasi rawan bencana.

v. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

w. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

x. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

y. Rehabilitasi sosial dasar peyandang disabilitas terlantar di luar panti.

z. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.

aa. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.

ab. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

ac. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

Terdapat enam Urusan Wajib Pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan dasar, yaitu terdiri dari:

a. Pendidikan;

b. Kesehatan;

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

f. Sosial

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau didasarkan pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang ruang lingkupnya mengatur mengenai:

a. Penerapan SPM;

b. Koordinasi Penerapan SPM;

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SPM;

d. Pembinaan dan Pengawasan; dan

e. Pembiayaan.

BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan Nasional di Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Selisih	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Indeks Pembangunan Manusia (berdasarkan UHH LF SP 2020)	73,55	74,00	0,45	0,61%
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,64	6,54	-0,1	-1,51%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,30	3,19	-0,11	-3,33%
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,27	4,75	-0,52	-9,87%
5	Pengeluaran Per kapita (Ribu)	10.304	10.708	404	3,92%
6	Ketimpangan Pendapatan *(Gini Ratio)*	0,260	0,285	0,025	9,62%

Sumber : BPS Malinau Tahun 2024.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan dan keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terbagi menjadi 2 (dua) Sub Indikator, yaitu:

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*)
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

Berikut Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Malinau 2023:

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	Pendidikan	1). Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini terakreditasi (Negeri & Swasta)	31 KB dan 26 TK		
		2). Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3.354 Siswa	Dinas Pendidikan	
		3). Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3.355 Siswa		
		4). Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri & Swasta)	0		
		5). Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	541		
		6). Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	161 Orang		
		7). Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri & Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	34 Orang		
		8). Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	64 SD dan 37 SMP		
		9). Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	8.576 Orang		
		10). Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	4.147 siswa		

			yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
		11).	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8.576 siswa		
		12).	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4.147 siswa		
		13).	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	826 Orang		
		14).	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	-		
		15).	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	-		
		16).	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	-		
		17).	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	40 Orang		
		18).	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	-		
		19).	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	129 Orang		
		20).	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	-		
		21)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan atau sertifikat pendidik	722 orang dengan Jumlah Guru Sertifikasi SD 244 orang		
		22).	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	-		
		23).	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	S1/DIV = 91 Orang, Sertifikat Pendidik = 53 orang, Surat		

			Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah = 75 orang		
		24). Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menegah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		25). Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat			
		26). Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat			
		46). Jumlah SD dan SMP Negeri terakreditasi	64 SD dan 37 SMP		
		47). Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah daerah	8.576 Siswa		
		48). Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	4.147 Siswa		
		49). Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8.576 Siswa		
		50). Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4.147 Siswa		
		51). Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar			
		52). Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			
		53). Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar			
		54). Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			
		55). Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar			
		56). Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama			
		57). Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat			

			(D-IV) atau Sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
		58).	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
		59).	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	231 Orang		
		60).	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	104 Orang		
		61).	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	-		
		62).	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	-		
		63).	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	5 PKBM		
		64).	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-		
		65)	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-		
		66).	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	18 Orang		
		67).	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	96 Orang		
		68).	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	87 Orang		
		69)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	8 Orang		
		70).	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8 Orang		
2.	Kesehatan	1).	Jmlh RS Rujukan kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat	3 RS	Kes	

			kesehatan (SPA) sesuai standar			
		2).	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3 RS		
		3).	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia a. Vaksin Tetanus Difteri (Td) b. Tablet Tambah Darah c. Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin d. Kartu ibu/rekam medis Ibu e. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	a. 1.847 b. 166.230 c. 5.542 d. 1.847 e. 1.847		
		4).	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal a. Dokter/dokter spesialis kebidanan b. Bidan c. Perawat	a. 39 Orang b. 237 Orang c. 298 Orang		
		5).	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia a. Formulir Partograf b. Kartu Ibu (rekam medis) c. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	a. 1.763 b. 1.763 c. 1.763		
		6).	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar a. Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan b. Bidan c. Perawat	a. 39 Orang b. 237 Orang c. 298 Orang		
		7).	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia a. Vaksin Hepatitis B0 b. Vitamin K1 Injeksi c. Salep/Tetes mata antibiotik d. Formulir bayi baru lahir e. Formulir manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	a. 1.679 b. 1.679 c. 1.679 d. 1.679 e. 1.679		

			f. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	f. 1.679		
		8).	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar a. Dokter/dokter spesialis anak b. Bidan c. Perawat	 a. 39 Orang b. 237 Orang c. 298 Orang		
		9).	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia a. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku b. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) c. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) d. Vitamin A Biru e. Vitamin A Merah f. Vaksin Imunisasi lanjutan : DPT –HB –Hib, Campak, Rubella g. Vaksin Imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT, -HB –Hib, Campak, Rubella h. Jarum suntik dan bahan habis pakai (BHP) i. Peralatan Anafilaktik	 a. 7.332 b. 7.332 c. 7.332 d. 1.679 e. 14.664 f. 21.996 g. 51.324 h. 7.332 i. 17		
		10).	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar a. Bidan b. Dokter c. Perawat d. Ahli Gizi e. Guru PAUD f. Kader Kesehatan	 a. 237 Orang b. 37 Orang c. 298 Orang d. 13 Orang e. 99 Orang f. 610 Orang		
		11).	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia a. Buku raport kesehatanku b. Buku Pemantauan Kesehatan c. Kuisioner Skrining kesehatan d. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah e. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar	 a. 6.994 b. 6.994 c. 6.994 d. 17 e. 17		

			sekolah			
		12).	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar a. Dokter/Dokter gigi b. Bidan c. Perawat d. Ahli Gizi e. Tenaga Kesehatan Masyarakat f. Guru g. Kader Kesehatan	 a. 45 Orang b. 237 Orang c. 298 Orang d. 13 Orang e. 19 Orang f. 25 Orang g. 75 Orang		
		13).	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia a. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) b. Alat ukur berat badan, Alat Ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes c. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	 a. 17 b. 85 c. 47.161		
		14).	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar a. Dokter b. Bidan c. Perawat d. Ahli Gizi e. Tenaga Kesehatan Masyarakat f. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	 a. 37 Orang b. 237 Orang c. 298 Orang d. 13 Orang e. 19 Orang f. 75 Orang		
		15).	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia a. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol b. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) c. Buku Kesehatan Lansia	 a. 9.356 b. 4.678 c. 4.678		

		16). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar a. Dokter b. Bidan c. Perawat d. Ahli Gizi e. Tenaga Kesehatan Masyarakat f. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	a. 37 Orang b. 237 Orang c. 298 Orang d. 13 Orang e. 19 Orang f. 75 Orang		
		17). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia a. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) b. Tensimeter c. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	a. 17 b. 17 c. 12.887		
		18). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar a. Dokter b. Bidan c. Perawat d. Tenaga Kesehatan Masyarakat	a. 37 Orang b. 237 Orang c. 298 Orang d. 19 Orang		
		19). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia a. Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas, Alkohol, Lancet b. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) c. Pedoman dan media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	a. 3.122 b. 1.035 c. 36		
		20). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar a. Dokter b. Bidan c. Perawat d. Ahli Gizi e. Tenaga Kesehatan Masyarakat	a. 37 Orang b. 237 Orang c. 298 Orang d. 13 Orang e. 19 Orang		

		21) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia a. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) b. Kit berisi 2 Alat Fiksasi c. Penyediaan Formulir pencatatan dan pelaporan	 a. 1 b. 36 c. 163		
		22). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar a. Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) b. Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan atau tenaga kesehatan lainnya	 a. 17 b. 55		
		23). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia a. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) b. Reagen Zn TB c. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 d. Pot Dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering e. Catridge tes cepat molekuler f. Formulir pencatatan dan pelaporan g. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	 a. 17 b. 270 c. 1.620 d. 3.242 e. 600 f. 1.620 g. 17		
		24). Jmlh SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar a. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis penyakit paru b. Perawat c. Analis teknik laboratorium Medik (ATLM) d. Penata Rontgen e. Tenaga Kesehatan Masyarakat f. Tenaga Non Kesehatan Terlatih mempunyai kualifikasi tertentu	 a. 40 Orang b. 298 Orang c. 15 Orang d. 6 Orang e. 19 Orang f. 75 Orang		
		25). Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia a. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) b. Tes Cepat HIV (RDT) pertama c. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lanet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	a. 17 b. 2.276 c. 9.104 d. 2.276		

		d. Alat Tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK			
		26). Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar a. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin b. Perawat c. Bidan d. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) e. Tenaga Kesehatan Masyarakat f. Tenaga Non Kesehatan Terlatih mempunyai kualifikasi tertentu	a. 39 Orang b. 298 Orang c. 237 Orang d. 15 Orang e. 19 Orang f. 75 Orang		
3.	Pekerjaan Umum	1). Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	162.967,43 (ha)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Perkim	
		2). Panjang sungai dikawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	128.400 M		
		3). Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada		
		4). Panjang pantai dikawasan pemukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	Tidak Ada		
		5). Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten/kota	Belum Ada		
		6). Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten /kota	Belum Ada		
		7). Data pasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	2 Jenis (Bangunan Perkuatan Tebing dan Kanal Banjir)		

		8).	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten /kota (ha)	Tidak Ada		
		9).	Panjang sungai dikawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenagan kabupaten /kota(m)	Tidak Ada		
		10).	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan ekresi di WS kewenangan kabupaten /kota (ha)	Tidak Ada		
		11).	Panjang pantai dikawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada		
		12).	Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencanan pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten /kota	Belum Ada		
		13).	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengolalaan sumber daya air kewenagan kabupaten /kota	Belum Ada		
		14).	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten /kota	Tidak Ada		
		14)	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	33,14%		
		15).	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	11,09%		
		16).	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	10,18%		
		17).	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada		
		18).	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kab/kota	Tidak		
		19).	Jumlah BUMD dan UPTD kab/kota penyelenggaran SPAM	Ada (1 PDAM)		

		20).	Jumlah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1 PDAM		
		21).	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemrintah pusat dan pemrintah daerah lain	1 (Hibah APBN)		
		22).	Jumlah rumah dengan akses unit pengelohan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	16.179 Unit		
		23).	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD –T	Tidak Ada		
		24).	Jumlah rumah dgn akses unit pengelolahan setempat & data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S & SPALD T	16.179 Unit		
		25).	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak Ada		
		26).	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengelolahan lumpur tinja	Tidak Ada		
		27).	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengelolahan air limba demostik	Tidak Ada		
		28).	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Tidak Ada		
		29).	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Tidak Ada		
		30).	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Tidak Ada		
		31).	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Tidak Ada		

		32).	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Tidak Ada		
		33).	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Tidak Ada		
		34).	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang sambungan ke IPALD	Tidak Ada		
		35).	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak Ada		
		36).	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0 (Tidak ada permhononan)		
		37).	Jumlah IMB yang diberikan oelh pemerintah kab/kota dalam tahun eksisting	20 IMB		
		38).	Penetapan peraturan daerah tentang bagunan /gedung	Ada (Perda No. 12 Tahun 2015)		
		39).	Penetapan keputusan bupati/wali bupati tentang tim ahli bagunan /gedung	Perbup No. 640/05/K/171/ Tahun 2021		
		40).	Jumlah bagunan gedung yang ditetapakan oleh bupati/ walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak Ada Data		
		41).	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab/kota	1.344 Unit		
		42).	Jumlah bagunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara /dirawat	8 Unit		
		43).	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kab/kota	1.043,20 Km		

		44).	Panjang jalan yang dibangun	3,71 Km		
		45).	Panjang jembatan yang dibangun	Tidak Ada		
		46).	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	11,37 Km		
		47).	Panjang jembatan yang diganti /dilebarkan	Tidak Ada		
		48).	Panjang jalan yang direkonstuksi atau direhabilitasi	Tidak Ada		
		49).	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Tidak Ada		
		50).	Panjang jalan yang dipelihara	0,90 Km		
		51).	Panjang jembatan yang di pelihara	Tidak Ada		
		52).	Jumlah pelatihan tenaga operator /teknisi/analis di wilayah kabupaten /kota	Tidak Ada		
		53).	Jumlah tenaga kerja operator /teknis /analis yang terlatih di wilayah kabupaten /kota	16 Orang		
		54).	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator /teknisi /analis di wilayah kabupaten /kota	6 Orang		
		55).	Terselenggarakan sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan kabupaten /kota yang aktif degan data termutakhir	Tidak Ada		
		56).	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi diwilayah kabupaten /kota untuk tahun berjalan yang sumber dari APBD kab /kota	Tidak Ada		

		57).	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi diwilayah kabupaten /kota untuk tahun berjalan yang sumber dari APBN	Tidak Ada		
		58).	Tersediahnya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi diwilayah kabupaten /kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada		
		59).	Tersediannya data dan informasi paket perkerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannnya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhirkan secara berkala	Tidak Ada		
		60).	Tersediahnya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten /kota	Tidak Ada		
		61).	Tersediannya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi diwilayah kabupaten /kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, penguruan tinggi dan instasi pemerintah lainnya	Tidak Ada		
		62).	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten /kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis /analis	10 Orang		
		63).	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/ analis di wilayah kab/kota	10 Orang		
		64).	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten /kota	Tidak Ada		
		65).	Tersediannya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada		
		66).	Tersediannya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis,sifat ,klasifikasi,layanan usaha ,bentuk dan /atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenagan pengawasannya	Tidak Ada		
		67).	Tersedianya data informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenagan pengawasannya	Ada		

		68).	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidak sesuaian jenis, sifat ,klasifikasi ,layanan usaha,bentuk dan /atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada		
		69).	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN diwilayah kab/kota	Tidak Ada		
		70).	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP diwilayah kabupaten /kota	Tidak Ada		
		71).	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam projek diwilayah kab/kota	Tidak Ada		
		72).	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan diwilayah kab/kota	Tidak Ada		
		73).	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada		
		74).	Jmlh pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan atau kualifikasi usaha dgn kegiatan usaha jasa konstruksi yg menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada		
		75).	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada		
		76).	Jumlah pengawasan terkait ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada		
		77).	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota	Tidak Ada		
		78).	Jumlah Tenagah kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	16 Orang		

		79).	Jumlah tenaga kerja kosntruksi terlatih yng tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	6 Orang		
		80).	Tersedianya sistem informasi pembina jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak Ada		
		81).	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD kab/Kota	Tidak Ada		
		82).	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak Ada		
		83).	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada		
		84).	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak Ada		
		85).	Tersedianya data dan prodil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tidak Ada		
		86).	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.			
		87).	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	10 Orang		
		88).	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	10 Orang		
		89).	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	Tidak Ada		

		90).	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada		
		91).	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada		
		92).	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada		
		93).	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segementasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada		
		94).	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak Ada		
		95).	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota	Tidak Ada		
		96).	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota	Tidak Ada		
		97).	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	Tidak Ada		
		98).	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada		
		99).	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada		
		100).	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada		
		101).	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segementasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada		

4.	Perumahan Rakyat	1).	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Tidak Ada	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Perkim
		2).	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Tidak Ada	
		3).	Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Tidak Ada	
		4).	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	
		5).	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	
		6).	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru /relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	
		7).	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak Ada	
		8).	Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Tidak Ada	
		9).	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak Ada	
		10).	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	
		11).	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendaptakan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan atau / bagunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	
		12).	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana penemuhan SPM	Tidak Ada	
		13).	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	

		14).	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatakan peyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana penemuhan SPM	Tidak Ada		
		15).	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak Ada		
		16).	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	104,084 Ha		
		17).	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Tidak Ada		
		18).	Jumlah luasan (Ha) penangan infrasstruktur kawasan kumuh	Tidak Ada		
		19).	Jumlah rumah di kab/kota	19.956 Unit		
		20).	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Tidak Ada		
		21).	Jumlah rumah tidak layak huni	516 Unit		
		22).	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak Ada		
		23).	Rasio rumah dan KK	1:1,11		
		24).	Jumlah rumah pembangunan baru	Tidak ada		
		25).	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	35 Unit		
		26).	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	35 Unit		
		27).	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	35 Unit		
		28).	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site /off site)	35 Unit		
		29).	Jumlah perumahan yang terfasilitas RTNH	Surat Pernyataan		
		30).	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	20 Unit		
		31).	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak Ada		
		32).	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Tidak Ada		

		33).	Jumlah pengembang yang mendapatkan penyuluhan atau pelatihan	Tidak Ada		
		34).	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh bupati / wali kota	Surat Pernyataan		
		35).	SK bupati / wali kota tentang penetapan tanah objek landrefrom yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subjek	Surat Pernyataan		
		36).	SK bupati / wali kota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum / absentee	Surat Pernyataan		
		37).	Dokumen izin membuka tanah	Surat Pernyataan		
		38).	Dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/ kota	Surat Pernyataan		
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	1).	Jumlah pelanggaran & pengaduan trantibum dlm Kabupaten yg ditangani	61 Aduan	Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	
		2).	Jumlah Satlinmas yg terlatih &dikukuhkan	57 Orang		
		3).	Jumlah Perda & Perkada yg ditegakkan	3 Perda		
		4).	Jumlah Polisi Pamong Praja yg memiliki kualitas sebagai PPNS	1 Orang		
		5).	Tersedianya SOP dlm penegakan Perda & Perkada serta penanganan gangguan trantibum	3 SOP		
		6).	Tersedanya sarana prasarana minimal	20 Jenis		
		7).	Perentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Surat Pernyataan		
		8).	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yg memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Surat Pernyataan		
		9).	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Surat Pernyataan		
		10).	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Surat Pernyataan		
		11).	Persentase jumlah aparatur & warga negara yg ikut pelatihan	Surat		

			Pernyataan		
		12). Persentase warga negara yg ikut pelatihan	Surat Pernyataan		
		13). Persentase warga negara yg mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana & sarana prasarana penanggulangan bencana	Surat Pernyataan		
		14). Persentase warga negara yg mendapat peralatan perlindungan	Surat Pernyataan		
		15). Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Surat Pernyataan		
		16). Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Surat Pernyataan		
		17). Persentase jumlah petugas yg aktif dalam penanganan darurat bencana	Surat Pernyataan		
		18). Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, & dievakuasi terhadap kejadian bencana	Surat Pernyataan		
		19). Jumlah & jenis layanan penyelamatan & evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Disdamkar di Kabupaten	20 Kejadian		
		20). Tersedianya pos sektor Damkar yg dilengkapi sarana prasarana Damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor Kecamatan	3 Pos Damkar		
		21). Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yg dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor Kecamatan	72 Orang		
		22). Pos Damkar yg dilengkapi dgn sarana/prasarana Damkar, sarana prasarana penyelamatan & evakuasi di setiap Kelurahan/Desa	3 Pos Damkar		
		23). Jumlah & jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan & evakuasi	3 Pos, 4 Unit Pemadam, 7 unit Portable		
		24). Jumlah aparatur pemadam kebakaran yg memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Thn 2009 ttg Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	55 Orang		

		25).	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Disdamkar atau Perangakat Daerah yg menyelenggarakan sub urusan kebakaran	40 Orang		
		26).	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	72 Orang		
6.	Sosial	1).	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Ada 1	Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	
		2).	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar , anak terlantar ,lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	188		
		3).	Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuk	Surat Pernyataan		
		4).	Jumlah penyadang disabilitas terlantar ,anak terlantar ,lanjut usia telantar dan gepeng yang di jangkau	Surat Pernyataan		
		5).	Jumalah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 unit		
		6).	Jumlah penyandang disabilitas terlantar ,anak telantar ,lanjut usia telantar dan gepeng yang menerima paket pemakanan sesuai standar gizi	Surat Pernyataan		
		7).	Jumlah rumah singgah / shelter /tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Surat Pernyataan		
		8).	Jumlah penyadang disabilits telantar ,anak terlantar lanjut usia telantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Surat Pernyataan		
		9).	Jumlah penyandang disabilitas terlantar , anak telantar ,lanjut usia telantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	9 orang		
		10).	Jumalah alat bantu yang tersedia dirumah singgah / shelter	1		
		11).	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Surat Pernyataan		
		12).	Jumlah disabilitas telantar ,anak telantar ,lanjut usia telantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Surat Pernyataan		
		13).	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan dirumah singgah	Surat Pernyataan		
		14).	Jumlah pekerja sosial professional dan /atau TKS dan /atau relawan sosial yang disediakan	15 TKS		

		15). Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar ,lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik,mental dan sosial sesuai standar dikeluarga ,masyarakat ,dinas sosial ,rumah singgah /shelter dan /atau pusat kesejahteraan sosial	Surat Pernyataan		
		16). Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	10		
		17). Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar lanjut usia telantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Surat Pernyataan		
		18). Jumlah penyandang disabilitas terlantar ,anak telantar ,lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Surat Pernyataan		
		19). Jumlah penyandang disabilitas telantar ,anak telantar ,lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Surat Pernyataan		
		20). Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar ,lanjut usia terlantar, dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Surat Pernyataan		
		21) Jumlah penyandang disabilitas telantar ,anak telantar lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	5 orang		
		22). Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	21		
		23). Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	21		
		24). Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Surat Pernyataan		
		25). Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Surat Pernyataan		
		26). Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Surat Pernyataan		

		27).	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	30 orang		
7.	Ketenagakerjaan	1).	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten /kota	Surat Pernyataan	Dinas Ketenaga Kerja	
		2).	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Surat Pernyataan		
		3).	Jumlah perusahan yang menyusun rencana kerja di kabupaten /kota	Surat Pernyataan		
		4).	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	14,28%		
		5).	Persentase instruktur bersertifikat kompensi	100%		
		6).	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelantikan	10,71		
		7).	Persentase LPK yang terakreditasi	30		
		8).	Persetase LPK yang perizinan	100%		
		9).	Jumlah pengangguran yang dilatih	280 Org		
		10).	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%		
		11).	Persentase penyerapan lulusan	Surat Pernyataan		
		12).	Lulusan bersertifikat kompetensi	100%		
		13).	Jumlah calon perkerja migran indonesia (CPMI) / calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Surat Pernyataan		
		14).	Jumlah pelatihan calon pekerja migran indonesia (CPMI) /calon tenaga kerja indonesia (CTKI)	Surat Pernyataan		
		15).	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	14,50%		

		16).	Data tingkat produktivitas total	18,71%		
		17).	Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP)	14,50%		
		18).	Persentase perusahaan yang memiliki telah memiliki perjanjian kerja bersama (PKB)	6,25%		
		19).	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat ,federasi SP/SB yang tercatat ,SP/SB diperusahaan yang tercatat, SP /SB diluar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB diperusahaan	975 org		
		20).	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100%		
		21).	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	100%		
		22).	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	22,91%		
		23).	Jumlah mogok kerja	Tidak ada		
		24).	Jumlah penutupan perusahaan	Tidak ada		
		25).	Jumlah perselisihan kepentingan	Tidak ada		
		26).	Jumlah perselisihan antara serikat pekerja /serikat buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Tidak ada		
		27).	Jumlah perselisihan PHK	Ada 57 org		
		28).	Jumlah perkerja /buruh yang ter-PHK	235 org		
		29).	Jumlah perselisihan yang siselesaikan melalui perundingan bipartite	178 kasus		
		30.)	Lembaga kerja sama (LKS) Tripartit kabupaten /kota yang di berdeyakan	Surat Pernyataan		
		31).	Persentase perselisihan hubungan industrial yang disediakan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	Surat Pernyataan		
		32).	Jumlah lowongan kerja yang tersediah diwilayah kabupaten /kota	1		
		33).	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dikabupaten /kota	131 Orang		
		34).	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kab/kota	Surat Pernyataan		
		35).	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten / kota	Surat Pernyataan		

		36).	Jumlah pejabat fungsional pengatar kerja	Surat Pernyataan		
		37.)	Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) antara kerja lokal dalam sutu wilayah kab/kota	Surat Pernyataan		
		38.)	Jumlah perjanjian kerja yang di sahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kab/kota	Ada 3		
		39).	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Surat Pernyataan		
		40.)	Jumlah calon pekerja migran indonesia (CPMI)/ Calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Surat Pernyataan		
		41.)	Jumlah calon pekerja migran indonesia (CPMI) /calon tenaga kerja indonesia (CKTI) yang terdata	Surat Pernyataan		
		42).	Jumlah pekerja migran indonesia (PMI)tenaga kerja indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan	Surat Pernyataan		
		43.)	Jumlah pekerja migran indonesia (PMI) tenaga kerja indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Surat Pernyataan		
		44).	Data pemberdayaan perkerja migran indonesia (PMI) tenaga kerja indonesia (TKI) purna dan keluarga nya	Surat Pernyataan		
		45.)	Jumlah layanan terpada satu atap (LTSA) yang dibentuk	Surat Pernyataan		
8.	Perlindungan Perempuan & Perlindungan Anak	1).	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten /kota yang telah dilatih PUG	Surat Pernyataan	Dinas Perlindungan Perempuan & Perlindungan Anak	
		2).	Jumlah program /kegiatan PUG pada perangkat daerah yg sudah dievaluasi melalui anlisis gender ditingkat kab/kota	Surat Pernyataan		
		3).	Jumlah media massa (cetak ,elektronik) yg berkerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pengcegahan kekerasan terhadap anak	Ada 1		
		4).	Jumlah lembaga layanan anak yang memiliki standar pelayanan minimal	Ada 1		
		5).	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	6		

		6). Jumlah lembaga layanan anak mendapat pelatihan	Ada 1		
		7). Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatakan bantuan keuangan / fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab /kota)	Surat Pernyataan		
		8). Jumlah organisasi kemasyrakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Surat Pernyataan		
		9). Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten /kota yang sudah dilatih	Surat Pernyataan		
		10). Jumlah lembaga layanan pemberdayaaan perempuan yang mendapat pelatihan	Surat Peryataan		
		11). Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten /kota	2		
		12). Jumlah kebijakan /program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Surat Pernyataan		
		13). Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Surat Pernyataan		
		14). Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Ada 3		
9.	Pangan	1). Tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Surat Pernyataan	Dinas Ketahanan Pangan	
		2). Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Surat Pernyataan		
		3). Tersediahnya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Surat Pernyataan		
		4). Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan komumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Surat Pernyataan		
		5). Tersedianya peta ketahanan dan kerntanan pangan	Surat Pernyataan		
		6). Tertanganinya kerawanan pangan	Surat		

			Pernyataan		
		7). Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Surat Pernyataan		
		8). Terlaksanakannya pengawasan keamanan pangan segar	Surat Pernyataan		
10.	Pertanahan	1). SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Surat Pernyataan	Bidang Pertanahan	
		2). SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Surat Pernyataan		
		3). SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	Surat Pernyataan		
		4). Dokumen Izin membuka tanah	Surat Pernyataan		
		5). Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Surat Pernyataan		
		6). SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Surat Pernyataan		
		7). SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Surat Pernyataan		
		8). SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	Surat Pernyataan		
		9). Dokumen Izin membuka tanah	Surat Pernyataan		
		10). Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Surat Pernyataan		
		11). SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Surat Pernyataan		
		12). SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform	Surat		

			bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Pernyataan		
		13).	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	Surat Pernyataan		
		14).	Dokumen Izin membuka tanah	Surat Pernyataan		
		15).	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Surat Pernyataan		
		16).	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Surat Pernyataan		
		17).	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Surat Pernyataan		
		18).	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	Surat Pernyataan		
		19).	Dokumen Izin membuka tanah	Surat Pernyataan		
		20).	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Surat Pernyataan		
		21).	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Surat Pernyataan		
		22).	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Surat Pernyataan		
		23).	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	Surat Pernyataan		
		24).	Dokumen Izin membuka tanah	Surat Pernyataan		
		25).	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Surat Pernyataan		
11	Lingkungan	1).	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap:	a. 62,38	[illegible]	(Sesuai

	Hidup	a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	b. 95,20 c. 100,00		Permen LHK Nomor 21 Thn 2021 ITH diubah menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL)
		2). Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada		
		3). Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Ada		
		4). Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Ada		
		5). Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Ada		
		6). Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Tidak Ada		
		7). Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.	Ada		
12	Administrasi Kependuduka n dan pencatatn sipil	1). Penerbitan akta perkawinan	65,41 %	Dinas Dukcapil	

		2).	Penerbitan akta perceraian	62,11 %	
		3).	Penerbitan akta kematian	100 %	
		4).	Penyajian data kependudukan	50 %	
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1).	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan
		2).	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	
		3).	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1006	
		4).	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	34	
14	Pengendalian Penduduk dan KB	1).	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Surat Pernyataan	Dinas Kesehatan
		2).	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Surat Pernyataan	
		3).	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	43	
		4).	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	24,54%	
		5).	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	825	
		6).	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	5 %	
		7).	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7,74 %	

		8).	Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	15 Kecamatan		
		9).	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan			
		10).	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	41,38 %		
		11).	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	60,15 %		
16	Perhubungan	1).	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	60 %	Dinas Perhubungan	
		2).	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Surat Pernyataan		
		3).	Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Surat Pernyataan		
		4).	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	75%		
		5).	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Surat Pernyataan		
		6).	Jumlah arus penumpang angkutan umum	124.639		
		7).	Rasio ijin trayek	0,42%		
		8).	Jumlah uji KIR angkutan umum	Surat Pernyataan		
		9).	Jumlah pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	16		
		10).	Persentase Layanan angkutan darat	0,33%		
		11).	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Surat Pernyataan		
		12).	Pemasangan Rambu-rambu	Surat Pernyataan		

		13).	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,35%		
		14).	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	51.232		
		15).	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	511.516		
17	Komunikasi dan informatika	1).	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	42	Dinas Komunikasi dan informatika	
		2).	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	31		
		3).	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada		
		4).	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Surat Pernyataan		
		5)	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	2		
		6).	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	42		
		7).	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Surat Pernyataan		
		8).	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Surat Pernyataan		

		9).	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	3		
		10)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Surat Pernyataan		
		11)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Surat Pernyataan		
		12).	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Surat Pernyataan		
		13)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Surat Pernyataan		
		14)	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Surat Pernyataan		
		15).	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Surat Pernyataan		
		16).	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Surat Pernyataan		
		17)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada		
18	KUKM	1).	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Surat Pernyataan	Dinas Perindakop	
		2).	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Surat Pernyataan		
		3).	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Surat Pernyataan		
		4).	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai	Surat Pernyataan		

			kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		5)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Surat Pernyataan		
		6).	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Surat Pernyataan		
		7).	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Surat Pernyataan		
		8).	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Surat Pernyataan		
		9).	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Surat Pernyataan		
		10)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Surat Pernyataan		
		11)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Surat Pernyataan		
		12).	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Surat Pernyataan		
		13)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Surat Pernyataan		
		14)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Surat Pernyataan		
		15).	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Surat Pernyataan		

		16).	Persentase Usaha mikro yang bermitra	Surat Pernyataan		
		17).	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan setifikasi produk usaha	Surat Pernyataan		
		18).	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Surat Pernyataan		
		19).	Rasio Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasiltiasi	Surat Pernyataan		
		20).	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Surat Pernyataan		
19	Penanaman Modal	1).	Presentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin:		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	
			a. Pusat Perbelanjaan	3,85%		
			b. Toko Swalayan	0,37%		
		2).	Persentase Penerbitan TDG	0,09%		
		3).	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Surat Pernyataan		
		4).	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu	100%		
		5).	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota	Surat Pernyataan		
		6).	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	100%		
		7).	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Surat Pernyataan		
		8).	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Surat Pernyataan		

		9).	Persentase jumlah izin yang diterbitkan Usaha Industri (IUI) menengah yang diterbitkan	Surat Pernyataan		
		10).	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Surat Pernyataan		
20	Kepemudaan dan Olahraga	1).	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	16 Orang	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		2).	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Surat Pernyataan		
		3).	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	2.500		
		4).	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Surat Pernyataan		
		5)	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	16 Pelatih		
		6).	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Surat Pernyataan		
21	Statistik	1).	Tersedianya buku profil daerah	Surat Pernyataan	Bidang Statistik-	
		2).	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	ADA 1		
		3).	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	ADA 1		
		4).	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Surat Pernyataan		
		5).	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Surat Pernyataan		
		6).	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	96%		
		7).	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	93,33%		
22	Persandian	1).	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang	Surat Pernyataan	ari g Per sa	

			harus diamankan			
		2).	Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Surat Pernyataan		
		3).	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Surat Pernyataan		
		4).	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Surat Pernyataan		
23	Kebudayaan	1).	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Surat Pernyataan	Dinas Kebudayaan	
		2).	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Surat Pernyataan		
		3).	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Surat Pernyataan		
		4).	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	3 Desa		
		5)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Surat Pernyataan		
		6).	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	Surat Pernyataan		
		7).	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Surat Pernyataan		
		8).	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Surat Pernyataan		

		9).	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Surat Pernyataan		
		10)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Surat Pernyataan		
		11)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	Surat Pernyataan		
		12).	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	Surat Pernyataan		
		13)	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Ada SK		
		14)	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	Surat Pernyataan		
		15).	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	Surat Pernyataan		
		16).	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Surat Pernyataan		
		17).	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	Surat Pernyataan		
		18).	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Surat Pernyataan		
		19).	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Surat Pernyataan		
24	Perpustakaan	1)	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan jumlah penduduk	98%	Dinas Perpustakaan	
		2).	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	74,01%		
		3).	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,37%		
		4).	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	70%		
		5).	Jumlah pemasyarakatan Perpustakaan	100%		

		6).	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Surat Pernyataan		
		7)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Surat Pernyataan		
		8).	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya	33,34%		
		9).	Upaya lain yang mendukung pembangunan Literasi Masyarakat	170		
25	Kearsipan	1).	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip aktif	65%	Dinas Perpustakaan	
		2).	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar in-arsip	91,5%		
		3).	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan arsip statis	70%		
		4).	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Surat Pernyataan		
		5).	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Surat Pernyataan		
		6).	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Surat Pernyataan		
		7).	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	85%		
		8).	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	Surat Pernyataan		
		9).	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Surat Pernyataan		
		10)	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	Surat Pernyataan		

	URUSAN PILIHAN					
26	Kelautan &Perikanan	1).	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	164 Pembudidaya	Dinas Perikanan	
		2).	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Surat Pernyataan		
		3).	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Surat Pernyataan		
		4).	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	401 Pembudidaya		
		5).	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	720.000 Benih/Tahun		
		6).	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	265 nelayan, 1 Pengolah hasil Perikanan		
		7).	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	1 Unit		
		8).	Jumla unit Pengolahan ikan, dan ternaungi dalam ijin usaha Berbadan Hukum (Akta Notaris)	1 Unit		
27	Pariwisata	1).	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	20 Entitas	Dinas Kebudayaan	
		2).	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	ada 103		
		3).	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Ada 6		
		4).	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	31		
		5)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Surat Pernyataan		

		6).	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Surat Pernyataan	Dinas Kebudayaan
		7).	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Surat Pernyataan	
		8).	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	Surat Pernyataan	
		9).	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	66,67%	
		10)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	3 Lokasi	
28	Pertanian	1).	Sarana pertanian yang diberikan	23 Sarana	Dinas Pertanian
		2).	Prasarana pertanian yang digunakan	23 Sarana	
		3).	Penerbitan izin usaha pertanian	Tidak Mengeluarkan Izin	
		4).	Persentase prasarana yang digunakan	100%	
		5)	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	Surat Pernyataan	
		6).	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	1570 kasus penyakit babi ASF tertanggulangi dan terdeteksi melalui uji laboratorium	
29	Kehutanan	1).	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Urusan dilaksanakan	
		2).	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		

		3). Pemulihan ekosistem pada Tahura	oleh Biro Provinsi		
		4). Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			
30	Energi dan SDM	1). Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Urusan dilaksanakan oleh Biro Provinsi		
31	Perdagangan	1). Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Surat Pernyataan	Dinas Perindakop	
		2). Persentase penerbitan TDG	Surat Pernyataan		
		3). Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Surat Pernyataan		
		4). Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	Surat Pernyataan		
		5) Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Surat Pernyataan		
		6). Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Surat Pernyataan		
		7). Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Surat Pernyataan		
		8). Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Surat Pernyataan		
		9). Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	382,10 Ton		Dinas pertanian
		10) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Surat		

			yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Pernyataan		
		11)	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Surat Pernyataan		
32	Perindustrian	1).	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Surat Pernyataan	Dinas Perindakop	
		2).	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Surat Pernyataan		
		3).	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Surat Pernyataan		
		4).	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Surat Pernyataan		
		5)	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	Surat Pernyataan		
33	Transmigrasi	1).	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Urusan tidak dilaksanakan Oleh Pemerintah Kab. Malinau		
		2).	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya			
		3).	Jumlah satuan pemukiman yang dibina			

2.2.2 Indikator Kinerja Hasil (OutCome)

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Hasil *(Outcome)*

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (OutCome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan	1). Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	86,06	Dinas Pendidikan	
		2). Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	90,44		
		3). Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	80,12		
		4). Tingkat partisipasi warga negara usia 7-25 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	87,87		*Belum ada dokumen*
2.	Kesehatan	1). Rasio daya tampung RS rujukan	2,45	Dinas Kesehaatan	Surat Pernyataan
		2). Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	66,66		
		3). Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
		4). Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100		
		5). Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100		
		6). Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100		
		7). Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
		8). Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97,76		
		9). Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100		
		10). Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,76		

		11).	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,04		
		12).	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100		
		13).	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	70,22		
		14).	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	96,54		
3.	Pekerjaan Umum	1).	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0,10	Dinas Pekerjaan Umum	
		2).	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0		Surat Pernyataan
		3).	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	44,52		
		4).	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	72,90		
		5).	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81,07		
		6).	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100		
		7).	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	26,44		
		8).	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	53,33		
		9).	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100		
4.	Perumahan Rakyat	1).	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0		Surat Pernyataan

		2).	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0		Surat Pernyataan
		3).	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0,01		Surat Pernyataan
		4).	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,36		Surat Pernyataan
		5).	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100		
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	1).	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Dinas Pekerjaan Umum	
		2)	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100		
		3).	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100		
		4).	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,29		Surat Pernyataan
		5).	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100		
		6).	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100		
		7).	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	6,43		Surat Pernyataan
6.	Sosial	1).	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	Bidang Sosial	
		2).	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100		
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
7.	Ketenagakerjaan	1).	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	Dinas Kanet enag a	
		2).	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,80		
		3).	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	43,39		

		4).	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	43,39	
		5).	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	21,08	
8.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	1).	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,10	Pemberdayaan Perempuan & Perlindung
		2).	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	
		3).	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	27,34	
9.	Pangan	1).	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	147,27	Dinas Pangan
10.	Pertanahan	1).	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Bidang Pertanahan
		2).	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	
		3).	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100	
		4).	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Surat Pernyataan
		5).	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	
		6).	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	
	Lingkungan Hidup	1).	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	84,52	Dinas Lingkungan Hidup
		2).	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	93,78	
		3).	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	3,03	

	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1). Perekaman KTP elektronik	97,15	Dinas Dukcapil	
		2). Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	60,27		
		3). Kepemilikan akta kelahiran	97,62		
		4). Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	43,24		
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1). Persentase pengentasan desa tertinggal	62,50	Dinas PMD	
		2). Persentase peningkatan status desa mandiri	33,96		Surat pernyataan
	Keluarga Berencana	1). TFR (Angka Kelahiran Total)	3,16	Bidang Kb	
		2). Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	20,67		
		3). Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,35		
	Perhubungan	1). Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,58	Dishub	
		2). Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,21		
	Komunikasi dan Informatika	1). Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Diskominfo	
		2). Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	26,19		

		3).	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	83,98		
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	1).	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	15,11	Dinas Perindakop	
		2).	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100		
	Penanaman Modal	1).	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	12,59	Dinas PTSP	
	Kepemudaan dan Olahraga	1).	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,23	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	
		2).	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	12,97		
		3).	Peningkatan prestasi olahraga	14		Jumlah Medali
	Statistik	1)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Bidang Statistik	
		2)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100		
	Persandian	1).	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0		Surat Pernyataan
	Kebudayaan	1).	Terlestarikannya Cagar Budaya	100		
	Perpustakaan	1).	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	60,09		

		2). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	48,38		
	Kearsipan	1). Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	67,29		
		2). Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	12,57		
	Urusan Pilihan				
	Kelautan dan Perikanan	1). Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	100		
	Pariwisata	1). Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-63,91		
		2). Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	3501,9		
		3). Tingkat hunian akomodasi	15,75		
		4). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,74		
		5). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	98,18		
	Pertanian	1). Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	229,72		
		2). Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	4,42		

	Kehutanan		0		
	Energi dan Sumber Daya Mineral	1). Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0		Pemda Malinau tidak melaksanakan urusan tersebut
	Perdagangan	1). Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100		
		2). Persentase kinerja realisasi pupuk	3,98		Surat Pernyataan
		3). Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0,38		Surat Pernyataan
	Perindustrian	1). Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	-90,04		Surat Pernyataan
		2). Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0		Surat Pernyataan
		3). Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3,26		Surat Pernyataan
		4). Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3,26		Surat Pernyataan
		5). Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	3,26		Surat Pernyataan
		6). Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	75		Ada

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2023

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang (OutCome)	Capaian	Sumber Data	Keterangan
	Perencanaan dan Keuangan	1). Rasio Belanja Pegawaidi luar guru dan tenaga kesehatan	10,66	BPKD -	
		2). Rasio PAD	321.28		
		3). Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3		
		4). Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2		
		5). Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	54,95		
		6). Opini Laporan Keuangan	10		2023 belum ditetapkan
	Pengadaan	1). Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	BPBJ	
		2). Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	48,77		

		3).	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	56,89		
		4).	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	226,33		
	Kepegawaian	1).	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	65,114	BKPP	
		2).	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,60		
		3).	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	14,93		
	Manajemen Keuangan	1).	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	96,78	BKPD	
		2).	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	3,21		
		3).	Manajemen Aset	4		
		4).	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	18,16		
	Transparansi dan Partisipasi Publik	1).	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	98,31	Diskominfo	
		2).	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	91,66		

2.3 AKUNTANBILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karekteristik komponen realisasi dalam kondisi :

1) Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\textbf{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Target}} \textbf{ X 100\%}$$

2) Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\textbf{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\textbf{Target - (Realisasi - Target)}}{\textbf{Target}} \textbf{ X 100\%}$$

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja serta hasil evaluasi Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Malinau.Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2023 dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan secara umum semuanya telah dapat dicapai dengan baik.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup (Tahun)	72,05	71,51	99,25%
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,67	9,43	97,51%
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Ribu Rupiah)	10.300,00	10.708.000	103,96%
4	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas (%)	0.55%	0,07%	187,27%
		Indeks Resiko Bencana (Poin)	124,4	144,18	155,9%
5	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	84,36	82,61	97,92%
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama (Poin)	80,6	81,18	100,71%
		Indeks Pembangunan Kebudayaan/ Masyarakat (Poin)	79,5	55,40	69,68%
7	Meningkatnya	Kontribusi	4,9%	8,61%	175%

	produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Pertanian Terhadap PDRB (%)			
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB (%)	2,70%	2,31%	85,55%
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1,84%	2,51%	136,41%
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Peningkatan Berkualitas (%)	72%	45,45%	63,13%
		Pesentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil (%)	73,30%	17,27%	24,01%
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Poin)	75,09	73,08	97,32%
11	Menurunnya Angka Pengganggguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,10%	3,19%	122,19%
12	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)	91.100.000.000	1.159.840.400.335	1.273 %
13	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	52,10%	26,45	50,77
		Pesentase Pemukiman Yang Layak (%)	79%	81,1	102,6%
		Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)	1:1,071	1:405,4	
		Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)	70%	70,64%	100,91%
		Persentase	72%	63	87,5%

		Penduduk Berakses Air Minum (%)			
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	30,34%	49,06	161,70%
14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi (%)	97,25%	96,33%	99,05%
15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	100	100	100%
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	53,75	62,38	116,06
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	91,36	96,71	105,86%
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	67,10	62,04	92,46%
		Nilai LPPD	2.950		
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	WTP	WTP	100%
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	5,5%	3,75%	68,18%
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	85	82,75	97,35%
20	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)	15,59%	458,11%	458,11%

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malinau didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Perolehan capaian 32 indikator sasaran terhadap 20 sasaran selama tahun 2023 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya:

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul

Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi

1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Indikator kinerja sasaran Angka Usia Harapan Hidup, dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Pembangunan di bidang kesehatan terus dilaksanakan di Kabupaten Malinau dalam rangka mewujudkan misi pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Indikator kinerja angka usia harapan hidup dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,05	71,51	99,25%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat tahun 2023 dengan indikator sasaran angka usia harapan hidup dengan target RPJMD tahun 2021-2026 adalah 72,05. Realisasi angka harapan hidup tahun 2023 adalah 71,51, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2023 adalah 99,25%.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 2.7

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,51	71,45	71,49	71,50	99,91	99,97	99,98

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi angka harapan hidup tahun 2023 sebesar 71,51 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 71,45 atau realisasi capaian kinerja 99,91%, realisasi tahun 2021 sebesar 71,49 atau realisasi capaian kinerja 99,97%, dan realisasi tahun 2022 sebesar 71,50 atau realisasi capaian kinerja 99,98%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,08% terhadap capaian tahun 2020, kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,02% terhadap capaian tahun 2021 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,01% terhadap capaian tahun 2022.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah.

Tabel 2.8

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,51	72,38	98,79%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi angka harapan hidup tahun 2022 sebesar 71,51 Tahun dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 72,38 Tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 sebesar 98,79% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Tabel 2.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Regional Provinsi	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)	
						Provinsi	Nasional
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,51	72,59	73,93	98,51%	96,72%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan regional provinsi tahun 2023 adalah perbandingan realisasi angka usia harapan hidup tahun 2023 sebesar 71,50 tahun dengan realisasi regional provinsi tahun 2023 sebesar 72,59 Tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2023 sebesar 98,51% terhadap regional provinsi tahun 2023. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional tahun 2023 adalah perbandingan realisasi angka usia harapan hidup tahun 2023 sebesar 71,50 tahun dengan realisasi nasional tahun 2022 sebesar 71,85 Tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2023 sebesar 96,72% terhadap standar nasional tahun 2023.

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang pada suatu populasi tertentu. Indikator ini dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat kematian dan kelahiran

Harapan Usia Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka Usia Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara.

Salah satu yang menjadi penyebab angka usia harapan hidup yang rendah, salah satunya adalah infrastruktur dan layanan medis yang terbatas serta rendahnya jumlah tenaga medis yang memadai. Kabupaten Malinau memiliki fasilitas kesehatan cukup memadai yaitu 1 (satu) Rumah SAKIT, 2 (dua) RS Pratama, 17 Puskesmas dan 82 Puskesmas Pembantu yang tersebar di 15 Kecamatan.

Berdasarkan data dari Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan PPKB Kab. Malinau, bahwa terdapat 551 orang tenaga ASN, 381 Tenaga Kontrak Kesehatan, dan 33 orang tenaga Nusantara Sehat. Permasalahan yang dihadapi

adalah masih terdapat fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan dan sangat terpencil yang belum memiliki tenaga dokter.

Berdasarkan data BPS, hasil evaluasi Capaian Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Malinau pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Malinau belum mencapai target yang telah ditetapkan, hanya nilai Angka Usia Harapan Hidup Kab. Malinau dari 2020-2023 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sudah cukup baik akan tetapi masih perlu adanya upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kesehatan baik di tingkat Desa melalui Puskesmas Pembantu, peningkatan kualitas kesehatan di tingkat Kecamatan melalui Puskesmas dan peningkatan kualitas kesehatan di Tingkat Kabupaten melalui Rumah Sakit.

Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- Peningkatan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Malinau untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
- Pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahperbatasan dan sangat terpencil.
- Peningkatan layanan kesehatan dengan memperbaiki manajemen program kesehatan.

d. Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan

suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sesuai tabel berikut :

Tabel 2.10
Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
1	***2***
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja angka usia harapan hidup sebesar Rp.93.416.420.809, dari jumlah target anggaran semua program yang disediakan sebesar Rp 125.315.595.817 atau capaian realisasi keuangan sebesar 74,54%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria kriteria **Kurang Efektif**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Berdasarkan standar efesiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui efesiensi atau tidak dengan memenuhi kriteria sesuai tabel berikut :

Tabel 2.11
Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
1	***2***
>100%	Tidak Efesien
90% - 100%	Kurang Efesien
80% - 90%	Cukup Efesien
60% - 80%	Efesien
<60%	Sangat Efesien

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja :

$$Rasio\ Efesiensi\ = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja angka usia harapan hidup sebesar Rp.93.416.420.809, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.220.973.438.840 atau capaian realisasi keuangan sebesar 42,27%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria **Sangat Efisien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.12
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup)	99,25%	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	112.822.391.675	83.937.015.894	74,40%
			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	8.918.411.142	7.793.890.215	87,39%
			Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	506.695.000	371.703.000	73,36%
			Pengendalian Penduduk	163.200.000	14.934.000	9,15%
			Pembinaan keluarga berencana (KB)	1.519.280.000	680.305.700	44,78%
			Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.046.700.000	311.049.500	29,72%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

Dari tabel 2.12 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capain keuangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program-program yang mendukung indikator kinerja angka usia harapan hidup adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang didukung dengan sub kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Bimbingan Teknis dan

Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), program Pengendalian Penduduk, program Pembinaan keluarga berencana (KB) yang didukung oleh sub kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dan dan program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang didukung oleh sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel. 2.13
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,67	9,43	97,51%

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2023

Tahun 2023 rata-rata lama sekolah Kabupaten Malinau Yang ditargetkan dalam RPJMD adalah 9,67 dengan realisasi untuk tahun 2023 adalah 9,43 sehingga capaian kinerja untuk rata-rata lama sekolah Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah 97,51%.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 2.14

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	9,43	9,39	9,40	9,41	99,58%	99,68%	99,78%

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi angka rata-rata lama sekolah tahun 2023 sebesar 9,43 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 9,39 tahun atau realisasi capaian kinerja 99,58%, realisasi tahun 2021 sebesar 9,40 atau realisasi capaian 99,68% dan realisasi tahun 2022 sebesar 9,41 atau realisasi capaian 99,78%. Dengan demikian maka, hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,42% terhadap capaian tahun 2020, kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,31% terhadap capaian tahun 2021 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,21 terhadap capaian kinerja tahun 2022.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 2.15

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	9,43	10,57	89,21%

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2023 sebesar 9,43 tahun dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 10,57 tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2023 pencapaiannya kinerja dengan indikator kinerja angka rata-lama sekolah sebesar 89,21% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan regional provinsi dan standar nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.16

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Regional Provinsi	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)	
						Provinsi	Nasional
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,43	9,34	8,77	100,9%	107,52%

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan regional provinsi tahun 2023 adalah perbandingan realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2023 sebesar 9,43 tahun dengan regional provinsi tahun 2023 sebesar 9,34 tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2023 pencapaiannya sebesar 99,04% terhadap regional provinsi tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional tahun 2023 adalah perbandingan realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2023 sebesar 9,43 tahun dengan standar nasional tahun 2023 sebesar 8,77 tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2023 pencapaiannya sebesar 107,52% terhadap standar nasional tahun 2023.

Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah mengindikasi makin tingginya Pendidikan formal yang dicapai oleh Masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang Pendidikan yang dijalani. Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah salah satu indikator Tingkat Pendidikan disuatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS untukAngka rata-rata lama sekolah untuk Kabupaten Malinau di tahun 2020 sebesar 9,39 untuk tahun 2021 sebesar 9,40 untuk tahun 2022 sebesar 9,41 dan tahun 2023 sebesar 9,43. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya trenpositif setiap tahunnya yaitu mengalami peningkatan secara konsisten untuk angka rata-rata lama sekolah Kabupeten Malinau. Namun Capaian tersebut masih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Capaian yang masih rendah dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu faktor sosial, ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan.

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukanan alisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah KabupatenMalinau. Untuk meningkatkan

Angka Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Malinau, Pemerintah telah mengupayakan kualitas dan akses pelayanan Pendidikan dengan beberapa program salah satunya bahkan menjadi program prioritas Bupati yaitu Wajib Belajar Malinau Maju 16 Tahun, program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan bantuan perlengkapan peserta didik untuk semua jenjang sekolah mulai dari PAUD, SD dan SMP bahkan jenjang SMA yang merupakan tanggung jawab provinsi juga ikut mendapatkan bantuan perlengkapan siswa, hal ini menandakan pemerintah serius dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Malinau. Selain itu juga pemerintah melalui dinas pendidikan melakukan pembangunan sarana dan prasarana sekolah, memberikan bantuan operasional sekolah, melakukan penambahan tenaga pendidik melalui perekrutan tenaga pendidik P3K dan Non ASN, serta melakukan berbagai kegiatan sosialisai dan pelatihan untuk tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik sehingga proses pembelajaran mendapatkan hasil yang maksimal dan berkualitas.

Faktor penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1) Komitmen pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam penyediaan anggaran untuk bidang Pendidikan, baik dalam peningkatan fasilitas Pendidikan berupa Pembangunan sarana dan prasaranan sekolah maupun dalam peningkatan layanan pendidikan.
2) Pendidikan merupakan salah satu Program prioritas Bupati, sehingga menjadi prioritas pemerintah;
3) Dukungan dan kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas sektor;
4) Dukungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam penempatan tenaga pendidik di daerah terpencil atau perbatasan.

Selain faktor keberhasilan, ada beberapa faktor yang bisa menjadi penghambat, penyebab kegagalan atau penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

1) Kurangnya kesadaran pendidikan pada sebagian masyarakat umur 25 tahun keatas, khususnya sebagian masyarakat perbatasan Kabupaten Malinau, karena masyarakat perbatasan merasa timbal balik yang diperoleh masih kurang ketika mereka sudah mendapatkan Pendidikan.
2) Kondisi geografis di Kabupaten Malinau terutama di daerah perbatasan dan sangat terpencil yang belum terlayani dengan maksimal, khususnya sekolah-sekolah dasar yang berada pada desa-desa terpencil yang sulit di jangkau.
3) Akses internet yang kurang memadai di daerah-daerah terpencil, sehingga informasi maupun revensi pembelajaran sangat sulit didapat.
4) Belum semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sehingga mempengaruhi proses belajar mengajar.
5) Sistem pelaporan pada Aplikasi Dapodik sekolah belum maksimal.

Alternative solusi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau atas kegagalan/penurunan kinerja sebagai berikut:

1) Melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada Masyarakat tentang pentingnya Pendidikan.
2) Memaksimalkan layanan pada sekolah-sekolah dasar khususnya yang berada pada daerah-daerah terpencil, dengan cara memprioritaskan kegiatan-kegiatan untuk di sekolah-sekolah Dasar pada daerah terpencil.
3) Melakukan pengadaan sarana dan prasarana dengan memprioritaskan bagi sekolah-sekolah daerah terpencil.
4) Mendirikan Lembaga-lembaga PKBM baru, untuk mengakomodir masyarakat yang bukan usia sekolah untuk bersekolah pada Lembaga PKBM
5) Membuat kegiatan Rapatkoordinasi (Rakor) untuk operator Dapodik sekolah setiap akhir semester pada tahun Pelajaran.

Penyerahan perlengkapan belajar siswa PAUD, SD dan SMP

d. Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

Analisis efektivitas penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas realisasi anggaran terhadap jumlah keseluruhan anggaran. Sedangkan untuk Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas penyerapan anggaran terhadap capaian kinerja. Berikut ini merupakan rumus perhitungan untuk mendapatkan nilai efisiensi sumber daya.

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja angka rata-rata lama sekolah sebesar Rp 120.403.532.578, dari jumlah terget anggaran semua program yang disediakan sebesar Rp.143.159.468.814 atau capaian realisasi keuangan sebesar 84,10%, Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja angka rata-rata lama sekolah sebesar Rp120.403.532.578, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.307.089.015.757 atau capaian realisasi keuangan sebesar 39,20%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efisien.**

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.17
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	97,51%	Program pengelolaan pendidikan	132.185.768.814	110.605.756.798	83,67 %
			Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	10.973.700.000	9.797.775.780	89,28 %

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2023

Dari tabel 2.16 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program pengelolaan pendidikan dan program pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel. 2.18
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	Ribu Rupiah	10.300.000	10.708.000

Sumber : Bappeda dan Litbang Tahun 2023

Pada Tabel 2.17 di atas dapat dilihat perbandingan pengeluaran perkapita dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMD 2016-2025 di tahun 2023 adalah 10.300,00 dan realisasi untuk tahun 2023 adalah 10.708,00 sehingga capaian kinerja untuk pengeluaran perkapitatahun 2023 adalah 103,96%.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 2.19

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	10.708,00	9.611,00	9.928,00	10.304,00	89,75%	92,71%	96,23%

Sumber : Bappeda dan Litbang Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah Perbandingan Realisasi pengeluaran perkapita tahun 2023 sebesar10.708,00 adalah dengan realisasi tahun 2020 sebesar 9.611,00 atau realisasi capaian kinerja 89,75%, realisasi tahun 2021 sebesar 9.928,00 atau realisasi capaian kinerja 92,71%, dan realisasi tahun 2022 sebesar 10.304,00 atau realisasi capaian kinerja 96,23%.

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan meningkat dari tahun ketahun. Selama periode 2020 hingga 2023, Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan telah meningkat sebesar 1,09 juta atau secara rata-rata tumbuh sebesar 3,67 persen per tahun. Padatahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat KabupatenMalinau mencapai Rp10,71 juta per tahun. Capaian ini meningkat 404 ribu rupiah (3,92 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 3,54 persen per tahun.

d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 2.20

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	10.708,00	10.750,00	99,60%

Sumber : Bappeda dan Litbang Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan pengeluaran perkapitatahun 2023 sebesar 10.708,00 Ribu Rupiah dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 10.750,00 Ribu Rupiah, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 99,60% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

d. PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Tabel 2.21

PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	RealisasiTahun 2023	Regional Provinsi	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)	
						Provinsi	Nasional
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Daya Beli masyrakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	10.708,00	9.734,00	11,890,00	110%	90,05%

Sumber : Bappeda dan Litbang tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan regional provinsi tahun 2023 adalah perbandingan realisasi pengeluaranperkapita tahun 2023 sebesar Rp. 10.708,00 dengan realisasi regional provinsi tahun 2023 sebesar Rp 9.734,00 maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2023 sebesar 110% terhadap regional provinsi tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional tahun 2023 adalah perbandingan realisasi pengeluaran perkapita tahun 2023 sebesar Rp 10.708,00 dengan realisasi standar nasional tahun 2023 sebesar Rp 11,890,00 maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2023 sebesar 90,05% terhadap standar nasional tahun 2023.

Pada tahun 2023 ada peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Malinau sebesar 404 ribu rupiah atau 3,92 %. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi inflasi seperti operasi pasar murah, bantuan modal UMKM serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) cukup memberi dampak yang positif terhadap daya beli masyarakat.

Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengaktifkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun oleh Pemda, seperti mengadakan kegiatan festival budaya dari 11 lembaga adat dan beberapa paguyuban,di laksanakannya pesta budaya Kabupaten Malinau melalui IRAU ke-X yang dilaksanakan selama 20 hari dimana dalam kegiatan ini semua organisasi masyarakat, UMKM, Pihak swasta maupun perangkat daerah terlibat demikian juga pelaksanaan turnamen-turnamen olahraga.Pada pelaksanaan kegiatan tersebut UMKM dipersilahkan untuk memasarkan produk-produk baik kerajinan tangan maupun makanan dan minuman jadi disetiap even festival budaya atau turnamen olahraga yang turut mendorong perputaran ekonomi dan merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas dan kelompok pengeluaran (rupiah) 2022 paling besar disumbang dari belanja makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 162.829 per bulan.

Sasaran ke-3 pada misi pertama RPJMD Kabuaten Malinau Tahun 2021-2025 adalah Meningkatkan Daya Beli Masyarakat dengan indkator Tujuan adalah Pengeluaran Perkapita. Pengeluaran Perkapita adalah salah satu unsur pembentuk indicator Tujuan ke-1 RPJMD 2021-2025 yakni Indeks Pembangnan Manusia (IPM), sehingga sangat penting menjadikan Pengeluaran Perkapita menjadi IKU daerah dalam rangka mewujudkan IPM Kabupaten Malinau yang semakin baik.

Pengeluaran Perkapita digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap golongan ekonomi rumah tangga. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat secara umum apakah rumah tangga dengan golongan termiskin memiliki pengeluaran perkapita jauh dibawah rumah tangga terkaya. Pengeluaran Perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yangtelah disesuaikan dengan paritas daya beli. Rumus perhitungan pengeluaran perkapita :

$$Yt = \frac{Yt}{PPP}$$

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja IKU tersebuat adalah Pengeluaran konsumsi masyarakat meningkat ditahun 2023 baik primer, sekunder maupun tersier. Pengeluaran konsumsi masyarakat yang meningkat di tahun 2023 mengindikasikan meningkatnya pendapatan masyarakat Kabupaten Malinau yang berarti perekonomian semakin membaik dan peredaran uang semakin tinggi sejak mewabahnya covid-19 di awal tahun 2020.

e. Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran atas program Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang pentinguntuk mendukung indikator kinerja Pengeluaran perkapita sebesar Rp.400.000.000, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 379.535.899 atau capaian realisasi keuangan sebesar94,88 %. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja untuk indikator kinerja Angka Usia harapan hidup termasuk dalam **kriteria efektif**. Kemudian realisasi penggunaan anggaran atas program Program Perekonomian dan Pembangunan untuk mendukung indikator kinerja Pengeluaran perkapita sebesar Rp.31.640.548.000, dari anggaran

yang disediakan sebesar Rp.28.189.521.558 atau capaian realisasi keuangan sebesar89,09%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja untuk indikator kinerja Angka Usia harapan hidup termasuk dalam **kriteria Cukup Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkankeluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.22
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	103,96%	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp.400.000.000	Rp379.535.899	94,88%
			Program perekonomian dan pembangunan	Rp.31.640.548.000	Rp28.189.521.558	89,09%

Sumber : Bappeda dan Litbang Tahun 2023

Dari tabel 2.21 diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh dua program yaitu program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan capaian keuangan 94,88% dan program perekonomian dan pembangunan dengan capaian keuangan 89,09%.

Tujuan 2 : Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana

Tabel. 2.23
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Angka Kriminalitas Yang Tertangani	Persen	0,55%	0,10%	187, 27%
Indeks Resiko Bencana	Poin	124,4	144,18	155,9%

Sumber : Satpol PP dan BPBD Tahun 2023

Pada Tabel 2.22 diatas dapat dilihat perbandingan angka kriminalitas dengan target RPJMD 2021-2026 adalah 0,55% dan realisasi untuk tahun 2023 adalah 0,07%, sehingga capaian kinerja untuk angka kriminalitas tahun 2023 adalah 187,27%. Untuk indikator kinerja Indeks Resiko Bencana dengan target RPJMD 2021-2026 adalah 124,4 dan realisasi untuk tahun 2023 adalah 144,18, sehingga capaian kinerja untuk Indeks Resiko Bencana tahun 2022 adalah 155,9%.

Tabel 2.24

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Angka Kriminalitas Yang Tertangani Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu	Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun
			2022	2022
1	*2*	*3*	*6*	*9*
Angka Kriminalitas Yang Tertangani	Persen	0,07	0,09	128,57%

Sumber : Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 adalah perbandingan realisasi angka kriminalitas tahun 2023 sebesar 0,07 dengan realisasi tahun 2022 sebesar 0,09 atau realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 128,57%. Dengan demikian maka, hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 71,42% terhadap capaian tahun 2022. Hal ini menunjukan bahwa angka realisasi semakin menurun menunjukan angka kriminalitas di Kabupaten Malinau mengalami penurunan.

Tabel 2.25

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Angka Kriminalitas Yang Tertangani	Persen	0,07	0,35	180%

Sumber : Satpol PP Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi angka kriminalitas tahun 2023 sebesar 0,07% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 0,35%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaian penurunan angka kriminalitas yang tertangani sebesar 180% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Angka kriminalitas adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 100.000 penduduk. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah Petugas pengamanan dalam hal ini Polres, TNI dan Satpol PP secara dini mengantisipasi terjadinya tindak Kriminal di setiap tempat, pihak keamanan secara rutin melakukan Patroli, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelanggaran hukum.

Adapun alasan Satpol PP Memilih indikator kinerja utama angka kriminalitas yang tertangani adalah :

1. Sesuai dengan tujuan RPJMD yaitu Tenciptanya Suasana Kondusif yang Mendukung Pengembagan Sumber Daya Manusia
2. Sesuai dengan tugas dan fungsi satpol PP dan Pemadam Kebakaran yaitu Menegakkan Perda, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, mengupayakan terlaksananya kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Kinerja adalah:

a. Adanya visi dan misi yang jelas dalam mendukung terciptanya Masyarakat Malinau yang aman, nyaman dan damai

b. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau ;
c. Budaya kepedulian masyarakat terciptakan rasa aman, tentram dan damai di Kabupaten Malinau;
d. Terjalinnya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja OPD;
e. Adanya upaya mengoptimalkan fungsi dan ketugasan anggota Satpol PP dan Damkar dalam Penegakan Perda dan Peraturan Bupati.

Faktor-faktor yang menjadi Penghambat pencapaian Kinerja adalah:

a. Sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau belum optimal dalam mendukung aktifitas sebagai pelaksana penegak Peraturan Daerah, penanggulangan bencana kebakaran dan perlindungan masyarakat
b. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal;
c. Belum terpenuhinya standarisasi dan kompetensi SDM antara kebutuhan personil/pegawai dengan bidang serta volume tugas yang diemban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Keberhasilan atau peningkatan Kinerja:

a. Petugas pengamanan dalam hal ini polres, TNI dan satpol PP secara dini mengantisipasi terjadinya tindak Kriminal di setiap tempat.
b. Melakukan Patroli secara rutinitas
c. Melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat tentang pelanggaran Hukum.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja angka kriminalitas sebesar Rp1.138.927.139, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.310.403.600 atau capaian realisasi keuangan sebesar 86,91%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria **Cukup Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkankeluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasianggaran belanja langsunguntuk mendukung indikator kinerja angka kriminal sebesar Rp.1.138.927.139, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp19.081.127.990 atau capaian realisasi keuangan sebesar 5,96%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efesien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan ataupembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.26
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas	187,27%	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1.310.403.600	1.138.927.139	86,91

Sumber : Satpol PP Tahun 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 2.27

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2019	2020	2022
1	2	3	4	5		6	7	
Indeks Resiko Bencana	Poin	144,18	124,4	155,85	155,85	86,28%	108%	108%

Sumber : BPBD Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi indeks resiko bencana tahun 2023 sebesar 144,18 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 124,4 atau realisasi capaian kinerja sebesar 86,28% dan realisasi tahun 2021 dan sebesar 155,85 atau realisasi capaian kinerja sebesar 108%. Dengan demikian maka, hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tahun 2023

sebesar 15,90% terhadap capaian tahun 2020 dan ada penurunan realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar -7,48terhadap capaian tahun 2021 dan 2022.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.28

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2023	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Indeks Resiko Bencana	Poin	144,18	124,4	115,90%

Sumber : BPBD Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi indeks resiko bencana tahun 2023 sebesar 144,18 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 124,4, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 115,90% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan Regional Provinsi dan standar nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.29

PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Regional Provinsi	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)	
						Provinsi	Nasional
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terciptanya kehidupan yang aman, tentram dan harmonis serta bebas bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	144,18	149,53	132,25	98,51%	108,20%

Sumber : BPBD Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan regional provinsi tahun 2023 adalah perbandingan realisasi indeks resiko bencana tahun 2023 sebesar 144,18 dengan realisasi regional provinsi tahun 2023 sebesar 149,53, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2023 sebesar 98,51% terhadap regional provinsi tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional tahun 2023 adalah perbandingan realisasi indeks resiko bencana tahun 2023 sebesar 144,18 dengan realisasi nasional tahun 2022 sebesar 132,25 maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaiankinerja tahun 2023 sebesar 108,20% terhadap standar nasional tahun 2023.

Indeks Resiko Bencana adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Resiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat resiko bencana tiap kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan Tabel 2.28 di atas, Indeks Resiko Bencana terjadi kenaikan Status Resiko Bencana dan Target 124,4 Poin (Sedang) menjadi 144,18 poin (Tinggi) yang berarti terjadi kenaikan sebesar 19,78% dari yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan ada beberapa data dukung IKD (Indek Ketahanan Daerah) masih

banyak yang tidak tersedia diantaranya dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana) dan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) yang sudah disahkan/dilegalkan (Tahun 2023 baru tersedia kegiatannya) serta data lintas sektoral yang masih kurang.

Altenatif solusi yang akan dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk memenuhi indikator ketahanan daerah.
2. Menyusun dokumen penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan kualitas pencatatan data dan informasi terkait kebencanaan.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks resiko bencana sebesar Rp 12.252.374.678, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 13.575.000.225 atau capaian realisasi keuangan sebesar 90,26%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria **Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkankeluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja indeks resiko bencana sebesar Rp.12.252.374.678, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.40.228.178.105 atau capaian realisasi keuangan sebesar30,45%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efisien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan ataupembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan

tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.30
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Indeks Resiko Bencana	155,9%	Program Penanggulangan Bencana	13.575.000.225	12.252.374.678	90,26 %

Sumber : BPBD Tahun 2023

Dari tabel 2.30 diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program penanggulangan bencana dengan capaian kinerja mencapai angka 155,9% dengan realisasi keuangan 90,26%.

5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender

Tabel. 2.31
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Kesetaraan Gender

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Indeks Pembangunan Gender	Poin	84,36	82,61	97,92%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2023

Tahun 2023 pencapaian sasaran meningkatnya kesetaraan gender dengan indikator indeks pembangunan gender yang ditarget dalam dokumen RPJMD 2021-2026 adalah 84,36 dan realisasi untuk tahun 2023 adalah 82,61 dengan capaian kinerja untuk indeks pembangunan gender tahun 2023 adalah 97,92%. Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.32

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Pembangunan Gender	Poin	82,61	81,36	81,95	82,61	98,48%	99,20%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi indeks pembangunan gender tahun 2023 sebesar 82,61 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 81,36 atau realisasi capaian kinerja sebesar 98,48%, realisasi tahun 2021 sebesar 81,95 atau realisasi capaian kinerja sebesar 99,20% dan realisasi tahun 2022 sebesar 82,61 atau realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 1,53% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023

sebesar 0,80% terhadap capaian tahun 2021 dan tidak ada kenaikan ditahun 2023 terhadap capaian 2022.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.33

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Indeks Pembangunan Gender	Poin	82,61	87,36	94,56%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi indeks pembangunan gender tahun 2023 sebesar 82,61 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 87,36, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 94,56% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target nasional dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.34

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Regional Provinsi	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)	
						Provinsi	Nasional
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Tahun	82,61	87,85	91,63	106	110

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan regional provinsi tahun 2023 adalah perbandingan realisasi indeks pembangunan gender tahun 2023 sebesar 82,61% dengan realisasi regional provinsi tahun 2023 sebesar 87,85 Tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2023 sebesar 98,48%, terhadap regional provinsi tahun 2023. Capaian realisasi tersebut masih dibawah provinsi Kalimantan Utara maupun nasional dengan selisih yang cukup besar yaitu 5,25 % dan selesih secara nasional berada pada 9,02%.

Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara. Capaian yang masih rendah dibanding target dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu faktor sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP

dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Penghitungan angka IPG dilakukan dengan menggunakan rasio antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki sebagai berikut:

$$IPG = \frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ Laki - Laki}\ x\ 100\%I$$
$$= \frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ Laki - Laki}\ x\ 100\%$$

Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

Kegunaan

Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia yang sudah memasukkan aspek gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Keterangan Tambahan

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

(i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life),

(ii) Pengetahuan (knowledge), dan

(iii) Standar hidup layak (decent standard of living)

Interpretasi

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

Tabel 2.35

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kelompok	2019	2020	2021	2022	2023
Malinau	81,71	81,36	81,95	82,61	Data belum Liris
Provinsi	87,00	86,67	87,30	87,85	Data belum Liris
Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63	Data belum Liris

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Untuk meningkatkan Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Malinau, Pemerintah telah mengupayakan kualitas

Faktor penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1) Komitmen pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam penyediaan anggaranyang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender
2) Mendukung implementasi PUG yang ditunjukkan dengan adanya Pokja (Kelompok Kerja), Focal Point, Gender Champion dan Fasilitator

3) Kebijakan dan program merupakan wujud komitmen yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan operasional atau teknis.
4) Kerjasama dengan Kesehatan, Pendidikan, dan ketenagakerjaan yang sudah seharusnya dioptimalkan untuk mendukung IPM,IPG, dan IDG. Hal itu merupakan kerja lintas sektor dan lintas bidang.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.
Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Selain faktor keberhasilan, ada beberapa faktor yang bisa menjadi penghambat, penyebab kegagalan atau penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

1) Komunikasi antar pelaksana kurang terjalin dengan baik sehingga menimbulkan beda persepsi terkait acuan pelaksanaan PUG yang digunakan.
2) Sumber daya manusia PUG di Kabupaten Malinau belum memadai. Terbatasnya sumber daya manusia PUG baik perencana yang memiliki kecakapan dalam melakukan analisis gender dalam PPRG menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan PUG. Begitupun jumlah SDM PUG yang ada tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Malinau dengan keseluruhan OPD yang perlu didampingi.

3) Kurangnya partisipasi aktif berbagai stakeholders dalam mengadakan kegiatan yang mendukung terwujudnya pembangunan responsif gender di Kabupaten Malinau
4) Sistem pencatatan dan pelaporan PUG belum maksimal.

Adapun hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut menyangkut minimnya SDM profesional dalam penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, belum optimalnya pemanfaatan Forum Gender yang ada serta masih kurangya tenaga penyuluh di lapangan.

Solusi, Memaksimalkan penguatan pengarusutamaan Gender dan Anak dengan memanfaatkan Forum Gender yang telah terbentuk, peningkatan SDM dengan mengikuti pelatihan-pelatihan serta adanya penambahan Tenaga Penyuluh Lapangan

Alternative solusi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malinau atas kegagalan/penurunan kinerja sebagai berikut :

1. Tingkatkan Komitmen yang meningkat (regulasi):
   a) Perda, Perbup/Perwal, Perdes
   b) rumuskan dalam regulasi operasional;
   c) lakukan RIA atas regulasi tersebut
2. Tingkatkan Kebijakan Strategi:
   a) Megarusutamakan gender dalam Dokumen RPJP,RPJMD,RKPD, Renstra OPD,Renja, RKA, DPA, APDB;
   b) Cek secara khusus implementasinya;
   c) Monev
3. Tingkatkan Partisipasi Masyarakat:
   a) Mengajak Dunia Usaha untuk bergabung menangani kesenjangan gender;
   b) Libatkan PT dan LSM;
   c) Libatkan secara langsung masyarakat

4. Meningkatkan kerjasama lintas sektor;
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program pendidikan;
6. Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peningkatan upaya promosi tentang kesetaraan gender;
8. Mengadakan evaluasi untuk pembangunan manusia (IPG) terhadap pencapaian laki-laki dan perempuan.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks pembangunan gender sebesar Rp1. 492.498.100, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.664.148.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar

89,68%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria **Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkankeluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja indeks pembangunan gender sebesar Rp1.496.498.100, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp1.492.498.100 atau capaian realisasi keuangan sebesar 24.43%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efisien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan ataupembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.36
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender)	97,92%	Program Perlindungan Perempuan	1.159.148.000	1.063.685.500	91,76%
			Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	75.000.000	55.854.000	74,47%
			Program peningkatan kualitas keluarga	230.000.000	200.423.900	87,14%
			Program pengelolaan sistem data gender dan anak	200.000.000	172.534.700	86,27%

Dari tabel 2.36 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Perlindungan perempuan.

6. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat

Tabel 2.37
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6
Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter
Dan Budaya Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Indeks Kerukunan Beragama	Poin	80,06	81,18	100,71%
Indeks Pembangunan Kebudayaan/ Masyarakat	Poin	79,5	55,40	69,68 %

Sumber : Badan Kesbangpol dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

Pada Tabel 3.37 diatas dapat dilihat perbandingan indeks kerukunan beragama dengan target RPJMD 2016-2022 adalah 80,06 dan realisasi untuk tahun 2023 adalah 81,18 sehingga capaian kinerja indeks kerukunan beragama tahun 2023 adalah 100,71%. Indeks pembangunan kebudayaan tahun 2023 target tahun 2023 79,5 poin dengan realisasi 55,40 poin dan capaian kinerja 69,68%.

Tabel 2.38

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*8*	*9*
Indeks Kerukunan Beragama	Poin	81,18	75,63	80,95	93,16%	99,71%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi indeks kerukunan beragama tahun 2023 sebesar 81,18 dengan realisasi tahun 2021 sebesar 75,63 atau realisasi capaian kinerja sebesar 93,16% dan realisasi tahun 2022 sebesar 80,95 atau realisasi capaian kinerja sebesar 99,71%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 7,33% terhadap capaian tahun 2021 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,28% terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.39

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Indeks Kerukunan Beragama Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Indeks Kerukunan Beragama	Poin	81,18	83,3	97,45%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi indeks kerukunan beragama tahun 2023 sebesar 81,18 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 83,3 maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 97,45% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan regional provinsi dan standar nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.40

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Regional Provinsi	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)	
						Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8
Mantapnya kehidupan keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama	poin	81,18	81,18	81,18	100%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan regional provinsi dan standar nasional tahun 2023 adalah perbandingan realisasi indeks kerukunan beragama tahun 2023 sebesar 81,18 dengan realisasi regional provinsi dan standar nasional tahun 2023 sebesar 81,18, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100% terhadap regional provinsi dan standar nasional tahun 2023.

Pengertian kerukunan sebagaimana dikutip dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006/8 Tahun 2006 yaitu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan saling menghargai; kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Indeks kerukunan umat beragama digunakan untuk memberikan informasi dan masukan bagi instasi/lembaga terkait tentang kondisi kerukunan umat beragama. kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan :

1. Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama.
2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu.

3. Umat beragama diberi kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing.

Indeks kerukunan beragama sendiri dihitung berdasarkan sejumlah indikator seperti tingkat toleransi antar agama, partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan tingkat konflik yang terjadi dalam masyarakat. Semakin tinggi indeks kerukunan beragama, semakin harmonis hubungan antar umat beragama di suatu wilayah.

Tujuan pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama:

1. Alat untuk mengukur kinerja seluruh unit teknis di Kementerian Agama terkait capaian *outcame* kerukunan.
2. Alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi dan deteksi dini.

Adapun faktor-faktor keberhasilan yang mendukung indikator kinerja indeks kerukunan umat beragama yaitu :

1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama dengan pemerintah.
2. Membangun harmonis sosial dan persatuan dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun.
3. Tidak adanya keberatan penganut agama lain dalam membangun rumah ibadat setelah mendapat izin dari pemerintah setempat.
4. Warga Negara Indonesia, apapun agamanya berhak menjadi Kepala Daerah.
5. Bersedia terlibat usaha yang dikelolah bersama teman/sahabat berbeda agama.

Faktor-faktor penghambat kerukunan hidup beragama yaitu cara-cara agresif dalam dakwah agama yang ditujukan kepada orang yang telah beragama, pendirian tempat ibadat tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Solusi yang akan dilakukan kedepan adalah memaksimalkan usaha-usaha pemeliharaan kerukunan dan pencegahan konflik mulai dari tingkat keluarga, lembaga pendidikan, sampai tingkat masyarakat.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks kerukunan beragama sebesar Rp 200.000.000, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.200.000.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria **Sangat Efiktif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkankeluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang

seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja indeks kerukunan beragama sebesar Rp. 22.236.113.495, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp 26.543.714.216 atau capaian realisasi keuangan sebesar 83,77%.Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria Cukup Efisian.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan ataupembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.41
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama	100,71	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	200.000.000	200.000.000	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang didukung oleh kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dan sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah sehingga di tahun 2023 capaian kinerja indeks kerukunan beragama mencapai angka 100,71% dengan realisasi keuangan 100%. Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.42

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	5	6	8	9
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	55,40	-	50,08	-	90,39%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja indeks pembangunan kebudayaan tahun 2023 dengan tahun 2022 adalah realisasi capaian tahun 2023 sebesar 55,40 poin dengan realisasi capaian 50,08 sehingga realisasi capaian mencapai 90,39%. Dengan demikian maka adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 10,62 terhadapa realisasi capaian kinerja tahun 2022. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.43
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Point	55,40	82,5	67,15%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan

tahun 2023 sebesar 55,40 poin dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 82,5 poin, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 67,15 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2023.

Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai salah satu isu strategis pembangunan Indonesia, tidak hanya bagaimana kebudayaan itu ada dan berkembang di dalam suatu masyarakat, namun kebudayaan adalah modal dalam pembangunan. Perhitungan IPK diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan yang knowledge based, agar perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan dapat lebih presisi sesuai kondisi daerah.

Berdasarkan Surat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 005/60/Budpar-III bahwa indikator kinerja indeks pembangunan kebudayaan belum bisa dihitung dikarenakan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 55 tahun 2022 Tantang Indeks Pembangunan Kebudayaan yakni Bab I pasal 1 dan 2 yang menyatakan bahwa indeks pembangunan kebudayaan disingkat IPK adalah suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan kebudayaan tingkat nasional dan provinsi, juga IPK bertujuan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan bidang kebudayaan pada tingkat nasional dan provinsi.

Indeks Pemajuan Kebudayaan merupakan suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam Pembangunan Kebudayaan yang bertujuan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan. Pemajuan merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya krisis karekter yang disebabkan oleh Pengaruh Kebudayaan Asing. Dengan adanya Pemajuan Kebudayaan berdampak positif pada kelestarian dan keberlangsungan kebudayaan suatu daerah.

Untuk mengatahui Indeks Pembangunan Kebudayan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

IPK = Jumlah Bobot Dimensi x Jumlah Indeks Dimensi

Tahun 2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan dikarenakan Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan hanya dilakukan pada tingkat nasional dan Provinsi. Sebagai acuan realisasi capaian, Dinas Kebudayaan mengikuti data perhitungaan dari Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun beberapa Faktor yang menyebabkan indeks pembangunan kebudayaan belum bisa dihitung atau dilaksanakan di Kabupaten Malinau adalah:

a. Belum tersedianya aturan yang memuat tentang petunjuk teknis penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tingkat Kabupaten
b. Belum adanya tim/OPD yang menjadi *leading sector* (Penanggung jawab) dalam melakukan penghitungan Indeks Pemajuan Kebudayaan mengingat bahwa dalam Rumus penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan terdiri dari 7 Dimensi dan 34 Indikator, dimana masing-masing Dimensi dan Indikator berada di OPD yang berbeda.

Langkah alternatif sebagai upaya yang akan dilakukan untuk kedepannya adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Koordinasi pada Kementrian Kebudayaan dan Pendidikan, Pemerintah Provinsi mengenai penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan
b. Membentuk Tim yang bertanggung jawab/ bertugas melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Tingkat Kabupaten, khususnya Kabupaten Malinau.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks pembangunan kebudayaan sebesar Rp. 3.376.633.100, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 4.843.455.381 atau capaian realisasi keuangan sebesar 84,55 %. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria **Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkankeluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasianggaran belanja langsunguntuk mendukung indikator kinerja indeks pembangunan kebudayaan sebesar Rp.3.387.708.575, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp 9.150.720.340 atau capaian realisasi keuangan sebesar 37.02%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efesien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan ataupembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.44
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan)	69,68%	Pengembangan Kebudayaan	5.590.901.881	3.387.708.575	60,59

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal

Tujuan 1 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah

7. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi dan Karekteristik Lokal

Tabel 2.45
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7
Meningkatnya produktifitas sektor sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Persen	4,9%	8,61%	175, 71%

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2023

Pada Tabel 2.45 diatas dapat dilihat perbandingan kontribusi pertanian terhadap PDRB dengan target RPJMD 2016-2022 adalah 4,9% dan realisasi untuk tahun 2023 adalah 8,61% sehingga capaian kinerja untuk kontribusi pertanian terhadap PDRB tahun 2022 adalah 175,71%. Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.46

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Persen	8,61%	11%	8,59%	127,7%	99,76%

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi kontribusi pertanian terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 8,61 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 11 atau realisasi capaian kinerja sebesar 127,7% dan realisasi tahun 2021 sebesar 8,59% atau realisasi capaian kinerja sebesar 99,76%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar -21% terhadap capaian tahun 2021 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,23% terhadap capaian tahun 2022. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.47

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Persen	8,61%	5%	172,2%

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi kontribusi pertanian terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 8,61% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 5%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 172,2% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan regional provinsi dan standar nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.48

PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Regional Provinsi	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)	
						Provinsi	Nasional
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorintasi pada potensi dan kearifan lokal	Konrtibusi pertanian terhadap PDRB	Persen (%)	8,61	4.32	12,40	200%	70%

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan regional provinsi tahun 2023 adalah perbandingan realisasi kontribusi pertanian terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 8,61 dengan realisasi regional provinsi tahun 2023 sebesar 4,32,

maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2023 sebesar 199% terhadap regional provinsi tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional tahun 2023 adalah perbandingan realisasi kontribusi pertanian terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 8,61 dengan realisasi nasional tahun 2023 sebesar 14,20, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaiankinerja tahun 2023 sebesar 70% terhadap standar nasional tahun 2023.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Nilai PDRB suatu wilayah dapat memberikan informasi tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat terhadap wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi atau tingkat kemakmuran masyarakatnya juga baik.

Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam memberikan informasi tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat terhadap wilayah.

Tabel 2.49
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha		Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2021	2022	2023
(1)		(3)	(4)	(5)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,00	8,59	8,61
B.	Pertambangan dan Penggalian	50,96	60,96	60,51
C.	Industri Pengolahan	2,44	1,93	1,96
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,03	0,03
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,06	0,06
F.	Konstruksi	15,63	12,06	11,94

Sumber Data : BPS, Malinau Dalam Angka 2024

Dari Tabel di Atas dapat di simpulkan Kontribusi Pertanian Dalam Arti Luas (TNP, Holti, Ternak, Perikanan) Terhadap PDRB semakin membaik, kenaikan pada 2021, lebih di sebabkan perhitungan PDRB pada saat itu masi memuat Pertambangan dan penggalian, sehingga jumlahnya menjadi lebih tinggi.

Faktor penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1) Komitmen pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam penyediaan anggaran untuk Dinas Pertanian, baik dalam peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
2) Dukungan dan kerjasama yang baik antara lintas OPD dan lintas sektoral;
3) Perubahan perilaku masyarakat seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Teknologi Pertanian dan Bibit- bibit tanaman yang bersertifikasi sehingga dapat meningkatkan produksi Tanaman pangan yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Petani dalam arti Luas;
4) Peningkatan kualitas pelayanan Pelayanan Oleh Dinas Pertanian melalui sosialisasi, pelatihan, bimtek yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga SDM dan pengetahuan para Petani menjadi semakin Baik dari Tahun ke Tahunnya;

Selain faktor keberhasilan, ada beberapa faktor yang bisa menjadi penghambat, penyebab kegagalan atau penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Keterampilan petani mengelola lahan pertanian sesuai karakteristik dan kearifan lokal secara berkelanjutan.
2. Kurangnya ketersediaan dan sebaran Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pertanian serta penyuluhan di tingkat Kecamataan dan desa.

3. Belum tersedianya tenaga pertanian PNS antara lain: pengawas benih tanaman, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, pengawas bibit ternak, pengawas mutu pakan, medik veteriner, paramedik veteriner, pengawas mutu hasil pertanian, analis pasar hasil pertanian.
4. Banyaknya petani yang berusia lanjut dan Kurangnya minat pemuda/pemudi dalam mengelola lahan pertanian. serta terbatasnya pengadaan distribusi alat mesin pertanian

Alternative solusi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Malinau atas kegagalan/penurunan kinerja sebagai berikut :

1) Meningkatkan upaya pencegahan Penyakit/Hama Tanaman Pangan dan Hewan Ternak
2) Peningkatan akses Jalan Tani melalui kerjasama dengan PU Perkim
3) Memperbaiki Saluran-saluran Irigasi melalui kerjasama dengan PU Perkim
4) Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat;
5) Menjamin ketersediaan Benih Padi;
6) Pembinaan/peningkatan kapasitas tenaga PPL;
7) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan;
8) Mengadakan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala (per triwulan).

Gbr. Pemeriksaan Kesehatan Hewan & Pemberian Vitamin Kepada Ternak

Gbr. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Petani dan PPL

Gbr. Monev Pencegahan Penyakit Tanaman Perkebunan

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Konrtibusi pertanian terhadap PDRB sebesar Rp.9.542.000.000,dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 9.982.452.542 atau capaian realisasi keuangan sebesar95,58%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria **Efektif**.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkankeluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan

antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasianggaran belanja langsunguntuk mendukung indikator kinerja Konrtibusi pertanian terhadap PDRB sebesar Rp.6.567.669.331, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp15.846.481.796 atau capaian realisasi keuangan sebesar41,44%.Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efesien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan ataupembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.50
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorintasi pada potensi dan kearifan lokal	Konrtibusi pertanian terhadap PDRB	175%	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.742.919.800	2.115.497.493	44,60%
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.651.870.392	1.814.370.390	49,68%
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.272.261.500	1.101.851.013	86,61%
			Program Penyuluh Pertanian	1.477.542.047	1.105.470.190	74,82%
			Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	445.028.000	347.961.324	78,19%
			Program perizinan usaha pertanian	200.000.000	82.518.921	41,26%

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2023

Dari tabel 2.50 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Penyuluh Pertanian dan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.

8. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah

Tabel 2.51

Evaluasi Pencapaian Sasaran 8
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB	Persen	2,70%	2,31%	85,55%
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	1,84%	2,51%	136,41%

Sumber : Dinas Perindag dan Dinas Kebudayaan dan periwisata Tahun 2023

Pada Tabel 2.51 diatas dapat dilihat perbandingan kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB dengan target di tahun 2023 adalah 2,70 realisasi 2,31 dan capaian kinerja untuk kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB tahun 2023 adalah 85,55%. Indikator kinerja kontribusi pariwisata terhadap PDRB dengan target di tahun 2023 adalah 1,84 realisasi tahun 2023 adalah 2,51 dengan capaian kinerja untuk rata-rata kontribusi pariwisata terhadap PDRB tahun 2022 adalah 136,41%.

KONTRIBUSI INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA TERHADAP PDRB

Tabel 2.52

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB	Persen	2,31%	1,93	2,44	83,59%	105,67 %

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 2,31% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 1,93 atau realisasi capaian kinerja sebesar 83,59% dan realisasi tahun 2022 sebesar 2,44% atau realisasi capaian kinerja 105,67%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 19,68% terhadap realisasi capaian tahun 2021 dan adanya penurunan realisasi capaian kinerja sebesar -5,32% terhadap realisasi capaian 2022.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.53
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB	Persen	2,31%	3,00%	77%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 2,31% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 3,00% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 77% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam satu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memiliki perang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Untuk itu pemerintah khususnya kabupaten Malinau berusaha untuk terus menerus meningkatkan PDRB-nya khususnya dari sektor industri, perdagangan dan jasa.

Pertumbuhan industri Kabupaten Malinau di Tahun 2023 ini terjadi pada industri kecil maupun industri menengah, sementara industri besar cenderung tetap. Hal ini mengingat bahwa kebijakan tata ruang Kabupaten Malinau yang terbatas untuk adanya penambahan jumlah industri besar. Sedangkan untuk jenis dan kelompok usahanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Jenis dan Kelompok Usaha Industri di Kabupaten Malinau Tahun 2023

No.	Jenis Industri	Aneka Usaha
1.	Pangan/Agro	1. Pembuatan Roti & Kue 2. Penggilingan Daging 3. Penggilingan Padi 4. Depo Air Minum 5. Tahu & Tempe 6. Pembuatan Mie 7. Kopi Bubuk 8. Obat Tradisional 9. Minyak Sawit
2.	Logam	1. Bengkel 2. Las, Teralis dan Bubut 3. Pandai Besi 4. Penggilingan Aspal 5. Pembuatan Perahu 6. Pengolahan Aluminium 7. Servis Elektronik 8. Percetakan
3.	Bahan Bangunan	1. Bata / Batako / Paving 2. Moulding
4.	Kerajinan	1. Anyaman 2. Manik-manik 3. Ukiran
5.	Furniture	1. Meubelair
6.	Konveksi	1. Penjahitan

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

Realisasi persentase pertumbuhan industri pada Tahun 2023 sebesar 85,55%. Upaya mempertahankan kinerja Persentase pertumbuhan industri adalah :

1. Terus meningkatkan sarana / prasarana dan kebijakan yang memberikan ruang gerak bagi pelaku industri.

2. Menjalin kerjasama dengan asosiasi yang ada untuk pengembangan industri kreatif.
3. Memotivasi pelaku industri kreatif dalam pemanfaatan bahan baku yang cukup.
4. Terus meningkatkan daya kreatifitas terutama pada sektor industri kuliner.
5. Mendorong pertumbuhan industri berdasarkan Rencana Pembangunan Industri.
6. Meningkatkan pemasaran produk unggulan tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Upaya kedepan yang dilakukan untuk pencapaian persentase peningkatan jumlah pertumbuhan industri adalah:

1. Pembinaan dan menumbuhkan usaha baru dan pengawasan terhadap usaha baru yang ada
2. Pelatihan SDM baik Kriya dan Aneka Kuliner
3. Fasilitasi bantuan mesin peralatan industri
4. Fasilitasi berkenaan HAKI, Paten Sertifikasi Halal, SNI Produk dan Pelatihan Keamanan Pangan.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB sebesar Rp.4.834.4442.819, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.5.677.188.835 atau capaian realisasi keuangan sebesar 85,15%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria **Efektif**.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkankeluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB sebesar Rp.4,834.442.819, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.10.398.187.297 atau capaian realisasi keuangan sebesar 46,51%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efesien**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan ataupembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan

tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.55
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB	85,55%	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.130.085.427	2.647.357.902	84,58%
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.547.103.426	2.187.084.917	85,87%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

Dari tabel 2.55 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDRB

Tabel 2.56
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun- (%)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	5	6		8	9	
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	2,51	1,83	1,92	1,67	72,90	76,49	66,53

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 2,51 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 1,83 atau realisasi capaian kinerja sebesar 72,90% dan realisasi tahun 2021 sebesar 1,92 atau realisasi capaian kinerja sebesar 76,49%, dan realisasi tahun 2022 sebesar 1,67 atau realisasi capaian kinerja sebesar 66.53%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 37,15% terhadap capaian tahun 2020, adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 30,72 % terhadap capaian tahun 2021 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 50,29 % terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.57
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	2,51%	1,86%	134,9%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi kontribusi pariwisata terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 2,51% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 1,86%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 134,9% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan utama dalam mendorong pertumuhan ekonomi suatu Daerah dikarenakan Pariwisata dapat memberikan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kekayaan suatu daerah. Pengaruh pariwisata dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terlihat dari kontribusi jasa pariwisata, penerimaan dan sektor pendukungnya. Sektor pariwisata merupakan sektor yang berbasis jasa dan sebagai salah satu sektor unggulan yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pariwisata tidak lepas dari jasa penyedia makanan dan minuman yaitu restoran, serta penyediaan akomodasi (hotel, penginapan) Untuk mengatahui kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{Jumlah\ Kontribusi\ PDRB\ dari\ Sektor\ Pariwisata}{Iumlah\ PDRB} x100$$

Target kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2023 yaitu sebesar 1,84% dengan realisasi sebesar 2,51% dan capaian kinerja 136,41%. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pencapaia kinerja sebagai berikut:

1. Terselanggaranya Even HUT Kabupaten Malinau dan Irau Kabupaten Malinau, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Malinau.
2. Terdapat objek wisata sebagai destinasi wisata di Kabupaten Malinau
3. Penyediaan jasa makan dan minum (Restoran dan Rumah Makan), penyediaan jasa akomodasi yang berkembang di Kabupaten Malinau.
4. Adanya dukungan dari instansi terkait dalam upaya peningkatan kualitas penyediaan jasa dan akomodasi pada sektor pariwisata melalui kegiatan pelatihan antara lain pelatihan pemandu wisata alam, pelatihan homestay dan lainnya.

Dalam pencapaian kinerja tidak hanya di pengaruhi faktor pendukung ada juga faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa Hotel dan Rumah Makan/Restoran yang belum terdata secara lengkap.
2. Keterbatasan tenaga/Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Hotel, Rumah Makan dan Restoran secara optimal.

Menindaklanjuti hambatan-hambatan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan alternatif perbaikan untuk solusi kedepannya sebagai berikut:

1. Melakukan promosi pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan.
2. Melakukan pendataan secara berkelanjutan terhadap usaha pariwisata yang ada.
3. Melakukan peningkatan dan pengembangan pada objek pariwisata.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada

output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja kontribusi pariwisata terhadap PDRB sebesar Rp. 7.384.318.106,dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.10.005.682.736 atau capaian realisasi keuangan sebesar 73,80%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria Kurang Efektif.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkankeluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasianggaran belanja langsunguntuk mendukung indikator kinerja kontribusi pariwisata terhadap PDRB sebesar Rp.7.384.318.106, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.13.147.329.871 atau capaian realisasi keuangan sebesar56,16%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efesiensi.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan ataupembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.58
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB)	136,41%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.346.426.286	6.817.000.671	72,94%
			Program Pemasaran Pariwisata	659.256.450	567.317.435	86,05%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

Dari tabel 2.58 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan program pemasaran pariwisata.

9. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas

Pengukuran sasaran meningkatnya pertumbuhan koperasi serta usaha kecil dan mikro yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran persentase peningkatan koperasi berkualitas dan persentase peningkatan usaha mikro dan kecil, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran dan analisa capaian kinerja. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran yaitu persentase peningkatan koperasi berkualitas dan pesentase peningkatan usaha mikro dan kecil dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.59
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9
Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	Persen	72%	45,45%	63,13%
Persentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil	Persen	73,30%	17,60%	24,01%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

Pada Tabel 2.59 diatas dapat dilihat perbandingan persentase peningkatan koperasi berkualitas dengan target RPJMD 2021-2026 adalah 72% dan realisasi untuk tahun 2023 adalah 45,45% sehingga capaian kinerja untuk persentase peningkatan koperasi berkualitas tahun 2023 adalah 63,13%. Pesentase peningkatan usaha mikro dan kecil dengan target RPJMD 2021-2026 adalah 73,30% dan realisasi untuk tahun 2023 adalah 17,60% sehingga capaian kinerja untuk pesentase peningkatan usaha mikro dan kecil tahun 2023 adalah 24,01%.

PERSENTASE PENINGKATAN KOPERASI BERKUALITAS

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.60
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	5	6	8	9
Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	Persen	45,45 %	-	72,4 %	-	159,29%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

Perbandingan realisasi persentase peningkatan koperasi berkualitas tahun 2023 sebesar 45,45% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 72,4% atau realisasi capaian kinerja sebesar 159,29%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar -37,22% terhadap capaian tahun 2022. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.61
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	Persen	45,45%	80%	56,81%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi persentase peningkatan koperasi berkualitas tahun 2023 sebesar 45,45% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 80%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 56,81% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Koperasi merupakan suatu bentuk organisasi yang memiliki badan hukum yang dapat didirikan oleh orang perseorangan atau yang memiliki badan hukum yaitu Koperasi, dimana terdapat pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan suatu usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta setara dengan badan usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi.

Koperasi dapat dikatakan berkualitas apabila koperasi memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan sekaligus manfaat bagi seluruh anggota koperasi yang memiliki badan hukum aktif dan badan usaha yang memiliki ciri prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan memiliki kinerja usaha yang semakin sehat serta memiliki orientasi kepada usaha anggota dan memiliki kepedulian sosial (Permenkop No. 21, 2015).

Keberhasilan program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan Koperasi Berkualitas. Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan diatas, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Adapun faktor Penghambat Koperasi Berkualitas adalah :

1. Sumber daya manusia Koperasi masih belum memadai.

2. Pengurus Koperasi yang kurang memiliki waktu luang atau masih dianggap bukan tugas pokok.
3. Kurangnya pemahaman gerakan Koperasi dalam penyelenggaraan Rapat Anggota koperasi dan pastisipasi, pengawasan anggota dan pengelolaan koperasi untuk pengembangan koperasi.
4. Belum adanya pengembangan sistem yang memudahkan perangkat koperasi melaporkan aktivitas kelembagaannya.
5. Belum optimal Koperasi dapat meningkatkan produk unggulan daerah menjadi komoditas ekspor yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa daerah.

Faktor Pendukung Persentase Koperasi Berkualitas adalah

1. Anggaran yang tersedia dalam APBD KabupatenMalinau;
2. Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya;
3. Telah ditetapkannya jadwal dan KAK pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
4. Tersedianya acuan mekanisme pemeriksaan Koperasi oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 9 Tahun 2020, Tentang Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.
5. Tersedianya tenaga Pendamping Koperasi yang siap membantu penyusunan laporan RAT.
6. Adanya himbauan pelaksanaan RAT setiap awal tahun. Komitmen OPD melaksanakan tupoksiny adengan baik.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan pembinaan terhadap Lembaga koperasi.
2. Meningkatkan kompetensi SDM koperasi.
3. Meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan.
4. Meningkatkan partisipasi anggota terhadap usaha koperasi.
5. Meningkatkan Kerjasama pembiayaan dengan pihak ketiga.
6. Meningkatkan unit usaha yang dikelola koperasi.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase peningkatan kopersai berkualitas sebesar Rp. 271.628.267, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.388.969.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 69,83%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria **kurang efektif**.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkankeluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang

seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsunguntuk mendukung indikator kinerja persentase peningkatan kopersai berkualitas sebesar Rp.271.628.267 dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.5.830.372.745 atau capaian realisasi keuangan sebesar 4,65%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efesien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan ataupembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.62
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	63,13	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	388.969.000	271.628.267	69,83%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program pendidikan dan pelatihan perkoperasian dengan hasil capaian kinerja mencapai angka 63,13% dengan realisasi keuangan 69,83%.

PERSENTASE PENINGKATAN USAHA MIKRO DAN KECIL

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.63

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	5	6	8	9
Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	Persen	17,60 %	-	81,90 %	-	465%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

Perbandingan realisasi persentase peningkatan usaha mikro dan kecil tahun 2023 sebesar 17,60% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 81,90% atau realisasi capaian kinerja sebesar 465%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 78,51% terhadap capaian tahun 2022. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.64
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	Persen	17,60%	100%	17,6%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi persentase peningkatan usaha mikro dan kecil tahun 2023 sebesar 17,60% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 17,6% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalamUndang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

1. Usaha Mikro Usaha mikro dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria

usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro UMKM adalah bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp 300 juta, dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp 50 juta (di luar aset tanah dan bangunan). Terkadang, keuangan usaha mikro masih tercampur dengan keuangan pribadi pemiliknya. Contoh UMKM mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedang asongan, dan sebagainya.

2. Usaha Kecil Usaha kecil UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Lalu penjualan per tahun berkisar dari angka Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar. Pengelolaan keuangan usaha kecil juga sudah lebih profesional ketimbang usaha mikro. Contoh UMKM kecil adalah usaha binatu, restoran kecil, bengkel motor, katering, usahafotocopy, dan sebagainya.
3. Usaha Menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat. Serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayan bersihnya sesuai yang sudah diatur denganperaturanperundang-undangan.

Selain pengelolaan keuangan yang sudah terpisah, usaha menengah juga sudah memiliki legalitas. Contoh UMKM menengah adalah perusahaan pembuat roti skalarumahan, restoran besar, hingga toko bangunan.

Keberhasilan program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan Pengembangan UMKM pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan Usaha Kecil dan Mikro (UMK). Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Adapun Faktor yang menghambatMeningkatnya Usaha Mikro dan Kecil:

1. Kurang dapat mengendalikan keuangan
2. Gagal dalam merencanakan
3. Tidak mampu dalam melakukan peralihan
4. Persaingan yang tidak sehat
5. Belum maksimalnya Penguatan Kelembagaan
6. UMKM belum menya dari HAKI (Hak Merk) jadi belum banyak UMKM yang memprioritaskan HAKI padahal Usaha UMKM sudah berjalan lama.
7. Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang teknologi digitalisasi

Sedangkan Faktor Pendukung Meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil :

1. Anggaran yang tersediadalam APBD Kabupaten Malinau;
2. Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya;
3. Telah ditetapkannya jadwal dan KAK pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
4. Komitmen OPD melaksanakan tupoksinya dengan baik.
5. Tekad yang kuat dan kerjakeras
6. Kesempatan dan peluang
7. Dukungan Pemerintah terhadap akses permodalan, regulasi dan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan dan kompetensi.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah :

1. Memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk melengkapi perizinan yang diperlukan untuk berusaha.
2. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku wirausaha.
3. Meningkatkan Kerjasama pemasaran baik secara online maupun offline.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil sebesar Rp 3.370.012.090, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 4.034.330.300 atau capaian realisasi keuangan sebesar 83,53%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria **Cukup Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkankeluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsunguntuk mendukung indikator kinerja Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil sebesar Rp.3.370.012.090 dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.8.928.756.568 atau capaian realisasi keuangan sebesar 37,34%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangan Efisien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan ataupembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.65
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil Dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil)	24,01%	Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	4.034.330.300	3.370.012.090	83,53%.
			Program Pengembangan UMKM	2.775.150.000	2.356.271.942	84,91

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

Dari tabel 2.65 diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).

Pelatihan Strategi Digital Marketing untukpeningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM

10. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

Tabel 2.66
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10
Meningkatnya Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Indeks Ketahanan Pangan	Poin	75,09	73,08	97,32%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Pada Tabel 2.66 diatas dapat dilihat hasil capaian indikator kinerja indeks ketahanan pangan dengan target RPJMD 2016-2022 adalah 75,09 dan realisasi untuk tahun 2023 adalah 73,08 dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah 97,32%. Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.67
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*5*	*6*		*8*	*9*	
Indeks Ketahanan Pangan	Poin	73,08	70,78	73,66	67,25	103,25%	99,21%	108,67%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi indeks ketahanan pangan tahun 2023 sebesar 73,08 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 70,78 atau realisasi capaian kinerja sebesar 103,25 %, realisasi tahun 2021 sebesar 73,66 atau realisasi capaian kinerja sebesar

99,21 % dan realisasi tahun 2022 sebesar 67,25 atau realisasi capaian kinerja sebesar 108,67 % .Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 3,2 % terhadap capaian tahun 2020, adanya penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar -0,73 % terhadap capaian tahun 2021, dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 8,66% terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.68

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Indeks Ketahanan Pangan	Poin	73,08	79,4	92,04%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi indeks ketahanan pangan tahun 2023 sebesar 73,08 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 79,4, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 92,04% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau terkait dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten,

Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) langsung dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan tingkat Nasional yang digolongkan ke dalam 3 aspek, yaitu:

(a) Aspek Ketersediaan Pangan; (b) Aspek keterjangkauan; (c) Badan Pangan Nasional melakukan updating Indeks Ketahanan Pangan Nasional (IKP) Tahun 2023 dengan unit analisis tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Capaian IKP Tahun 2023 sebesar 73,08 poin sedangkan target 73,08 dengan Hasil IKP ini jelas tergambar bahwa masih belum tercapai dengan Selisih 2,01 poin.

Capaian IKP Tahun 2023 yakni 73,08 Poin, dengan 3 Aspek :

A. Aspek Ketersediaan Pangan

Ketersediaan 55,65 poin

1) Indikator Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.

B. Aspek Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan 91,15 poin

1) Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
2) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran
3) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

C. Aspek Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan 72,60 poin

1) Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun
2) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
3) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
4) Persentase balita *stunting*
5) Angka harapan hidup pada saat lahir

- Meskipun dari 3 Aspek di atas ada kenaikan dari Tahun 2022 yakni 67,25 point dan di tahun 2023 mengalami kenaikan 5,83 poin sehingga di Tahun 2023 mencapai 73,08 poin. Namun dari 3 aspek Aspek Ketersediaan tersebut yang masih yang masih

rendah yakni Indikator Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.

- Yang dimaksud Rasio konsumsi normative yakni Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah. Produksi bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer, penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan
- Adapun Data produksi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah menggunakan angka tetap 2022 dari BPS dan Kementerian Pertanian.
- Hasil dari updating Indeks Ketahanan Pangan Nasional (IKP) Tahun 2023 untuk mewujudkan Tercapainya wilayah Tahan Pangan Tahun 2024 yakni bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD terkait di sarankan harus lebih di tingkatkan Hasil Produksi Pertanian dengan komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah dalam hal ini Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Malinau.
- Untuk lebih Detail angka dalam perhitungan setiap Indikator IKP yang terakomodir dalam 3 Aspek belum di ketahui karena belum dilakukan Koordinasi secara Teknis langsung ke Teknis Penyusunan IKP di Badan Pangan Nasional.

IKP DENGAN FSVA KABUPATEN

- IKP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA Kabupaten) ada 3 Indikator indikator IKP yang digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional yakni :
  - Indikator Presentase Penduduk Miskin
  - Presentase rumah tangga tanpa akses air bersih

- Rasio jumlah penduduk pertenaga kesehatan

- Dalam Penyusunan FSVA 2023 Peran Dinas Ketahan Pangan yakni menganalisis penyiapan Data dan Informasi Kerentanan dan ketahanan pangan ***Food Security Vulnerbility Atlas*** (FSVA) dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) kabupaten Malinau. Dalam hal ini melibatkan beberapa Unit Perangkat Daerah dengan data data yang di perlukan sesuai Aspek pada FSVA 2022. Adapun Unit Perangkat Daerah yang masuk dalam Tim yakni :
  1) BPS
  2) Dinas PU Perkim
  3) Dinas Pertanian
  4) Dinas Kesehatan
  5) DP3AS
  6) Disdukcapilnaker
- Faktor Penyebab Kerentanan Pangan secara umum di lihat dari ke enam indikator pembentuk indeks yang belum memadai yakni : Penyediaan Lahan Pertanian, sarana dan prasarana penyedia pangan dan tenaga kesehatan.

Tindak lanjut IKP di Tahun 2023 ini agar Data dari Unit Perangkat Daerah yang terlibat dalam Pengisian Aspek, Indikator memberikan Data yang riil dan dengan harapan pada akhirnya Informasi Kerentanan dan ketahanan pangan ***Food Security Vulnerbility Atlas*** (FSVA) TAhun 2023 bida tercapai.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan

suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks ketahanan pangan sebesar Rp 576.783.735,dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 715.222.972 atau capaian realisasi keuangan sebesar 80,64%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Cukup Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja indeks ketahanan pangan sebesar Rp.379.386.895, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.572.188.895 atau capaian realisasi keuangan sebesar 66%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Efisien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.69
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	97,32%	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	620.085.372	492.381.000	79,41
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	50.780.000	43.676.500	86,01

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Dari tabel 2.69 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.

11. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja

Tabel 2.70
Evaluasi Pencapaian Sasaran 11
Menurunnya Angka Pengangguran

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun2022 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,10%	3,19%	122,19%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023

Berdasarkan Tabel di atas, pencapaian sasaran menurunnya angka pengangguran dengan indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka dengan target 4,10% dan terealisasi 3,19%. Untuk tahun 2023 capaian kinerja sebesar 122,19%, dengan demikian berarti ada peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.71
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,19	5,08	4,14	3,30	159,24 %	107,52 %	103,44 %

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 sebesar 3,19 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 5,08 atau realisasi capaian kinerja sebesar 159,24%, realisasi tahun 2021 sebesar 4,14 atau realisasi capaian kinerja sebesar 107,52%, dan realisasi tahun 2022 sebesar 3,30 atau realisasi capaian kinerja sebesar 103,44%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tingkat pengganggguran terbuka tahun 2023 sekitar 1,89% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tahun 2023 sekitar 0,95% terhadap realisasi capaian tahun 2021 dan adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tahun 2023 sekitar 0,11% terhadap realisasi capaian tahun 2022.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.72

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,19	4,00	120,25%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Tingkat Pengganggguran tahun 2023 sebesar 3,19 dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 4,00 tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 120,25% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.73

PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	RealisasiTahun 2023	Regional Provinsi	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)	
						Provinsi	Nasional
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Menurunnya angka penganggura n	Tingkat Pengan gguran Terbuka	%	3,19	4,01	5,32	120,44	139,23

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan regional provinsi tahun 2023 adalah perbandingan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 sebesar 3,19% dengan realisasi regional provinsi tahun 2023 sebesar 4.01%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaiankinerjatahun 2023 sebesar 120,44% terhadap regional provinsi tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional tahun 2023 adalah perbandingan realisasi Tingkat Pengangguran Terbukatahun 2023 sebesar 3.19% dengan realisasi nasional tahun 2023 sebesar 5,32%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaiankinerja tahun 2023 sebesar 139,23%terhadap standar nasional tahun 2023.

Berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2023 bahwa sasaran menurunnya angka pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka untuk tahun 2023 capaian kinerjanya sebesar 122,19% dari target 4,10% dan realisasi tahun 2023 sebesar 3,30%. Berdasarkan data yang telah ditampilkan pada tabel-tabel diatas terjadi peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan indikator kinerja ini yaitu:

1) Tingkat kesempatan kerja yang cukup besar pada sektor usaha baik pada sektor usaha industri, perbankan dan UMKM.
2) Adanya dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau yaitu melalui salah satu program inovasi daerah yakni Program Milenial Mandiri dimana pada program ini telah dilakukan banyak kegiatan Pelatihan-pelatihan bagi pencari kerja, perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja dan bursa kerja (job Fair) yang dilaksanakan guna mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Malinau.

Data jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 di Kabupaten Malinau adalah 47.796 orang/jiwa atau sekitar 74,26% persen dari jumlah penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,26%, dengan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tersebut menunjukkan besarnya partisipasi angkatan kerja aktif dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Malinau. Dari jumlah 47.796orang/jiwa, proporsi angkatan kerja laki-laki lebih besar dibandingkan dengan Angkatan kerja perempuan dimana 63,06 persen (30.380 jiwa) adalah angkatan kerja laki-laki dan 36,94 persen (17.794 jiwa) penduduk perempuan.

Jumlah angkatan kerja terbagi menjadi dua kategori yaitu jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan sebesar 47.796 orang (96,81%), sedangkan jumlah penduduk yang belum atau tidak memiliki pekerjaan (Pengangguran Terbuka) sebanyak1.526 orang (3.19%). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau bahwa tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kegiatan selama satu tahun yang lalu sebesar 1.526 orang atau 3,19% pada tahun 2023.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat atau angka pengggangguran di Kabupaten Malinau belum menurun secara signifikan karena;

a. Kurang maksimalnya penyerapan Tenaga Kerja Lokal di berbagai sector industry karena kurangnya keterampilan/Skil yang dimilki sesuai dengan kebutuhan industry saat ini.
b. Ketidak sesuaian jurusan lulusan pencaker dengan kebutuhan akan tenaga kerja saat ini serta Tingkat kebutuhan akan tenaga kerja berpengalaman dibidang pekerjaan tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh pencari kerja lokal Malinau.

Jumlah pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja serta tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya tamatan lembaga–lembaga pendidikan formal. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar Rp 2.182.492.832,00,dari anggaran yang disediakan sebesarRp 2.928.943.650,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 74,51%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Cukup Efektif**.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar Rp.2.182.492.832, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.5.851.110.894 atau capaian realisasi keuangan sebesar37.30%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efisien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.74
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	122,19%	Program Perencanaan tenagakerja	100.000.000	95.003.018	95,00
			Program Pelatihan dan Pemningkatan Produktivitas Tenaga kerja	1.550.600.900	1.353.500.319	87,29

			Program Penempatan Tenaga kerja	210.482.000	183.000.820	86,94
			Program Hubungan Industrial	720.000.000	550.988.675	76,53

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023

Dari tabel 2.74 diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja menurunnyaangkapengangguranmencapai angka 3,19% dengan rata-rata realisasi keuangan 86,25%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah ProgramPerencanaantenagakerja, Program Pelatihan dan PeningkatanProduktivitas Tenaga kerja, Program Penempatan Tenaga kerja, Program Hubungan Industrial

12. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah

Tabel 2.75
Evaluasi Pencapaian Sasaran 12
Meningkatnya Investasi Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Nilai Investasi Daerah	Rupiah	91.100.000.000	1.159.840.400.335	1.273 %

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023

Pencapaian sasaran meningkatnya nilai investasi daerah dengan target RPJMD 2021-2026 adalah 91.100.000.000 dan terealisasi untuk tahun 2021 adalah Rp. 1.159.840.400.335, sehingga capaian indikator kinerja nilai investasi daerah tahun 2023 adalah 1.273 %. Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.76
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Nilai Investasi Daerah	Rupiah	1.159.840.400.335	92.077.524.030	314.470.808.689	1.030.086.378.748	7,93	27,11	88,81

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2023 sebesar 1.159.840.400.335 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 92.077.524.030 atau realisasi capaian kinerja 7,93 %, realisasi tahun 2021 sebesar 314.470.808.689 atau realisasi capaian kinerja 27,11 %, dan realisasi tahun 2022 sebesar 1.030.086.378.748 atau realisasi capaian kinerja 88,81 %, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 1.159% terhadap capaian tahun 2020, kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 200% terhadap capaian tahun 2021 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 12,59% terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.77
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Nilai Investasi Daerah	Rupiah	1.096.450.036.894	94.000.000.000	1166%

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi nilai investasi daerah tahun 2023 sebesar Rp. 1.096.450.036.894 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar Rp. 94.000.000.000, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 1166% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2023 ada 2 Indikator:

1, Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ kota
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Alasan Pemilihan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatas:

1. Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten /Kota adalah Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Berdasarkan Laporan dari Bidang Pengaduan yang menjadi tupoksi Bidang dalam menghitung Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Rumusan Penghitungannya berdasarkan rumusan yang telah diberikan oleh Kemenpan RB yang menjadi acuan Bidang dalam mendapatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	$\frac{\text{Jumlah Nilai Investasi (satuan rupiah) Tahun n} - \text{Jumlah Nilai Investasi (satuan rupiah) Tahun n-1)}}{\text{Jumlah Nilai Investasi (satuan rupiah) Tahun n-1}} \times 100\%$	Bidang Perencanaan, Pembangunan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kepala Bidang Perencanaan, Pembangunan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan pelayanan perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja:

1. Anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Malinau;
2. Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya;
3. Telah ditetapkannya jadwal dan KAK pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
4. Komitmen OPD melaksanakan tupoksinya dengan baik.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja:

1. Masih adanya keterlambatan terbitnya Juknis pada kegiatan DAK dan menunggu pergeseran/ perubahan anggaran sesuai Junis Kementrian sehingga kegiatan dalam pelaksanaannya terbatas
2. Adanya Keterlambatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal oleh Pelaku usaha (LKPM) yang menjadi penghambat dalam mendapatkan Update data Nilai Realisasi Investasi tiap Triwulannya.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni:

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Investasi Daerah sebesar Rp.345178520, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.417.400.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 82,70%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Cukup Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja Nilai Investasi Daerah sebesar Rp345.178.520, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp4.674.781.392 atau capaian realisasi keuangan sebesar7,38%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efesian.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.78
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi daerah	1203%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	417.400.000	345.178.520	82,70%

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan capaian kinerja mencapai angka 1203% dengan realisasi keuangan 82,70%%.

Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Tujuan 1 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar

13. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan dasar melalui Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut:

Tabel 2.91
Evaluasi Pencapaian Sasaran 13
Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	52,10	26.45%	50,77%
Persentase Pemukiman yang Layak	Persen	79%	81,41	103,06%
Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1:1,074	1:1,068	1:1,002
Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	Persen	70%	70,64%	100,91%
Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	72%	81,84%	113,66%
Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	Persen	30,34%	49,06%	161,70%

Sumber : Dinas PUPRPerkim dan Dinas Perhubungan Tahun 2023

PERSENTASE PANJANG JALAN DALAM KONDISI MANTAP

Pada tabel 2.91 di atas pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dengan indikator kinerja sasaran persentase panjang jalan dalam kondisi baik atau mantap untuk tahun 2023 ditargetkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 adalah 52,10%. Tahun 2023 realisasi dari indikator kinerja sasaran persentase panjang jalan dalam keadaan mantap mencapai 26,45% dengan capaian kinerja sebesar 50,77%. Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan

realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.92
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	26,45%	49,70%	45,10%	12,16%	1,88 %	1,71%	0,46%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020,2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%) tahun 2023 sebesar 26,45 % dengan realisasi tahun 2020 sebesar 49,70% atau realisasi kinerja 1,88% realisasi tahun 2021 sebesar 45,10% atau realisasi kinerja sebesar 1,71% realisasi tahun 2022 sebesar 12,16% atau realisasi kinerja sebesar 0,46%. Dengan demikian maka hasil maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,46 % terhadap capaian tahun 2020, penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,41 % terhadap capaian tahun 2021, kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 1,17 % terhadap capaian tahun 2022. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.93
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	26,45%	64.40%	41,07%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap tahun 2022 sebesar 26,45% tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 64,40%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapainnya sebesar 41,07 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Dari tabel-tabel yang telah disajikan diatas, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase jalan dalam kondisi baik atau mantap yaitu:

$$\frac{panjang\ jalan\ kabupaten\ dalam\ kondisi\ baik}{panjang\ seluruh\ jalan\ kabupaten\ di\ daerah\ tersebut} x100\%$$

Penyelenggaraan Jalan pada tahun 2023 dari penanganan kegiatan pembanguan jalan capaian indikator kinerja pertama Kabupaten Malinau yaitu dalam mencapai jalan dalam kondisi mantap sebesar 26,45 persen Untuk jalan kabupaten pada akhir 2023 mengalami penurunan, dari target 52,10 persen

menurun menjadi 25,65 persen yang disebabkan perubahan laju penurunan kondisi jalan yang tidak diimbangi dengan upaya peningkatan jalan dan tidak terpenuhinya standar pemeliharaan rutin jalan serta meningkatnya kerusakan jalan. Dan Beberapa kegiatan gagal tender dikarenakan tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran sehingga dilakukan tender ulang. Jumlah penyedia jasa konstruksi dengan keahlian khusus aspal sangat kurang dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan yang ada dalam satu tahun, Kurangnya jumlah Tenaga teknis Dinas PU PR Perkim yang memiliki kompetensi untuk menangani pekerjaan konstruksi.

Adapun Solusi perbaikan yang akan dilakukan kedepan untuk memperbaiki Tingkat persentase Panjang jalan dama kondisi mantap adalah:

- Terus berkoordinasi dengan BPBJ terkait percepatan proses pengadaan tender yang gagal
- Menarik lebih banyak investor/kontraktor pengaspalan untuk berinvestasi di Malinau
- Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi teknis untuk ASN secara intensif.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan

efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar Rp.116.197.785.017, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp121.490.273.030 atau capaian realisasi keuangan sebesar95,64%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja ersentase panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar Rp 116.197.785.017, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp 205.464.916.707 atau capaian realisasi keuangan sebesar 56,55%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria **Sangat Efesien.**

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Bina Marga, UPTD dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S3 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.94
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	50,77%	Program Penyelenggaraan Jalan	121.490.273.030	116.197.785.017	95,64%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2023

Dari tabel 2.94 diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh beberapa program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Hasil capaian indikator kinerja Persentase jalan dalam kondisi mantap mencapai angka 50,77%. Program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program penyelenggaraan jalan dengan realisasi keuangan 95,64%.

Program Pembangunan Jalan Tahun 2023

PERSENTASE PEMUKIMAN YANG LAYAK

Pada tabel idikator kinerja persentase permukiman yang layak di tahun 2023 dengan target yang ditetapkan di rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malinau RPJMD 2021 - 2026 adalah 79%. realisasi untuk indikator kinerja Persentase permukiman yang layak adalah 81,41 % dan capaian indikator kinerja adalah 103,05%. Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.95
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Pesentase Pemukiman Yang layak	Persen	81,41%	-	81,16	-	99,96%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 tidak dapat dihitung dikarenakan indikator kinerja persentase pemukiman yang layak baru dilaksanakan ditahun 2022. Tahun 2023 dengan tahun 2022 yaitu perbandingan realisasi Persentase permukiman yang layak di tahun 2023 sebesar 81,41 % dengan realisasi tahun 2022 sebesar 81,16% atau realisasi capaian kinerja 99,96% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,308 % terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.96
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Persentase Pemukiman Yang layak	Persen	81,41 %	81,97%	99,31%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Persentase rumah tangga bersanitasi layak tahun 2023 sebesar 81,41 % dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 81,87%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapainnya sebesar 99,31 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Capaian indikator persentase permukiman yang layak yaitu sebesar 103,05 persen dan dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami bebrapa kendala yaitu didalam kegiatan termasuk dengan perencanaan sehingga menunggu kegiatan perencanaan selesai terlebih dahulu baru dapat melaksanakan pengadaan kegiatan fisik dan ada 2 (dua) kegiatan yang gagal lelang karena tidak ada penyedia yang mengikuti proses lelang. Akan tetapi persentase pemukiman yang layak mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 81,41%.

Adapun Solusi perbaikan yang akan dilakukan kedepan untuk memperbaiki Tingkat persentase persentase pemukiman yang layak adalah Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan pencapaian target baik fisik maupun keuangan.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase pemukiman yang layak sebesar Rp797.768.944,dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.881.765.600 atau capaian realisasi keuangan sebesar 42,39%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas

maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Tidak Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja persentase pemukiman yang layak sebesar Rp.797.768.944, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.80.481.536.138 atau capaian realisasi keuangan sebesar Rp.1%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efesiaen.**

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S2 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program,

kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.97
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Pemukiman Yang layak	103,05%	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah	1.881.765.600	797.768.944	42,39%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dengan capaian kinerja mencapai angka 103,05% dan realisasi keuangan 42%.

RASIO RUMAH LAYAK HUNI

Pada tabel indikator kinerja Rasio rumah layak huni yang ditetapkan di rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malinau RPJMD 2021 - 2026 adalah 1 : 1,071 . realisasi untuk indikator kinerja Rasio rumah layak huni adalah 1 : 1,068 dan capaian indikator kinerja adalah 1 : 1,002.

Hasil persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.98
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1 : 1,068	-	1:1,15	-	1:1,077

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 tidak dapat dihitung dikarenakan indikator kinerja Rasio Rumah Layak Huni merupakan salah satu indikator kinerja yang baru dilaksnakan ditahun 2022. Persentase kenaikan atau penurunan realisasi capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat dari perbandingan realisasi Rasio Rumah layak huni tahun 2023 sebesar 1 : 068 dengan realisasi tahun 2022 sebesar 1 : 1,15 atau realisasi kinerja 1 : 1,077 maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 7,13 % terhadap capaian tahun 2022. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.99
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1 : 1,068	1 : 1,062	1 : 1,005

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Rasio rumah layak huni tahun 2023 sebesar 1 : 1,068 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 1 : 1,062 , maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapainnya sebesar 1 : 1, 005 (99,4%) terhadap target akhir RPJMD tahun 2026. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target nasional dapat disajikan sebagai berikut:

Rasio rumah layak huni pada tahun 2023 yaitu sebesar 1 : 1,002 dan mampu meningkatkan hunian yang layak untuk kawasan kumuh. Target RPJMD 1:1,071 dalam pelaksanaan pekerjan mengalami kenaikan dengan realisasi 1:1,068. Adapun kendala selama pelaksanaan pekerjaan adalah material kayu yang tersedia dilapangan sering terjadi kekosongan dan memangkas waktu yang cukup lama untuk menunggu material tersebut tersedia dilapangan sehingga kegiatan RTLH tidak bisa trealisasi sesuai target.

Adapun Solusi perbaikan yang akan dilakukan kedepan untuk memperbaiki Tingkat persentase persentase pemukiman yang layak adalah Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan pencapaian target baik fisik maupun keuangan.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan

efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja rumah layak huni sebesar Rp12.320.000,dari anggaran yang disediakan sebesar Rp250.000.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 4,93%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Tidak Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja rumah layak huni sebesar Rp.12.320.000, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.89.279.451.690 atau capaian realisasi keuangan sebesar 0,01%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efesien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.100
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Rasio Rumah Layak Huni	1:1,002	Program pengembangan Permukiman	250.000.000	12.320.000	4,93%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program pengembangan pemukiman dengan capaian kinerja mencapai angka 1:1,002 dengan realisasi keuangan 4,93%.

PERSENTASE DESA YANG TERHUBUNG DENGAN MODA TRANSPORTASI

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2021 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.101

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Pesentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	Persen	70,64%	92,68	94,94	131.2%	134,3%

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022adalah perbandingan realisasi Pesentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi tahun 2023 sebesar 70,64% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 92,68% atau realisasi capaian kinerja sebesar 131,2% dan realisasi tahun 2022 sebesar 94,94% atau realisasi capaian kinerja sebesar 134,3%. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.102

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pesentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	Persen	70,64	85	83,10%

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Pesentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi tahun 2023 sebesar 70,64% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 85%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 83,10% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Pengertian lain dari Desa yang terhubung dengan Moda Trasportasi ini secara umum juga mencakup Sarana dan Prasarana yang sudah ada maupun akan diadakan yang tercermin pada Dua Program yaitu Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai Aplikasi Perwujudannya. Dari tabel-tabel yang telah disajikan diatas, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan dalam kondisi baik dan memadai serta memenuhi standar pelayanan minimal.
2. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kabupaten Malinau serta terjalinnya kerjasama/koordinasi yang baik antar elemen untuk meningkatkan kondisi lalu lintas yeng tertib, lancar, aman dan nyaman.

Faktor-faktor yang menghambat indikator kinerja persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi adalah:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sertafasilitas yang belum sepenuhnya memadai dan perlu adanya perbaikan dan rehabilitasi SDM yang belum Profesional.
2. Adanya perbedaan status jalan nasional dan kabupaten.

Solusi yang akan dilakukan kedepan adalah

1. Perlunya melakukan rehabilitasi pada sarana dan prasarana Perhubungan terutama pada sarana dan prasarana pelayanan publik seperti terminal, dermaga dan angkutan umum.
2. Melakukan koordinasi terkait kewenangan status jalan.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi sebesar Rp 5.051.229.748, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 5.154.576.177 atau capaian realisasi keuangan sebesar 97,99%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi sebesar Rp.646.075.648 dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.5.044.513.828 atau capaian realisasi keuangan sebesar 12,80%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efesien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan

bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.103
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	100,91	Penyelengaraa n lalulintas dan Angkutan Jalan	659.576.177	646.075.648	97,95%

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program Penyelengaraan lalulintas dan Angkutan Jalan dengan capaian kinerja mencapai angka 100,91% dengan realisasi keuangan 94,56%.

PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM

Pada indikator kinerja Persentase penduduk berakses air minum yang ditetapkan di rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Malinau RPJMD 2021 - 2026 adalah 72%, realisasi untuk indikator kinerja Persentase penduduk berakses air minum adalah 81,84% dan capaian indikator kinerja adalah 113,66%. Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.104
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pesentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	81,84 %	78,31 %	100%	78,83 %	95,68 %	122%	96,32 %

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Persentase penduduk berakses air minum tahun 2020 sebesar 78,31% atau realisasi capaian 95,68%, realisasi tahun 2021 sebesar 100% atau realisasi capaian 122%, realisasi tahun 2022 sebesar 78,83% atau realisasi capaian 96,32%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 terhadap capaian tahun 2020 sebesar 4,50%, penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 18,16 % terhadap capaian tahun 2021, kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 3,81 % terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.105
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pesentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	81,84 %	87%	86,18%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tahun 2023 sebesar 74,98% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 86,18%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapainnya sebesar 86,18% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Capaian indikator keempat yaitu persentase penduduk berakses air minum yaitu sebesar 77 persen dari target RPJMD dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami peningkatan dengan realisasi 81,84% Adapun kendala selama pelaksanaan pekerjaan adalah Di dalam kegiatan termasuk dengan perencanaan sehingga menunggu kegiatan perencanaan selesai terlebih dahulu baru dapat melaksanakan pengadaan kegiatan fisik dan ada beberapa kegiatan yang mengajukan addendum penambahan jumlah hari kerja karena keterlambatan pengiriman material pabrikasi

Adapun Solusi perbaikan yang akan dilakukan kedepan untuk memperbaiki Tingkat persentase persentase pemukiman yang layak adalah :

- Terus berkoordinasi dengan BPBJ terkait percepatan proses pengadaan tender yang gagal

- Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan pencapaian target baik fisik maupun keuangan.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja pesentase penduduk berakses sebesar Rp.20.179.739.997,dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.26.625.380.183 atau capaian realisasi keuangan sebesar 75,79%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Kurang Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja pesentase penduduk berakses sebesar Rp.20.179.739.997, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.99.863.507.191 atau capaian realisasi keuangan sebesar 20,20%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efisien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.106
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Penduduk Berakses Air Minum	113,66%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	26.625.380.183	20.179.739.997	75,79%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan capaian kinerja mencapai angka 113,66% dengan realisasi keuangan 75,79%.

PERSENTASE IRIGASI KABUPATEN YANG BERFUNGSI

Pada indikator kinerja Persentase irigasi kabupaten yang berfungsi yang ditetapkan di rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malinau RPJMD 2021 - 2026 adalah 30,34%. realisasi untuk indikator kinerja Persentase irigasi kabupaten yang berfungsi adalah 49,06 % dan capaian indikator kinerja adalah 161,70%. Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.107
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Pesentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	Persen	49,06 %	-	23,87	-	99,17

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 tidak dapat dihitung dikarenakan indikator kinerja persentase irigasi kabupaten yang berfungsi baru dilaksanakan ditahun 2022. Capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 adalah perbandingan realisasi Persentase irigasi kabupaten yang berfungsi (%) tahun 2023 sebesar 49,06 % dengan realisasi tahun 2022 sebesar 23,87% atau realisasi kinerja 99,17% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 1,05 % terhadap capaian tahun 2022. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.108
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	Persen	49.06%	36,92%	132%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2023 adalah perbandingan realisasi Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi tahun 2023 sebesar 49,06, dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 36,92, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 132% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Prasarana Sumber Daya Air yang ada di Kabupaten Malinau pada tahun 2023 mampu meningkatkan infrastruktur irigasi sebagai dukungan ketahanan air bagi pertanian. Target Kinerja RPJMD Irigasi tahun 2023 sebesar 30,34% target realisasi mengalami kenaikan menjadi 49,06%. Adapun beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan adalah Perencanaan belum ada, sehingga dilaksanakan perencanaan di intern tim teknis terlebih dahulu, setelah itu baru dapat dilakukan pelaksanaan pengadaan fisik dan pelaksanaan galian terhambat karena curah hujan yang tinggi dan bertepatan dengan musim tanam.

Adapun Solusi perbaikan yang akan dilakukan kedepan untuk memperbaiki tingkat persentase irigasi kabupaten yang berfungsi adalah Adanya penanganan jaringan irigasi pada daerah kewenangan kabupaten dengan sarana pendukung serta kebijakan penggangaran APBD yang lebih proporsional.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase irigasi kabupaten yang berfungsi sebesar Rp. 21.033.836.596, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.26.617.122.157 atau capaian realisasi keuangan sebesar 79,02%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Kurang Efektif**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja persentase irigasi kabupaten yang berfungsi sebesar Rp.21.033.836.596, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.100.717.603.790 atau capaian realisasi keuangan sebesar 20,88%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efesien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.110
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	161,70 %	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	26.617.122.157	21.033.836.596	79,02%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan capaian kinerja mencapai angka 161,70% dengan realisasi keuangan 79,02%.

14. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisolasian Daerah

Tabel 2.111
Evaluasi Pencapaian Sasaran 14
Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisolasian Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pesentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	Persen	97,25%	96,33%	99,05%

Sumber : *Dinas Kominfo Tahun 2023*

Tahun 2023 pencapaian sasaran meningkatnya layanan teknologi informasi yang membuka keterisolasian daerah dengan indikator kinerja pesentase desa yang terlayani telekomunikasi dengan target RPJMD tahun 2021-226 terkhusus tahun 2023 adalah 97,25%, Realisasi 96,33%, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2023 adalah 99,05%. Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.112

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pesentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	Persen	96,33%	95,41%	95,41%	96,33%	99,04%	99,04%	100%

Sumber : *Dinas Kominfo Tahun 2023*

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Pesentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi tahun 2023 sebesar 96,33% dengan realisasi tahun 2020 dan 2021 sebesar 95,41% atau realisasi capaian kinerja sebesar 99,04% dan realisasi tahun 2022 sebesar 96,33% atau realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,96.% terhadap capaian tahun 2020 dan 2021. Tidak adanya kenaikan ataupun penurunan di tahun 2023 terhadap tahun 2022. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.113

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Pesentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	Persen	96,33%	100%	96,33%

Sumber : *Dinas Kominfo Tahun 2022*

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi persentase desa yang terlayani telekomunikasi tahun 2023 sebesar 96,33% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 96,33% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target nasional dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.114

PerbandinganRealisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Regional Provinsi	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)	
						Provinsi	Nasional
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi yang Membuka Keterisolsian Daerah	Pesentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	Persen	96,33	72,59	73,93	132,7%	130,2%

Sumber : Diskominfo Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan regional provinsi tahun 2023 adalah perbandingan realisasi pesentase desa yang terlayani telekomunikasi tahun 2023 sebesar 96,33% dengan realisasi regional provinsi tahun 2023 sebesar 72,59, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaiankinerja tahun 2023 sebesar 132,7% terhadap regional provinsi tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional tahun 2023 adalah perbandingan realisasi pesentase desa yang terlayani telekomunikasi tahun 2023 sebesar 96,33 dengan realisasi nasional tahun 2023 sebesar 73,93, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaiankinerja tahun 2023 sebesar 130,2% terhadap standar nasional tahun 2023.

Target RPJMD tahun 2023 untuk sasaran strategis meningkatkan layanan teknologi informasi yang membuka keterisolasian daerah dengan indikator kinerja persentase desa yang terlayani komunikasi yang dengan target 97,25% dan hasil realisasinya pada tahun 2023 adalah 96,33% dan capaian kinerja 99,05%. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase desa yang terjangkau komunikasi yaitu:

$$\frac{Jumlah\ desa\ yang\ terjangkau\ komunikasi}{jumlah\ keseluruna\ desa}\ x100$$

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya realisasi dari target yang telah ditentukan yaitu:

1. Belum terealisasinya jaringan komunikasi di daerah (desa) tersebut;
2. Infrastruktur jaringan komunikasi seluler belum tersedia, baik yang dikerjakan oleh pusat, provinsi maupun daerah.
3. Kondisi wilayah/desa yang sangat terpencil dengan jumlah penduduk dan juga sangat sedikit.

Disamping beberapa kendala diatas yang mempengaruhi realisasi yang tidak memenuhi target yang ditetapkan tetapi adanya keseriusan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bekerja dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan yaitu mempercepat pembangunan prasarana dan sarana komunikasi dan informasi serta melakukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Provider terkait.

Tabel 2.115

Kondisi Akses Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Malinau

NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
1	Mentarang				
		1	Pulau Sapi	4G	Telkomsel (Swasta)
		2	Long Gafid	Sinyal Telkomsel dari Desa Pulau Sapi	
		3	Long Bisai		
		4	Temalang		
		5	Long Liku		
		6	Lidung Kemenci		
		7	Mentarang Baru		
		8	Paking	4G	Telkomsel
		9	Harapan Maju	Sinyal Telkomsel dari Desa Paking	
NK	**Kecamatan**	**ND**	**Desa**	**Sinyal Selular**	
				Kelas	**Penyedia**
2	Malinau Kota				
		1	Batu Lidung	3G	Telkomsel, IM3
		2	Malinau Kota	4G	Telkomsel, IM3
		3	Pelita Kanaan	4G	Telkomsel, IM3
		4	Malinau Hulu	4G	Telkomsel, IM3
		5	Malinau Hilir	4G	Telkomsel, IM3
		6	Tanjung Keranjang	3G	Telkomsel, IM3
NK	**Kecamatan**	**ND**	**Desa**	**Sinyal Selular**	
				Kelas	**Penyedia**
3	Malinau Utara				
		1	Kaliamok	4G	Telkomsel, IM3
		2	Luso	Eg	Telkomsel
		3	Malinau Seberang	4G	Telkomsel, IM3
		4	Putat	Eg	Telkomsel
		5	Salap	Eg	Telkomsel
		6	Seruyung	Blankspot	
		7	Respen Tubu	Eg	Telkomsel, IM3
		8	Belayan	Eg	Telkomsel
		9	Sembuak Warod	Eg	Telkomsel
		10	Lubak Manis	4G	Telkomsel, IM3

		11	Kelapis	3G	Telkomsel
		12	Semengaris	4G	Telkomsel, IM3
NK	**Kecamatan**	**ND**	**Desa**	**Sinyal Selular**	
				Kelas	**Penyedia**
4	Malinau Barat				
		1	Long Bila	Sinyal Telkomsel dari Desa Setulang	
		2	Long Kenipe		
		3	Sentaban		
		4	Punan Bengalun	4G	Telkomsel
		5	Sesua	Eg	Indosat
		6	Tanjung Lapang	4G	Telkomsel, IM3
		7	Taras	4G	Telkomsel
		8	Kuala Lapang	4G	Telkomsel, IM3
		9	Sempayang	3G	Telkomsel
NK	**Kecamatan**	**ND**	**Desa**	**Sinyal Selular**	
				Kelas	**Penyedia**
5	Malinau Selatan				
		1	Bila Bekayuk	4G	Indosat
		2	Long Loreh	Eg	Telkomsel
		3	Langap	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
		4	Laban Nyarit	Blankspot	
		5	Nunuk Tanah Kibang	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
		6	Pelencau	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
		7	Paya Seturan	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
		8	Punan Rian	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
		9	Sengayan	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
NK	**Kecamatan**	**ND**	**Desa**	**Sinyal Selular**	
				Kelas	**Penyedia**
6	Malinau Selatan Hilir				
		1	Setulang	4G	Telkomsel
		2	Setarap	2G	Telkomsel
		3	Punan Setarap	Sinyal Telkomsel dari Desa Setarap	
		4	Batu Kajang	4g	Indosat

		5	Gong Solok	4g	Indosat
		6	Punan Gong Solok	4g	Indosat
		7	Long Adiu	4g	Indosat
		8	Punan Long Adiu	4g	Indosat
NK	**Kecamatan**	**ND**	**Desa**	**Sinyal Selular**	
				Kelas	**Penyedia**
7	Malinau Selatan Hulu				
		1	Long Lake	Blankspot	
		2	Punan Mirau	4G	Indosat
		3	Long Rat	Blankspot	
		4	Halanga	Blankspot	
		5	Metut	4G	Indosat
		6	Long Jalan	4G	Indosat
		7	Nahakramo	Blankspot	
		8	Tanjung Nanga	4G	Telkomsel
NK	**Kecamatan**	**ND**	**Desa**	**Sinyal Selular**	
				Kelas	**Penyedia**
8	Mentarang Hulu				
		1	Lung Fala	4G	Telkomsel
		2	Lung Kebinu	4G	Indosat
		3	Lung Mekatip	4G	Indosat
		4	Lung Simau	4G	Indosat
		5	Lung Barang	Eg	Telkomsel
		6	Lung Sulit	4G	Indosat
		7	Lung Semamu	4G	Indosat
NK	**Kecamatan**	**ND**	**Desa**	**Sinyal Selular**	
				Kelas	**Penyedia**
9	Sungai Tubu				
		1	Long Nyau	4G	Indosat
		2	Long Titi	4G	Indosat
		3	Long Ranau	4G	Indosat
		4	Rian Tubu	4G	Indosat
		5	Long Pada	4G	Telkomsel
NK	**Kecamatan**	**ND**	**Desa**	**Sinyal Selular**	
				Kelas	**Penyedia**
10	Pujungan				
		1	Long Pujungan	Eg	Telkomsel
		2	Long Ketaman	4G	Telkomsel

		3	Long Pua	4G	Telkomsel
		4	Long Aran	4G	Telkomsel
		5	Long Lame	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Aran	
		6	Long Jelet	4G	Telkomsel
		7	Long Paliran	4G	Telkomsel
		8	Long Bena	4G	Telkomsel
		9	Long Belaka Pitau	4G	Telkomsel
NK	**Kecamatan**	**ND**	**Desa**	**Sinyal Selular**	
				Kelas	**Penyedia**
11	Kayan Hilir				
		1	Data Dian	Eg	Telkomsel
		2	Long Pipa	4G	Telkomsel
		3	Long Sule	2G	Telkomsel
		4	Sungai Anai	4G	Telkomsel
		5	Long Metun	4G	Telkomsel
NK	**Kecamatan**	**ND**	**Desa**	**Sinyal Selular**	
				Kelas	**Penyedia**
12	Kayan Hulu				
		1	Long Nawang	Eg	Telkomsel
		2	Nawang Baru	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Nawang	
		3	Long Temuyat		
		4	Long Betaoh	4G	Telkomsel
		5	Long Payau	4G	Telkomsel
NK	**Kecamatan**	**ND**	**Desa**	**Sinyal Selular**	
				Kelas	**Penyedia**
13	Sungai Boh				
		1	Mahak Baru	Eg	Telkomsel (Swasta)
		2	Dumu Mahak	Sinyal Telkomsel dari Desa Mahak Baru	
		3	Long Lebusan	4G	Indosat & Telkomsel
		4	Long Top	4G	Indosat
		5	Agung Baru	2G	Telkomsel
		6	Data Baru	Sinyal Telkomsel dari Desa Mahak Baru	
NK	**Kecamatan**	**ND**	**Desa**	**Sinyal Selular**	
				Kelas	**Penyedia**
14	Kayan Selatan				

		1	Long Ampung	Eg	Telkomsel (Pemda)
		2	Long Uro	4G	Indosat
		3	Lidung Payau	4G	Telkomsel
		4	Sungai Barang	4G	Telkomsel
		5	Metulang	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Ampung	
NK	**Kecamatan**	**ND**	**Desa**	**Sinyal Selular**	
				Kelas	**Penyedia**
15	Bahau Hulu				
		1	Long Uli	4G	Indosat
		2	Long Alango	Eg	Telkomsel (Pemda)
		3	Long Berini	4G	Telkomsel
		4	Long Tebulo	4G	Indosat
		5	Apau Ping	4G	Telkomsel
		6	Long Kemuat	4G	Indosat

Sumber : *Dinas Kominfo Tahun 2023*

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja pesentase desa yang terlayani telekomunikasi sebesar Rp.5.671.921.512, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.6.581.057.944 atau capaian realisasi keuangan sebesar 86.18%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Cukup Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja pesentase desa yang terlayani telekomunikasi sebesar Rp. 5.671.921.512, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.9.981.876.755 atau capaian realisasi keuangan sebesar 56,82%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efesien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.116
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Layanan Teknologi Yang Membuka Keterisolasian Daerah	Pesentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	99,05%	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	924.188.000	708.483.995	76,66
			Program Aplikasi Informatika	5.656.869.944	4.963.437.517	87,74

Sumber : *Dinas Kominfo Tahun 2023*

Dari tabel 2.116 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh Program Informasi Dan Komunikasi Publik dan Program Aplikasi Informatika.

Tujuan 2: Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup

15. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lahan, Air, dan Udara

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran indeks kualitas tutupan lahan, indeks kualitas air dan indeks kualitas udara dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.117
Evaluasi Pencapaian Sasaran 15
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air, dan Udara

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)	Poin	100	100	100%
Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	Poin	53,75	62,38	116,06%
Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)	Poin	91,36	96,,71	105,86%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

Hasil pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lahan, air dan udara dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100) dengan target RPJMD 2023 adalah 100 poin, realisasi 100 poin dan capaian 100%. Untuk indikator kinerja indeks kualitas air dengan target RPJMD tahun 2023 dengan 53,75 poin, realisasi 62,38 poin dan capain kinerja 116,06% sedangkan indikator kinerja indeks kualitas udara dengan target tahun 2023 sebesar 91,36 poin, realisasi 96,71 poin dan capaian kinerja 105,86%.

INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Adapun rumus perhitungan indeks kualitas tutupan lahan adalah :

$$\text{IKTL} = 100 - \left(\left(84{,}3 - (\text{TL} \times 100)\right) \times \frac{50}{54{,}3} \right)$$

Berdasarkan informasi dari Direktorat Kerusakan Pemulihan Lahan Akses Terbuka, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2018, diperoleh data sebagai berikut :

- Luas wilayah (LW) = 4.031.167,6569
- Luas Hutan (LH) = 3.833.081,1211
- Luas Belukar Dalam Kawasan (LBDK) = 50.712,8983
- Luas Belukar Luar Kawasan (LBLK) = 27.062,8957

Dengan menggunakan rumus perhitungan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) di atas, maka nilai IKTL Tahun 2023 adalah:

$$\text{IKTL} = 100 - \left(\left(84{,}3 - (\text{TL} \times 100)\right) \times \frac{50}{54{,}3} \right)$$

$$\text{Tutupan Lahan (TL)} = \frac{(\text{LH} + ((\text{LBDK} + \text{LBLK}) \times 0{,}6))}{\text{LW}}$$

$$\text{TL} = \frac{(3833081{,}1211 + ((50712{,}8983 + 27062{,}8957) \times 0{,}6))}{4031167{,}6569}$$

$$\text{TL} = 0{,}96$$

Nilai IKTL Tahun 2023 adalah :

$$\text{IKTL} = 100 - \left(\left(84{,}3 - (\text{TL} \times 100)\right) \times \frac{50}{54{,}3} \right)$$

$$\text{IKTL} = 100 - \left(\left(84{,}3 - (0{,}96 \times 100)\right) \times \frac{50}{54{,}3} \right)$$

$$\text{IKTL} = 110{,}77 \text{ atau } 100{,}00$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka diperoleh nilai indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) pada tahun 2023 adalah sebesar 100,00 (poin) dari target 100,00 (poin) atau 100,00%. Dengan demikian, karena persentase capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 80-100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Baik.** Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 202, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.118
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)	Poin	100	100	100	100	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2023 adalah perbandingan realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100) tahun 2023 sebesar 100 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 100 atau realisasi capaian kinerja sebesar 100%, realisasi tahun 2021 sebesar 100 atau realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dan realisasi tahun 2022 sebesar 100 atau realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilainya cendrung stabil dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100 poin dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.119

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)	Poin	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100) tahun 2022 sebesar 100 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal dari poin-poin yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa capaian kinerja secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil dengan besaran capaian akuntabilitas kinerja dengan kategori Sangat Baik. Dalam proses pencapaian keberhasilan pencapaian target tersebut terdapat hal-hal yang mempengaruhi, diantaranya adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Tercapainya target pada indikator komponen Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diatas merupakan suatu capaian yang menunjukkan keberhasilan atas berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator-indikator tersebut meliputi :

- Penanganan Pengaduan

  Penanganan pengaduan Tahun 2022, dapat direspon sebesar 100% tertangani. Total jumlah pengaduan di Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) pengaduan dan semua pengaduan dapat ditangani.

- Penertiban atau penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan dapat mendorong kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya kesadaran kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan dapat meminimalisir pencemaran baik terhadap kualitas air maupun udara.

Walaupun tahun ini indikator kinerja indeks kualitas tutupan lahan mencapai target yang ditetapkan tetapi mengantisipasi beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi kedepan untuk pencapaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

- Minimnya anggaran program dan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL.

- Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan yang menyeluruh terhadap semua kegiatan dan/atau usaha yang ada di wilayah Kabupaten Malinau, dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Ada beberapa solusi yang bisa mengatasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Berikut ini, antara lain :

- Komponen perhitungan tutupan lahan dilakukan kerjasama dengan perusahaan dan KPH, karena dasar perhitungan tutupan lahan adalah kewenangan KPH.
- Melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala pada pelaku usaha besar dan kecil.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas juga menggambarkan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks kualitas tutupan lahan sebesar Rp. 4.226.921.574 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 4.805.347.800 atau capaian realisasi keuangan sebesar 87,95%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja untuk indikator kinerja Angka Usia harapan hidup termasuk dalam kriteria **Cukup Efektif**.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar Rp.4.226.921.574, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.4.226.921.574 atau capaian realisasi keuangan sebesar38,25%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efesien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksankan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan bagi aparatur, sehingga dalam pelaksanaan perhitungan Tutupan lahan bisa lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.120
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)	100%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	4.805.347.800	4.226.921.574	87,95%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

Dari tabel diatas, Program/kegiatan yang menunjang untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tidak dapat dipisahkan, dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menunjang pencapaian nilai IKTL. Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung oleh Program pengelolaan keanekaragaman hayati dan Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati serta didukung oleh Sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

INDEKS KUALITAS AIR

Kualitas Air merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. IKA merupakan nilai tunggal terhadap kualitas air yang diperoleh dari integrasi beberapa parameter penyusunnya pada waktu dan lokasi tertentu. Semakin tinggi nilai IKA maka semakin baik kualitas air tersebut. Acuan yang digunakan untuk menghitung IKA adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air Menteri Negara Lingkungan Hidup. Untuk menghitung IKA dilakukan dengan menggunakan metode STORET (Secara prinsip metoda STORET adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air) dan Indeks Pencemaran *(Indeks Pencemaran (Pollution Index)* yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan (Nemerow, 1974). Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.121

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	Poin	62,38	50	50	62,38	80,15%	80,15%	100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100) 2023 dengan realisasi tahun 2020 dan 2021 sebesar 50 poin atau realisasi capaian kinerja sebesar 80,15%, dan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 62,38 poin atau capaian kinerja 100% dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 24,76% terhadap capaian tahun 2020 dan 2021 dan tidak ada kenaikan pion di tahun 2023 terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.122

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	Poin	62,38	54,05	115,41%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2022

Pada tabel 2.122 di atas, target akhir RPJMD dengan indikator indeks kualitas air (IKA) adalah 54,05 poin. Nilai target Indeks Kualitas Air (IKA) di wilayah kabupaten/kota pada Tahun 2023 disesuaikan dengan realisasi 62,38 poin. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai persentase capaian terhadap target RPJMD akhir tahun sebesar 115,41%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan Sangat Baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator Indeks Kualitas Air telah tercapai, bahkan melebihi target yang dicantumkan pada target RPJMD Tahun 2021-2026. Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan regional provinsi dan standar nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.123
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Regional Provinsi	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)	
						Provinsi	Nasional
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	Poin	62,38	.....	55,4	.....	112,60 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019- 2024 terdapat indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Adapun target nasional yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2023 untuk Indeks Kualitas Air adalah 62,38 poin sedangkan untuk standar nasional sebesar 55,4 poin atau 112,60%. Sehingga dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja sasaran Kabupaten Malinau untuk Indeks Kualitas Air (IKA) telah mencapai atau bahkan melebihi target nasional dengan capaian sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Indeks Kualitas Air, berada pada kategori Sangat Baik.

Kualitas Air merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. IKA merupakan nilai tunggal terhadap kualitas air yang diperoleh dari integrasi beberapa parameter penyusunnya pada waktu dan lokasi tertentu. Semakin tinggi nilai IKA maka semakin baik kualitas air tersebut. Acuan yang digunakan untuk menghitung IKA adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air Menteri Negara Lingkungan Hidup. Untuk menghitung IKA dilakukan dengan menggunakan metode STORET (Secara prinsip metoda STORET adalah membandingkan antara data kualitas air dengan

baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air) dan Indeks Pencemaran *(Indeks Pencemaran (Pollution Index)* yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan (Nemerow, 1974). Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Pencemaran.

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 A}{2}}$$

Hasil pengujian kualitas air pada 7 titik pantau air sungai yaitu (1) air Sungai Sesayap Desa Kuala Lapang, (2) air Sungai Sesayap Desa Long Uji, (3) air Sungai Sesayap Desa Sembuak, (4) air Sungai Sesayap Desa Pulau Sapi, (5) air Sungai Sesayap Intake PDAM Kuala Lapang, (6) air Sungai Sesayap Intake PDAM Malinau Kota, (7) air Sungai Sesayap Seturan selama 3 periode pengambilan sampel, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 21 sampel Air Sungai yang dilakukan pada Tahun 2023 menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 2.123
Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air

Mutu AIR	Jumlah Titik Sampel Yang Memenuhi mutu Air	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Per Mutu Air
Memenuhi	13	62%	70	43.33
Cemar Ringan	8	38%	50	19.05
Cemar Sedang	0	0%	30	0.00
cemar Berat	0	0%	10	0.00
Total	**21**	**100%**		**62.38**
Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)				**62,38**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

Berdasarkan tabel Nilai Indeks Kualitas Air tersebut di atas, diketahui bahwa pada Tahun 2023 nilai Indeks Kualitas Air mencapai 62,38 (poin) dari target yang ditentukan sebesar 53,65 (poin) atau capaian kinerja 116,27%. Karena persentase capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) >100, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan Sangat Baik.

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Air (IKA) terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang selaras dengan RPJMD Tahun 2023 sebesar 53,65 poin terealisasi sebesar 62,38 poin atau 116,27% termasuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dengan kategori Sangat Baik. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator-indikator tersebut adalah dengan cara Melakukan Pemantauan Kualitas Air. Sebagai dasar untuk penyediaan data kualitas air yang akan digunakan untuk penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang merupakan komponen dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air sesuai petunjuk teknis pemantauan yang tercantum dalam peraturan perundangan-undangan yaitu:

- Pemantauan dilaksanakan pada 8 (delapan) titik pantau yang secara umum terdiri dari sungai dan anak-anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Malinau yang menjadi prioritas dengan berbagai pertimbangan diantaranya Sungai dan anak-anak sungai Malinau, sungai yang mengalir dari wilayah administrasi lain, sungai yang menjadi badan air pembuangan limbah usaha/kegiatan, serta sungai yang menjadi prioritas untuk kegiatan pengendalian pencemaran air lainnya. Kedelapan titik sampel yang diambil untuk dilakukan pengujian meliputi Air Sungai Sesayap Intake PDAM Malinau, Air Sungai Sesayap Pelabuhan Lama, Air Sungai Sembuak Jembatan Desa Luso, Air Sungai Sembuak Hilir RSUD, Air Sungai Malinau Intake PDAM Desa Tanjung Nanga, Air Sungai Malinau Intake PDAM Lama Desa Pulau Sapi, Air Sungai Mentarang Desa Pulau Sapi RT 4, dan Air Sungai Bengalun Jetty PT. BDMS.

- Kegiatan pemantauan hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun dan diharapkan dapat mewakili kondisi musim penghujan, musim peralihan dan musim kemarau. Hal ini lebih sedikit (kurang) dari periode pemantauan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu 2 (dua) kali dalam setahun.
- Kegiatan pengujian kualitas air dilaksanakan bekerja sama dengan Laboratorium yang telah terakreditasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Laboratorium Balai Riset & Standardisasi Industri (Baristand Industri) Samarinda yang dimiliki oleh Kementrian Perindustrian Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. M.T. Haryono, Jl. Banggeris Nomor 1 Samarinda, Kalimantan Timur Indonesia-75124; Email: BaristandSamarinda; Telp. 0541-7771364; Fax. 0541-745431.

Diharapkan melalui kegiatan pemantauan kualitas air ini didapatkan data kualitas air yang valid yang akan digunakan sebagai basis data penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA).

Pada Tahun 2023, DLH melaksanakan penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sesuai dengan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KLHK terkait penghitungan Nilai IKLH, dengan beberapa pertimbangan teknis lainnya. Pertimbangan teknis lainnya yang dimaksud adalah terkait dengan jumlah titik lokasi yang digunakan untuk penghitungan nilai IKA. Jumlah titik lokasi yang digunakan sebagai dasar penghitungan IKA adalah 8 (delapan) titik pantau lokasi yang dipantau dengan kriteria sebagai berikut :

- ✓ Sungai Malinau yang terletak di wilayah hulu dan hilir yang berdampak akibat adanya kegiatan usaha dan/atau kegiatan.
- ✓ Sungai yang sumber airnya berada di wilayah Kabupaten Malinau dan melintas hanya di wilayah Kabupaten Malinau.

Dalam hal ini, anak-anak sungai yang mengalir dari wilayah administrasi lain dan berbatasan dengan Kabupaten Malinau tidak diikutkan dalam penghitungan IKA. Hal ini dilakukan agar nilai IKA yang didapatkan dapat merepresentasikan kondisi kualitas air di wilayah Kabupaten Malinau dan tidak dipengaruhi oleh kondisi kualitas air dari sungai di wilayah administrasi lain yang secara langsung tidak dapat dikontrol kualitasnya oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Data Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023 (data terlampir).

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Air antara lain :

- Minimnya anggaran program dan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL), terutama indeks kualitas air (IKA).
- Minimnya sumber daya aparatur yang cakap, profesional dan terakreditasi untuk melakukan pengambilan sampel dan uji air sehingga hal ini masih diantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan Baristand Samarinda untuk melakukan uji dan pengambilan sampel air.
- Belum optimalnya pengelolaan UPTD laboratorium lingkungan sehingga sampai saat ini laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau belum dapat berjalan dengan baik.

Ada beberapa solusi untuk menjawab kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Air antara lain :

- Melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan untuk melakukan uji kualitas air, sehingga diperoleh data kualitas air setiap tahunnya.
- Setiap tahun selalu mengusulkan Diklat ASN untuk pengawas lingkungan.
- Melakukan penambahan alat-alat Laboratorium lingkungan hidup untuk melengkapi alat-alat yang ada di laboratorium.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas juga menggambarkan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks kualitas air sebesar Rp 635.052.900,dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 739.991.320 atau capaian realisasi keuangan sebesar 85,81%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **cukup efektif**.

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasianggaran belanja langsunguntuk mendukung indikator kinerja indeks kualitas air sebesar Rp.635.052.900, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp15.420.407.765 atau capaian realisasi keuangan sebesar 4,11%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efesien.** Untuk meningkatkan efektifitas penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksankan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan bagi aparatur, sehingga dalam pelaksanaan pengambilan sampel air bisa lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.124
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	116,06%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	739.991.320,-	635.052.900,-	85,81 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

Dari tabel diatas, Program/kegiatan yang menunjang untuk Indeks Kualitas Kualitas Air (IKA) tidak dapat dipisahkan, dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menunjang pencapaian nilai IKA. Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung oleh Program Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota serta didukung oleh Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut dan Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium LIngkungan Hidup Kabupaten/Kota.

INDEKS KUALITAS UDARA

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Metodologi perhitungan indeks kualitas udara mengadopsi program Uni Eropa melalui *European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project,* yaitu *"Common Informatiob to European Air" (Citeair II)* dengan judul *CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality Actross Borders – 2012. Common Air Quality Index (CAQI)* ini digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata per jam, harian, dan tahunan.

Persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.125
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	
Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)	Poin	96,71	93,98	96,21	95,20	97,17	99,48	98,43

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100) tahun 2023 sebesar 96,71 poin dengan realisasi tahun 2020 sebesar 93,98 poin atau realisasi capaian kinerja sebesar 97,17%, realisasi tahun 2021 sebesar 96,21 poin atau realisasi capaian kinerja sebesar 99,48%, dan realisasi tahun 2022 sebesar 95,20 poin atau realisasi capaian 98,43%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 2,90% terhadap capaian tahun 2020, adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,51% terhadap capaian tahun 2021 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 1,58% terhadap capaian tahun 2022. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.126
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)	Poin	96,71	91,68	105,48%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100) tahun 2023 sebesar 96,71 poin dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 91,68 poin, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 105,48% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026. Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.127
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Regional Provinsi	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)	
						Provinsi	Nasional
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)	poin	96,71		84,4		114,59 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019- 2024 terdapat indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan sampah. Adapun target nasional yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2023 untuk Indeks Kualitas Udara sebesar 84,4 poin atau capaian 114,59%. Sehingga dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah mencapai atau bahkan melebihi target nasional dengan capaian sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Indeks Kualitas Udara berada pada kategori **Sangat Baik.**

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Metodologi perhitungan indeks kualitas udara mengadopsi program Uni Eropa melalui *European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project,* yaitu *"Common Informatiob to European Air" (Citeair II)* dengan judul *CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality Actross Borders – 2012. Common Air Quality Index (CAQI)* ini digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata per jam, harian, dan tahunan. Sehubungan dengan baku mutu udara Indonesia masih mengacu pada PP 41/1999 yang bersifat longgar, maka dalam perhitungan indeks mengadopsi Direktif EU *(EU Directives)* sebagai berikut :

Pollutant		***Target Value/Limit Value***
	NO_2	*Year Average (40 µm/m3)*
	PM_{10}	*Year Average (40 µm/m3)*
daily	PM_{10}	*Number of daily averages above 40 µm/m3 is 35 days*
	Ozone	*25 days with an 8-hour average value ≥ 120 µm/m3*
	PM2,5	*Year Average (20 µm/m3)*
	SO_2	*Year Average (20 µm/m3)*
	Benzene	*Year Average (5 µm/m3)*
	CO	-

Indeks kualitas Udara dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\textbf{IKU} = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \text{ x } (\text{Ieu} - 0,1) \right)$$

Sedangkan untuk nilai *Ieu* didapat dengan rumus sebagai berikut :

- I_{EU} NO_2 $= \frac{NO_2 \text{ rata - rata}}{40}$
- I_{EU} SO_2 $= \frac{SO_2 \text{ rata - rata}}{20}$
- I_{EU} $= \frac{I_{EU} NO_2 + I_{EU} SO_2}{2}$

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* Kabupaten Malinau Tahun 2022 oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan laman website: https://ppkl.menlhk.go.id/ iklh/login yang dilakukan pada 4 lokasi (transportasi: Bandara R.A. Bessing Malinau, industri: Industri/Agro Industri SD Kelapis, pemukiman Taman Jojok, dan perkantoran Kantor Bupati Malinau Jl. Pusat Pemerintahan) selama 14 hari pemantauan menunjukkan NO2 rata-rata 4,95 dan SO2 rata-rata 4,98 sehingga perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara adalah :

$$I_{EU}\ NO_2 = \frac{NO_2 \text{ rata - rata}}{40}$$

$$I_{EU}\ NO_2 = \frac{NO_2 \text{ rata - rata}}{40}$$

$$= \frac{4,95}{40} \qquad = \frac{4,98}{20}$$

$$= 0,12 \qquad = 0,25$$

$$I_{EU} = \frac{I_{EU} NO_2 + I_{EU} SO_2}{2}$$

$$= \frac{0,12 + 0,25}{2}$$

$$= 0,19$$

$$\text{IKU} = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \text{ x } (\text{Ieu} - 0,1)\right)$$

$$= 100 - \left(\frac{50}{0,9} \text{ x } (0,19 - 0,1)\right)$$

$$= 95,20$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai indeks kualitas udara (IKU) pada tahun 2023 adalah sebesar 96,71 (poin) dari target 91,36 (poin) atau capaian kinerja 105,86%. Dengan demikian, karena persentase capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) >100, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan Sangat Baik.

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang selaras dengan RKPD Tahun 2023 sebesar 91,36 poin terealisasi sebesar 96,71 poin atau 105,86% termasuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dengan kategori Sangat Baik.

Tercapainya target pada beberapa indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL) dan Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota diatas merupakan suatu capaian yang menunjukkan keberhasilan atas berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator-indikator tersebut meliputi:

- Pemantauan Kualitas Udara

Pemantauan mutu udara ambien merupakan salah satu upaya untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil

pemantauan mutu udara ambien dapat dijadikan indikator untuk menentukan prioritas program pengendalian pencemaran udara yang perlu dilakukan. Saat ini, metode pemantauan mutu udara ambien yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara yaitu melalui metode otomatis kontinyu *(AQMS)* dan manual *(passive sampler).*

Menurut SOP Pelaksanaan Pemantauan SO_2 dan NO_2 di udara ambien Tahun 2011, metode *passive sampler* adalah suatu metode yang menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penghisap dengan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.

Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung yang mewakili area padat kendaraan (transportasi), area pemukiman, area perkantoran dan area industri pada 427 Kabupaten/Kota yang ada di 34 Provinsi. Pemilihan 4 lokasi yang mewakili 4 jenis aktivitas pada setiap Kabupaten/Kota tidak boleh berada dalam 1 lokasi yang sama, namun minimal berjarak 1 kilometer dari titik satu ke titik lainnya.

Pemilihan 4 lokasi tersebut adalah :

a) Transportasi

   Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5-10 meter dari bahu jalan.

b) Pemukiman

   Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.

c) Perkantoran/pasar/komersil

Lokasi di daerah perkantoran/pasar/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/pasar/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

d) Perkantoran/pasar/komersial

Lokasi di daerah perkantoran/pasar/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

Pengukuran dilakukan secara otomatis dan atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan. Parameter yang dipantau adalah NO_2 dan SO_2 dengan durasi pemantauan dalam setahun adalah sebagai berikut :

a) Passive sampler: minimal 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
b) Manual aktif: minimal 24 hari per tahun (2 kali per bulan @24 jam),
c) AQMS fixed station: minimal 65% data (238 data harian per tahun),
d) AQMS mobile station: minimal 20 data harian per bulan (240 data harian per tahun).

Untuk melihat Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2022, maka dapat dilihat pada tabel perhitungan Indeks Kualitas Udara (data terlampir).

- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan

  Efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan berupa perusahaan tambang batubara, berpengaruh terhadap nilai IKU. jika perusahaan penghasil emisi sumber tidak bergerak melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dapat meminimalisir pencemaran pada udara.

- Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan Tahun 2023, dapat direspon sebesar 100% tertangani. Total jumlah pengaduan di Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) pengaduan dan semua pengaduan dapat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

- Penertiban atau penegakan hukum

  Penertiban atau penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan dapat mendorong kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya kesadaran kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan dapat meminimalisir pencemaran baik terhadap kualitas udara.

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Udara antara lain :

- Minimnya anggaran program dan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL), terutama indeks kualitas Udara (IKU).
- Minimnya sumber daya aparatur yang cakap, profesional dan terakreditasi untuk melakukan pengambilan sampel dan uji Udara sehingga hal ini masih diantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan Baristand Samarinda untuk melakukan uji dan pengambilan sampel Udara.
- Belum optimalnya pengelolaan UPTD laboratorium lingkungan sehingga sampai saat ini laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau belum dapat berjalan dengan baik.

Ada beberapa solusi untuk mengatasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Udara antara lain:

- Melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan untuk mengambil sampel uji udara sehingga diperoleh data kualitas udara setiap tahunnya.
- Melakukan penambahan alat-alat labolatorium yang diajukan pada anggaran APBD Kabupaten Malinau dan dana TAPE Provinsi Kalimantan

Utara sehingga alat-alat laboratorium secara bertahap akan terlengkapi sesuai dengan standarisasi yang dipersyaratkan.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas juga menggambarkan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator indeks kualitas udara sebesar Rp 8.597.210.303,dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 9.833.121.900 atau capaian realisasi keuangan sebesar 87,43%, Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Cukup Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasianggaran belanja langsunguntuk mendukung indikator indeks kualitas udara harapan hidup sebesar Rp.8.597.210.303, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp 15.420.407.765 atau capaian realisasi keuangan sebesar 55,75%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efesien.**

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.128
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Udara	105,86%	Program PengendalianPencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.833.121.900	8.597.210.303	87,43%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

Dari tabel diatas, Program/kegiatan yang menunjang untuk Indeks Kualitas Kualitas Air (IKA) tidak dapat dipisahkan, dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menunjang pencapaian nilai IKA. Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung oleh Program Program PengendalianPencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota serta didukung oleh Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dan Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Tujuan 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (*Good Governance*)

16. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik (*Good Governance*) secara luas melalui Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP dan Nilai LPPD, Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

Tabel 2.129
Evaluasi Pencapaian Sasaran 16
Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP dan Nilai LPPD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Nilai SAKIP	Nilai	67,10	62,04	92,46%
Nilai LPPD	Nilai	2,930	-	-

Sumber : Bagian Organisasi dan Tapem Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

NILAI SAKIP

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi AKIP tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwa Pemerintah Kabupaten Malinau memperoleh nilai SAKIP tahun 2023 adalah 62,04 atau Predikat B. Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.130

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Nilai SAKIP	Nilai	62,04	56,32	57,14	62,02	90,78%	92,10%	96,74%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 62,04 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 56,32 atau realisasi capaian kinerja sebesar 90,78%, realisasi tahun 2021 sebesar 57,14 atau realisasi capaian kinerja sebesar 92,10% dan realisasi tahun 2022 sebesar 60,02 atau realisasi capaian kinerja sebesar 96,74%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 10,15% terhadap capaian kinerja tahun 2020, kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 8,58% terhadap capaian capaian tahun 2021 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 3,36 terhadap capaian kinerja 2022. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.131
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Nilai SAKIP	Nilai	62,04	75,25	82,44%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 62,04 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 75,25, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian nilai SAKIP sebesar 82,44% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan tujuan mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorentasi hasil (*result orientid government*). Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau menunjukan bahwa nilai sebesar 62,04 dengan predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik" yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 2.132
Capaian Kinerja SAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2023

KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI 2023
A. Perencanaan Kinerja	30%	23,87
B. Pengukuran Kinerja	30%	16,28
C. Pelaporan Kinerja	15%	10,15
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	12,14
Nilai Hasil Evaluasi	**100%**	**62,04**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**

Sumber : Kemenpan RB Tahun 2023

Tahun 2023 penilaian evaluasi SAKIP Kabupaten Malinau mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namum belum memenihi atau mencapai target capaian kinerja tahun 2023. Adapun komponen-komponen yang mempengaruhi atau penyebab capaian kinerja belum tercapai yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
   - Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang memiliki indikator kinerja yang belum memenuhi SMART-C.
   - Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya memperhatikan *critical success factor*, isu strategi dan hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja.
   - Penyusunan matriks peran hasil sebagai bagian dari proses penetapan sasaran kinerja individu belum sepenuhnya memanfaatkan pola perjanjian kinerja yang menjabarkan setiap kondisi kinerja sesuai levelnya.
   - Identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bagian dari proses melihat pola kolaborasi kinerja lintas sektor belum dijabarkan secara spesifik dan belum mempertimmbangkan kondisi/isu strategi yang ada.
2. Pengukuran Kinerja

- Data kinerja belum dapat diyakini keakuratannya dikarenakan penggumpulan data masih manual
- Pengukuran kinerja individu belum sepenuhnya terintegrasi dengan hasil pengukuran kinerja organisasi sehingga belum terlihat keterkaitan hasil pelaporan aktivitas tersebut dalam mengawal capaian kinerja *outcame* atasanya.
- Monitoring dan evaluasi belum mengukur capaian kinerja outcame yang diperjanjikan.
- Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pemberian *reward dan punishmant*.

3. Pelaporan kinerja
   - Informasi terkait hasil analisis efesiansi sumber daya dan upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja kedepan
   - Pemanfaatan informasi yang tertuang dalam LKjIP guna sebagai alat penentuan target tahunan belum dimanfaatkan, terutama pada indikator yang tidak tercapai realisasinya.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal
   - Evaluasi internal sudah dilakukan namum kualitas hasil evalusi yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum cukup menggambarkan permasalahan yang sebenarnya terjadi pada implementasi SAKIP setiap Perangkat Daerah.
   - Monitoring evaluasi atas temuam dan rekomendasi belum dilakukan secara berkala.
   - Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.

Tahun 2023 Nilai SAKIP Kabupaten Malinau tidak mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2023 namun realisasi capaian kinerja tahun 2023 mengalami kanaikan dari tahun ke tahun seperti dijelaskan pada tabel perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir yang telah disajikan diatas. Adapun solusi/ tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan kedepan untuk memperbaiki Nilai SAKIP yaitu:

- Menyempurnakan kualitas rumusan kinerja yang sudah ada sehingga indikator kinerja memenuhi kriteria SMART dan Cukup
- Menyempurnakan kualitas perjanjian kinerja dengan memperhatikan *critical success factor*, isu strategi dan hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja.
- Membangun suatu sistem pengumpulan data dan pengukuran kinerja di internal pemda yang lebih lengkap dan terintegritasi.
- Mendorong pelaksanaan pengukuran kinerja individu.
- Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.
- Melakukan penyeragaman format Informasi terkait hasil analisis efesiansi sumber daya dan upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja kedepan
- Memanfaatkan informasi yang tertuang dalam LKjIP guna sebagai alat penentuan target tahunan belum dimanfaatkan, terutama pada indikator yang tidak tercapai realisasinya.
- Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP internal dan menjabarkan secara spesifik temuan yang menjadi masalah di tiap Perangkat Daerah.
- Mendorong pelaksanaan monitoring secara berkala rekomendasi yang diberikan kepada Perangkat Daerah melalui LHE.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai SAKIP sebesar Rp. 472.483.012 dari anggaran yang disediakan sebesar 599.404.554 atau capaian realisasi keuangan sebesar 78,83%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria **Kurang Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan pelatihan penyusunan dokumen SAKIP kepada setiap kasubbag penyusunan program dan staf Perangkat Daerah baik melalui studi belajar ke kabupaten lain yang memiliki nilai SAKIP lebih tinggi (A) dan bimbingan teknis di awal tahun sebelum pelaksanaan penyusunan dokumen SAKIP.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.133
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	92,46%	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.651.588.910	2.367.355.401	89,28%
			Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.348.562.601	982.775.880	72,88%
			Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	2.201.751.800	814.099.535	36,98
			Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	599.404.554	472.483.012	78,83%

Sumber : Bappeda dan Litbang, Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Dari tabel 2.133 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dan Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

NILAI LPPD

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.134

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai LPPD	Predikat	Dalam Proses Pengajuan	-	2,08	2,71	-	Rendah	Sedang

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja LPPD tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Nilai LPPD tahun 2023 sebesar yang sedang dalam proses penilaian dengan hasil tahun 2020 tidak dilaksanakan penilaian karena adanya pandemi COVID-19 atau realisasi capaian kinerja sebesar 0, realisasi tahun 2021 dengan predikat sebesar 2,08 atau realisasi capaian kinerja sebesar **Rendah** dan realisasi tahun 2022 sebesar 2,71 atau realisasi capaian kinerja sebesar **Sedang**. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2021 dengan predikat **Rendah** dan terjadi kenaikan capaian kinerja tahun 2022 dengan predikat **Sedang**, sedangkan tahun 2023 sedang dalam proses penilaian dari TIMNAS.

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.135
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Nilai LPPD	Nilai	Dalam proses	2,95	Sedang

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Adapun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan ini sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat dalam rangka mewujudkan transparansi dan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi Tahun 2021-2026 dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauh mana

perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.7/8697/OTDA, tanggal 11 Desember 2023 perihal penyampaian pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan instrumen pembinaan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga hak dan kewenangan daerah dalam mengelola otonomi tetap sejalan dengan cita-cita nasional.

LPPD Tahun 2023 belum dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri karena masih dalam proses penilaian. Adapun kendala Realisasi Nilai LPPD untuk Tahun 2020 sehingga tidak dilakukan penilaian Karena adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2019 dan 2020 sehingga banyak daerah yang tidak menyerahkan laporannya ke pusat (Kementerian Dalam Negeri).

17. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Dari KKN

Tabel 2.136
Evaluasi Pencapaian Sasaran 17
Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Dari KKN

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun2022 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau Tahun 2023

Tahun 2023 pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Opini BPK dengan target RPJMD tahun 2023 adalah WTP

Realisasi tahun 2023 adalah WTP, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2023 adalah 100 %. Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.137

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%

Sumber : BPKD tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi opini BPK tahun 2023 adalah WTP dengan realisasi tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah WTP atau realisasi capaian kinerja sebesar 100dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai tahun 2023 Kabupaten Malinau masih mendapat Opini BPK adalah WTP. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.138

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%

Sumber : BPKD tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi opini BPK tahun 2023 adalah WTP dengan target akhir RPJMD tahun 2026 WTP, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, capaian kinerja untuk indikator kinerja Status Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023 mencapai 100% yang artinya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil di capai berdasarkan standar pemeriksaan BPK. Pencapaian WTP mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah melakukan penyusunan laporan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang diungkapkan juga sesuai dengan ketentuan. Penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dialakukan secara efektif. Analis capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dengan realisasi maupun capaian kinerja seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Opini WTP juga menggambarkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah telah dipertanggungjawabkan pelaksanaanya sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun *stakeholder* terkait.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan indikator :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
3. Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Selain itu, ada 5 kriteria yang menjadi dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan Keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiaban, (4) Kelangkaan, (5) Pengungkapan. Kabupaten Malinau senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan.

Keberhasilan dalam pencapaian target bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala. Adapun permaslahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target antara lain :

a. Data yang tidak akurat/data yang tidak valid
b. Laporan Keuangan dari setiap SKPD yang lambat atau tidak tepat waktu
c. Sumber daya manusia pengurus barang OPD/Pengurus Barang masih ada yang kurang memiliki kompentensi dibidang penatausahaan dibidang aset.
d. Dari sisi data, data aset belum semua OPD tertata dengan baik/belum tertib.
e. Dari sisi administrasi dan penyimpanan masih belum tertib.

Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau pada tahun yang akan datang perlu dilakukan alternative maupun strategi sebagai berikut :

a. Komitmen semua ASN dan *stakeholder* maupun pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
b. Peran APIP dalam pemantauan penerapan SPI di masing-masing OPD perlu dioptimalkan
c. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan melalui program peningkatan kapasitas aparatur, khususnya aparatur pengelola keuangan, maupun melalui upaya perbaikan sistem dan kebijakan sistem dan kebijakan akuntasi serta manajemen aset.

d. Perbaikan sistem melalui rencana aksi *(action plan)* agar proses perbaikan yang dilakukan jelas, terarah, terukur dan terpadu. Sehingga kelemahan dalam pengelolaan keuangan stidak terulang dimasa yang akan datang.
e. Memprioritaskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset.
f. Tertib penyampaian laporan keuangan.
g. Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
h. Mengadakan pelatihan/bimtek mengenai pengelolaan keuangan daerah pada SKPD.
i. Menyelenggarakan bimtek dan sosialisasi penyusunan laporan keuangan.
j. Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait.
k. Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.
l. Menyelengarakan bimtek pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja opini BPK sebesar Rp.325.948.258.631,dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 584.041.128.068 atau capaian realisasi keuangan sebesar 75,39%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Kurang Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.139
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Dari KKN	Opini BPK	100%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.497.168.279	2.375.958.687	95,15
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	581.547.959.789	323.572.299.944	55,64

Sumber : BPKD tahun 2023

Dari tabel 2.139 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah

18. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pengukuran capaian kinerja Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan Indikator kinerja sasaran nilai indeks kepuasan masyarakat, dalam proses implementasi dari perwujudan pengukuran capaian kinerja sasaran dan indikator kinerja sasaran diuraikan dalam penjelasan berikut:

Tabel 2.140
Evaluasi Pencapaian Sasaran 19
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	82,75	97,35%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Tahun 2023 capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat mencapai 97,35% dari target 85 dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 82,75. Dari capaian yang diperolah di tahun 2023 ini maka, kualitas pelayanan publik Kabupaten Malinau Tahun 2023 masuk dalam predikat "**Baik**".

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu:

$$IKM = \frac{Total\ dari\ nilai\ per\ unsur}{Total\ unsur\ yang\ terisi} x\ nilai\ penimbang$$

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.141

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,75	78,28	79,31	80,71	94,59%	95,84%	97,53%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 82,75 dengan realisasi tahun 2020

sebesar 78,28 atau realisasi capaian kinerja sebesar 94,59%, realisasi tahun 2021 sebesar 79,31 atau realisasi capaian kinerja sebesar 95,84%, dan realisasi tahun 2022 sebesar 80,71 atau realisasi capaian kinerja sebesar 97,53% dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 5,71% terhadap capaian tahun 2020, adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 4,33% terhadap capaian tahun 2021 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 2,46% terhadap capaian kinerja tahun 2022. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.142

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,75	88,50	93,50%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 82,75 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 88,50, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 93,50% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan regional provinsi dan standar nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Penyusunan IKM berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyususnan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengg ara Pelayanan Publik. Nilai IKM Kabupaten Malinau diperolah dari OPD yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pelayanan publik. IKM di Kabupaten Malinau dilaksanakan secara mandiri (OPD melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara langsung tanpa bantuan pihak ketiga).

OPD yang melaksanakan Pelayanan Publik di Kabupaten Malinau dan melaksanakan/ membuat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebanyak 6 OPD UPP dan 18 UPT Bidang Kesehatan berikut nama dan nilai IKM yang diperoleh.

Tabel 2.143
Peringkat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Pada Pemerintahan Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	NAMA OPD	NILAI IKM SETELAH DIKONVERSIKAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,87	B	Baik
2	Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu	86,75	B	Baik
3	Dinas Kesehatan PPKB	80,03	B	Baik
4	Dinas Pendidikan	81.00	B	Baik
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	86,02	B	Baik
6	Kecamatan Malinau Utara	82,94	B	Baik
7	RSUD	77,82	B	Baik

8	PKM di Kabupaten Malinau	79,62	B	Baik
NILAI IKM KAB. MALINAU		**80,71**	**B**	**Baik**

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Dari data tabel diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara umum kualitas pelayanan pada OPD yang melaksanakan pelayanan publik di Kabupaten Malinau dipersepsikan baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisaran di antara 76,61–88,30. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran antara lain:

1) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan yang lebih berkualitas,
2) Penyediaan dan publikasi dokumen standar pelayanan, pengembangan sistem informasi pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik.
3) Budaya kerja aparatur dalam melayani masyarakat semakin baik.

Dari nilai unsur terendah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dapat diketahui masalah atau kendala yang ada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal berbeda-beda. Dari beberapa kendala yang menghambat pencapaian kinerja yang telah disebutkan diatas maka akan dilakukan alternatif solusi kedepan untuk perbaikan yaitu :

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
2. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian pelayanan pada OPD pelayanan publik di Kabupaten Malinau mendatang lebih baik lagi dengan

memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tahun 2023 Nilai IKM Kabupaten Malinau tidak mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2023 namun realisasi capaian kinerja tahun 2023 mengalami kanaikan dari tahun ke tahun seperti dijelaskan pada tabel perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir yang disajikan diatas.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat sebesar Rp.452.206.914, dari anggaran

yang disediakan sebesar Rp.517.634.176 atau capaian realisasi keuangan sebesar 87,36%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Cukup Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan pelatihan Sumber Daya Manusia melalui studi belajar ke kabupaten lain yang memiliki nilai Pelayanan publik yang tinggi.

Program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan program tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.144
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,35%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.517.634.176	Rp.452.206.914	87,36%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2023 capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai angka 97,35% dengan realisasi keuangan 87,36%. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

19. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa

Pengukuran sasaran meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa dengan indikator kinerja sasaran persentase peningkatan status desa mandiri, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran persentase peningkatan status desa mandiri dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.145
Evaluasi Pencapaian Sasaran 20
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun2023 %
		Target	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	15,59	71,43	458,17%

Sumber : DPMD Tahun 2023

Tahun 2023 pencapaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa dengan indikator persentase peningkatan status desa mandiri yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 adalah 15,59 dan realisasi 71,43 dengan capaian tahun 2023 458,17%. Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.146
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*8*	*9*
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	71,42	12,04	13,76	16,85%	19,26%

Sumber : DPMD Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri tahun 2023 sebesar 71,43 dengan realisasi tahun 2021 sebesar 12,04 % atau realisasi capaian kinerja sebesar 16,85% dan realisasi tahun 2022 sebesar 12,04% atau realisasi capaian kinerja sebesar 19,25%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 493% terhadap capaian tahun 2021 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 419% terhadap capaian tahun 2022. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.147
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	71,43%	21,05%	339%

Sumber : DPMD Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi persentase peningkatan status desa mandiri tahun 2023 sebesar 71,43% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 21,05%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya indikator kinerja persentase peningkatan status desa mandiri sebesar 339% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026. Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan regional provinsi dan standar nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Oktober 2016. IDM bisa dijadikan rujukan untuk pengentasan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri di Indonesia. Penentuan IDM dengan meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama proses kemajuan dan pemberdayaan desa. IDM menggunaan pendekatan yang bertumpu pada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal. IDM ini sendiri dibuat untuk memperkuat pencapaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. IDM dipakai sebagai acuan dalam melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya untuk mewujudkan kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. Desa Membangun Indonesia tetap dihadapkan pada kenyataan kemiskinan di Desa. Maka, ketersediaan data dan pengukuran sangat dibutuhkan. Khususnya dalam pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa menjadi lima status yakni Desa sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Klasifikasi dalam lima status itu untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan.

Desa berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan seperti goncangan ekonomi, bencana alam, atau konflik sosial maka dapat memengaruhi status Desa Berkembang turun menjadi Desa Tertinggal. Sementara, apabila Desa Berkembang mempunyai kemampuan dalam mengelola potensi, informasi / nilai, inovasi / prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Indeks Desa Membangun merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

UU Desa tahun 2016 tersebut yang sekarang menjadi pendukung utama untuk mempercepat ketercapaian program pembangunan desa. Oleh karena itu masyarakat desa sebagai subjek utama dari program ini akan mendapatkan perhatian lebih oleh negara khususnya dalam peningkatan kualitas sumber dayanya agar menjadi manusia yang berdikari dan mandiri. Selanjutkan diharapkan akan berimplikasi terhadap kondisi desa yang maju, mampu mengolah dan memanfaatkan potensi yang ada untuk kemakmuran desa. desa adalah suatu wilayah yang ditempati sekumpulan manusia yang hidup bersama, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Berdasarkan pengertian di atas desa saat ini mampunyai kekuatan yang besar untuk mengolah segala potensi yang ada di desa. Hal ini akan diperkuat dengan ketersediaan SDM yang sudah ada di desa. Di era reformasi, menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembanguan merupakan hal yang penting. Apalagi sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah pedesaan dengan jumlah penduduknya yang besar. Oleh karena itu menggali potensi desa dan sumber-sember produksi yang selama ini ditelantarkan penting untuk diberdayakan. Salah satu ukuran bagaimana program ini berdampak positif terhadap pembangunan desa dengan melihat hasil dari indeks pembangunan desa. Indeks pembangunan desa ini yang kemudian direalisasikan dengan peraturan menteri desa no 80 Tahun 2022 tentang indeks desa membangun. Kementrian desa melalui permendesa no 2 tahun 2022 tersebut, telah menetapkan beberapa indikator yang memberikan kemudahan bagi desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desa. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri, sedangkan tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah :

a) menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan

b) menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa

formulasi untuk menghitung desa mandiri adalah sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ Desa\ Maju + Desa\ Mandiri}{Jumlah\ desa\ Berkembang\ (per\ awal\ tahun} X100$$

Tabel 2.148
Data Perkembangan Kemajuan Status Desa Tahun 2023 Berdasarkan IDM

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM 2023
1	Mentarang	Long Bisai	Mandiri
2	Mentarang	Pulau Sapi	Mandiri
3	Mentarang	Lidung Kemenci	Mandiri
4	Mentarang	Mentarang Baru	Mandiri
5	Malinau Kota	Batu Lidung	Mandiri
6	Malinau Kota	Malinau Kota	Mandiri
7	Malinau Kota	Pelita Kanaan	Mandiri
8	Malinau Kota	Malinau Hulu	Mandiri
9	Malinau Kota	Malinau Hilir	Mandiri
10	Malinau Kota	Tanjung Keranjang	Mandiri
11	Kayan Hilir	Long Sule	Mandiri
12	Kayan Hulu	Long Nawang	Mandiri
13	Malinau Selatan	Long Loreh	Mandiri
14	Malinau Selatan	Langap	Mandiri
15	Malinau Selatan	Laban Nyarit	Mandiri
16	Malinau Selatan	Sengayan	Mandiri
17	Malinau Utara	Malinau Seberang	Mandiri
18	Malinau Utara	Respen Tubu	Mandiri
19	Malinau Barat	Sesua	Mandiri
20	Malinau Barat	Tanjung Lapang	Mandiri
21	Malinau Barat	Kuala Lapang	Mandiri
22	Malinau Barat	Sempayang	Mandiri
23	Pujungan	Long Pujungan	Maju
24	Kayan Hilir	Data Dian	Maju
25	Kayan Hilir	Long Pipa	Maju
26	Kayan Hilir	Sungai Anai	Maju

27	Kayan Hilir	Long Metun	Maju
28	Kayan Hulu	Nawang Baru	Maju
29	Kayan Hulu	Long Temuyat	Maju
30	Malinau Utara	Kaliamok	Maju
31	Malinau Utara	Kelapis	Maju
32	Malinau Barat	Long Bila	Maju
33	Malinau Barat	Taras	Maju
34	Sungai Boh	Dumu Mahak	Maju
35	Sungai Boh	Mahak Baru	Maju
36	Kayan Selatan	Long Ampung	Maju
37	Kayan Selatan	Metulang	Maju
38	Mentarang Hulu	Temalang	Maju
39	Malinau Selatan Hilir	Setulang	Maju
40	Malinau Selatan Hilir	Punan Gong Solok	Maju
41	Mentarang	Paking	Berkembang
42	Mentarang	Harapan Maju	Berkembang
43	Pujungan	Long Ketaman	Berkembang
44	Pujungan	Long Pua	Berkembang
45	Pujungan	Long Jelet	Berkembang
46	Pujungan	Long Aran	Berkembang
47	Pujungan	Long Peliran	Berkembang
48	Kayan Hulu	Long Betaoh	Berkembang
49	Kayan Hulu	Long Payau	Berkembang
50	Malinau Selatan	Bila Bekayuk	Berkembang
51	Malinau Selatan	Nunuk Tanah Kibang	Berkembang
52	Malinau Selatan	Pelencau	Berkembang
53	Malinau Selatan	Paya Seturan	Berkembang
54	Malinau Selatan	Punan Rian	Berkembang
55	Malinau Utara	Luso	Berkembang
56	Malinau Utara	Putat	Berkembang
57	Malinau Utara	Salap	Berkembang
58	Malinau Utara	Seruyung	Berkembang
59	Malinau Utara	Belayan	Berkembang
60	Malinau Utara	Sembuak Warod	Berkembang
61	Malinau Utara	Lubak Manis	Berkembang
62	Malinau Utara	Semengaris	Berkembang
63	Malinau Barat	Long Kenipe	Berkembang
64	Malinau Barat	Punan Bengalun	Berkembang
65	Malinau Barat	Sentaban	Berkembang
66	Sungai Boh	Long Lebusan	Berkembang
67	Sungai Boh	Agung Baru	Berkembang

68	Sungai Boh	Data Baru	Berkembang
69	Kayan Selatan	Long Uro	Berkembang
70	Kayan Selatan	Lidung Payau	Berkembang
71	Kayan Selatan	Sungai Barang	Berkembang
72	Bahau Hulu	Long Alango	Berkembang
73	Mentarang Hulu	Lung Fala	Berkembang
74	Mentarang Hulu	Lung Kebinu	Berkembang
75	Mentarang Hulu	Lung Mekatif	Berkembang
76	Mentarang Hulu	Lung Simau	Berkembang
77	Mentarang Hulu	Lung Berang	Berkembang
78	Mentarang Hulu	Lung Sulit	Berkembang
79	Mentarang Hulu	Lung Semamu	Berkembang
80	Mentarang Hulu	Long Gafid	Berkembang
81	Mentarang Hulu	Long Liku	Berkembang
82	Malinau Selatan Hilir	Setarap	Berkembang
83	Malinau Selatan Hilir	Punan Setarap	Berkembang
84	Malinau Selatan Hilir	Batu Kajang	Berkembang
85	Malinau Selatan Hilir	Gong Solok	Berkembang
86	Malinau Selatan Hilir	Long Adiu	Berkembang
87	Malinau Selatan Hilir	Punan Long Adiu	Berkembang
88	Malinau Selatan Hulu	Long Lake	Berkembang
89	Malinau Selatan Hulu	Punan Mirau	Berkembang
90	Malinau Selatan Hulu	Metut	Berkembang
91	Malinau Selatan Hulu	Nahakramo	Berkembang
92	Malinau Selatan Hulu	Tanjung Nanga	Berkembang
93	Sungai Tubu	Long Pada	Berkembang
94	Pujungan	Long Lame	Tertinggal
95	Pujungan	Long Bena	Tertinggal
96	Pujungan	Long Belaka Pitau	Tertinggal
97	Sungai Boh	Long Top	Tertinggal
98	Bahau Hulu	Long Uli	Tertinggal
99	Bahau Hulu	Long Berini	Tertinggal
100	Bahau Hulu	Long Tebulo	Tertinggal
101	Bahau Hulu	Apau Ping	Tertinggal
102	Bahau Hulu	Long Kemuat	Tertinggal
103	Malinau Selatan Hulu	Long Rat	Tertinggal
104	Malinau Selatan Hulu	Halanga	Tertinggal
105	Malinau Selatan Hulu	Long Jalan	Tertinggal
106	Sungai Tubu	Long Nyau	Tertinggal
107	Sungai Tubu	Long Titi	Tertinggal

108	Sungai Tubu	Long Ranau	Tertinggal
109	Sungai Tubu	Rian Tubu	Tertinggal

Sumber: DPMD Kab.Malinau Tahun 2023

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Selain faktor-faktor yang mendukung keberhasilan di atas masih terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan pada tahun 2023 realisasi capaian tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaiantugas yang telah di tentukansebelumnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggarandengan rumus:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Target\ Anggaran} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase peningkatan status desa mandiri sebesar Rp 47.517.000, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 50.000.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 95,03%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka Rasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalam dengan kriteria **Efektif.**

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung indikator kinerja persentase peningkatan status desa mandiri sebesar Rp188,660.800, dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp.1.973.581.475 atau capaian realisasi keuangan sebesar 9,55%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas makaRasio Efesiensi dan Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja termasuk dalamdengan kriteria **Sangat Efesien.**

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.149
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Penyelengaraan Pembangunan Berbasis desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	458,1%	Program Penataan Desa	50.000.000	47.517.000	95,03%

Sumber : DPMD Tahun 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program penataan desa dengan capaian kinerja mencapai angka 458,1%% dengan realisasi keuangan 95,03%.

Dokumentasi Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

REALISASI ANGGARAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah:

Tabel 2.150
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Konsolidasi)
Tahun Anggaran 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	*2*	*3*	4 = (3 / 2) * 100	*5*
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pajak Daerah	14.975.396.658	17.025.579.720	113,69	11.104.533.079,00
Retribusi Daerah	1.958.274.100	1.690.525.129	86,33	1.614.238.693
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.600.000.000	3.939.962.456,51	109,44	3.794.954.038,39
Lain-Lain PAD yang Sah	42.160.000.000	68.780.279.159,49	163,14	50.512.443.191,05
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**62.693.670.758**	**91.436.346.465**	**145,85**	**67.026.169.001,44**
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	2.286.953.742.074	2.171.948.684.064,00	94,97	1.197.009.441.619,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya	117.636.673.000	117.636.673.000,00	100	121.920.235.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.339.421.997	80.328.811.804,00	95,24	60.318.134.431,33
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.488.929.837.071**	**2.369.914.168.868,00**	**95,22**	**1.379.247.811.050,33**
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**5.391.368.618**	**5.174.043.266,00**	**95,97**	**4.457.008.753,00**
JUMLAH PENDAPATAN	**2.557.014.876.447**	**2.466.524.558.599,00**	**96,46**	**1.450.730.988.804,77**
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	**1.671.649.789.344**	**1.339.526.068.007,00**	**80,13**	**949.275.124.192,54**
BELANJA MODAL	**567.136.405.419**	**479.449.708.295,00**	**84,54**	**134.670.133.753,00**
BELANJA TIDAK TERDUGA	**260.904.142.047**	**3.513.349.290,00**	**1,35**	**1.024.987.500,00**
BELANJA TRANSFER	**298.642.228.562**	**298.642.015.702,00**	**100**	**269.427.308.000,00**
JUMLAH BELANJA	**2.798.332.565.372**	**2.121.131.141.294,00**	**75,8**	**1.354.397.553.445,54**
SURPLUS/DEFISIT	**-241.317.688.925**	**345.393.417.305,00**	**-143,13**	**96.333.435.359,23**
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**251.317.688.924**	**212.043.389.759,96**	**84,37**	**154.984.253.565,73**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**10.000.000.000**	**10.000.000.000,00**	**100**	**0**
PEMBIAYAAN NETO	**241.317.688.924**	**202.043.389.759,96**	**83,73**	**154.984.253.565,73**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		**547.436.807.064,96**	**0**	**251.317.688.924,96**

Sumber Data : BPKD Kabupaten Malinau (SIPD Kemendagri) (28/02/2024)

Berdasarkan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2023 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Malinau, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau selama tahun 2023.

Mengingat masih ada kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Malinau pada tahun 2023, dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk tahun-tahun mendatang akan tetap difokuskan pada:

- Perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan publik.
- Peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).
- Peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik.
- Penegakan hukum dan perundang-undang, serta perbaikan dalam sistem informasi kinerja pemerintah daerah.
- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja.
- Penyempurnaan mekanisme pengumpulan data kinerja.

Dengan tersusunnya Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergis, inovatif dan kolaboratif bersama masyarakat dan semua pihak.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Tugas pembantuan dilaksanakan agar daerah dapat ikut serta membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan kewenangannya di daerah. Tugas pembantuan dilakukan antara lain ketika terdapat kewenangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya berada atau berlokasi di daerah sementara kementerian/lembaga pemerintah non kementerian memandang tidak efisien dibentuk instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat tersebut.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan yaitu untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Secara pendanaan tugas pembantuan dapat dibiayai oleh APBN maupun APBD. Tugas pembantuan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila pemberi penugasan adalah

pemerintah pusat jika pemberi penugasan adalah pemerintah provinsi maka pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pada prinsipnya, pola pertanggungjawaban dalam tugas pembantuan adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggung jawab kepada pemberi penugasan namun pada kondisi di mana tugas pembantuan berasal dari pemerintah pusat kepada bupati/walikota maka selain bupati/walikota bertanggung jawab kepada pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga juga harus melaporkan kepada gubernur pelaku wakil dari pemerintah pusat di daerah. Tugas pembantuan diberikan sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu dengan memberi penugasan kepada daerah.

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Malinau

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Malinau melaksanakan Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah sebagai berikut:

3.2.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Atasnya

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Malinau mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yang diberikan pada 2 (dua) perangkat daerah pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing – masing yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PERKIM) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Atasnya Tahun Anggaran 2023

No	OPD / Program / Kegiatan	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Dasar Hukum	Asal Bantuan
1	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau - Program Perdagangan dalam Negeri - Kegiatan Pengembangan Sarana perdagangan dan kapasitas logistik - Sub Kegiatan Revitalisasi Pasar Induk Malinau Kota.	3.000.000.000,-	2.784.287.013, atau 92,81% dan realisasi fisiknya 100%.	- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 12 Tahun 2023 Tentang Penugasan Bupati/ Wali Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan / revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan Tahun Anggaran 2023. - DIPA Nomor 090.02.4.403747/2023 tanggal 30 November 2022 Kementerian Perdagangan.	Kementerian Perdagangan RI
2	- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PERKIM) - **Program** Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa - **Kegiatan** Pembinaan Kawasan, Perkotaan, Batas Negara, Batas Wilayah, dan Toponimi - **Sub Kegiatan** Pembangunan Sarana Prasarana (sarpras) pemerintahan di batas antar negara dan PPT/PPKT (Pembangunan gedung pertemuan Kecamatan Kayan Hulu)	1.655.910.000,-	1.652.783.500 atau 99,81% dan realisasi fisiknya 100%.	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri. - Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.9.6-666 Tahun 2022 Tentang Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023. - Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.9.6-671 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2023.	Kementerian Dalam Negeri RI
T o t a l		**4.655.910.000**	**4.437.070.513**		

Sumber : LKPJ Tahun 2023

3.2.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Di Bawahnya

Tugas Pembantuan yang diberikan atau dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa tugas pembantuan yang diberikan kepada Yang Diberikan Kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya diidentifikasi seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Di Bawahnya Tahun Anggaran 2023

No	OPD/Program/Kegiatan	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Dasar Hukum
---	---	---	---	---
Total				

Sumber : LKPJ Tahun 2023

3.3 Hambatan Dan Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Hambatan dan atau permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan atau dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten ditampilkan pada Tabel 3.3 tentang Rekapitulasi Permasalahan dan solusi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Atasnya Tahun Anggaran 2023. Sedangkan untuk Pemerintah Tingkat di Bawahnya dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.4 tentang Rekapitulasi Permasalahan dan solusi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Pemerintah Tingkat di BawahnyaTahun Anggaran 2023.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Permasalahan dan solusi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Atasnya Tahun Anggaran 2023

No	OPD/Program/Kegiatan	Permasalahan	Solusi
1	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau - **Program** Perdagangan dalam Negeri - **Kegiatan** Pengembangan Sarana perdagangan dan kapasitas logistik - **Sub Kegiatan** Revitalisasi Pasar Induk Malinau Kota.	- Penetapan awal lahan lokasi pembangunan tidak mencukupi.	- Diajukan pergeseran lokasi yang semula di belakang pos keamanan bergeser ke lahan parkir area los pasar ikan
2	- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PERKIM) - **Program** Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa - **Kegiatan** Pembinaan Kawasan, Perkotaan, Batas Negara, Batas Wilayah, dan Toponimi - **Sub Kegiatan** Pembangunan Sarana Prasarana (sarpras) pemerintahan di batas antar negara dan PPT/PPKT (Pembangunan gedung pertemuan Kecamatan Kayan Hulu)	- Penetapan dalam membuat pelaporan pada system Sakti dan E-Monev yang membutuhkan Bimtek dan koneksi internet yang baik. - Faktor cuaca dan akses jalan yang rusak - Inflasi harga material yang diakibatkan jarak antara kegiatan perencanaan dan kegiatan fisik, selisi harga dikarenakan faktor cuaca yang berdampak pada progres pekerjaan fisik bangunan. - Survey lapangan pada kedinasan secara berkala yang sulit dilakukan karena biaya mobilisasi yang besar.	- Mendatangi KPPN cabang Kalimantan Utara di Tanjung Selor dan melakukan pelaporan serta pembelajaran pada sistem Saktidan E-Monev secara *Onsite.* - Menunggu sampai situasi cuaca dan jalan dapat di lalui dan di gunakan. - Membeli material dengan alternatif antar negara dan antar kabupaten yang menggunakan transportasi yang lebih murah. - Pengawasan secara berkala cukup dilaksanakan konsultan pengawas yang di tugaskan sesuai kontrak pengawasan.

Sumber : LKPJ Tahun 2023

Tabel 3.4
Rekapitulasi Permasalahan dan solusi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Pemerintah Tingkat di Bawahnya Tahun Anggaran 2023

No	OPD/Program/Kegiatan	Permasalahan	Solusi
---	---	---	---
Total			

Sumber : LKPJ Tahun 2023

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintahan Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pendidikan anak usia dini.
2. Pendidikan dasar.
3. Pendidikan kesetaraan.
4. Pelayanan kesehatan ibu hamil.
5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
6. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
7. Pelayanan kesehatan balita.
8. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
10. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
12. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.
13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
14. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.

15. Pelayanan kesehatan orang dengan dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus).*
16. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
17. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten.
19. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah.
20. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
21. Pelayanan informasi rawan bencana.
22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
24. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
25. Rehabilitasi sosial dasar peyandang disabilitas terlantar di luar panti.
26. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.
28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
29. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

Terdapat 6 (enam) Urusan Wajib Pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan dasar, yaitu terdiri dari:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

4.1 Bidang Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan atau disebut SPM Pendidikan adalah Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jada kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam pelaksanaanya ada 3 (tiga) jenis standar pelayanan minimal (SPM) yaitu:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;

   Indikator pencapaian yaitu Jumlah warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD.
2. Pendidikan Dasar terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

   Indikator pencapaiannya Jumlah warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs).

3. Pendidikan Kesetaraan.

   Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2 Indikator Dan Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Beberapa indikator tingkat pencapaian standar pelayanan minimum (SPM) Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian SPM Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIN
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi Siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraa	100%	Setiap Tahun
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi Siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau 2023

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	Realisasi
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	99,22%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	99,32%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi Siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraa	100%	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi Siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau 2023

Berdasarkan tabel perhitungan pencapaian SPM bidang Pendidikan Tahun 2023 di atas dapat dijabarkan bahwa:

1. Pencapaian tertinggi dari 3 Jenis Pelayanan dasar di bidang pendidikan yaitu terdapat pada Bidang Pendidikan Kesetaraan yaitu sebesar 100% dari target 100% setiap tahun.

2. Pencapaian terendah dari 3 Jenis Pelayanan dasar dibidang pendidikan yaitu terdapat pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini yaitu sebesar 99,22% dari target yang seharusnya yaitu 100% setiap tahun.
3. Capaian realisasi SPM untuk Pendidikan Dasar yaitu 99,32% dari target yang seharusnya yaitu 100% setiap tahun.

Dari hasil rapor pendidikan tersebut, ada beberapa indikator yang tidak terdapat nilainya dan harus ditutup mutunya pada aplikasi E-SPM (yaitu pada jenis pelayanan pendidikan kesetaraan dikarenakan Satuan Pendidikan Kesetaraan belum mengikuti *Assesmen* Nasional (AN) sehingga hasil capaian tersebut tidak tersedia di rapor pendidikan.

4.1.3 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau pada Dinas Pendidikan bersumber dari APBD Kabupaten, APBN dan sumber dana lain yang sah. Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

TAHUN 2023	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU APBD-P	REALISASI	PERSENTASE
ALOKASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN	453.031.719.600	457.380.219.600	307.085.919.757	67 %
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PENDIDIKAN	3.304.229.200	3.304.229.200	2.686.221.200	96 %

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau 2023

Pagu anggaran awal untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2023 Rp.453.031.719.600 dan pagu APBD-P Rp.457.380.219.600 sedangkan pagu anggaran untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Rp. 457.380.219.600. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Malinau juga memberikan bantuan kepada Peserta Didik melalui Dinas Pendidikan berupa Pengadaan Perlengkapan Siswa Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang disalurkan langsung ke satuan pendidikan.

4.1.4 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Data Personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan		Pangkat/Gol		Penjabat Struktural		Penjabat Fungsional	
1	66 Orang	S3	1	Gol I		Esl. I		Esl. I	
		S2	12	Gol II	8	Esl. II	1	Esl. II	
		S1	32	Gol III	39	Esl. III	4	Esl. III	
		D4	-	Gol IV	19	Esl. IV	7	Esl. IV	4
		D3	3			Non Esl	50	Non Esl	
		D2	-						
		D1	-						
		SMA	18						

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau 2023

4.1.5 Permasalahan Dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Malinau secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta Pencapaian Rata-rata lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang di hadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

A. Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yaitu:
   1. Adanya Perubahan data dikarenakan adanya perubahan jumlah siswa serta jumlah tenaga kependidikan di tahun berjalan.

2. Adanya penambahan ataupun pengurangan kebutuhan pada beberapa indikator, sehingga harus dilakukan perhitungan secara merinci dan didukung dengan data yang akurat agar tidak terjadi kesalahan.
3. Data yang terinput di dalam Aplikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang menjadi data acuan dalam kependidikan masih bekum terinput dengan baik oleh Sekolah.
4. Adanya keterbatasan anggaran karena tidak semua sub kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dapat dianggarkan dan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah ada, dilaksanakan secara bertahap.
5. Terdapat beberapa daerah yang memiliki medan yang sangat sulit sehingga menghambat akses pelayanan.

B. Solusi:

1. Meningkatkan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan dengan pengangkatan Guru PPPK.
2. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S-1 dan mengikuti Program PPG (Pendidikan Profesi Guru).
3. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana dari Dana Alokasi Khusus dan yang bersumber dari APBD.

4.2 Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB;
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV.

4.2.2 Target SPM Kesehatan

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan target Capaian Kinerja Pemerintah dalam Pelayanan adalah 100 persen (%).

4.2.3 Indikator dan Nilai SPM

Indikator dan nilai SPM Kesehatan tersaji pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Jenis Pelayanan SPM Bidang Kesehatan

NO	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Nilai (%)	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	2023
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	2023
3	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	100	2023
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	2023
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	2023
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	2023
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	2023
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	100	2023

9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	2023
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	2023
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100	2023
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	2023

Sumber: DKPPKB Kab.Malinau 2023

4.2.4 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Malinau Tahun 2023

NO	INDIKATOR SPM	TARGET SPM	CAPAIAN SPM 2023
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	71,91%
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	82,29%
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	70,74%
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	71,41%
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	97,76%
7	Cakupan Pelayanan Pada Usia Lanjut	100%	62,14%
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	100%	98,15%
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Diabetes Melitus	100%	97,44%

10	Cakupan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa	100%	100%
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	100%	73,11%
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%	100%

Sumber: DKPPKB Kab.Malinau 2023

Tabel 4.7
Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Malinau
Tahun 2020-2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET SPM NASIONAL		CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	81.45%	80.28%	76.20%	78.13%	71.91%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	74.92%	91.60%	68.90%	73.91%	82.29%
3	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	100%	92.00%	66.32%	75.60%	73.98%	70.74%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	65.50%	57.07%	57.60%	72.65%	71.41%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	78.96%	40.08%	44.20%	65.35%	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	24.44%	31.54%	39.90%	79.69%	97.76%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	70.20%	14.61%	48.80%	53.96%	62.14%

8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	100%	100.00%	13.29%	82.48%	76.62%	98.15%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100.00%	56.81%	89.10%	76.68%	97.44%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	100.00%	53.95%	74.30%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100%	100.00%	88.50%	97.04%	44.29%	73.11%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%	100.00%	19.77%	55.67%	61.04%	100%

Sumber: DKPPKB Kab.Malinau 2023

4.2.5 Alokasi Anggaran

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Angka Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebesar Rp.65,406,073,703.95 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.73,122,772,136.00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 89% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 71,36%.

Capaian realisasi keuangan tidak dapat mencapai 100% dikarenakan pada OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB pada Tahun 2023 mengalami beberapa pergeseran anggaran sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur, baik pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun kegiatan ke lapangan menjadi terlambat, terutama untuk kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Selain itu, dikarenakan

jumlah Covid-19 menurun, sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan pelayanan covid-19 tidak dilaksanakan.

4.2.6 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Malinau yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan:

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota

Adapun Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Malinau dapat dilihat dalam tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8

Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan Kabupaten Malinau Tahun 2023

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN	REALISAS	
				KEU (RP)	KEU (%)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**52.933.672.818,00**	**41.217.417.911,00**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**23.246.601.200,00**	**20.416.948.187,00**	**87,83**
1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman ke Puskesmas dan Fasilitas	Dinkes PPKB	550.000.000,00	493.479.026,00	89,72

	Kesehatan Lainnya				
2	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinkes PPKB	1.034.982.000,00	866.161.099	83,69
3	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinkes PPKB	1.462.038.000,00	1.438.141.867	98,37
4	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes PPKB	5.980.200.000,00	5.588.463.400	93,45
5	Pembangunan Puskesmas Long Ampung	Dinkes PPKB	8.457.384.480,00	7.056.986.080	83,44
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	Dinkes PPKB	4.518.662.240,00	3.775.012.315,00	83,54
7	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes PPKB	1.243.334.480,00	1.198.704.400	96,41
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**29.687.071.618,00**	**20.800.469.724,00**	**70,07**
8	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes PPKB	10.290.392.000,00	9.873.612.700,00	95,95
9	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Kota	PKM Malinau Kota	355.148.000,00	169.042.652,00	47,60
10	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Seberang	PKM Malinau Seberang	331.054.000,00	174.113.887,00	52,59
11	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Alango	PKM Long Alango	154.256.000,00	88.816.000	57,58
12	Penyediaan Operasional Puskesmas Pulau Sapi	PKM Pulau Sapi	252.580.000,00		-
13	Penyediaan Operasional Puskesmas Sehati	PKM Sehati	119.305.000,00	95.298.206,00	79,88
14	Penyediaan Operasional Puskesmas Sesua	PKM Sesua	151.411.000,00	101.694.657,00	67,16
15	Penyediaan Operasional Puskesmas Setulang	PKM Setulang	161.842.000,00	47.334.912,00	29,25
16	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Barat/Tg. Lapang	PKM Malinau Barat/ Tg.Lapa ng	229.862.000,00	179.224.937,00	77,97
17	Penyediaan Operasional Puskesmas Pujungan	PKM Pujungan	187.035.000,00	149.818.030,00	80,10
18	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Ampung	PKM Long Ampung	164.656.000,00	57.449.871,00	34,89
19	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Nawang	PKM Long Nawang	215.800.000,00	149.506.554,00	69,28

20	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Sule	PKM Long Sule	97.670.000,00	21.420.000,00	21,93
21	Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Boh	PKM Sungai Boh	202.788.000,00	90.565.644,00	44,66
22	Penyediaan Operasional Puskesmas Data Dian	PKM Data Dian	127.923.000,00	16.776.680	13,11
23	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Loreh	PKM Long Loreh	267.770.000,00	94.130.996	35,15
24	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Berang	PKM Long Berang	139.977.000,00	92.609.653	66,16
25	Penyediaan Operasional Puskesmas Metut	PKM Metut	199.544.000,00	110.395.853	55,32
26	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinkes PPKB	5.391.368.618,00	1.382.836.484,00	25,65
27	Penyediaan Operasional RSP Langap	RSP Langap	400.000.000,00	398.947.690,00	99,74
28	Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pratama Long Ampung	RSP Long Ampung	816.934.500,00	675.745.340,00	82,72
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinkes Malinau	233.085.000,00	43.951.000	18,86
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Data Dian	133.588.830,00	32.100.000,00	24,03
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Long Alango	171.300.000,00	155.398.000,00	90,72
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Long Ampung	92.820.000,00	74.570.000,00	80,34
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Long Berang	162.080.000,00	128.090.000,00	79,03
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Long Loreh	227.800.000,00	99.004.400	43,46
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Long Nawang	192.670.000,00	185.370.000,00	96,21
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Long Pujungan	215.010.000,00	187.581.600,00	87,24
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Long Sule	65.088.000,00	17.100.000,00	26,27
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Malinau Kota	162.915.400,00	158.301.000,00	97,17
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Malinau Seberang	185.100.000,00	158.598.000,00	85,68
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Metut	98.186.800,00	46.670.000,00	47,53
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pulau Sapi	138.806.000,00	112.950.000,00	81,37
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sehati	202.356.000,00	88.316.000,00	43,64

43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesua	102.228.000,00	86.142.000,00	84,26
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setulang	128.000.000,00	57.300.000,00	44,77
45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sungai Boh	74.390.000,00	46.200.000,00	62,11
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tanjung Lapang	130.620.000,00	127.993.500,00	97,99
47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Data Dian	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Long Alango	31.120.000,00	29.100.000,00	93,51
49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Long Ampung	46.100.000,00	40.700.000	88,29
50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Long Berang	29.760.000,00	29.560.000	99,33
51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Long Loreh	42.500.000,00	23.500.000,00	55,29
52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Long Nawang	54.480.000,00	44.100.000,00	80,95
53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Long Pujungan	37.740.000,00	37.210.000,00	98,60
54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Long Sule	9.900.000,00	4.050.000,00	40,91
55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Malinau Kota	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Malinau Seberang	32.400.000,00	27.300.000,00	84,26
57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Metut	13.500.000,00		-
58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pulau Sapi	48.960.000,00	28.950.000,00	59,13
59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Sehati	37.800.000,00	32.400.000,00	85,71

60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Sesua	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Setulang	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00
62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Sungai Boh	31.050.000,00	15.600.000,00	50,24
63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Tanjung Lapang	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
64	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinkes PPKB	755.536.300,00	564.450.448,00	74,71
65	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Data Dian	131.250.000,00	44.250.000	33,71
66	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Long Alango	159.469.140,00	145.567.200,00	91,28
67	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Long Ampung	175.137.000,00	153.596.200,00	87,70
68	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Long Berang	328.511.200,00	303.200.000,00	92,30
69	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Long Loreh	310.020.000,00	167.150.000,00	53,92
70	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Long Nawang	135.135.600,00	89.205.000,00	66,01
71	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Long Pujungan	221.324.230,00	186.335.200,00	84,19
72	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Long Sule	92.277.000,00	12.200.000,00	13,22
73	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Malinau Kota	332.634.000,00	286.626.000,00	86,17
74	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Malinau Seberang	293.500.000,00	225.750.000,00	76,92
75	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Metut	240.940.000,00	148.836.800,00	61,77
76	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pulau Sapi	197.960.000,00	159.750.000,00	80,70
77	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sehati	225.692.400,00	169.860.000,00	75,26
78	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sesua	94.285.000,00	67.861.000,00	71,97

79	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Setulang	185.090.000,00	80.850.000,00	43,68
80	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sungai Boh	205.139.200,00	92.500.000,00	45,09
81	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tanjung Lapang	387.600.000,00	364.500.000,00	94,04
82	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Data Dian	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
83	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Long Alango	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
84	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Long Ampung	13.360.000,00	13.360.000	100,00
85	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Long Berang	300.000,00		-
86	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Long Loreh	3.210.000,00	3.200.000	99,69
87	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Long Nawang	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
88	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Long Pujungan	8.720.000,00	8.719.900,00	100,00
89	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Long Sule	7.200.000,00	3.290.000,00	45,69
90	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Malinau Kota	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
91	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Malinau Seberang	14.400.000,00	14.400.000	100,00
92	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Metut	800.000,00		-
93	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pulau Sapi	6.480.000,00	6.300.000,00	97,22
94	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Sehati	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00

95	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Sesua	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
96	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Setulang	10.800.000,00	2.700.000,00	25,00
97	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Sungai Boh	9.000.000,00	3.900.000,00	43,33
98	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Tanjung Lapang	33.750.000,00	33.750.000,00	100,00
99	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Dinkes PPKB	5.095.000,00	3.200.000,00	62,81
100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Data Dian	22.895.000,00	22.873.200,00	99,90
101	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Long Alango	34.460.000,00	18.870.000,00	54,76
102	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Long Ampung	48.068.800,00	44.271.200,00	92,10
103	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Long Berang	24.805.000,00	24.560.000	99,01
104	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Long Loreh	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00
105	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Long Nawang	28.620.000,00	28.168.600	98,42
106	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Long Pujungan	4.560.000,00		-
107	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Long Sule	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
108	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Malinau Kota	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00
109	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Malinau Seberang	3.300.000,00	990.000,00	30,00
110	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Metut	8.360.000,00	8.100.000,00	96,89
111	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Pulau Sapi	31.800.000,00	31.500.000,00	99,06
112	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Sehati	6.840.000,00	6.633.000,00	96,97
113	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Sesua	5.400.000,00	1.800.000,00	33,33
114	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Setulang	8.460.000,00	8.460.000,00	100,00
115	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Sungai Boh	22.490.000,00	22.490.000,00	100,00

116	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tanjung Lapang	359.552.000,00	302.234.330	84,06
117	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Data Dian	7.450.000,00	4.500.000,00	60,40
118	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Long Alango	31.720.000,00	28.720.000,00	90,54
119	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Long Ampung	11.920.000,00	6.000.000,00	50,34
120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Long Berang	8.440.000,00	3.470.000,00	41,11
121	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Long Loreh	40.100.000,00	3.800.000,00	9,48
122	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Long Nawang	23.860.000,00	20.136.000,00	84,39
123	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Long Pujungan	50.180.000,00	45.785.500,00	91,24
124	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Long Sule	8.190.000,00		-
125	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Malinau Kota	26.000.000,00	20.634.000,00	79,36
126	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Malinau Seberang	21.000.000,00		-
127	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Metut	23.850.000,00		-
128	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pulau Sapi	13.964.000,00	8.400.000,00	60,15
129	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sehati	20.000.000,00	16.970.000,00	84,85
130	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesua	9.840.000,00	6.648.000,00	67,56
131	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setulang	29.520.000,00	13.194.000,00	44,70
132	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sungai Boh	37.500.000,00	1.500.000,00	4,00
133	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tanjung Lapang	9.840.000,00	6.816.000,00	69,27
134	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinkes Malinau	57.900.600,00		-
135	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinkes Malinau	50.000.000,00	27.291.900	54,58
136	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	UPTD IFK/GFK	400.000.000,00	400.000.000	100,00

	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		**1.860.927.142,00**	**1.648.155.125,00**	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		**1.233.587.142,00**	**1.175.623.104,00**	**95,30**
137	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinkes PPKB	1.233.587.142,00	1.175.623.104,00	95,30
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota		**627.340.000,00**	**472.532.021,00**	**75,32**
138	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Dinkes PPKB	627.340.000,00	472.532.021,00	75,32
TOTAL ANGGARAN UNTUK SPM			**54.794.599.960,00**	**42.865.573.036,00**	

Sumber: DKPPKB Kab.Malinau 2023

4.2.7 Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 sebanyak 551 orang. Tenaga ini tersebar di Dinas Kesehatan PPKB, 17 Puskesmas, Instalasi Farmasi Kabupaten, RS Pratama Langap dan RS Pratama Long Ampung.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui pemerataan kebutuhan SDM Kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Malinau. Selain itu, semua SDM Kesebatan diberikan pengembangan kapasitas SDM Kesehatan dengan mengikuti berbagai pelatihan sesuai kompetensinya.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, SDM yang melaksanakan kegiatan pelayanan yaitu tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan seharusnya terdapat 9 jenis tenaga kesehatan diantaranya yaitu Dokter dan dokter gigi, bidan, perawat, tenaga

farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga analis, tenaga promosi kesehatan. Seluruh tenaga kesehatan ini terpadu dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing. Beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Malinau mengenai tenaga kesehatan ini yaitu belum meratanya tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas terutama di Puskesmas perbatasan dan sangat terpencil.

Adapun rincian berdasarkan jenis tenaganya bisa dilihat ditabel berikut:

Tabel 4.9
SDM Kesehatan Per Jenis Tenaga di Kabupaten Malinau Tahun 2023

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	BIDAN	PERAWAT	DOKTER	DOKTER SPESIALIS	DOKTER GIGI	KESEHATAN MASYARAKAT	AHLI GIZI
1	Malinau Kota	Malinau Kota	15	23	4	0	0	2	1
2	Malinau Utara	Malinau Seberang	35	31	3	0	1	5	0
3		RSUD Malinau	51	188	20	12	2 + 4 Spesialis	3	7
4	Malinau Barat	Tanjung Lapang	12	25	2	0	1	2	0
5		Sesua	8	18	1	0	1	2	0
6	Malinau Selatan	Long Loreh	21	20	2	0	1	2	1
7		RSP Langap	10	16	2	0	1	1	1
8	Malinau Selatan Hulu2	Metut	9	10	1	0	1	2	0
9	Malinau Selatan Hilir	Sehati	6	12	1	0	1	1	0
10		Setulang	10	17	1	0	1	3	0
11	Mentarang	Pulau Sapi	21	31	4	0	1	3	3
12	Mentarang Hulu	Long Berang	7	15	1	0	1	0	0
13	Pujungan	Pujungan	7	19	1	0	0	1	2
14	Bahau Hulu	Long Alango	9	11	0	0	0	2	2
15	Kayan Hilir	Data Dian	6	9	0	0	1	2	1
16		Long Sule	3	3	1	0	1	0	0
17	Kayan Hulu	Long Nawang	12	8	1	0	0	3	1
18	Kayan Selatan	Long Ampung	7	8	2	0	0	1	0
19		RSP Long Ampung	2	7	4	0	0	1	1
20	Sungai Boh	Sungai Boh	6	9	1	0	0	2	0
TOTAL			**248**	**480**	**52**	**12**	**18**	**38**	**20**

Sumber: DKPPKB Kab.Malinau Tahun 2023

4.2.8 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan

Permasalahan:

Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang belum mencapai target dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Anggaran kesehatan yang dikelola oleh Puskesmas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai SPM masih kurang. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Malinau memiliki 17 Puskesmas yang tersebar di 15 Kecamatan. Dari 17 Puskesmas tersebut, hanya satu Puskesmas yang belum terakreditasi, yang dapat diartikan bahwa perencanaan yang dilaksanakan oleh Puskesmas sudah berjalan dengan baik. Usulan rencana kegiatan Puskesmas agar dapat melaksanakan kegiatan pelayanan ke masyarakat lebih besar dibanding pagu indikatif yang ditetapkan oleh daerah. Terdapat dua sumber pembiayaan Puskesmas, yaitu dana operasional dari APBD dan dana Bantuan Operasional Kesehatan dari APBN. Meskipun anggaran kesehatan telah mencapai 10% dari APBD tetapi ini masih kurang untuk dapat mencapai target SPM 100%. Adapun dana desa yang dikelola oleh setiap desa di Kabupaten Malinau masih belum maksimal dialokasikan untuk bidang kesehatan.
2. Sumber Daya Manusia Kesehatan di beberapa Puskesmas masih kurang. Terbatasnya jumlah ASN kesehatan di Puskesmas sebetulnya sudah diupayakan dengan penambahan tenaga kontrak kesehatan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB agar dapat melaksanakan pelayanan secara maksimal di setiap Puskesmas. Akan tetapi dengan keterbatasan dana yang dikelola oleh APBD masih terdapat kekurangan tenaga di beberapa Fasilitas Kesehatan. Selain itu untuk beberapa Puskesmas di wilayah perbatasan masih tidak ada peminat untuk tenaga kesehatan mendaftar. Hal ini menjadikan pelayanan kesehatan dalam upaya mencapai target SPM menjadi kurang.

3. Masih kurangnya monitoring dan evaluasi ke Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB.

Solusi:

Untuk meningkatkan capaian SPM Bidang Kesehatan di Tahun 2024, maka upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan PPKB yaitu:

1. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2. Melakukan advokasi terhadap pemerintah desa agar dapat mengalokasikan APBDes untuk kegiatan pembangunan di bidang kesehatan.
3. Menetapkan SK penanggung jawab dan tim terpadu pembinaan dan pengawasan Puskesmas untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas baik managemen, UKM maupun UKP.
4. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas dan evaluasi capaian program kegiatan per triwulan oleh Dinas Kesehatan PPKB baiksecara tatap muka maupun *online* melalui *zoom meeting*.
5. Memaksimalkan kegiatan/program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran lebih ditingkatkan.

4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan yang meliputi:

1. Bidang Pekerjaan Umum

   Jenis pelayanan dasar SPM bidang Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang meliputi:

   a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
   b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.
2. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang meliputi:

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan jenis pelayanan di atas maka menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau untuk memuat perencanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

4.3.2 Target Capaian

Target capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2023 yaitu:

1. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 4.10
Jenis Pelayanan Dasar dan Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	100%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%

2. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 4.11
Jenis Pelayanan Dasar dan Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Penyediaan dan Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0%

4.3.3 Realisasi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau memiliki realisasi Layanan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

1. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 4.12
Target dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target OPD 2023	Realisasi Tahun 2023
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100%	100%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%
Nilai Rata-Rata Capaian SPM DPU.PR-PERKIM				**100%**

Sumber: DPUPR & PERKIM Kabupaten Malinau 2023

2. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 4.13
Target dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target OPD 2023	Realisasi Tahun 2023
1.	Penyediaan dan Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	0%
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	0%
Nilai Rata-Rata Capaian SPM DPU.PR-PERKIM				0%

Sumber: DPUPR & PERKIM Kabupaten Malinau 2023

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dalam mendukung pelayanan SPM tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 4.14
Alokasi anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Kegiatan dan Dukungan Dana
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp.26.625.380183,-
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan danPengembangan SistemAir Limbah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp.1.881.765.600,-

Sumber: DPUPR & PERKIM Kabupaten Malinau 2023

2. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 4.15
Alokasi anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Kegiatan dan Dukungan Dana
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten /Kota	Persentase Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp. 250.000.000,-

Sumber: DPUPR & PERKIM Kabupaten Malinau 2023

4.3.5 Program dan Kegiatan

Peranan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Untuk menjawab kebutuhan Pelayanan Dasar bagi masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilakukan dengan menyusun program kegiatan dan alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.16
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2023

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI FISIK
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		1,365,111,190	100%
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		25,260,268,993	100%

Sumber: DPUPR & PERKIM Kabupaten Malinau 2023

Tabel 4.17
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Tahun 2023

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI FISIK
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota		481,777,200	100%
	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat		1,399,988,400	100%

Tabel 4.18
Program Pengembangan Perumahan
Tahun 2023

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI FISIK
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	250,000,000	0%

Sumber: DPUPR & PERKIM Kabupaten Malinau 2023

4.3.6 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dalam proses penerapan SPM di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan SPM adalah:

a. PNS berjumlah 5 (lima) orang.
b. NonPNS berjumlah 2(dua) orang.

4.3.7 Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau terdapat beberapa permasalahan/hambatan yang mempengarui tingkat capaian penerapan SPM. Adapun hambatan beserta solusi nya sebagai berikut:

1. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 4.19
Hambatan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Hambatan	Solusi
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Belum memadainya SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan	Akan ditingkatkan lagi penyediaan air minum untuk daerah perdesaan khususnya daerah yang prioritas pada tahun berikutnya.
			Kegiatan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan sampai dengan batas akhir kontrak pekerjaan belum selesai, sehingga dilakukan perpanjangan kontrak/ Adendum selama 50 hari, mengakibatkan realisasi anggaran tidak terserap maksimal	Melakukan tender dini atau tender di awal tahun pada tahun anggaran berikutnya untuk mengantisipasi waktu pelaksanaan pekerjaan yang mepet, sehingga tidak perlu dilakukannya lagi perpanjangan kontrak

2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) belum tersedia/ belum di bangun sehingga jumlah mutu barang/jasa/SDM pada sub-sistem pengangkutan, sub-sistem pengolahan lumpur tinja, dan pengolahan lumpur tinja pada pelayanan pengolahan air limbah domestik tidak ada data, ini mempengaruhi tingkat pencapian mutu minimal layanan dasar	Membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Malinau agar pencapaian minimal layanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat mencapai 100%.
			Terdapat kegiatan pembangunan SPAL Komunal yang gagal lelang	Melakukan tender dini atau tender di awal tahun pada tahun anggaran berikutnya

2. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 4.20
Hambatan dan Solusi SPM Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Hambatan	Solusi
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Belum tersusunnya Peta Resiko Bencana di Kabupaten Malinau, sehingga kegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dalam rangka pengumpulan data tidak dapat dilakukan	Berkoordinasi dengan BPBD selaku penanggung jawab penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.

4.4 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM NYA OLEH pemerintah. Dengan semakin berkembangnya ekonomi, politik, sosial dan budaya maka gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat, dan berdampak pada perilaku individu maupun sosial kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, beberapa pelayanan dasar dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dasar tersebut yang mana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar tersebut yaitu Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, maka pelayanan dasar yang menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:
   - Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
   - Cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat;

- Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten/kota

3. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, meliputi Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:
   - Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota;
   - Tingkat waktu tanggap *(response time rate);*
   - Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi;
   - Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 - 5000 Liiter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran).

4.4.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Malinau belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan belum terbangunnya sinkronisasi antara perencanaan dengan pelaksanaan teknis di lapangan dan semoga di tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan.

Tahun 2023 ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan amanah dari permendagri dengan segala keterbatasan yang ada. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau telah memasukan target SPM pada RPJMD dengan jenis pelayanan dasar dan program yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malinau dari segi penganggarannya pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21
Pagu Anggaran SPM Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator	Target	Anggaran
A.	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindugan Masyarakat	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase anggaran program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	16.280.408.581
		2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3x sehari	290.000.000
			Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota	100%	605.404.500
			Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten/kota	1 orang setiap RT atau sebutan lainnya	-
			Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		100.000.000
		3. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	100%	2.381.906.000
			Tingkat waktu tanggap *(response time rate)*	75%	
			Persentase aparatur	85%	

			pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi		
			Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 - 5000 Liiter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	90%	

Sumber: SATPOL PP & DAMKAR Kabupaten Malinau 2023

4.4.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau pada tahun 2023 tidak terlepas dari peran serta yang positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Malinau terhadap pemenuhan SPM yang realisasikan melalui alokasi/pagu anggaran.

Adapun realisasi pencapaian pelaksanaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.22
Realisasi Anggaran SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	JenisPelayanan Dasar	Indikator SPM		Anggaran (Rp)
A.	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindugan Masyarakat Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.1	Persentase anggaran program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	16.280.408.581
2.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.1	Cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	290.000.000
		2.2	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota	605.404.500
		2.3	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten/kota	
		2.4	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	-
				100.000.000
3.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	2.381.906.000
		3.2	Tingkat waktu tanggap*(response time rate)*	
		3,3	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	
		3.4	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 - 5000 Liiter pada WMK (Wilayah *Manajemen* Kebakaran)	

Sumber: SATPOL PP & DAMKAR Kabupaten Malinau 2023

Tabel 4.23
Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator	Target	Penghitungan		Target Nasional
1.	Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/ kota	112 kasus pelanggaran yang ditangani	Jumlah Pelanggaran Perda yang ditangani dibagi Jumlah Pelanggaran x 100%	$\frac{112}{112}$ x 100% = 100%	100%
2.		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakatat	4 kelompok Di 15 Kecamatan	Jumlah Kelompok Patroli x 3 dibagi Jumlah Kecamatan	$\frac{4 \times 2}{15}$ = 0.53	3x Patroli dalam sehari
			Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten/ kota	470 Orang Laporan bidang Linmas tahun 2022	Jumlah Linmas dibagi Jumlah RT	$\frac{470}{381}$ = 1.23	1 orang setiap RT atau sebutan lainnya
3.		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/ kota	14,71%	Luas WMK (Km2) dibagi Luas potensi kebakaran (Km) x 100%	$\frac{5.897,07}{40.088,41}$x100% = 14,71%	80%
			Tingkat waktu tanggap *(response time rate)*	100%	Kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu dibagi Kasus kebakaran dalam jangkaua	$\frac{25}{25}$x 100% = 100%	100%

					n WMK x 100%		
			Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	52,73%	Satgas damkar memiliki sertifikasi sesuai kualifikasi dibagi Satgas damkar x 100%	$\frac{58}{110}$ x 100% = 52,73%	85%
			Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 Liiter pada WMK (Wilayah ManajemenKebakaran)	42,86%	WMK memiliki mobil/mesindamkar yang layak pakai dibagi WMK/lingkungan dan/ kawasan potensi kebakaran x 100%	$\frac{3}{7}$ x 100% = 42,86%	90%

Sumber: SATPOL PP & DAMKAR Kabupaten Malinau 2023

Salah satu gambaran pemenuhan indikator SPM bidang ketentraman Umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota: Pada tahun 2023 data dari bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP telah terjadi pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan sebanyak 112 kasus. Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan dibagi pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan/ dipantau dikali 100%.

Atau :

$$\frac{\text{Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan/dipantau}}{\text{Pelanggaran Perda/Perkada yang diselasaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{112}{112} \times 100\% = 100\%$$

2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

   Pada tahun 2023 data dari bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP kelompok patroli sebanyak 4 kelompok berpatroli wilayah kecamatan 1 kali sehari di 15 kecamatan dan patroli tiap-tiap pos dilaksanakan 2 kali dalam sehari. Rasio kelompok patroli :

   $$\frac{\text{Kelompok patrol dikali 2 patroli dalam sehari}}{\text{Kelompokkecamatan (jumlah kecamatan)}}$$

   $$\frac{4 \times 2}{15} = 0.53$$

3. Cakupan rasio petugas LINMAS

   Rasio Jumlah Linmas Per-RT

   Menghitung rasio Linmas per – RT digunakan rumus sebagai berikut:

   $$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah RT}}$$

   $$\frac{470}{381} = 1.23$$

4. Cakupan Rasio Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten

   Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Malinau adalah 14,71%. Hal ini berdasarkan pada luas potensi kebakaran di Kabupaten Malinau 40.088,41 Km^2 dan wilayah manajemen kebakaran 5.897,07 Km^2. Untuk rencana ke depan agar capaiannya meningkat atau setidaknya mendekati nilai nasional, Bidang Pemadam Kebakaran pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau harus mengembangkan 3 wilayah manajemen kebakaran yaitu di Kecamatan Mentarang dan Malinau Selatan dan Malinau Selatan Hilir.

5. Cakupan Rasio Tingkat Waktu Tanggap *(Respon Time Rate)*

   Dari 18 kejadian, tingkat waktu tanggap mencapai 100%. Capaian indikator ini sudah mencapai nilai nasional karena berdasarkan analisis di Kabupaten Malinau baru ada 3 WMK, seharusnya menurut perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 harus ada 7 WMK, sehingga 25 kasus kebakaran yang tertangani dengan tingkat waktu tanggap adalah 25 kasus berada di dalam WMK.
6. Cakupan Rasio Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Berdasarkan sertifikasi standar yang dilegalisasi Kementerian Dalam Negeri capaiannya adalah 52,73% atau baru ada 58 aparat dari 110 aparat pemadam kebakaran Kabupaten Malinau yang memenuhi standar kualifikasi dari tahun 2021.
7. Cakupan Rasio Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Di atas 3.000 – 5.000 Liter pada WMK saat ini baru ada 3 unit mobil pemadam kebakaran, sedangkan untuk kebutuhan WMK di Kabupaten Malinau minimal 7 WMK kalau mengacu ke target nasional. Untuk itu mobil pemadam kebakaran 3.000 – 5.000 liter WMK perlu ditambah agar capainnya bisa mendekati target nasional.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN, dan Sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Tahun 2023 sebesar Rp 20.262.718.181,00 *(Dua Puluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan*

Puluh Satu Rupuah) dengan rincian sebagai berikut:

1) APBD Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau : Rp 20.262.718.181,00
   a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 14.914.906.683,00
   b. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp 995.404.500,00
   c. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Rp 2.2449.780.000,00

2. APBD I Propinsi Kalimantan Utara: Rp. 132.126.000,00
3. APBN: Rp 0,00
4. Sumber dana lain: Rp 0,00

4.4.5 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM program pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2022 – 2026, tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24
Program Dan Kegiatan Penunjang Pelaksanaan SPM Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.914.906.683,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.996.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.999.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	199.999.200

		SKPD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.998.600
		Pengembagan Kapasitas dan Karer PPNS	74.999.450
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	925.509.098
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	290.000.000
2.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	605.404.500
		Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban	100.000.000
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	449.999.650
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50.000.000
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30.000.000
3.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	2.179.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penaggulagan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	50.000.000
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertologan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	132.126.000

Sumber: SATPOL PP & DAMKAR Kabupaten Malinau 2023

4.4.6 Dukungan Personil

Dukungan personil yang menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran dari Tahun 2021 didukung oleh personil sebanyak 783 orang.

1. Jumlah Pegawai Satpol PP Januari s.d bulan Desember 2021 adalah 778 Orang dengan status sebagai berikut:
   a. Pegawai Negeri Sipil: 107 Orang
   b. Non Pegawai Negeri Sipil: 677 Orang
   c. PPNS Satuan Polisi Pamong Praja: 3 Orang
2. Rincian Pegawai Satpol PP dan Damkar sebagai berikut.

Tabel 4.25
Rekapitulasi Pegawai Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Tingkatan Pendidikan status PNS Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	10
2.	S1	34
3.	D4/D3	3
4.	SLTA	52
5.	SLTP	4
6.	SD	4
Jumlah Keseluruhan		**107**

Sumber: SATPOL PP & DAMKAR Kabupaten Malinau 2023

Tabel 4.26
Rekapitulasi Pegawai Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah
1.	I	8
2.	II	64
3.	III	27
4.	IV	8
Jumlah Keseluruhan		**107**

Sumber: SATPOL PP & DAMKAR Kabupaten Malinau 2023

Tabel 4.27
Rekapitulasi Pegawai Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Jenis Kediklatan Tahun 2023

No	Kediklatan	Jumlah
1.	Diklat STRUKTURAL	99
2.	Diklat FUNGSIONAL	
3.	Diklat PEMERINTAHAN	
4.	Diklat TEKNIS	3
5.	Diklat Dasar POL. PP	185
Jumlah Keseluruhan		**287**

Sumber: SATPOL PP & DAMKAR Kabupaten Malinau 2023

3. Jumlah Eselon adalah sebagai berikut:
   a. Eseon II : 1 orang
   b. Eselon III : 6 orang
   c. Eselon IV : 18 orang

4.4.7 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Beberapa permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri antara lain:

Permasalahan :

1. Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli wilayah se Kabupaten Malinau.
2. Jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP yang minim/kurang memadai.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Peraturan Daerah yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
5. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/ instansi terkait.
6. Jauhnya jarak tempuh daerah rawan bencana dari posko komando bencana.
7. Terbatasnya anggaran operasional penanggulangan bencana.
8. Terbatasnya sarana dan prasarana penyelamatan korban bencana.
9. Kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Malinau sehingga menyulitkan pengendalian kebakaran di lokasi di luar WMK.
10. Terbatasnya aparatur yang memiliki sertifikasi pendidikan/pelatihan sebagai anggota satpol PP maupun Damkar.

Solusi :

1. Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak pemerintah kabupaten Malinau maupun pemerintah provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah.
2. Merencanakan penambahan personil anggota Satpol PP Kab. Malinau untuk mengikuti pendidikan/pelatihan PPNS guna mengoptimalkan penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran PERDA.
3. Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak pemerintah kabupaten Malinau maupun pemerintah provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah.
4. Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional
5. Melakukan revisi atas produk peraturan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
6. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.
7. Meningkatkan fungsi dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana sebelum petugas gabungan hadir dilokasi kejadian.
8. Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.
9. Mengusulkan penambahan anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana penyelamatan.
10. Memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar WMK untuk mengenal potensi kebakaran dan memberikan pengetahuan tentang tata cara pengendalian dini musibah kebakaran.
11. Mengusulkan anggaran untuk mengikuti pendidikan/pelatihan bagi anggota Satpol PP dan Damkar.

4.5 Bidang Urusan Penanggulangan Bencana Daerah

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Dengan semakin berkembangnya ekonomi, politik, sosial dan budaya maka gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat, dan berdampak pada perilaku individu maupun sosial kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
   a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana;
   b. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana (per jenis bencana), sebagai berikut:
      - Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana;
      - Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia;

      Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, sebagai berikut
   a. Penyususnan rencana penanggulangan bencana.
   b. Pembuatan rencana kontinjensi
   c. Perlatihan pencegahan dan mitigasi
      - Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur;
      - Pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara.
   d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
      - Simulasi dalam ruang (*table top exercise*);
      - Gladi lapang

e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
   - Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana Penyediaan sarana prasarana operasional dan kesiap-siagaan bencana
   - Penyediaan layanan pesan singkat secara *broadcast*
   - Penyediaan obat-obatan dan vaksin
   - Tatalaksana/pengobatan dan vaksinasi
   - Penyediaan peralatan kesehatan
   - Penyediaan peralatan laboratorium
   - Penyediaan layanan bio sekuriti
   - Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat

f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
   - Penyediaan peralatan penyelamatan diri

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
   - Investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/wabah (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risik, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen sertaq konfirmasi laboratorium;
   - Penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah (zoonosis prioritas);
   - tindakan cepat penanganan epidemi/wabah penyakit (zoonosis prioritas), yang direspon 24 jam setelah laporan deteksi dini, dan tindakan teknis (tata laksana kasus/isolasi/pengebalan/ pengobatan/komunikasi risiko).

b. Respon cepat darurat bencana

- Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana

c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
   - Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat)

d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
   - Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
   - Penyediaan sarana dan pasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi;
   - Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
   - Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana.

4.5.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian pelaksanaan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan belum terbangunnya sinkronisasi antara perencanaan dengan pelaksanaan teknis dilapangan dan semoga di tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan.

Di tahun 2023 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang kebencanaan sesuai dengan amanah dari permendagri dengan segala keterbatasan yang ada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Malinau telah memasukan target SPM pada RPJMD dengan jenis pelayanan dasar dan program yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malinau dari segi penganggarannya pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.28
Pagu Anggaran SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator	Target	Anggaran
1.	Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah daerah dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah/Kota	**Presentase pelayanan prima yang terlaksna**	100%	30.730.318.122
		Program Penanggulangan Bencana	**Presentase Pelayanan dalam ranka Pencegahan Mitigasi Dan Penyelamatan serta Evakuasi korban Bencana**	100%	13.461.968.992
JUMLAH ANGGARAN					44.192.287.114

Sumber: BPBD Kabupaten Malinau 2023

4.5.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar peningkatan penangganan darurat bencana yang tepat dan cepat Kabupaten Malinau pada tahun 2023 tidak terlepas dari peran serta yang positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Malinau terhadap pemenuhan SPM yang realisasikan melalui alokasi/pagu anggaran.

Adapun realisasi pencapaian pelaksanaan SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.29
Realisasi Anggaran SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten MalinauTahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya penangganan darurat bencana yang tepat dan cepat	1.1	Presentase pelayanan administrasi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	5.178.146.573
		1.2	Presentase Jangka waktu mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	249.600.000.00
		1.3	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan	49.999.600.00
		1.4	Persentase korban bencana yang dievakuasi	50.000.000.00

Sumber: BPBD Kabupaten Malinau 2023

Tabel 4.30
Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator	Target	Penghitungan		Target Nasional
1.	Meningkatnya penangganan darurat bencana yang tepat dan cepat	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah/Kota	**Presentase pelayanan prima yang terlaksna**	100 %	Jumlah pelayanan administrasi SKPD	56 x 100% 12 = 466	100%
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan Presentase Pelayanan Penyelamatan serta Evakuasi korban Bencana	100 %	Jumlah Bantuan x 12 dibagi Jumlah desa Jumlah Bantuan x 12 dibagi Jumlah desa	26x 100% 23 =88,5 23x 100% 26	100%

Sumber: BPBD Kabupaten Malinau 2023

Salah satu gambaran pemenuhan indikator SPM bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Presentase pelayanan administrasi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebanyak 466 kasus dikali 100%. Atau:

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang terlaksana selama 1 tahun}}{\text{Jumlah Jenis dan fungsi pelayanan selama 1 tahun}} \times 100\%$$

$$\frac{56}{12} \times 100\% = 466{,}66$$

2. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah korban kebakaran yang terjadi dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran yang terjadi dalam 1 tahun}} \times 100\%$$

$$\frac{5}{12} \times 100\% = 41{,}66$$

3. Persentase korban bencana yang dievakuasi

$$\frac{\text{Jumlah korban kebakaran yang terjadi dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran yang terjadi dalam 1 tahun}} \times 100\%$$

$$\frac{75}{12} \times 100\% = 625$$

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN, dan Sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malinau untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Perencanaan dan Pelaksanaan			
		APBD	DBH-DR	DAK	Sumber Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota				
	a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	1.204.051.414	-	-
	b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	-	275.632.350	-	-
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				-
	a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Bulungan	-	473.967.179	85.826.244	-
	b. Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	102.600.000	-	-
	c. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap	-	506.694.792	-	-
	d. Pasca Bencana Kabupaten/Kota	-	59.999.780	-	-
	e. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	-	207.328.840
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
	a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.147.853.520	351.149.890	-	-
	b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	11.649.540	-	-	-
4	Penataan Sistem Dasar				
	a. Penguatan Kelembagaan Bencana	-	257.796.459	-	-
	b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	302.820.694	-	-
	Jumlah	**1.159.503.060**	**2.974.095.405**	**85.826.244**	**207.328.840**

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan SPM Tahun 2023 didukung oleh personil sebagai berikut:

Tabel 4.31
Rekapitulasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Tingkatan Pendidikan status PNS Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	3
2.	S1	10
3.	D4/D3	7
4.	SLTA	7
5.	SLTP	-
6.	SD	1
Jumlah Keseluruhan		**28**

Sumber: BPBD Kabupaten Malinau 2023

Tabel 4.32
Rekapitulasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Tahun 2023

N o	Golongan	Jumlah
1.	I	1
2.	II	1
3.	III	4
4.	IV	6
5.	Non Eselon	17
Jumlah Keseluruhan		**28**

Sumber: BPBD Kabupaten Malinau 2023

Tabel 4.33
Rekapitulasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Jenis Kediklatan Tahun 2023

N 0	Kediklatan	Jumlah
1.	Diklat STRUKTURAL	14
2.	Diklat FUNGSIONAL	2
3.	Diklat PEMERINTAHAN	7
4.	Diklat TEKNIS	4
5.	Diklat Dasar BPBD	8
Jumlah Keseluruhan		**36**

Sumber: BPBD Kabupaten Malinau 2023

3. Jumlah Eselon adalah sebagai berikut :
   a. Eseon II : 1 orang
   b. Eselon III : 4 orang
   c. Eselon IV : 1 orang

4.5.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanggulangan bencana antara lain :

Tabel 4.34
Permasalahan dan Solusi Dalam Penerapan SPM Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2023

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih terbatasnya Sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis	Optimalisasi Sumber daya manusia yang ada melalui upaya peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait
2	Masih terbatasnyasarana dan prasarana pendukung kegiatan Penanggulangan Bencana	1. Membuat proposal melalui peluang sumber pembiayaan lain baik dari provinsi dan BNPB 2. Optimalisasi sarana prasarana yang ada
3	Adanya daerah rawan banjir dibeberapa desa yang berada di wilayah Kabupaten Malinau	Melakukan Pembangunan Siring di daerah rawan bencana tersebut
4	Bencana bersifat mendadak dan terjadi di banyak lokasi sehingga membutuhkan sumber daya manusia dan anggaran yang cukupbesar	Mengoptimalkan anggaran yang tersedia serta melibatkan Destana, dan komunitas relawan serta Stakeholder untuk ikut berperan aktif dalam penanggulangan bencana
5	Adanya pandemic covid-19 menyebabkan kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang seperti sosialisasi, pelatihan, dan gladi lapangan harus dibatalkan	Merevisi target pencapaian SPM

Sumber: BPBD Kabupaten Malinau 2023

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM Penanggulangan Bencana Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.35
Program dan Kegiatan Penunjang Pelaksanaan SPM BPBD
Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.027.556.852
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.314.761.270
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.000.000
2.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	798.947.476
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	11.460.324.438

Sumber: BPBD Kabupaten Malinau 2023

4.6 Bidang Sosial

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kemenetrian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Indikator, Nilai SPM, Target Daerah serta Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional serta Realisasi

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2023 adalah 100% dengan rincian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.36
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Realisasi		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	2023	100 %	100%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar PenyandangDasar Anak Telantar di Luar Panti	2023	100 %	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya kebutuhan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	2023	100 %	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Terpenuhinya kebutuhanDasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	2023	NIHIL	NIHIL	NIHIL

		di Luar Panti				
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana BagiKorban Bencana Kabupaten/Kota	2023	100 %	100%	100%

Sumber: DPPP3AS Kab.Malinau 2023

Berdasarkan Tabel tersebut diatas Pencapaian indikator kinerja dari lima Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2019 yang terealisasi yaitu kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten sebesar 100% sehingga persentase pencapaian kinerja berdasarkan kriteria kinerja masuk pada kriteria baik, dan untuk 4 point Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal tidak ada di Kabupaten Malinau.

4.6.2 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.37
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	125.000.000
2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	105.000.000
3	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
4	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	90.000.000
	TOTAL	**520.000.000**

Sumber: DPPP3AS Kab.Malinau 2023

4.6.3 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.38
Program dan Kegiatan APBD Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Serta Realisasinya Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)
1	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	125.000.000	100.061.000
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	105.000.000	81.739.100

2	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	173.907.360
3	Program Penanganan Bencana	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	90.000.000	72.186.000

Sumber: DPPP3AS Kab.Malinau 2023

4.6.4 Dukungan Pegawai

Dukungan pegawai menggambarkan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

a. PNS = 32 Orang
b. Non-PNS = 2 Orang

4.6.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

a. Sebaran Penduduk

Sebaran Penduduk Kabupaten Malinau yang belum merata menyebabkan aksesbilitas ke lokasi sasaran PMKS belum merata.

b. Asumsi Masyarakat

Asumsi Masyarakat yang menganggap bahwa Kabupaten Malinau memiliki sumber daya alam yang melimpah, menyebabkan Kabupaten Malinau menjadi sasaran para pencari kerja dari daerah lain. Kedatangan pencari kerja tersebut tidaklah disertai dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai, sehingga membuat permasalahan baru dengan bertambahnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.

c. Belum maksimal penggunaan data

Belum maksimalnya penggunaan data sehingga penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten/Kota sehingga menjadi

penghambat dalam penyusunan program dan distribusi kegiatan untuk Kabupaten/ Kota

d. Sinkronisasi Program

Sinkronisasi program antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota belum optimal.

e. Sumber Daya Manusia

Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dalam proses perencanaan dan mengimplementasikan penanganan program-program kesejahteraan sosial.

f. Sistem Regulasi

Kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan dari segi peraturan dan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan penganggaran baik pusat maupun daerah.

Solusi:

Adapun Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Melengkapai sarana dan prasarana

   Melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan sehingga pencapaian sasaran dapat diperoleh secara maksimal;

2. Sinkronisasi Sistem Pelaporan Kinerja
3. Mengoptimalkan anggaran

   Lebih Mengoptimalkan anggaran berdasarkan program-program skala prioritas;

4. Penajaman Program

   Penajaman Program-Program kesejahteraan sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

   Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan serta mengikutsertkan pegawai yang ada di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau pada setiap kegiatan pelatihan/diklat baik ditingkat daerah maupun nasional.

BAB V
P E N U T U P

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Angaran 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian Kinerja, baik capaian Makro maupun Mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Malinau sebagai wujud Transparansi dana Akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah. Dinamika yang berkembang selama ini merupakan suatu tuntutan dari masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam setiap tindakan dan merupakan konsekuensi adanya perubahan-perubahan yang mendasar dari masyarakat yang tidak lagi sebagai obyek tetapi sebagai subyek pembangunan.

Pergeseran paradigma tersebut menuntut adanya komitmen dari setiap penyelenggara pemerintahan di Daerah guna meningkatkan kompetensi dan daya saing dalam pengelolaan potensi daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan berbagai urusan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan 26 urusan wajib, 8 urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Berbagai kemajuan dan kekurangan selama tahun 2023 telah dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, diharapkan akan menjadi awal kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang perbaikan–perbaikan ke depan. Karena dalam siklus manajemen strategik, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dapat dipisahkan dengan penetapan perencanaan dan sebaliknya.

Dengan demikian apabila semua pihak dapat memahami siklus manajemen strategik tersebut, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dipandang bukan hanya sekedar sebagai pemenuhan formalitas belaka.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya memerlukan evaluasi terhadap pelaksanaannya, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah berupaya dan terus berupaya memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Malinau di masa mendatang. Dalam menghadapi segala permasalahan dan tantangan pembangunan Sehingga meskipun masih dihadapi beberapa kekurangan dan segala keterbatasan, jerih payah yang telah diberikan dapat memberi arti bagi perkembangan Kabupaten Malinau, sehingga terwujudnya Visi **Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional**.